



RPJMD Perubahan

**TAHUN
2018-2023**



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Ahmad Yani Pontianak Telepon (0561) 736541 Faks. (0561)730062 PONTIANAK
Website. www.kalbarprov.go.id



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional;
 - c. bahwa seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta telah terjadinya pemetaan wabah pandemi Covid-19, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2), disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perubahan RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur yang memuat tujuan sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tahun) tahun sebagaimana sisa masa berlaku RPJMD 2018-2023.
- (1a) Perubahan RPJMD merupakan hasil penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang berdasarkan terbitnya kebijakan nasional dan terjadinya penyebaran wabah Pandemi Covid-19 di Indonesia.
- (2) Rincian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD.
- (4) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	: KERANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	: PENUTUP

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 Februari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd.

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

A.L LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANBARAT TAHUN 2021 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1-32/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUHARTO, SH.MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660222 199103 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019. Selama pelaksanaannya, telah terjadi beberapa perubahan kebijakan nasional, diantaranya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Selain adanya perubahan kebijakan pada level nasional, juga telah terjadi perubahan kebijakan di level daerah yaitu telah terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan

- c. Terjadi Perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan beberapa kondisi riil tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah kebijakan yaitu:

1. Melakukan perubahan RPJMD terutama terkait dengan target capaian kinerja seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, gini rasio, tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan; dan
2. Melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah serta menyesuaikan target kinerja dan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum	2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	4
	1.4. Maksud dan Tujuan	5
	1.5. Sistematika Dokumen RPJMD	5
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	7
	2.1. Aspek Geografis dan Demografi	7
	2.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah	7
	2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah	7
	2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	8
	2.1.1.3. Topografi	8
	2.1.1.4. Geologi	9
	2.1.1.5. Hidrologi	11
	2.1.1.6. Klimatologi	11
	2.1.1.7. Penggunaan Lahan	12
	2.1.2. Demografi	12
	2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah	15
	2.1.4. Wilayah Rawan Bencana	20
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	20
	2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	21
	2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	32
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	39
	2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	39
	2.3.1.1. Pendidikan	39
	2.3.1.2. Kesehatan	43
	2.3.1.3. Perumahan dan Kawasan Pemukiman	48
	2.3.1.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51
	2.3.1.5. Sosial	55
	2.3.1.6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	59
	2.3.1.7. Tenaga Kerja	63
	2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	65
	2.3.1.9. Pangan	67
	2.3.1.10. Pertanahan	69
	2.3.1.11. Lingkungan Hidup	70
	2.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73
	2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	74
	2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75

2.3.1.15.	Perhubungan	75
2.3.1.16.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	77
2.3.1.17.	Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah	78
2.3.1.18.	Penanaman Modal	79
2.3.1.19.	Kepemudaan dan Olahraga	83
2.3.1.20.	Kebudayaan	84
2.3.1.21.	Perpustakaan	85
2.3.1.22.	Kearsipan	86
2.3.1.23.	Statistik	86
2.3.1.24.	Persandian	86
2.3.2.	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	87
2.3.2.1.	Kelautan dan Perikanan	87
2.3.2.2.	Pariwisata	87
2.3.2.3.	Pertanian	89
2.3.2.4.	Kehutanan	93
2.3.2.5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	95
2.3.2.5.1.	Ketenagalistrikan	98
2.3.2.5.2.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)	100
2.3.2.6.	Perdagangan	101
2.3.2.7.	Perindustrian	104
2.3.2.8.	Transmigrasi	105
2.3.3.	Fokus Urusan Penunjang, Pengawasan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan	106
2.3.3.1.	Sekretariat Daerah	106
2.3.3.2.	Sekretariat DPRD	110
2.3.3.3.	Pengawasan	110
2.3.3.4.	Keuangan Daerah	112
2.3.3.5.	Perencanaan	112
2.3.3.6.	Penelitian dan Pengembangan	112
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	113
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	113
2.4.1.1.	Indeks Wiliamson	113
2.4.1.2.	Nilai Tukar Petani	114
2.4.1.3.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	115
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	116
2.4.2.1.	Indeks Infrastruktur	116
2.4.2.2.	Jalan Mantap Provinsi	118
2.4.2.2.1.	Peningkatan Persentase Kemantapan Jalan	118
2.4.2.3.	Presentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik	119
2.4.2.3.1.	Rasio Elektrifikasi	119
2.4.2.4.	Luas Wilayah Produktif	120

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	123
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	123
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	123
	3.1.2. Neraca Daerah.....	125
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	127
	3.2.1. Proporsi Penyusunan Anggaran.....	128
	3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	130
	3.3. Kerangka Pendanaan.....	131
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	137
	4.1. Permasalahan Pembangunan	137
	4.1.1. Permasalahan Bidang Politik, Ketentraman dan Ketertiban	138
	4.1.2. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM.....	139
	4.1.3. Permasalahan Pembangunan Bidang Ekonomi.....	142
	4.1.4. Permasalahan Bidang Sosial dan Budaya	146
	4.1.5. Permasalahan Pembangunan Bidang Infrastruktur	151
	4.1.6. Permasalahan Utama Pembangunan Kalimantan Barat	157
	4.1.7. Permasalahan Dimensi Kewilayahan	158
	4.2. Isu – Isu Strategis Daerah.....	160
	4.2.1. Identifikasi Lingkungan Internal.....	160
	4.2.2. Identifikasi Lingkungan Eksternal.....	161
	4.2.3. Rumusan Isu – Isu Strategis Daerah.....	162
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	163
	5.1. Visi	163
	5.2. Misi.....	163
	5.3. Tujuan dan Sasaran	164
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	171
	6.1. Strategi Pembangunan Daerah	171
	6.1.1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur	172
	6.1.2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governanc	172
	6.1.3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif....	172
	6.1.4. Mewujudkan masyarakat sejahtera.....	172
	6.1.5. Mewujudkan masyarakat yang tertib.....	173
	6.1.6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	173
	6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	200
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	202

BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	232
	8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah	232
	8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	232
BAB IX	PENUTUP.....	297
	9.1. Pedoman Transisi	297
	9.2. Kaidah Pelaksanaan	297

DAFTAR TABEL

BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1.	Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat	8
2.2.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019	12
2.3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	13
2.4.	Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan Agama	14
2.5.	Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat	15
2.6.	Jumlah Desa/ Kelurahan Rawan Kebakaran Hutan, Banjir dan Longsor di Kalimantan Barat	20
2.7.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	21
2.8.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019 (%)	22
2.9.	Distribusi PDRB Atas Dasar Berlaku Tahun 2013-2019 (%)	23
2.10.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Kalimantan Barat 2015-2019	24
2.11.	Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	25
2.12.	Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	25
2.13.	Perbandingan Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, 2019 dan 2020	26
2.14.	Data Desa Sangat Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kalimantan Barat Tahun 2020	26
2.15.	Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	27
2.16.	Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	28
2.17.	Perkembangan Kemiskinan Kalimantan Barat	28
2.18.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin September 2018 - September 2019	28
2.19.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Di Kalimantan Barat Menurut Daerah, September 2018-September 2019	29
2.20.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)	30
2.21.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)	30
2.22.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	31
2.23.	Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2019	32
2.24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	32
2.25.	Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kalimantan Barat 2017	33
2.26.	Angka Melek Aksara Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	33
2.27.	Angka Melek Aksara Per Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	34
2.28.	Angka rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	34
2.29.	Angka rata-rata Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	35

2.30.	Angka Harapan Lama Sekolah Kalimantan Barat Tahun 2013-2019.....	36
2.31.	Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	36
2.32.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019.....	37
2.33.	Persentase Penduduk Bekerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	38
2.34.	Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-2019.....	39
2.35.	Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (%)	40
2.36.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)	40
2.37.	Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Penduduk yang Bersekolah di Sekolah Menengah Berdasarkan Kabupaten di Kalimantan Barat 2019	41
2.38.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)	41
2.39.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)	42
2.40.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)	43
2.41.	Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Kalimantan Barat	44
2.42.	Kondisi Perumahan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat 2013-2017.....	48
2.43.	Kondisi Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018	48
2.44.	Pelayanan Sanitasi Kabupaten/Kota.....	49
2.45.	Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	49
2.46.	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.....	50
2.47.	Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2019.....	51
2.48.	Jenis permukaan Jalan Tahun 2019	51
2.49.	Kondisi Jalan Tahun 2019.....	52
2.50.	Kondisi Jalan Tahun 2018 dan 2019.....	52
2.51.	Kondisi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.....	53
2.52.	Kondisi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	53
2.53.	Kondisi Irigasi Rawa di Kalbar Tahun 2019	54
2.54.	Kondisi Irigasi Permukaan di Kalbar Tahun 2019	54
2.55.	Kondisi Irigasi Tambak di Kalbar Tahun 2019.....	54
2.56.	Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2019.....	55
2.57.	Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	56
2.58.	Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2019	57
2.59.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019.....	58
2.60.	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2019.....	58
2.61.	Anak Terlantar yang Dibina di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017	58

2.62.	Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Per September 2020.....	59
2.63.	Anak Terlantar Baru Penerima Bantuan (2020*).....	60
2.64.	Perkembangan Kondisi Aparatur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	60
2.65.	Indeks Resiko Bencana Kalimantan Barat Tahun 2017, 2018 dan 2019.....	61
2.66.	Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana	62
2.67.	Indeks Kebebasan Sipil	62
2.68.	Masyarakat Yang Memperoleh Layanan Dalam Menegakkan PERDA/PERKADA.....	62
2.69.	Orang/Kelompok Masyarakat Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi.....	63
2.70.	Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat.....	64
2.71.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Agustus 2018-2019	64
2.72.	Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Terbanyak dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-2019	65
2.73.	Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat.....	65
2.74.	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.....	66
2.75.	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Barat dan Nasional.....	66
2.76.	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat	66
2.77.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Regional Kalimantan	67
2.78.	Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2013-2019	67
2.79.	Ketersediaan Beras (Ton) Per Kab/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2014-2019.....	67
2.80.	Data Konsumsi Beras Per Kabupaten Se Kalimantan Barat Tahun 2014-2019	68
2.81.	Rasio Ketersediaan Pangan Dan Konsumsi Per Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2014-2017	68
2.82.	Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2018-2019	69
2.83.	Perkembangan Redistribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kalimantan Barat	70
2.84.	Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019.....	70
2.8.	Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) yang Terkait Langsung Dengan Sumber Daya Lahan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017	71
2.87.	Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Kalimantan Barat	71
2.88.	TPA dan Sistem Operasi di Provinsi Kalimantan Barat.....	72
2.89.	Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP	73
2.90.	Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akte Kelahiran	73
2.91.	Jumlah Penduduk Telah Memiliki Kartu Keluarga.....	74
2.92.	Status Desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) 2019 di Kalimantan Barat	74
2.93.	Jumlah dan Persentase Status Desa menurut (IDM) Tahun 2018- 2019 di Kalimantan Barat	75
2.94.	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Kalimantan Barat	76

2.95. Sebaran Terminal di Provinsi Kalimantan Barat 2019.....	77
2.96. Sarana Perhubungan Darat Kabupaten/Kota.....	78
2.97. Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler dan Internet serta Jumlah BTS Tahun 2019.....	79
2.98. Capaian Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013-2019 Provinsi Kalimantan Barat.....	79
2.99. Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019.....	80
2.100. Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019.....	81
2.101. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2018-2019.....	81
2.102. Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2018 2019.....	81
2.103. Tabel Target Dan Realisasi Investasi Tahun 2019 (RPJMD 2018-2023).....	81
2.104. Realisasi Proyek PMDN/PMA Menurut Kab/Kota di Kalimantan Barat Periode Januari-Desember 2019.....	82
2.105. Realisasi Proyek PMDN/PMA Menurut Sektor Di Kalimantan Barat Periode Januari-Desember 2019.....	83
2.106. Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat Tahun 2015-2019.....	83
2.107. Sebaran Fasilitas Olahraga di Kalimantan Barat Tahun 2019.....	84
2.108. Gambaran Kondisi Urusan Kebudayaan di Kalimantan Barat.....	84
2.109. Sebaran Cagar Budaya/yang Diduga Cagar Budaya.....	86
2.110. Gambaran Kondisi Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2019.....	86
2.111. Gambaran Kondisi Urusan Kearsipan di Kalimantan Barat.....	87
2.112. Perkembangan Kondisi Indikator Kelautan dan Perikanan.....	87
2.113. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Tahun 2013-2019.....	88
2.114. Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata.....	89
2.115. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pariwisata Kalimantan Barat.....	89
2.116. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Kalbar.....	90
2.117. Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2013-2019.....	90
2.118. Realisasi Produksi Sub Sektor Holtikultura dan Sub Sektor Florikultura Tahun 2013-2019.....	91
2.119. Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013-2019.....	91
2.120. Perkembangan Capaian Indikator Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013-2019.....	92
2.121. Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton) Tahun 2013-2019.....	93
2.122. Capaian Sektor Peternakan Tahun 2018-2019.....	94
2.123. Kondisi Umum Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017.....	94
2.124. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Per Kabupaten Se Kalimantan Barat Tahun 2013-2017.....	94
2.125. Kerusakan Hutan Per Kabupaten Se Kalimantan Barat Tahun 2013-2017.....	95
2.126. Capaian Sektor Kehutanan Tahun 2018-2019.....	95
2.127. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertambangan dan Penggalian Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019.....	98
2.128. Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalimantan Barat.....	98

2.129. Persentase Peningkatan Produksi Listrik Per Tahun Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2019.....	102
2.130. Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat Tahun 2013 s/d 2019	102
2.131. Ekspor Kalimantan Barat Menurut Golongan Barang	102
2.132. Ekspor Kalimantan Barat Menurut Menurut Negara Tujuan	103
2.133. Impor Kalimantan Barat Menurut Golongan Barang	103
2.134. Impor Kalimantan Barat Menurut Menurut Negara Asal Barang	104
2.135. Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat Tahun 2018 s/d 2019	104
2.136. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Perdagangan Kalimantan Barat	106
2.137. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Kalimantan Barat.....	106
2.138. Penempatan Transmigrasi di Kalimantan Barat 2013-2019.....	107
2.139. Penataan Perundang-Undangan	107
2.140. Presentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan Melalui Media Cetak Elektronik Online dan Media Luar Ruang.....	107
2.141. Presentase Pelayanan Pimpinan Pemprov Kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standar Pelayanan.....	107
2.142. MoU dan Perjanjian Kerjasama	108
2.143. Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan.....	108
2.144. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum).....	108
2.145. Pembentukan Kabupaten.....	108
2.146. Segmen Batas Daerah.....	108
2.147. Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kerjasama.....	109
2.148. Persentase Peningkatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan	109
2.149. Persentase Pelayanan Pelayanan Umum dan Pimpinan.....	109
2.150. Presentase Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Ditata Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	109
2.151. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Barat.....	109
2.152. Presentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Berdasarkan Merit Sistem	110
2.153. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2019	110
2.154. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja.....	110
2.155. Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	110
2.156. Persentase Penyelesaian Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK.....	111
2.157. Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP Yang Selesai Ditindaklanjuti.....	111
2.158. Persentase Penyelesaian Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan APIP	111
2.159. Level Maturitas SPIP.....	111
2.160. Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional.....	111
2.161. Level Kapabilitas APIP.....	112
2.162. Jumlah Pedoman/Standar Pengawasan Internal	112
2.163. Hasil Survey Kepuasan Eksternal.....	112
2.164. Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK Yang Selesai Ditindaklanjuti.....	112
2.165. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja.....	113
2.166. Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja.....	113
2.167. Jumlah Rekomendasi Mendukung Kebijakan Daerah	113

2.168. Jumlah Inovasi	113
2.169. Persentase Sistem Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan Yang Baik Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotadi Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	114
2.170. Persentase Kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	114
2.171. Perkembangan Kemerataan Pembangunan di Kalimantan Barat Tahun 2016-2018	115
2.172. Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2013-2019.....	116
2.173. Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2019 (tahun Dasar = 2012).....	116
2.174. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	117
2.175. Capaian Angka pengeluaran per kapita tahun 2018 dan 2019.....	117
2.176. Indeks Infrastruktur Kalbar Tahun 2018	118
2.177. Indeks Infrastruktur Kalbar Tahun 2019.....	118
2.178. Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019.....	118
2.179. Jenis permukaan Jalan Tahun 2019	119
2.180. Status Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	120
2.181. Rasio Elektrifikasi (Re) Kalimantan Barat 2018-2019	121
2.182. Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat	121
2.183. Arah Pemanfaatan Kawasan Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar).....	122

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015-2019 Provinsi Kalimantan Barat.....	124
3.2. Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	125
3.3. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019.....	125
3.4. Analisis Proporsi Belanja Pegawai Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	12
3.5. Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019.....	129
3.6. Analisis Proporsi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	129
3.7. Realisasi (dalam Rp. Miliar) dan Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	130
3.8. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019	130
3.9. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2020	131
3.10. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	132
3.11. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kalimantan Barat untuk Mendanai Pembangunan 2018-2023.....	137

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Rumah Sakit Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu.....	149
4.2. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin	

	dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, Agustus 2020	150
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	
	5.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat	165
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
	6.1. Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	174
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
	7.1. Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2018-2023	202
	7.2. Rencana Program Prioritas Yang Disertai Pendanaan Provinsi Kalimantan Barat.....	203
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019-2023.....	232
	8.2. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	233
BAB IX	PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Bagan Alur Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD	5
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
	2.1. Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat	7
	2.2. Peta Kelas Lereng Wilayah Kalimantan Barat	9
	2.3. Peta Gambut Wilayah Kalimantan Barat	10
	2.4. Peta Jenis Tanah Wilayah Kalimantan Barat	10
	2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat	11
	2.6. Piramida Penduduk Kalimantan Barat Tahun 2019	14
	2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019	21
	2.8. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kalimantan Barat Tahun 2013-2019(Juta Rp)	24
	2.9. Laju Inflasi Ibu Kota Provinsi Tahun 2013-2019 (%)	25
	2.10. Perkembangan Kemiskinan Kalimantan Barat	28
	2.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin September 2018 - September 2019	29
	2.12. Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (tahun)	38
	2.13. Angka Harapan Hidup di Setiap Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2019	38
	2.14. Jumlah Kematian dan Angka Kematian Ibu Tahun 2019	45
	2.15. Proporsi Penyebab Kematian Ibu Desember 2019	45
	2.16. Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Konversi Angka Kematian Bayi Berdasarkan Jumlah Kasus Kematian yang Terlaporkan Tahun 2019	46
	2.17. Jumlah Kasus Kematian Balita (0-59 bulan) dan Konversi Angka Kematian Balita Berdasarkan Jumlah Kasus Kematian Yang Terlaporkan Tahun 2019.....	47
	2.18. Peta Indeks Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.....	61
	2.19. Perkembangan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019	96
	2.20. Perkembangan Laju Pertumbuhan Industri Nasional dan Kalimantan Barat.....	105
	2.21. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2019	119
	2.22. Persentase Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat.....	120
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 Juni 2018 telah dilantik oleh Presiden pada tanggal 5 September 2018 di Istana Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), maka setelah pelantikan, Pemerintah Kalimantan Barat harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. RPJMD periode ini merupakan pelaksanaan periode lima tahunan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 dengan visi “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat melibatkan partisipasi *stakeholder* pembangunan secara luas melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Masukan atau saran yang disampaikan didalam Musrenbang tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi dokumen RPJMD definitif yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 05 Maret 2019.

Selama pelaksanaan RPJMD tersebut, telah terjadi beberapa perubahan kebijakan Nasional, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu adanya perubahan struktur Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9) serta adanya pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dengan Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non alam Penyebaran *Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Hasil dari Evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 pada tahun 2020 diperoleh Rekomendasi untuk melakukan beberapa penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang meliputi penyempurnaan pada:

1. Target indikator makro pembangunan daerah sebagaimana pada bab VIII RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan adanya pandemi Covid-19
2. Indikator yang kurang relevan dengan pencapaian hasil indikator tujuan
3. Indikator Sasaran dan Program dengan adanya perubahan Struktur Organisasi
4. Indikator sesuai hasil rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar serta; dan
- d. Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan guna penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaam Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non alam Penyebaran Virus *Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

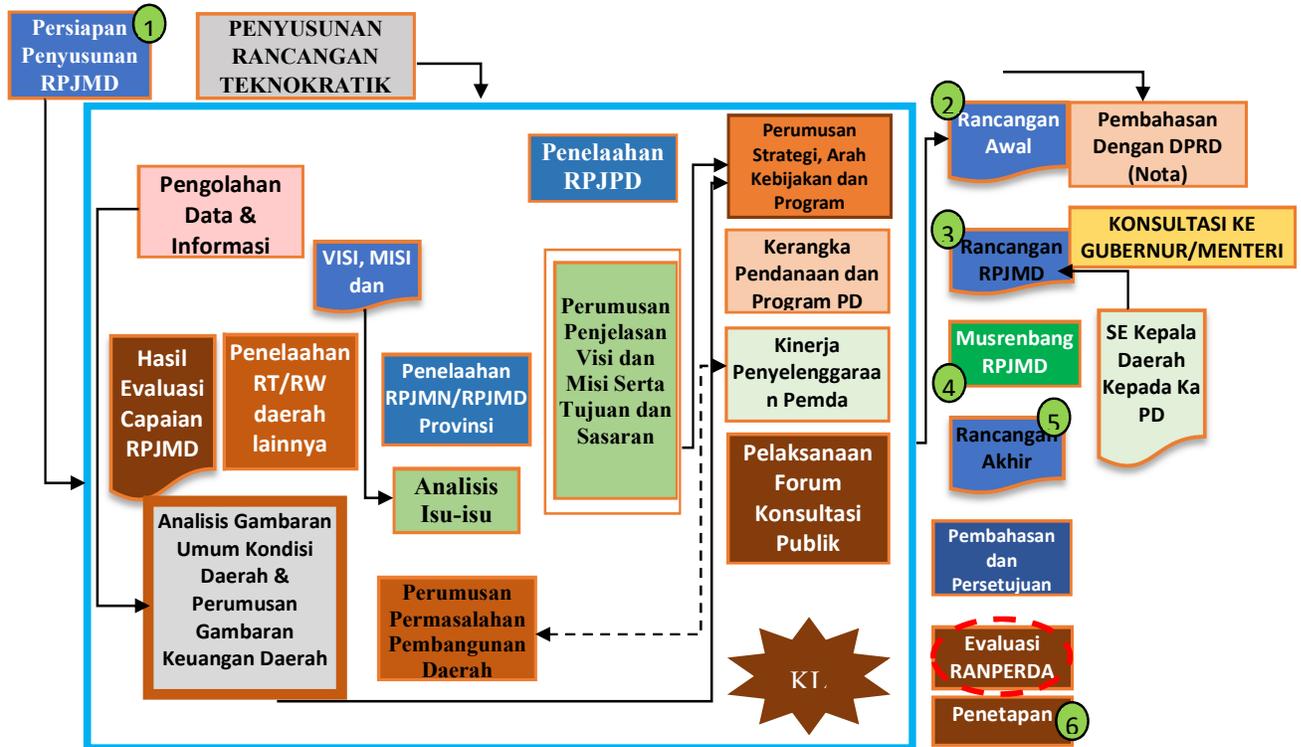
Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJMD merupakan penjabaran lima tahunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD periode 2018-2023 merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya dan mempersiapkan landasan bagi RPJMD berikutnya untuk mewujudkan visi jangka panjang Kalimantan Barat pada tahun 2025.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, program dan kegiatan di dalam RPJMD ini. Selain itu, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan.

Selanjutnya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam rangka mengefektifkan dampak kebijakan pembangunan dalam RPJMD di wilayah Kalimantan Barat, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadikan RPJMD Provinsi sebagai acuan guna menyusun dan/atau mengevaluasi RPJMD Kabupaten/Kota.

Setiap tahun dalam periode pelaksanaannya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di dalam RKPD inilah rencana program dan kegiatan indikatif RPJMD dijabarkan menurut urusan dan fungsi, dilengkapi dengan indikator keluaran, alokasi pendanaan serta lokasi pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Gambar 1.1.
Bagan Alur Tahapan dan Tata cara Penyusunan RPJMD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam strategi, kebijakan umum, program pembangunan dan kegiatan-kegiatan indikatif selama periode 2018-2023. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah untuk:

1. menjabarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
2. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dalam periode RPJMD sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat;
3. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD;
4. menjadi pedoman dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat;
5. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, serta menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

1.5. Sistematika Rancangan Akhir Dokumen RPJMD

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dibagi menjadi 9 (sembilan) bab dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini diuraikan mengenai gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun 2017.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini diuraikan mengenai kinerja keuangan daerah di masa lalu dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bagian ini diuraikan mengenai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai visi pembangunan daerah, misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini diuraikan mengenai strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini akan ditampilkan matriks yang berisi program, kegiatan indikatif, kebutuhan dana, hingga Perangkat Daerah penanggungjawab.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX. PENUTUP

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

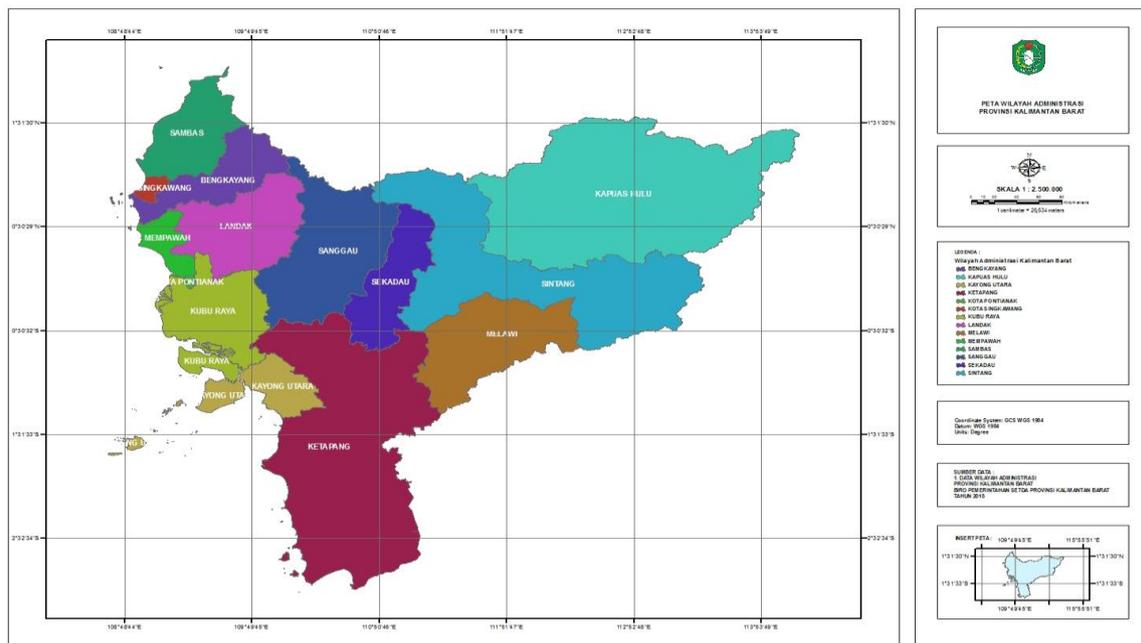
2.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km² atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km²) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km²), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km² setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

1. Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata.
2. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa.
4. Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2015

Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 desa.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan**)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Sambas	19	-	193
Kab. Mempawah	9	7	60
Kab. Sanggau	15	6	163
Kab. Ketapang	20	9	253
Kab. Sintang	14	16	390
Kab. Kapuas Hulu	23	4	278
Kab. Bengkayang	17	2	122
Kab. Landak	13	-	156
Kab. Sekadau	7	-	87
Kab. Melawi	11	-	169
Kab. Kayong Utara	6	-	43
Kab. Kubu Raya	9	-	117
Kota Pontianak	6	29	-
Kota Singkawang	5	26	-
Kalimantan Barat	174	99	2.031

Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2° 05' LU-3° 05' LS dan 108° 30'-114° 10' BT. Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara.

Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kabupaten Sekadau, Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, untuk dimensi wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia disebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

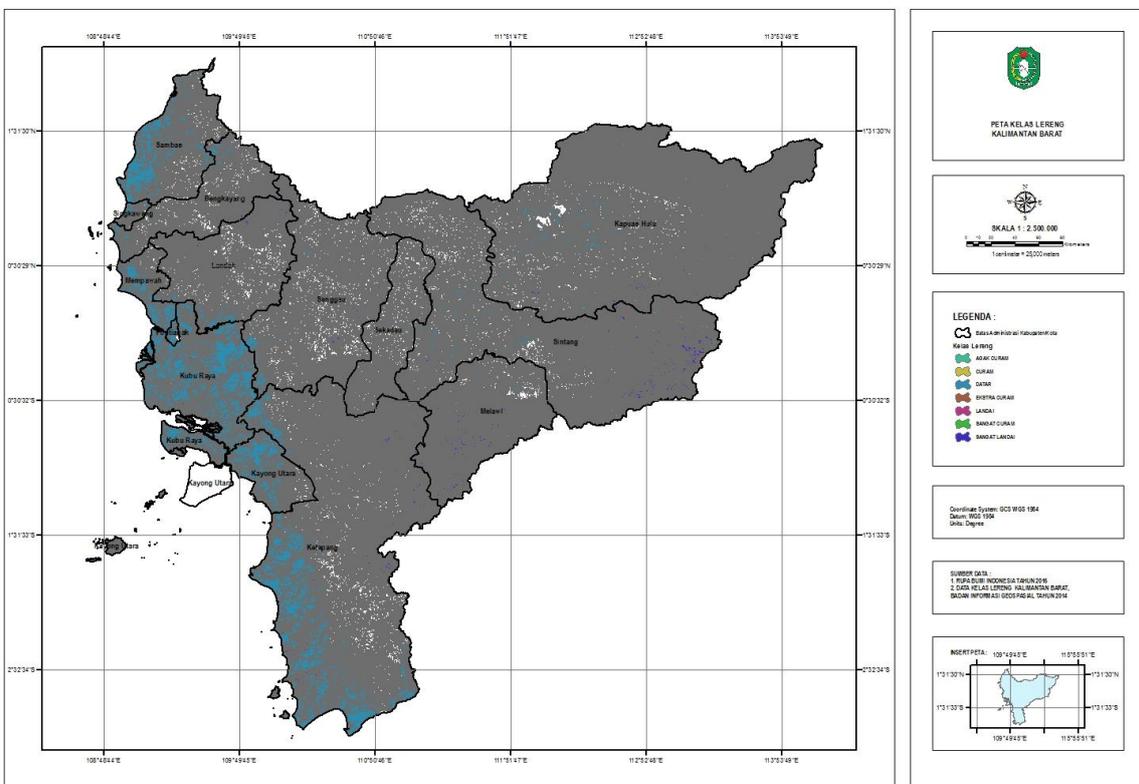
2.1.1.3. Topografi

Topografi Provinsi Kalimantan Barat dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata, sepanjang daerah daratan berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan diapit oleh Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dipengaruhi oleh daratan rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan non aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah gunung

Baturaya di Kec. Ambalau Kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan terendah adalah gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.

Sekitar 29,21 persen atau 4.287.880 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng < 2 persen atau cenderung landai. Sementara itu, sekitar 33,34 persen atau 4.894.333 Ha berada pada kelas lereng 2-15 persen atau cenderung bergelombang. Sedangkan 21,31 persen atau 3.127.844 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng 15-40 persen atau cenderung curam dan sekitar 16,15 persen atau 2.370.643 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng >40 persen atau cenderung sangat curam.

Gambar 2.2
Peta Kelas Lereng Wilayah Kalimantan Barat



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2015.

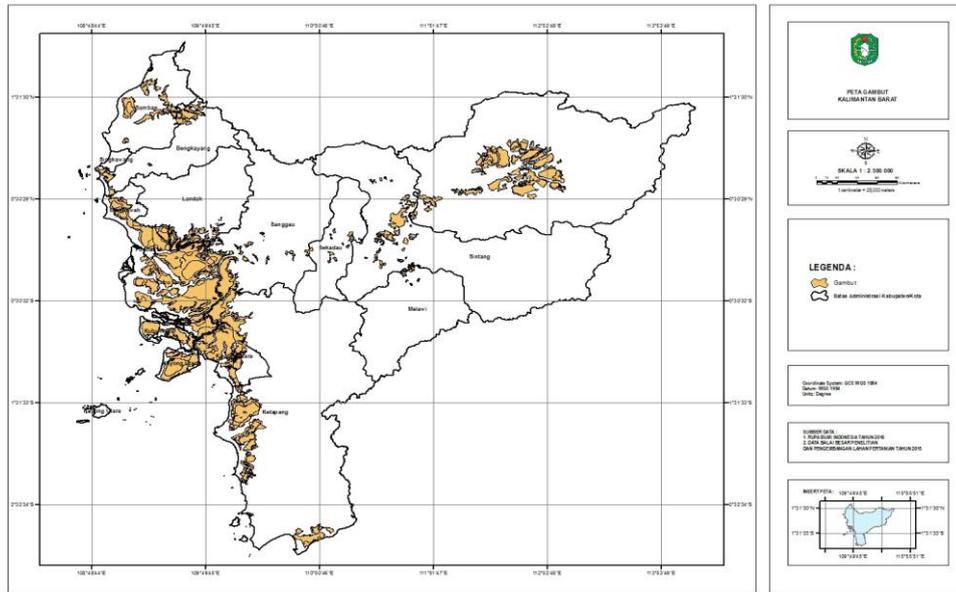
2.1.1.4. Geologi

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat memiliki jenis tekstur tanah Sedang yakni seluas 6.714.126 Ha, sementara 3.439.943 Ha merupakan jenis tekstur tanah halus, 2.762.006 Ha merupakan jenis tekstur tanah Kasar, 1.543.752 Ha merupakan jenis tekstur tanah Gambut dan 220.873 Ha merupakan jenis tekstur tanah rawa.

Sementara itu dilihat dari kandungan tanah, sebesar 5.806.633 Ha memiliki kandungan tanah Kwarter. Sedangkan 3.102.464 Ha memiliki kandungan tanah Carboniferous jenis Effusive, dan 1.468.680 Ha memiliki kandungan tanah intrusif dan plutonik asam. Beberapa wilayah lainnya

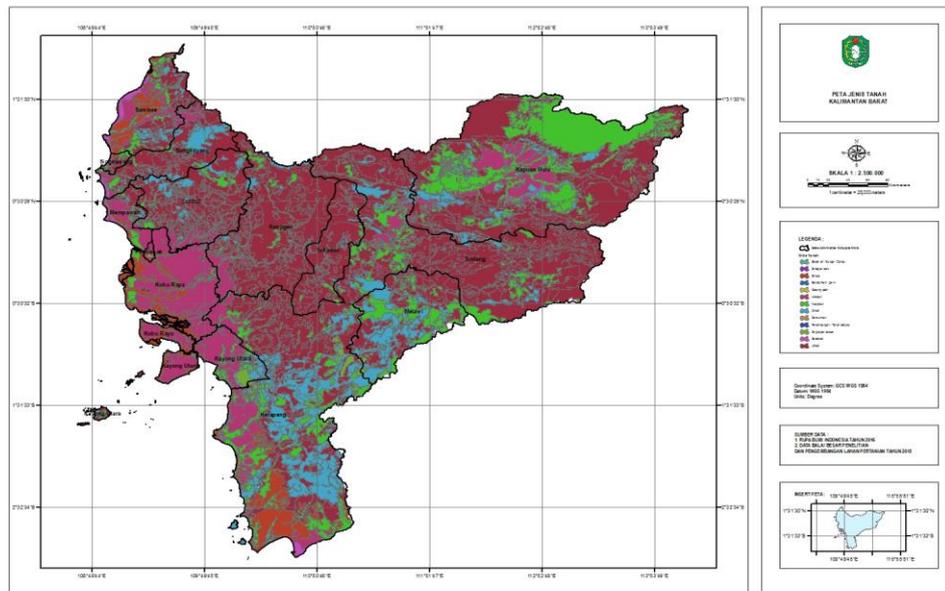
memiliki kandungan tanah Naegon, Kapur, Jura, Trias, Permokarbon Trias Atas, dan beberapa jenis Carboniferus lainnya.

Gambar 2.3
Peta Gambut Wilayah Kalimantan Barat



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2015.

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Wilayah Kalimantan Barat



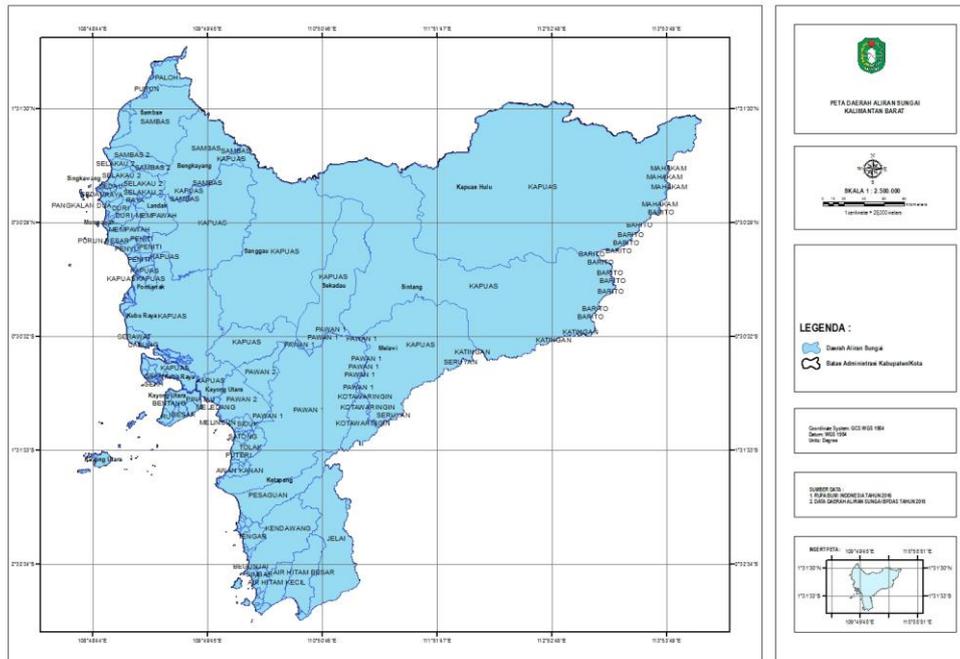
Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2015.

2.1.1.5. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai di Kalimantan Barat cukup banyak, akan tetapi terdapat 3 (tiga) DAS terbesar diantaranya yakni DAS Kapuas, DAS Pawan dan DAS Jelai.

Gambar 2.5

Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2015.

Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah provinsi yang dijuluki dengan **“Seribu Sungai”**, julukan ini selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari serta merupakan urat nadi dan jalur utama sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama dan terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yaitu 1.086 km (daerah yang dilalui adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, dan Kota Pontianak). Selanjutnya Kalimantan Barat memiliki Danau Sentarum dengan luas (117.500 hektar) dan Danau Luar I (5.400 hektar). Kedua danau ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

2.1.1.6. Klimatologi

Posisi geografis Kalimantan Barat yang terletak di garis Khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Barat yakni Iklim Tropis dengan 2 (dua) musim, yakni musim panas dan musim penghujan. Suhu udara di Kalimantan Barat relatif panas yang diikuti dengan kelembaban udara yang tinggi. Berdasarkan catatan empiris dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat, suhu udara di daerah Kalimantan Barat cukup normal dengan suhu terendah yang tercatat 18,10°C di Stasiun Meteorologi Susilo di Kabupaten Sintang pada bulan Desember 2019 dan suhu tertinggi yang tercatat adalah 37,10°C pada Stasiun Meteorologi Pontianak, pada bulan Juni 2019. Pada

Tahun 2019 tercatat dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat curah hujan di Kalimantan Barat tertinggi pada bulan Desember sebesar 869 mm di Stasiun Meteorologi Paloh Sambas dan rata-rata curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Desember 2019 sebesar 609,25 mm, sedangkan rata-rata curah hujan terendah pada bulan September sebesar 82,5 mm. Sementara rata-rata dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat untuk Jumlah Hari Hujan Tahun 2019 terbanyak pada bulan November yakni 25 hari hujan.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi Kawasan budidaya dan Kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, pemukiman, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam Kalimantan Barat Dalam Angka 2020, total luas Kawasan budidaya di Kalimantan Barat adalah 6.429.721. Ha dan Kawasan Non Budidaya 8.322.447 Ha.

2.1.2. Demografi

Berdasarkan data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 semester II berjumlah sekitar 5,440,030 jiwa, dimana 51,47 persen atau 2,800,189 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 48,53 persen atau 2,639,841 jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah 146,807.00 Km², maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2019 adalah 37.58 jiwa per kilometer persegi.

Dilihat dari sebaran penduduk, pada tahun 2019 Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni sebesar 6.205,33 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yakni sebesar 8.27 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.2

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
		Laki-Laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sambas	326,821	310,027	636,848	6,394.70	99.59
2.	Mepawah	157,117	149,241	306,358	1,276.90	239.92
3.	Sanggau	253,173	234,140	487,313	12,857.70	37.90
4.	Ketapang	297,769	275,305	573,074	31,240.74	18.34
5.	Sintang	212,315	198,419	410,734	21,635.00	18.98
6.	Kapuas Hulu	126,617	120,155	246,772	29,842.00	8.27
7.	Bengkayang	149,816	138,773	288,589	5,397.30	53.47
8.	Landak	210,512	190,635	401,147	9,909.10	40.48
9.	Sekadau	111,278	103,019	214,297	5,444.30	39.36
10.	Melawi	120,552	113,121	233,673	10,644.00	21.95
11.	Kayong Utara	65,698	61,603	127,301	4,568.26	27.87
12.	Kubu Raya	311,713	295,847	607,560	6,985.20	86.98
13.	Kota Pontianak	335,612	333,323	668,935	107.80	6,205.33

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
		Laki-Laki	Perempuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	Kota Singkawang	121,196	116,233	237,429	504.00	471.09
	Kalimantan Barat	2,800,189	2,639,841	5,440,030	146,807.00	37.58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, 2019.

Berdasarkan kelompok umur, sebesar 69,43 persen atau sebanyak 3.776.988 jiwa merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tingginya penduduk usia produktif memberikan keuntungan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Sementara itu untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2019 yakni sebesar 25,69 persen atau sebanyak 1.397.449 jiwa, sedangkan untuk penduduk usia lanjut usia (kelompok 65 tahun ke atas) sebesar 4,98 persen atau sebanyak 265.593 jiwa. Informasi lebih lengkap terkait Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia dapat dilihat pada tabel dan gambar piramida penduduk dibawah ini:

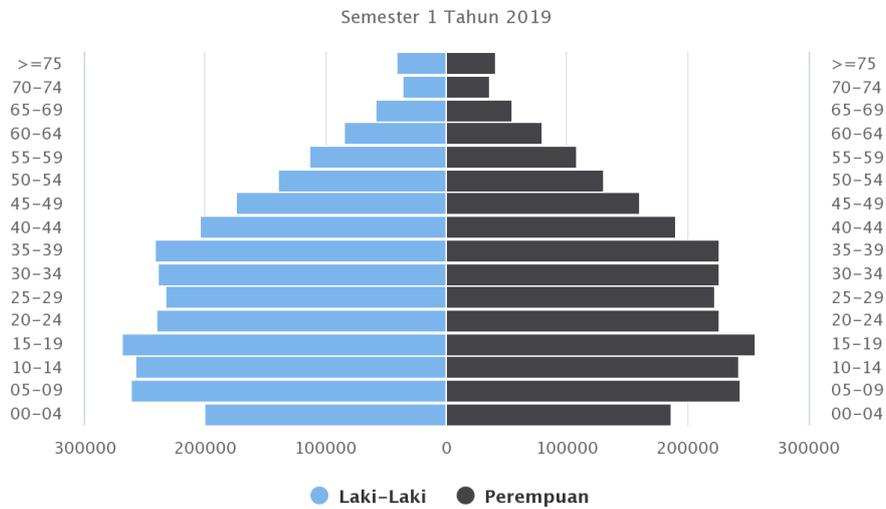
Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
Tahun 2013-2019

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (SEMESTER II)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0-4	338.092	357.026	353.602	367.424	341.389	493.951	390.585	387.857
5-9	492.380	484.997	504.855	489.131	495.173	489.430	506.517	508.237
10-14	537.637	542.815	551.336	512.493	508.100	458.230	500.347	502.828
15-19	476.124	484.196	491.460	498.301	513.977	440.563	524.301	511.570
20-24	500.702	480.403	461.344	476.726	472.498	428.916	473.302	485.634
25-29	526.624	506.978	491.347	489.376	481.172	419.951	449.671	447.578
30-34	524.995	511.498	493.591	510.663	490.491	403.606	462.908	461.988
35-39	431.036	438.276	449.713	453.257	475.324	384.982	463.567	459.426
40-44	367.065	365.189	366.041	388.266	391.156	349.041	400.792	419.209
45-49	293.576	306.190	312.687	316.891	333.022	300.595	334.079	341.405
50-54	248.053	252.848	247.604	253.796	254.254	250.929	277.408	287.110
55-59	189.837	196.678	211.899	207.861	219.436	202.243	223.298	221.237
60-64	134.930	144.877	139.421	147.672	151.919	150.418	167.662	179.456
65-69	92.117	100.524	102.834	100.457	107.311	101.566	116.296	110.347
70-75	66.026	70.117	70.954	70.399	69.541	65.539	73.189	72.497
>75	62.727	70.720	75.297	66.241	76.665	61.704	76.108	75.931
Total	5.281.921	5.313.332	5.323.985	5.348.954	5.381.428	5.001.664	5.440.030	5.472.310

Sumber : SIPD-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar.

Gambar 2.6
Piramida Penduduk Kalimantan Barat Tahun 2019



Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kalimantan Barat, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5,440,030 seperti dalam tabel 2.3 di atas. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam (59,91 persen), penganut agama Katholik (22.17 persen). Sedangkan penganut Kristen (11.49 persen), penganut Khonghucu (0,24 persen), Hindu (0,06 persen), dan Budha (6.69 persen). Rinciannya sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan Agama

No	Agama	Pemeluk (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Islam	59.91
2.	Katholik	22.17
3.	Kristen	11.49
4.	Khonghucu	0, 24
5.	Hindu	0,06
6.	Budha	6.09

Sumber: Kanwil Kemenag Kalimantan Barat, 2019.

Untuk memfasilitasi kehidupan umat beragama, terdapat rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut ada dalam kondisi baik, rusak ringan, dan rusak parah. Lebih jelasnya jumlah dan keadaan rumah ibadah di Kalimantan Barat seperti tabel berikut :

Tabel 2.5
Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Agama	Kondisi Rumah Ibadah			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Islam	2947	2431	1989	7367
2.	Katholik	2801	1936	865	5602
3.	Kristen	3000	450	660	4110
4.	Khonghucu	39	23	15	77
5.	Hindu	-	15	1	16
6.	Budha	519	317	180	1016

Sumber: Kanwil Kemenag Kalbar, 2019.

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RT RW Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 Kawasan budidaya di Kalimantan Barat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; Kawasan peruntukan hortikultura; Kawasan peruntukan perkebunan; Kawasan peruntukan peternakan; Kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan pertahanan.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas :

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.116.885,26 hektar yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang;
2. Hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 2.097.484,16 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten; dan
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 206.098,54 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Pengembangan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas sekitar 542.455 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan Kawasan Perlindungan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 460.000 hektar yang diarahkan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

c. Kawasan Peruntukan Hortikultura

Pengembangan Kawasan Hortikultura berada di kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah yang diarahkan tersebar diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

d. Kawasan peruntukan perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat berada di diseluruh Kabupaten/Kota dengan tanaman komoditi unggulan berupa Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada dan Kakao.

e. Kawasan peruntukan peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kota Singkawang yang khusus untuk peternakan unggas, sedangkan untuk peternakan hewan pemamah biak (ruminansia) maupun yang non ruminansia yang berada di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

f. Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kabupaten Sambas Kecamatan Pemangkat dan sekitarnya; Kota Singkawang di Kecamatan Singkawang Utara; Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan; Kabupaten Mempawah di Kecamatan Mempawah Hilir dan Segedong; Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Kakap dan Teluk Pakedai; Kabupaten Kayong Utara di Kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata; Kabupaten Ketapang di Kecamatan Matan Hilir Utara, Delta Pawan dan sekitarnya, serta Kendawangan; dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Jongkong dan sekitarnya.

Untuk menunjang pengembangan kawasan peruntukan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau kecil tersedia :

1. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Pemangkat di Kabupaten Sambas yang direncanakan menjadi pelabuhan perikanan samudera (PPS);
2. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara yang direncanakan menjadi PPN;
3. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya;
4. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Mempawah di Kabupaten Mempawah yang direncanakan menjadi PPP; dan
5. PPI yang tersebar di:
 - a.) Kabupaten Sambas sebanyak 6 (enam) PPI;
 - b.) Kota Singkawang sebanyak 2 (dua) PPI;
 - c.) Kabupaten Bengkayang sebanyak 8 (delapan) PPI;
 - d.) Kabupaten Mempawah sebanyak 9 (sembilan) PPI;
 - e.) Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) PPI;
 - f.) Kabupaten Kubu Raya sebanyak 8 (delapan) PPI;
 - g.) Kabupaten Kayong Utara sebanyak 11 (sebelas) PPI; dan
 - h.) Kabupaten Ketapang sebanyak 3 (tiga) PPI;
6. Rencana PPI Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

g. Kawasan peruntukan pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan berupa KPP mineral, batubara, minyak dan

gas bumi, dan/atau panas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan berada di seluruh Kabupaten dan Kota Singkawang.

h. Kawasan peruntukan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Provinsi Kalimantan Barat :

1. Kawasan industri berada di daerah Semparuk, Sungai Raya (Kabupaten Bengkayang); Sungai Raya Kepulauan, Sungai Kunyit, Mandor, Siantan, Pontianak, Sungai Raya (Kabupaten Kubu Raya); Tayan (Kabupaten Sanggau), Teluk Batang, Matan Hilir Selatan, Kendawangan (Kabupaten Ketapang), Sei Ringin (Kabupaten Sintang) dan Badau (Kabupaten Kapuas Hulu); dan
2. Kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit, Tayan, Kendawangan, dan Tanjung Api.

i. Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan Kawasan pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat berada di wilayah sebagai berikut :

1. Kawasan Metropolitan Pontianak dan sekitarnya;
2. Kawasan Pantai Pasir Panjang, Kota Singkawang dan sekitarnya;
3. Sekitar (di luar kawasan) CA Gunung Niyut-Penrinsen;
4. Danau Lait dan sekitarnya;
5. Gunung Palung dan sekitarnya;
6. Bukit Baka - Bukit Raya;
7. Sekitar (di luar kawasan) CAL Karimata; dan
8. Danau Sentarum dan sekitarnya.

j. Kawasan peruntukan permukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman meliputi :

1. Kawasan permukiman perkotaan berada di Kawasan perkotaan ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan kota, ibukota kecamatan dan desa yang sudah menampilkan gejala perkotaan; dan
2. Kawasan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan.

k. Kawasan Peruntukan Pertahanan.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertahanan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertahanan baik wilayah darat, laut maupun udara diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

1. Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata;
2. Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri;
3. Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
4. Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri;
5. Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan;
6. Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan;
7. Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
8. Kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan;
9. Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan;
10. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan;
11. Kawasan Manismata-Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; dan
12. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi dengan sektor unggulan pertambangan.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang;
2. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya-Pasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
3. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Niyut-Penrinsen di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau;
4. Kawasan Strategis Ekosistem Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
5. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.

3. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan,

kawasan lindung provinsi yang diarahkan ke seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang berupa kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri atas :
 1. Pantai tersebar di enam kabupaten dan satu kota yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang dan Kota Singkawang dengan lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
 2. Sempadan sungai terdiri atas :
 - Sempadan sungai besar yang terdapat di:
 - a. WS Sambas, yaitu Sungai Paloh, Sambas Besar, Bantan, Kumba, Sambas Kecil, Sebangkau, Selakau, dan Terusan Senujuh;
 - b. WS Mempawah, yaitu Sungai Raya, Duri, Mempawah, dan Sungai Peniti;
 - c. WS Kapuas, yaitu Kapuas Kecil, Mandor, Landak, Menyuke, Behe, Pede, Ambawang, Kapuas, Tayan, Mengkiang, Kembayan, Sekayam, Sekadau, Belitang, Melawi, Kayan, Belimbing, Pinoh, Sayan, Keruas, Ella, Mentatai, Serawai, Ambalau, Ketungau, Silat, Tawang, Empanang, Embaloh Leboyan, Jongkong, Bunut, Embaloh, Palin, Mandai, Sibau, Mendalam, Keriyau (Kapuas Hulu), Mendawak, Labai, Lida, Kualan, Kerawang, dan Sungai Durian Sebatang;
 - d. WS Pawan, yaitu Sungai Simpang, Semandang, Matan, Tolak, Pawan, Kayung, Tayap, Laur, Jekah, Keriyau (Ketapang), Kerabai, Biya, dan Sungai Pesakuan; dan
 - e. WS Kendawangan-Jelai, yaitu Sungai Kendawangan, Membuluh, Air Hitam Besar, Berais, Jelai, dan Sungai Kawah;
 - Sempadan kecil yang terdapat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
 3. Kawasan sekitar danau atau waduk tersebar di Kota Singkawang dan di 5 (lima) kabupaten yaitu Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. Kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas :
 1. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan di 6 (enam) kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang yang merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 2. Kawasan rawan banjir tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah di sekitar sungai besar.
 3. Kawasan rawan tanah longsor tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan-pegunungan, kecuali Kota Pontianak.
- e. Kawasan lindung geologi yang terdiri atas :
 1. Kawasan rawan abrasi tersebar di daerah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang.
 2. Kawasan sekitar mata air tersebar di seluruh kabupaten/kota.

- f. Kawasan lindung lainnya yang terdiri atas :
1. Kawasan terumbu karang tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, dan Ketapang.
 2. Kawasan kebun raya berada di Kabupaten Sambas.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Masalah menurunnya kualitas lingkungan di Kalimantan Barat menjadi fenomena yang kian mengkhawatirkan. Bencana lingkungan terus terjadi semakin intensif. Hingga tahun 2019 bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan tanah longsor semakin meningkat intensitasnya. Bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi di semua Kabupaten/Kota. Telah diidentifikasi sebanyak 322 Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 471 Desa/Kelurahan termasuk dalam daerah potensi banjir dan sebanyak 72 Desa/Kelurahan termasuk dalam daerah potensi longsor.

Tabel 2.6

Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Kebakaran Hutan, Banjir dan Longsor di Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/ Kota	Desa/ Kelurahan Potensi Karhutla	Desa/ Kelurahan Potensi Banjir	Desa/ Kelurahan Potensi Longsor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Pontianak	3	3	0
2.	Kota Singkawang	8	7	2
3.	Kab. Kubu Raya	18	13	0
4.	Kab. Kapuas Hulu	12	104	2
5.	Kab. Bengkayang	40	5	11
6.	Kab. Sambas	34	6	1
7.	Kab. Kayong Utara	23	21	2
8.	Kab. Mempawah	28	33	7
9.	Kab. Landak	27	82	9
10.	Kab. Sanggau	14	59	6
11.	Kab. Sekadau	13	36	2
12.	Kab. Melawi	15	37	0
13.	Kab. Ketapang	45	26	13
14.	Kab. Sintang	42	39	7
Jumlah		322	471	72

Sumber : BPBD Provinsi Kalimantan Barat, 2019.

Banjir dan tanah longsor menjadi indikasi menurunnya daya dukung lingkungan yaitu makin meningkatnya lahan kritis dan makin menyempitnya ruang terbuka sebagai daerah resapan. Ditambah lagi persoalan rob yang melanda beberapa kawasan pemukiman akibat air pasang yang cenderung semakin meningkat. Kerusakan dan bencana lingkungan memperburuk kondisi kemiskinan yang jumlahnya masih cukup tinggi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran kondisi aspek kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat diuraikan dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

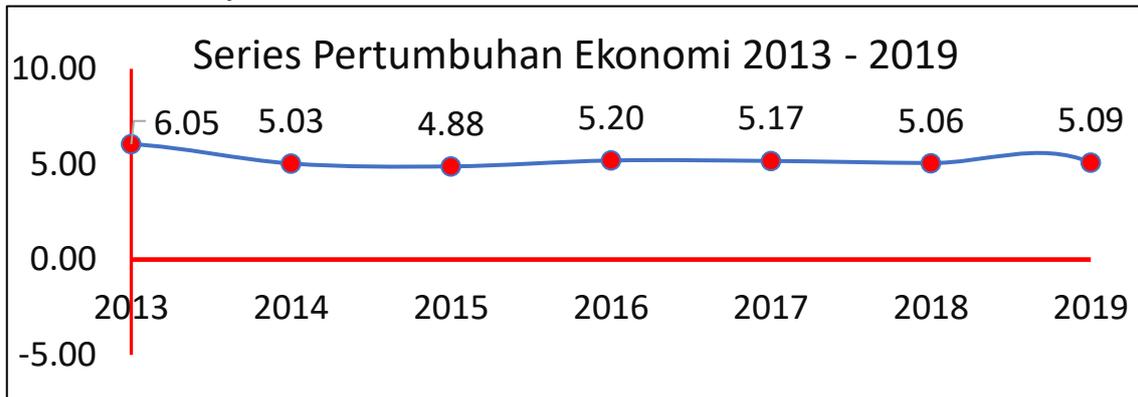
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, laju inflasi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2013-2019, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat rata-rata tumbuh 5,3 persen tiap tahunnya dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 6,05 persen dan terendah pada tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,09 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,06 persen.

Gambar 2.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019

Selama tahun 2013-2019, kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi adalah Ketapang (rata-rata 6,72% per tahun); diikuti Kubu Raya (rata-rata 5,82% per tahun) dan Mempawah (rata-rata 5,81% per tahun). Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah (di bawah rata-rata Kalbar) adalah Kapuas Hulu (rata-rata 4,03% per tahun), Sanggau (rata-rata 4,30% per tahun), dan Singkawang rata-rata 4,53% per tahun).

Tabel 2.7

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sambas	6,18	5,40	4,76	5,24	5,13	5,03	4,89
2	Bengkayang	5,90	4,02	3,96	5,15	5,66	5,37	5,23
3	Landak	5,23	4,93	5,11	5,28	5,21	5,09	5,01
4	Mempawah	5,44	5,67	5,62	5,99	5,93	5,82	5,81

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Sanggau	5,98	3,26	3,68	5,34	4,50	4,45	4,30
6	Ketapang	4,55	2,76	5,53	7,97	7,21	7,99	6,72
7	Sintang	6,47	5,37	4,57	5,28	5,33	5,47	5,09
8	Kapuas Hulu	5,23	3,98	4,66	5,28	5,39	5,23	4,03
9	Sekadau	6,56	6,09	5,75	5,93	5,85	5,87	5,49
10	Melawi	4,85	4,73	4,70	4,75	4,79	5,38	4,97
11	Kayong Utara	5,26	5,66	5,03	5,98	5,42	5,01	5,04
12	Kubu Raya	6,66	6,28	6,35	6,37	6,56	5,62	5,82
13	Kota Pontianak	7,86	5,54	4,99	5,08	5,05	4,91	4,81
14	Kota Singkawang	6,62	6,62	6,17	5,17	5,42	4,70	4,53

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Indikator Pertumbuhan PDRB, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat umumnya dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung melalui dua pendekatan yaitu pendekatan harga berlaku dan harga konstan. Perkembangan perekonomian Kalimantan Barat secara agregat dapat tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta distribusinya diungkapkan dari sisi penawaran (mencakup 17 lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan).

Tabel 2.8

Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2019 (%)

No	Lapangan Usaha	2018 (digunakan data rilis)	Prakiraan dan Harapan 2019 (RKPD)	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.68	6,54	5.85
2	Pertambangan dan Penggalian	7.95	7,75	6.09
3	Industri Pengolahan	2.66	2,82	7.49
4	Pengadaan Listrik, Gas	3.58	4,40	5.70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.63	4,65	4.75
6	Konstruksi	1.94	2,35	0.73
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.59	4,63	5.54
8	Transportasi dan Pergudangan	7.47	7,54	3.67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.99	7,72	6.52
10	Informasi dan Komunikasi	6.91	7,01	6.36
11	Jasa Keuangan	8.15	8,22	-2.73
12	Real Estate	4.11	4,21	2.99
13	Jasa Perusahaan	4.06	4,25	4.93
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.73	5,79	5.86
15	Jasa Pendidikan	3.41	3,53	3.92
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.73	6,81	7.09
17	Jasa Lainnya	5.43	5,48	8.26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,07	5,20	5,09

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2020.

Selama kurun waktu 2013-2019, dari 17 (tujuh belas) sektor perekonomian penyusun PDRB di Kalimantan Barat, terdapat 4 (empat) sektor dengan kontribusi terbesar, yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 20,18 persen; sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 16,31 persen, sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 14,29 persen dan sektor Konstruksi dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 12,31 persen.

Tabel 2.9
Distribusi PDRB Atas Dasar Berlaku Tahun 2013-2019 (%)

NO	SEKTOR	TAHUN							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (TW III)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	22,77	21,56	20,54	20,21	20,30	20,23	20,18	20,93
2	Pertambangan dan Penggalian	5,03	4,79	4,90	5,61	5,40	6,07	6,71	7,08
3	Industri Pengolahan	16,33	16,48	15,78	16,12	16,21	17,61	19,51	15,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	0,13
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12	0,11	0,13
6	Konstruksi	11,45	12,21	13,10	12,44	12,80	12,52	12,31	12,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,52	14,51	14,81	14,47	14,13	14,08	14,29	13,01
8	Transportasi dan Pergudangan	4,22	4,30	4,40	4,52	4,57	5,23	5,63	3,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,31	2,38	2,37	2,31	2,57	2,86	2,14
10	Informasi dan Komunikasi	3,30	3,30	3,36	3,43	3,73	4,12	4,55	4,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,61	3,63	3,56	3,64	3,69	4,14	4,12	3,43
12	Real Estate	3,08	3,04	3,01	2,96	2,88	3,17	3,42	2,86
13	Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,47	0,46	0,44	0,48	0,53	0,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,80	6,29	6,67	6,94	6,94	7,63	8,44	7,30
15	Jasa Pendidikan	4,44	4,42	4,30	4,20	4,01	4,31	4,69	3,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,49	1,51	1,45	1,40	1,53	1,72	1,91
17	Jasa Lainnya	1,03	1,03	1,01	0,99	0,98	1,07	1,21	0,77
PDRB		100,00							

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

b. PDRB Per Kapita

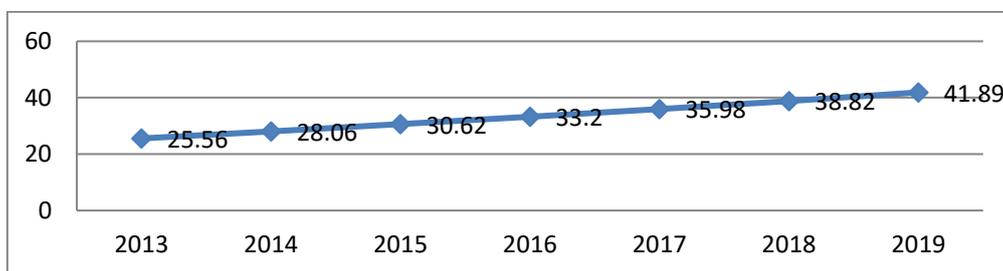
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita adalah hasil bagi antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk periode tertentu. Nilai PDRB Per Kapita digunakan untuk mengetahui nilai PDRB per kepala atau per satuan penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB Per Kapita

Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat menunjukkan kenaikan sebesar 7,3 persen menjadi Rp 41,89 Juta dibandingkan kondisi tahun 2018 sebesar Rp 38,82 Juta.

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Gambar 2.8

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (Juta Rp)



Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2019, *) Angka Sementara.

Tabel 2.10

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Kalimantan Barat 2015-2019

Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah)	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- ADHB	146.654	161.364	177.494	194.199	212.318
- ADHK (harga konstan 2010)	112.347	118.183	124.289	130.589	137.121
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	30.617	33.189	35.981	38.824	41.886
- ADHK (harga konstan 2010)	23.454	24.308	25.195	26.107	27.051
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	3.26	3.64	3.65	3.62	3.61
Jumlah Penduduk (ribu orang)	4.790	4.862	4.933	5.002	5.069
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1.57	1.50	1.46	1.40	1.34

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

c. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Selama periode 2013-2019, nilai Indeks Gini Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan dilihat dari nilai indeks yang bergerak menjauh dari angka 1. Untuk perhitungan bulan Maret dari tahun 2013 hingga tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 17,42 persen atau turun 0,069 poin. Sedangkan perhitungan bulan September dari tahun 2013 sampai 2019 mengalami penurunan sebesar 17.19 persen atau 0,066 poin.

Tabel 2.11
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

Semesteran	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Maret	0,396	0,391	0,334	0,341	0,327	0,339	0,327
September	0,384	0,402	0,330	0,331	0,329	0,325	0,318

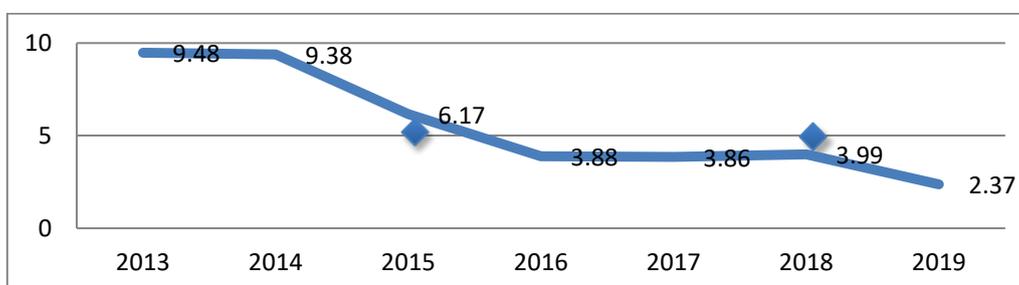
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

d. Laju Inflasi

Laju Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Untuk mengendalikan laju inflasi, Pemerintah Kalimantan Barat sudah membentuk Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Instansi Vertikal seperti BPS, Bank Indonesia, serta seluruh PD terkait. Forum TPID melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif, untuk menjaga agar inflasi dapat dikendalikan, dan ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga terjangkau.

Laju inflasi Kalimantan Barat diukur dari laju inflasi ibu kota provinsi yakni laju inflasi Kota Pontianak. Selama periode 2013-2019 laju inflasi Kota Pontianak cukup terkendali. Pada tahun 2013 inflasi Kota Pontianak sebesar 9,48 persen turun menjadi 2,37 persen pada tahun 2019.

Gambar 2.9
Laju Inflasi Ibu Kota Provinsi Tahun 2013-2019 (%)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Tabel 2.12
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

Semesteran	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inflasi	6,17	3,88	3,86	3,99	2,37

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

e. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi

serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (*sumber : idm.kemendesa.go.id*).

Adapun proses penetapan indeks desa membangun melalui 5 tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Kompilasi Data Lapangan oleh Kepala Desa Dibantu Pendamping Lokal Desa (PLD)
2. Verifikasi di Tingkat Kecamatan oleh Camat dan Pendamping Desa
3. Validasi di Tingkat Kabupaten, dan Provinsi Hasil Akhir ditandatangani Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PMD Kabupaten dengan didampingi oleh Tenaga Ahli (TA) Kabupaten
4. Validasi oleh Ditjen PPM
5. Validasi oleh PUSDATIN Kemendesa dan PDPT.

Perkembangan IDM di Provinsi Kalimantan Barat bersifat positif dari 1 desa di 2018, 87 desa di 2019 dan 214 desa di 2020 seperti tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.13

Perbandingan Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, 2019 dan 2020

NO	STATUS DESA	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sangat Tertinggal	677	33.33%	208	10.24%	12	0.59%
2	Tertinggal	928	45.69%	781	38.45%	566	27.87%
3	Berkembang	372	18.32%	767	37.76%	907	44.66%
4	Maju	53	2.61%	188	9.26%	332	16.35%
5	Mandiri	1	0.05%	87	4.28%	214	10.54%
TOTAL		2031	100.00%	2031	100.00%	2031	100.00%

Sumber : *idm.kemendesa.go.id*

Tabel 2.14

Data Desa Sangat Tertinggal Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kalimantan Barat Tahun 2020

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	IKS	IKE	IKL	SKOR IDM	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETAPANG	MANIS MATA	TERUSAN	0.5486	0.3333	0.4667	0.4495	SANGAT TERTINGGAL
2	KETAPANG	SUNGGAI LAUR	MERABU JAYA	0.5543	0.2833	0.6000	0.4792	SANGAT TERTINGGAL
3	KETAPANG	SIMPANG HULU	LEGONG	0.5600	0.3000	0.5333	0.4644	SANGAT TERTINGGAL
4	KETAPANG	SIMPANG HULU	SEKUCING KUALAN	0.5200	0.3167	0.6000	0.4789	SANGAT TERTINGGAL

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	IKS	IKE	IKL	SKOR IDM	STATUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	SINTANG	SERAWAI	GURUNG SENGHIANG	0.5486	0.3500	0.4667	0.4551	SANGAT TERTINGGAL
6	LANDAK	MEMPAWAH HULU	SABAKA	0.6743	0.3167	0.4667	0.4859	SANGAT TERTINGGAL
7	LANDAK	MEMPAWAH HULU	ANSOLOK	0.6857	0.3667	0.3333	0.4619	SANGAT TERTINGGAL
8	LANDAK	MERANTI	MORO BETUNG	0.6057	0.3167	0.4667	0.4630	SANGAT TERTINGGAL
9	LANDAK	MERANTI	AMPADI	0.6171	0.3333	0.4667	0.4724	SANGAT TERTINGGAL
10	LANDAK	MERANTI	TAHU	0.5714	0.3167	0.4000	0.4294	SANGAT TERTINGGAL
11	LANDAK	KUALA BEHE	SEJOWET	0.5429	0.3667	0.4667	0.4587	SANGAT TERTINGGAL
12	LANDAK	BANYUKE HULU	GAMANG	0.5086	0.2333	0.6667	0.4695	SANGAT TERTINGGAL

Sumber : idm.kemendesa.go.id

f. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Selama periode 2013-2019, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2013 persentase penduduk miskin Kalimantan Barat sebesar 8,24 persen turun menjadi 7,49 persen atau sebesar 0,75 poin pada bulan Maret 2019. Sementara itu, selama periode 2013-2019 jika dibandingkan, persentase penduduk miskin di pedesaan jauh lebih besar yakni rata-rata 8 hingga 10 persen per tahun dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan yang rata-rata sebesar 4 hingga 6 persen per tahun.

Tabel 2.15
Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

Indikator	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Persentase Penduduk Miskin (%) (Kota+Desa)	8.24	8.74	8.54	8.07	8.03	8.44	7.87	8.00	7.88	7.86	7.77	7.37	7.49	7.28
Kota	5.30	5.68	5.76	5.47	5.62	6.00	5.16	4.97	4.88	5.25	5.03	4.58	4.60	4.61
Desa	9.51	10.07	9.76	9.20	9.09	9.51	9.11	9.38	9.28	9.09	9.16	8.84	9.05	8.73
Garis Kemiskinan (Rp / kapita/Bulan) Kota + Desa	248.592	270.305	282.835	298.212	323.615	340.413	347.880	363.027	377.219	396.842	409.287	420.831	438.555	409.287
Kota	264.149	279.331	291.533	307.789	334.575	347.516	353.143	366.477	379.187	401.588	423.128	434.470	456.525	477.154
Desa	242.322	265.898	279.049	294.044	318.793	337.288	345.480	360.940	375.621	394.313	402.349	413.806	429.220	441.084
Jumlah penduduk miskin (jiwa) (Kota+Desa)	369.010	407.340	401.510	381.920	383.700	405.510	381.350	390.320	387.430	388.810	387.080	369.730	378.410	370.470
Kota	71.750	90.370	82.050	78.530	82.050	88.150	78.290	75.980	76.160	83.990	84.520	79.360	81.640	82.280
Desa	297.260	326.970	319.460	303.380	301.650	317.360	303.060	314.340	311.270	304.920	302.560	290.370	296.770	288.190

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat selama periode 2013-2019 digambarkan melalui tabel 2.14 Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Melawi yakni sebesar 12,38 persen, sedangkan persentase terendah berada di Kabupaten Sanggau sebesar 4,74 persen.

Tabel 2.16

Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No	Lokasi	Persentase Penduduk Miskin						
		(%)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sambas	9,90	9,46	9,42	8,54	8,59	8,55	8,19
2	Bengkayang	8,01	7,20	6,94	7,46	7,51	7,17	6,96
3	Landak	14,18	13,71	13,51	12,32	12,23	11,77	11,47
4	Mempawah	6,30	6,00	5,52	5,75	5,94	5,61	5,32
5	Sanggau	4,71	4,47	4,57	4,51	4,52	4,67	5,57
6	Ketapang	12,85	11,60	11,72	10,99	11,02	10,93	10,54
7	Sintang	10,09	9,11	9,33	10,07	10,20	40,30	9,65
8	Kapuas Hulu	11,11	10,03	9,66	9,82	9,45	25,22	9,62
9	Sekadau	6,93	6,31	6,50	6,14	6,46	12,28	6,11
10	Melawi	13,70	12,40	12,57	12,63	12,54	25,71	12,38
11	Kayong Utara	10,87	9,55	9,84	10,19	9,89	11,21	9,98
12	Kubu Raya	6,04	5,45	5,22	5,04	5,26	27,37	4,74
13	Kota Pontianak	5,56	5,15	5,22	5,55	5,31	31,46	4,88
14	Kota Singkawang	6,50	5,88	5,76	5,33	5,42	10,90	4,91

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

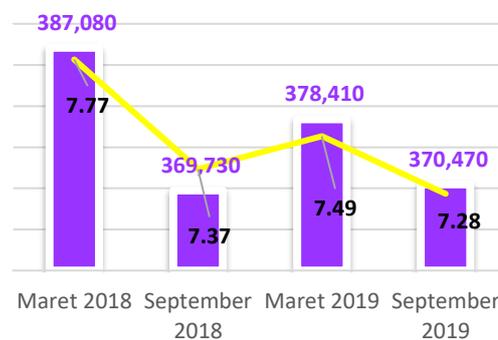
Tabel 2.17

Perkembangan Kemiskinan Kalimantan Barat

Bulan/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Maret 2018	387.080	7,77
Sept 2018	369.730	7,37
Maret 2019	378.410	7,49
Sept 2019	370.470	7,28

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2019.

Gambar 2.10
Perkembangan Kemiskinan Kalimantan Barat



— Jlh Penduduk Miskin — % penduduk miskin

Tabel 2.18

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin September 2018-September 2019

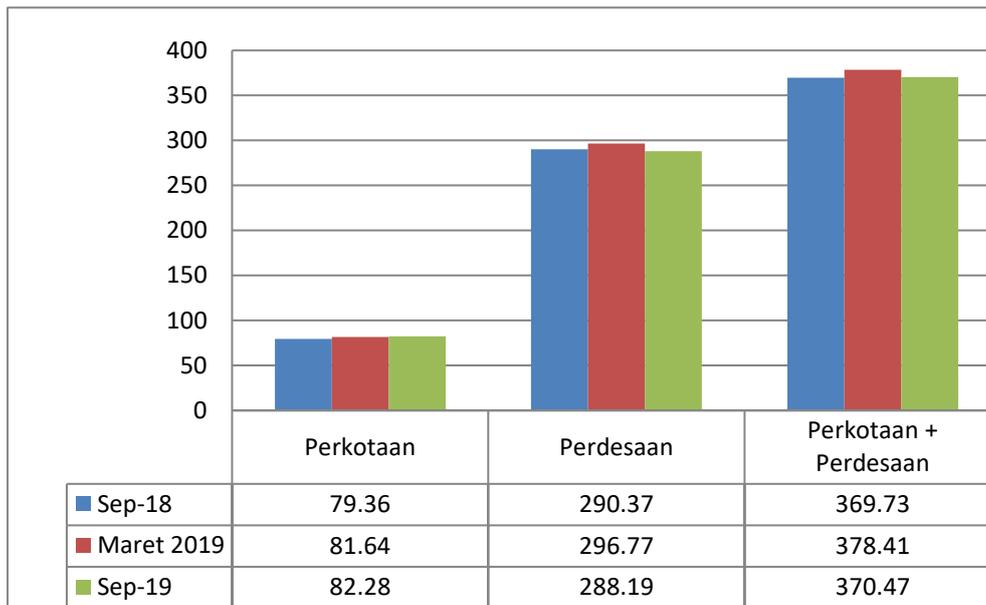
Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2018	79.360	4,58
Maret 2019	81.640	4,60
September 2019	82.280	4,61
Perdesaan		
September 2018	290.370	8,84
Maret 2019	296.770	9,05

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
September 2019	288.190	8.73
Perkotaan + Perdesaan		
September 2018	369.730	7,37
Maret 2019	378.410	7,49
September 2019	370.470	7,28

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2019.

Gambar 2.11

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin September 2018 - September 2019



Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2019.

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Tabel 2.19

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
Di Kalimantan Barat Menurut Daerah, September 2018-September 2019

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
September 2018	0.680	1.484	1.206
Maret 2019	0.758	1.350	1.142
September 2019	0.780	1.155	1.024
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
September 2018	0.152	0.353	0.258
Maret 2019	0.170	0.303	0.256
September 2019	0.194	0.231	0.218

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2019.

g. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. TPT Kalimantan Barat tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan tahun 2018 menjadi 4.16.

Tabel 2.20
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Se Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sambas	3.03	3.70	4.85	n.a	4.24	3.34	3.58
2	Bengkayang	2.30	3.74	3.15	n.a	2.40	2.40	2.71
3	Landak	3.24	3.43	5.81	n.a	2.03	2.29	2.75
4	Mempawah	5.66	5.57	7.12	n.a	6.72	6.87	5.19
5	Sanggau	0.78	3.25	5.13	n.a	3.27	2.47	3.07
6	Ketapang	4.70	2.06	4.29	n.a	3.97	3.23	4.53
7	Sintang	2.24	3.06	2.48	n.a	1.93	2.34	3.20
8	Kapuas Hulu	2.09	2.02	3.00	n.a	2.21	1.58	2.46
9	Sekadau	1.44	0.31	2.97	n.a	0.64	2.80	3.14
10	Melawi	3.99	2.46	3.03	n.a	2.11	3.15	2.45
11	Kayong Utara	4.66	4.08	3.76	n.a	5.00	3.93	4.00
12	Kubu Raya	9.26	6.18	6.11	n.a	5.91	5.04	5.62
13	Kota Pontianak	6.12	7.05	9.44	n.a	9.36	10.37	9.13
14	Kota Singkawang	4.59	8.22	6.12	n.a	8.08	7.88	6.44
KALIMANTAN BARAT		3.86	3.94	4.80	n.a	4.13	4.12	4.16

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Pada tahun 2013 Kabupaten Sanggau merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah yakni sebesar 0,78 persen sedangkan Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 9,26 persen. Sementara itu, pada tahun 2019 Kabupaten Melawi merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah yakni sebesar 2.45 persen, sedangkan Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 9,13 persen.

Tabel 2.21
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)

Periode	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Februari	3,09	2,53	4,78	4,58	4,22	4,15	4,14
Agustus	4,03	4,04	5,15	4,23	4,36	4,26	4,45

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

h. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM

menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Selama periode 2013-2019, IPM Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Kalimantan Barat sebesar 64,30 poin meningkat sebesar 3,35 poin atau 1,05 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 67,65 poin. Meskipun terus mengalami peningkatan, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat masih berstatus sedang.

Untuk IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama kurun waktu 2013 hingga 2019 seluruhnya mengalami peningkatan dan sejak tahun 2015 seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat status pembangunan manusianya keseluruhannya telah masuk kategori sedang, terkecuali untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang status pembangunan manusianya masuk kategori tinggi.

Tabel 2.22

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No	Wilayah	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sambas	62,47	63,28	64,14	64,94	65,92	66,61	67,02
2	Bengkayang	63,99	64,40	64,65	65,45	65,99	66,85	67,57
3	Landak	62,72	63,59	64,12	64,58	64,93	65,45	65,96
4	Mempawah	62,09	62,78	63,37	63,84	64,00	64,90	65,9
5	Sanggau	61,72	62,06	63,05	63,90	64,61	65,15	65,67
6	Ketapang	62,85	63,27	64,03	64,74	65,71	66,41	67,16
7	Sintang	62,64	63,19	64,18	64,78	65,16	66,07	66,70
8	Kapuas Hulu	62,63	62,90	63,73	63,83	64,18	65,03	65,65
9	Sekadau	61,02	61,98	62,34	62,52	63,04	63,69	64,34
10	Melawi	62,27	62,89	63,78	64,25	64,43	65,05	65,54
11	Kayong Utara	57,92	58,52	60,09	60,87	61,52	61,82	62,66
12	Kubu Raya	63,94	64,52	65,02	65,54	66,31	67,23	67,76
13	Kota Pontianak	75,98	76,63	77,52	77,63	77,93	78,56	79,35
14	Kota Singkawang	69,13	69,84	70,03	70,10	70,25	71,08	71,72
Kalimantan Barat		64,30	64,89	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

i. Konflik Sosial

Faktor keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berpengaruh dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah. Kondusifitas di suatu wilayah juga berperan dalam mendorong datangnya investasi di wilayah tersebut. Selama periode 2013-2019, kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kalimantan Barat cukup kondusif dengan digambarkan tidak terdapatnya kasus konflik sosial di masyarakat. Kemudian, selama periode 2019-2023 akan

dioptimalkan tidak ada konflik, tetapi juga mengupayakan kondisi stabilitas sosial yang semakin kondusif untuk mendukung iklim investasi dan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.

j. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah: (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter: SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.23

Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2019

No.	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	80,00	55,8	50,00
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,12	87,9	90,04
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58,58	64,19	NA
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,17	73,09	NA

Sumber : Kementerian LHK Tahun 2017, Kementerian LHK 2018, Kementerian LHK 2019.

Tabel 2.24

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,1	68,3	67,1	66,1	74,17	73,09	NA

Sumber : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, KLHK Tahun 2019.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial digambarkan melalui indikator Jumlah Penduduk Usia Sekolah, Angka Melek Aksara, angka rata-rata lama sekolah, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja.

a. Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Gambaran umum tentang akses penduduk terhadap berbagai jenjang dan jenis pendidikan di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.23. Pada tabel tersebut, penduduk pada jenjang

Sekolah Dasar memiliki jumlah yang paling banyak dibanding dengan jenjang sekolah lainnya. Apabila diperhatikan penduduk usia sekolah yang bersekolah dijenjang yang selayaknya penduduk itu sekolah tampak bahwa angka paling besar terjadi pada sekolah dasar sederajat. Sementara jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah di jenjang yang selayaknya mereka sekolah yang paling kecil jumlahnya adalah jenjang pendidikan menengah.

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kalimantan Barat 2017

Jenjang Pendidikan (1)	Keterangan (2)	Jumlah (3)
TK/PAUD	Usia 3-6 tahun	408.652
SD/MI sederajat	Usia 7-12 tahun	601.934
SMP/MTs sederajat	Usia 13-15 tahun	312.732
SMA/MA sederajat	Usia 16-18 tahun	306.065
	Bersekolah di SMA/MA sederajat	408.652

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

b. Angka Melek Aksara

Angka melek aksara berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek aksara merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek aksara maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Tabel 2.24 menyajikan Angka Melek aksara di Kalimantan Barat tahun 2013-2019.

Tabel 2.26
Angka Melek Aksara Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Angka Melek Aksara	Persen	92.75	93.15	91.81	93.28	93.25	98.24	98.30	0.93

Sumber : SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Data BPS), Tahun 2019.

Angka melek aksara Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 0.92 persen pada periode 2013-2019. Pada tahun 2013-2014, angka melek huruf di Kalimantan Barat sebesar mengalami kenaikan 0,35 persen, namun kurun waktu 2014-2015 terjadi penurunan sebesar 1,34 persen. Pada tahun 2016, angka melek huruf kembali meningkat sebesar 1.47% persen, kemudian mengalami penurunan sebesar 0.03 persen pada 2017 lalu pada 2018 naik cukup tinggi dengan persentase kenaikan yakni 5,05 persen dan pada dari tahun 2018 hingga tahun 2019 tidak ada kenaikan pada Angka Melek Huruf. Persentase angka melek huruf yang cukup besar ini menunjukkan adanya meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik.

Sebaran angka melek aksara setiap kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.25 Pada tahun 2019 angka melek aksara paling tinggi ada pada Kota Pontianak sebesar 96,43 persen, sedangkan paling rendah ada pada Kabupaten Mempawah, yakni sebesar 90,90 persen. Pada beberapa kabupaten, angka melek aksara ini mengalami fluktuasi, namun pada Kabupaten Ketapang, Sekadau dan Melawi angka melek huruf di kabupaten tersebut terus mengalami kenaikan walaupun persentasenya relatif kecil. Semua ini menunjukkan bahwa angka buta huruf penduduk Kalimantan Barat relatif masih besar.

Tabel 2.27

Angka Melek Aksara Per Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

Kab/Kota	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Melek Aksara (Persen)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kalimantan Barat	92.75	93.15	91.81	93.28	93.25	91.66	93.21
Sambas	92.55	92.04	92.1	94.44	93.09	90.62	93.00
Bengkayang	92.62	92.76	89.14	91.1	92.26	92.69	93.12
Landak	94.84	95.95	92.75	91.84	92.87	92.27	93.63
Mempawah	93.45	93.45	90.12	91.53	90.9	91.65	91.67
Sanggau	92.81	93.83	92.44	93.61	93.12	93.24	91.63
Ketapang	91.72	92.89	91.38	94.21	94.66	91.58	95.16
Sintang	91.41	92.27	88.58	91.74	91.23	93.53	93.44
Kapuas Hulu	92.9	92.55	93.84	92.33	93.65	92.20	94.63
Sekadau	93.35	92.83	92.48	94.03	95.14	91.88	91.92
Melawi	87.8	90.09	88.14	90.06	91.06	84.71	91.13
Kayong Utara	90.45	91.27	88.93	88.16	90.58	92.17	88.14
Kubu Raya	89.91	90.22	93.67	92.84	92.56	96.68	91.59
Kota Pontianak	96.35	95.71	95.99	97.13	96.43	91.77	96.67
Kota Singkawang	93.9	94.85	90.38	93.18	92.56	92.58	91.05

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Data BPS).

c. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rerata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan semakin baik. Tabel 2.26 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat tahun 2013-2019.

Tabel 2.28

Angka rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	6.69	6.83	6.93	6.98	7.05	7.12	7.92

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (Data BPS Prov. Kalbar, Tahun 2019).

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tren positif dari pertumbuhan rata-rata lama sekolah dari tahun 2013-2019 di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum, pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat mencapai 0,2 per tahun. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018-2019, yang mencapai 0,8 tahun. Angka rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak dasar pendidikan makin tinggi dari waktu ke waktu.

Angka rata-rata lama sekolah setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.27 Pada tabel tersebut tampak bahwa angka rata-rata lama sekolah paling tinggi terdapat di Kota Pontianak, sebesar 10,14 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah yang paling rendah ada di Kabupaten Kayong Utara, sebesar 6 tahun. Dengan kata lain, umumnya penduduk Kota Pontianak berpendidikan setara dengan kelas VIII SMP, sementara penduduk Kabupaten Kayong Utara umumnya berpendidikan setara dengan kelas VI SD/MI.

Tabel 2.29

Angka rata-rata Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

Kab/Kota	Angka Rata-rata Lama Sekolah						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KALIMANTAN BARAT	6.69	6.83	6.93	6.98	7.05	7.12	7.31
Sambas	5.48	5.80	6.13	6.42	6.67	6.68	6.70
Bengkayang	5.96	5.97	5.98	6.08	6.09	6.27	6.53
Landak	6.99	7.05	7.06	7.07	7.08	7.09	7.10
Pontianak	6.15	6.33	6.45	6.46	6.47	6.63	6.82
Sanggau	6.35	6.37	6.74	6.92	6.93	6.94	6.95
Ketapang	6.17	6.22	6.56	6.68	7.03	7.04	7.26
Sintang	6.26	6.63	6.70	6.71	6.72	6.74	6.89
Kapuas Hulu	6.60	6.65	7.00	7.01	7.02	7.25	7.47
Sekadau	6.16	6.54	6.55	6.56	6.57	6.58	6.60
Melawi	5.81	6.00	6.42	6.52	6.53	6.66	6.67
Kayong Utara	5.14	5.19	5.37	5.84	5.85	5.86	6
Kubu Raya	6.16	6.41	6.56	6.57	6.58	6.81	6.82
Kota Pontianak	9.36	9.62	9.77	9.78	9.79	9.90	10.14
Kota Singkawang	7.14	7.26	7.28	7.29	7.30	7.57	7.72

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

d. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam Pendidikan di bangku sekolah. Tabel 2.28 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat tahun 2013-2019.

Tabel 2.30
Angka Harapan Lama Sekolah Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Harapan lama Sekolah	Tahun	11.60	11.89	12.25	12.37	12.50	12.55	12.58	0.16

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (Data BPS Prov. Kalbar), Tahun 2019.

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tren positif dari pertumbuhan Harapan lama sekolah dari tahun 2013-2019 di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum, pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat mencapai 0,16 tahun. Pada tahun 2019 HLS Provinsi Kalimantan Barat sebesar 12,58 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,58 tahun atau setara dengan Diploma I.

Angka harapan lama sekolah setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.29 Pada tabel tersebut tampak bahwa angka harapan lama sekolah paling tinggi terdapat di Kota Pontianak, sebesar 14,99 tahun, sedangkan harapan lama sekolah yang paling rendah ada di Kabupaten Melawi, sebesar 11,15 tahun. Dengan kata lain, umumnya penduduk Kota Pontianak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah setara dengan Diploma I, sementara penduduk Kabupaten Kayong Utara usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2019 memiliki peluang untuk bersekolah hingga dengan SMA Kelas 2. Angka kelulusan pendidikan dasar dan menengah akan berdampak terhadap Harapan Lama Sekolah. Persentase Kelulusan SMA/SMK pada tahun 2019 sebesar 100%.

Tabel 2.31
Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

Kab/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KALIMANTAN BARAT	11,60	11,89	12,25	12,37	12,50	12,55	12,58
Sambas	11,22	11,46	11,70	11,92	12,38	12,52	12,60
Bengkayang	10,98	11,11	11,14	11,60	12,00	12,01	12,08
Landak	11,50	12,00	12,03	12,35	12,36	12,37	12,39
Pontianak	11,48	11,75	11,91	12,29	12,30	12,31	12,33
Sanggau	10,38	10,60	10,67	11,05	11,53	11,54	11,56
Ketapang	10,61	10,90	10,95	11,34	11,76	11,77	11,79
Sintang	10,30	10,25	10,84	11,27	11,54	11,98	12,02
Kapuas Hulu	11,73	11,80	11,83	11,84	11,85	12,03	12,04
Sekadau	10,84	11,12	11,23	11,34	11,53	11,56	11,57
Melawi	10,46	10,65	10,78	11,05	11,12	11,13	11,15
Kayong Utara	10,58	10,89	11,74	11,75	11,78	11,79	11,81
Kubu Raya	12,14	12,34	12,55	12,84	13,21	13,59	13,64
Kota Pontianak	13,58	13,84	14,48	14,49	14,72	14,81	14,99
Kota Singkawang	12,34	12,80	12,84	12,85	12,86	12,87	12,89

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perhitungan persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat. Berikut Tabel 2.30 menunjukkan angka pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2019.

Tabel 2.32

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

Status Pendidikan	Persentase Penduduk 7-24 tahun menurut Pendidikan yang ditamatkan						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tidak/ Belum Pernah Sekolah	1.51	1.24	1.21	0.96	1.03	0.62	0.89
SD/MI/Paket A	40.9	41.26	40.58	39.2	36.87	38.00	38.11
SLTP/MTs/Paket B	13.21	13.99	14.5	14.8	14.61	14.10	13.82
SMU/SMK/MA/Paket C	8.89	9.98	11.72	13.04	13.76	12.85	13.27
Diploma I s.d Universitas	4.74	6.07	3.91	4.2	4.9	4.58	4.64
Jumlah yang Masih Sekolah	67.73	71.29	70.71	71.24	70.14	69.52	69.86
Tidak Bersekolah Lagi	30.77	27.47	28.08	27.79	28.83	29.86	29.25

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

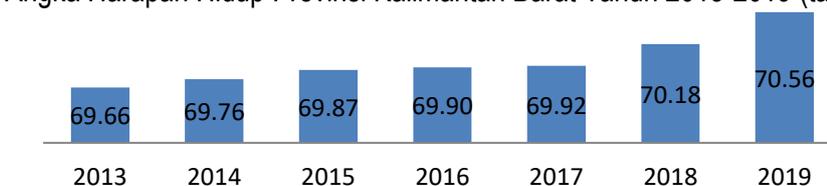
Data Tabel 2.30 menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kalimantan Barat adalah pendidikan dasar (SD/MI/Paket-SMP/MTs/Paket B). Pada tahun 2017 persentase penduduk 7-24 tahun yang menamatkan pendidikan pasar mencapai 51,48 persen. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk yang tamat pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket) baru mencapai 13,76 persen. Pada jenjang pendidikan tinggi persentasenya bahkan baru mencapai 4,9 persen. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kalimantan Barat masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar.

f. Angka Harapan Hidup

Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata-rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2019 mencapai 70.56 tahun meningkat 0,38 tahun bila dibandingkan kondisi tahun 2018 sebesar 70.18 tahun.

Gambar 2.12

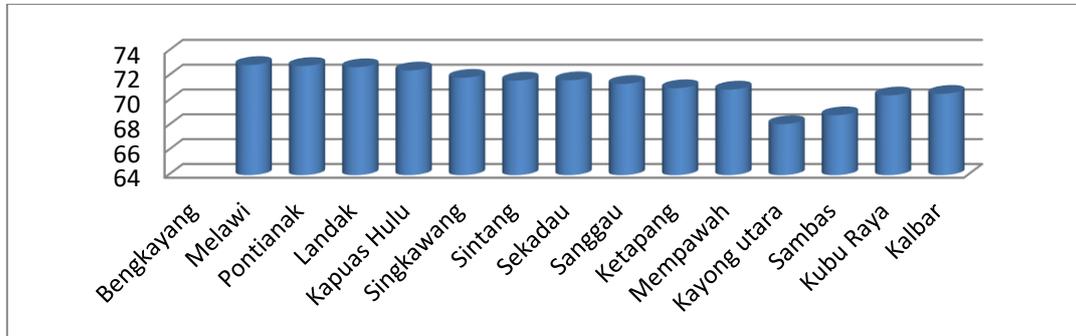
Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (tahun)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah)

Angka Harapan Hidup tertinggi dicapai oleh Kabupaten Melawi 72.88 tahun sedangkan angka Harapan Hidup terendah, yaitu 68.11 tahun di Kabupaten Kayong Utara, sebagaimana tergambar pada grafik berikut :

Gambar 2.13
Angka Harapan Hidup di Setiap Kabupaten di Kalimantan Barat Tahun 2019



(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah)

g. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Dari Tabel 2.31 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya fluktuatif. Berdasarkan data pada tabel tersebut pada akhir tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa 95.56 % dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2.33
Persentase Penduduk Bekerja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

URAIAN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Persentase penduduk yang bekerja (%)	95.97	95.96	94.85	95.77	95.64	95.76	95.56

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Berdasarkan status pekerjaan utama dapat diperoleh gambaran tentang pekerja Formal dan pekerja Informal. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja Formal terdiri dari yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan kategori buruh/karyawan. Sedangkan pekerja Informal adalah yang berstatus berusaha sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tidak dibayar.

Tabel 2.34
Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-2019

Status Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-2019Utama	Status Pekerjaan (Agustus)			
	2018	%	2019	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
FORMAL	871.654	37,14	906.341	40,02
~ Berusaha Sendiri	454.906	19,38	518.381	21,88
~ Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	416.748	17,76	387.960	16,38
INFORMAL	1.475.227	62,86	1.462.674	59,99
~ Berusaha dibantu Buruh Tetap	69.429	2,96	73.625	3,11
~ Buruh/Karyawan/ Pegawai	881.446	37,56	874.357	36,91
~ Pekerja Bebas Pertanian	54.279	2,31	52.284	2,21
~ Pekerja Bebas Non Pertanian	65.798	2,80	71.355	3,01
~ Pekerja Keluarga/tak Dibayar	404.275	17,23	391.053	16,51
Total	2.346.881	100,00	2.369.015	100,00

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2019.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Indikator kinerja dalam bidang pendidikan pada aspek pelayanan umum bidang pendidikan digambarkan melalui angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs.

1. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan keadaan proporsi kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah tahun 2017 pada semua jenjang menunjukkan perkembangan yang positif jika dibandingkan kondisi tahun 2016. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2017 sebesar 0,19 persen turun sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,38 persen. Sedangkan angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2017 juga menunjukkan kondisi perkembangan positif dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,36 persen, menurun 0,27 poin dari tahun 2016 (0,63 persen). Sementara itu, untuk angka putus sekolah SMA/MA pada tahun 2017 sebesar 0,31 persen turun 0,70 poin dari kondisi tahun 2016 sebesar 1,01 persen.

Tabel 2.35

Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (%)

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,83	0,83	0,55	0,38	0,19
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,79	0,79	0,75	0,63	0,36
3	Angka Putus Sekolah SMA/MA	0,86	0,86	0,96	1,01	0,31

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017.

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Berdasarkan data Kemdikbud 2019, jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Kalimantan Barat adalah 524.301 orang. Dari jumlah tersebut ternyata yang bersekolah di jenjang Sekolah Menengah baik SMA, SMK, MA maupun Paket C sebanyak 141.355 orang, sedangkan jumlah yang bersekolah di sekolah menengah mencapai 196.995 orang. Tabel 2.34 menunjukkan APK pendidikan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2019.

Tabel 2.36

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)

NO	INDIKATOR	TAHUN							Pertumbuhan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	67,33	69,45	70,14	72,31	72,33	71,00	81,92	2.42%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (data NPD Dikbud 2019 84,47).

Secara umum, dari tahun 2013-2019 terjadi peningkatan APK pendidikan menengah sebesar 14.59 persen atau tumbuh rata-rata pertahun sebesar 2.42%. Pada tahun 2013, APK pendidikan menengah di Kalimantan Barat baru mencapai 67,33 persen. Pada tahun 2014, angka itu meningkat sebesar 2,12 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018-2019 yang mencapai 10.92 persen. Dengan demikian berarti minat penduduk usia pendidikan menengah untuk mendapatkan pendidikan menengah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang sekolah menengah dan penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di sekolah menengah pada setiap kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.37
Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Penduduk yang Bersekolah di Sekolah Menengah
Berdasarkan Kabupaten di Kalimantan Barat 2019

Kab/Kota	Penduduk Usia 16-18 tahun	Penduduk Bersekolah di Sekolah Menengah	Penduduk Usia 16-18 Bersekolah di Sekolah Menengah
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN BARAT	262.700	198.613	198.613
Sambas	24,850	18,002	13,550
Bengkayang	11,505	8,970	6,506
Landak	19,299	16,338	11,640
Mempawah	48,510	35,662	25,002
Sanggau	19,559	14,189	10,112
Ketapang	29,151	17,184	12,601
Sintang	19,702	15,428	10,938
Kapuas Hulu	11,443	8,986	6,505
Sekadau	8,796	7,500	5,144
Melawi	9,815	8,141	5,849
Kayong Utara	5,708	4,684	3,500
Kubu Raya	27,631	20,446	14,649
Kota Pontianak	11,360	9,823	7.128
Kota Singkawang	15,371	11,642	8,231

Sumber: APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SM Tahun Ajaran 2018/2019.

Angka partisipasi kasar (APK) setiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.36 Pada Tahun 2019 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah tertinggi ada di Kota Pontianak yakni sebesar 100.01 persen, sedangkan paling rendah di Kabupaten Ketapang, sebesar 68.93 persen. Fluktuasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah pada setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun partisipasi penduduk usia pendidikan menengah pada setiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Tabel 2.38

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK /Paket C						
	2013*	2014*	2015*	2016**	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KALIMANTAN BARAT		66.89	81.88	72.33	Na	71,00	81,92
Sambas	65.96	70.83	90.57	74.09	Na	79.80	83.63
Bengkayang	51.69	64.08	68.79	66.06	Na	86.80	94.58
Landak	62.33	68.6	77.9	66.03	Na	91.30	91.43
Mempawah	49.17	66.42	76.46	73.27	Na	96.40	100.01
Sanggau	51.9	54.95	51.57	63.07	Na	80.60	83.47
Ketapang	40.52	46.31	73.79	49.67	Na	66.10	68.93
Sintang	47.87	45.13	77.04	68.83	Na	83.80	90.63
Kapuas Hulu	65.71	73.2	72.93	62.35	Na	85.20	85.25
Sekadau	57.14	71.67	60.43	72.34	Na	92.20	99.48
Melawi	50.45	62.35	76.69	76.14	Na	91.30	89.92
Kayong Utara	65.52	75.9	81.82	75.24	Na	90.30	95.72
Kubu Raya	53.06	67.83	91.66	61.39	Na	-	85.55

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK /Paket C						
	2013*	2014*	2015*	2016**	2017	2018	2019
Kota Pontianak	83.83	83.82	121.61	103.65	Na	78.60	78.63
Kota Singkawang	88.89	86.09	69.36	87.04	Na	79.30	80.13

Sumber : *) BPS Kalbar 2020.

**) Data Profil Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan, tahun 2019/2020.

***) APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SM Tahun 2018/2019. Kemdikbud 2019.

3. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (16-18 tahun untuk SMA/SMK/MA) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Berikut Tabel 2.37 menunjukkan angka partisipasi murni di Kalimantan Barat tahun 2013-2019.

Tabel 2.39

Perkembangan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	44,79	50,06	50,32	50,43	50,96	51,16	51,21

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar, 2019.

Secara umum, dari tahun 2013-2019 terjadi penurunan APM pendidikan menengah sebesar -7,14 persen atau tumbuh negatif rata-rata pertahun sebesar 2,44 persen. Pada tahun 2013, APM pendidikan menengah di Kalimantan Barat baru mencapai 72,41 persen. Pada tahun 2014, angka itu turun sebesar -12,41 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar -2,49. Tahun 2016-2017 terjadi peningkatan sebesar 2,49 persen dan pada Tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 8,27 persen. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang masih belum baik serta partisipasi masyarakat yang belum besar dari penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut juga menunjukkan masih fluktuasinya penduduk usia pendidikan menengah yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.

Sebaran Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2013-2019 kabupaten/kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.30. Pada tahun 2019, kabupaten/kota yang memiliki APM pendidikan menengah tertinggi ada di Kabupaten Bengkayang sebesar 67,89 persen, sedangkan APM pendidikan menengah paling rendah ada di Kabupaten Ketapang, sebesar 54,89 persen. APM pendidikan menengah di kabupaten/kota yang masih berada di bawah 70 persen menunjukkan banyak penduduk usia 16-18 tahun yang belum menikmati pendidikan menengah yang selayaknya mereka dapatkan.

Tabel 2.40
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019 (%)

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK /Paket C						
	2013*	2014*	2015*	2016**	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
KALIMANTAN BARAT	44,79	50,06	50,32	50,43	50,96	51,16	51,21
Sambas	66.67	46.6	49.33	45.09	na	59.30	67.41
Bengkayang	78.57	49.59	47.68	52.19	na	62.40	76.89
Landak	48.28	47.76	45.76	56.33	na	62.10	72.18
Mempawah	56	42.34	43.92	37.70	na	67.20	74.11
Sanggau	32.2	37.58	34.48	52.35	na	55.60	65.12
Ketapang	66.67	38.94	39.11	45.60	na	47.60	54.89
Sintang	60	57.73	57.4	54.47	na	59.00	69.26
Kapuas Hulu	71.43	48.33	47.08	33.80	na	57.90	67.80
Sekadau	72.73	48.24	45.34	40.67	na	63.60	76.47
Melawi	75	51.81	49.72	60.04	na	61.20	68.00
Kayong Utara	50.94	47.55	46.82	46.16	na	66.50	74.54
Kubu Raya	61.08	63.58	64.45	58.43	na		65.03
Kota Pontianak	67.42	69.57	70.5	63.95	na	55.80	58.40
Kota Singkawang	58.98	50.9	50.13	50.43	na	55.90	60.84

Sumber : *) BPS Kalbar 2020.

**) Data Profil Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan, tahun 2018/2019.

***) APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SM Tahun 2018/2019. Kemdikbud 2019.

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif. Terdapat 4 (empat) Indikator Kerja Utama pada sektor kesehatan yang perlu dicapai, yang salah satunya telah dipaparkan di atas yaitu Angka Harapan Hidup. Tiga indikator lainnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Balita (AKaBa) dengan kondisi faktual saat ini (tahun 2019) secara umum AKB Kalbar adalah 7 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara untuk AKI di Kalbar dengan angka sebesar 130, kajian per daerahnya yang terbaik dicapai oleh Kabupaten Bengkayang yang hanya menyumbang 2 dari 130 tersebut, sedangkan terburuk terjadi di Kabupaten Ketapang yaitu menyumbang 17 kematian ibu dari 130 kematian ibu di Kalbar per 100.000 kelahiran. Adapun untuk AKaBa kondisi 2019 menunjukkan angka sebesar 7 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.41

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Kalimantan Barat

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	138	141	95	113	95	130
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	7	7	8	8	7
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran	8	8	8	9	8	7

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar, Tahun 2019.

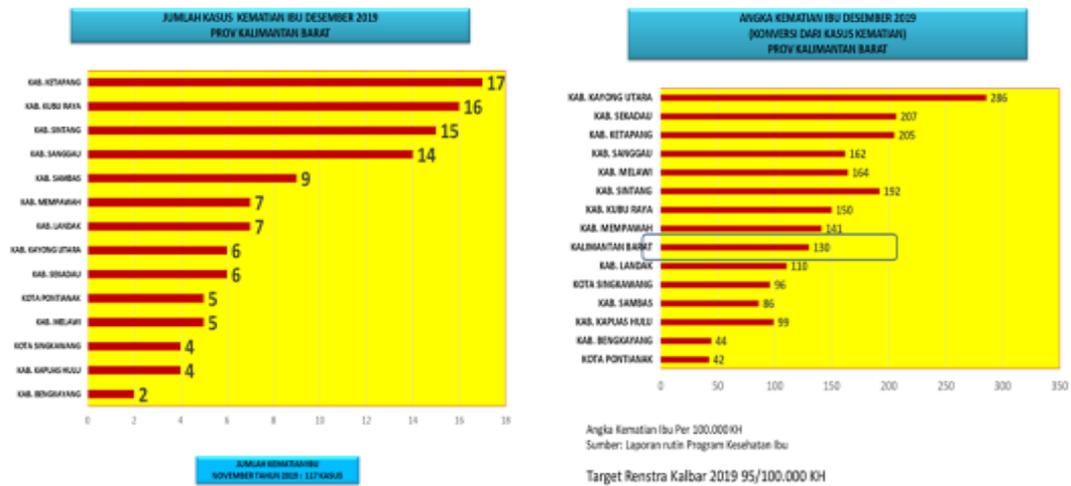
a) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting dari derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 Kelahiran Hidup.

Saat ini, di Indonesia berdasarkan SUPAS 2015 Angka Kematian Ibu berada pada posisi 305/100.000 Kelahiran Hidup sedangkan Kalimantan Barat berada pada posisi 240/100.000 Kelahiran Hidup (BPS, 2010). Untuk mengetahui adanya peningkatan atau penurunan Angka Kematian Ibu di Kalimantan Barat di tahun berjalan dilakukan perhitungan melalui konversi, dari jumlah kasus kematian yang dilaporkan selama 1 (satu) tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah lahir hidup. Jumlah kasus dan angka kematian per kabupaten/kota disajikan dalam grafik di bawah ini: Jumlah Kematian Ibu tahun 2019 di kabupaten/kota berjumlah 117 kasus. Bila dikonversikan diperoleh angka sebesar 130/100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Jumlah kasus kematian terbanyak terjadi di kabupaten Ketapang (17 kasus), Kabupaten Kubu Raya (16 kasus) dan kabupaten Sintang (15 kasus). Sementara bila dilihat di kabupaten/kota berdasarkan Angka konversi maka tiga urutan tertinggi berada di Kayong Utara (286/100.000 KH) diikuti Sekadau (207/100.000 KH) dan terakhir di Ketapang (205/100.000) KH. Adapun penyebab kematian ibu tahun 2019 di jabarkan dalam diagram berikut ini :

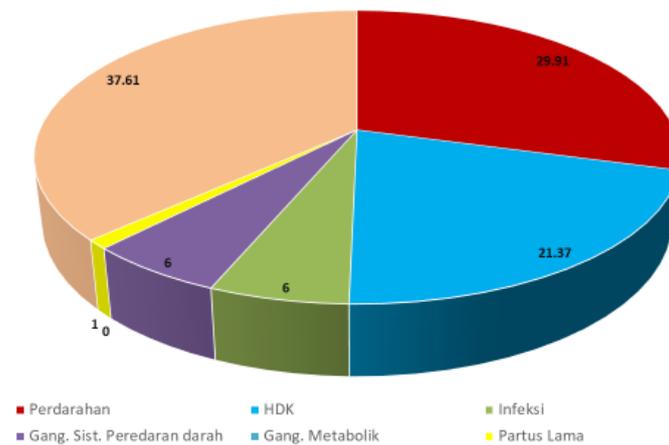
Gambar 2.14

Jumlah Kematian dan Angka Kematian Ibu Tahun 2019



Gambar 2.15

Proporsi Penyebab Kematian Ibu Desember 2019



Berdasarkan penyebab kematian ibu, perdarahan (29,91%) masih menjadi penyebab utama kematian diikuti hipertensi dalam kematian (21,37%), gangguan sistem peredaran darah (6%), infeksi (6%), partus lama (1%) dan sebab lain (37,61%). Kematian karena perdarahan erat hubungannya dengan kondisi gizi ibu saat hamil. Ibu hamil yang menderita anemia dan kurang energi kronis berisiko untuk mengalami perdarahan saat melahirkan dan nifas. Sehingga sangatlah penting deteksi resiko dan pengawasan serta intervensi terkait kasus-kasus gizi pada ibu hamil

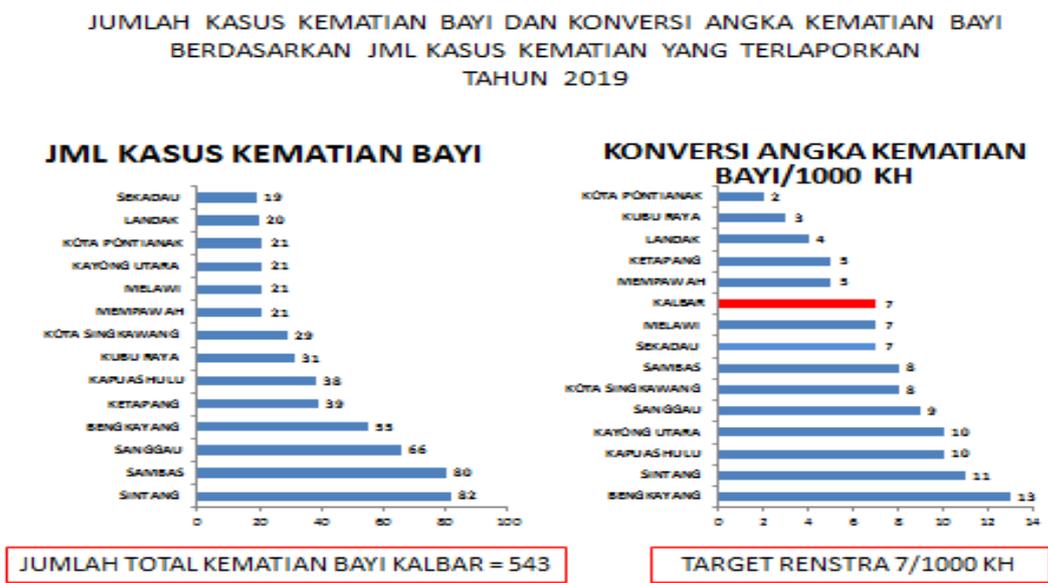
selama masa kehamilannya selain itu perlu ditingkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi adanya faktor resiko pada ibu hamil, peran dokter umum di Puskesmas mengingat kematian ibu juga diperparah oleh penyakit yang diderita ibu sebelum masa kehamilan, mengoptimalkan sistem rujukan. Peran keluarga dalam mengambil keputusan juga memiliki pengaruh yang besar untuk terjadinya keterlambatan dalam proses rujukan ibu.

b) Angka Kematian Bayi (AKB)

Status kesehatan anak merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa. Indikator keberhasilan program kesehatan anak mengacu pada target post MDGs dan pada RPJMN 2015-2019. Kematian bayi dan balita merupakan salah satu indikator yang akan dipantau dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Target SDGs adalah mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah. Seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH. Data SDKI tahun 2017 menunjukkan bahwa kematian neonatal di Indonesia masih 15 per 1.000 KH, kematian Bayi 24 per 1.000 KH dan kematian Balita 32 per 1.000 KH.

Berdasarkan data jumlah kematian dari Kabupaten/Kota tahun 2019 Angka kematian bayi berdasarkan penghitungan konversi dari jumlah kasus kematian yang dilaporkan berada di angka 7/1000 Kelahiran Hidup. Untuk melihat sebaran Jumlah kasus kematian dan konversi angka kematian bayi tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.16



Tahun 2019 jumlah kasus kematian bayi di kabupaten/kota sebantak 543 kasus (Angka konversi 7/1000 Kelahiran Hidup). Tiga urutan tertinggi adalah Kabupaten Bengkayang (13/1000 KH) diikuti Kabupaten Sintang (11/1000 KH), dan Kabupaten Kapuas Hulu (10/1000 KH). Jika dilihat dari jumlah kasus kematian yang terbanyak adalah Kabupaten Sintang (82 kasus), kemudian Kabupaten Sambas (80 kasus) dan Kabupaten Sanggau (66 kasus). Penyebab kasus kematian bayi Provinsi Kalimantan Barat tersebut pada masa neonatal 26,96% disebabkan BBLR, asfiksia

31,57%, Tetanus Neonatorum 0,46%, sepsis 5,53%, kelainan bawaan 8,76%, dan penyebab lainnya 26,73%. Sedangkan penyebab kasus kematian bayi pada masa neonatal adalah pneumonia 21,10%, diare 11,01%, kelainan saluran cerna 0,92% dan penyebab lain-lain 66,97%.

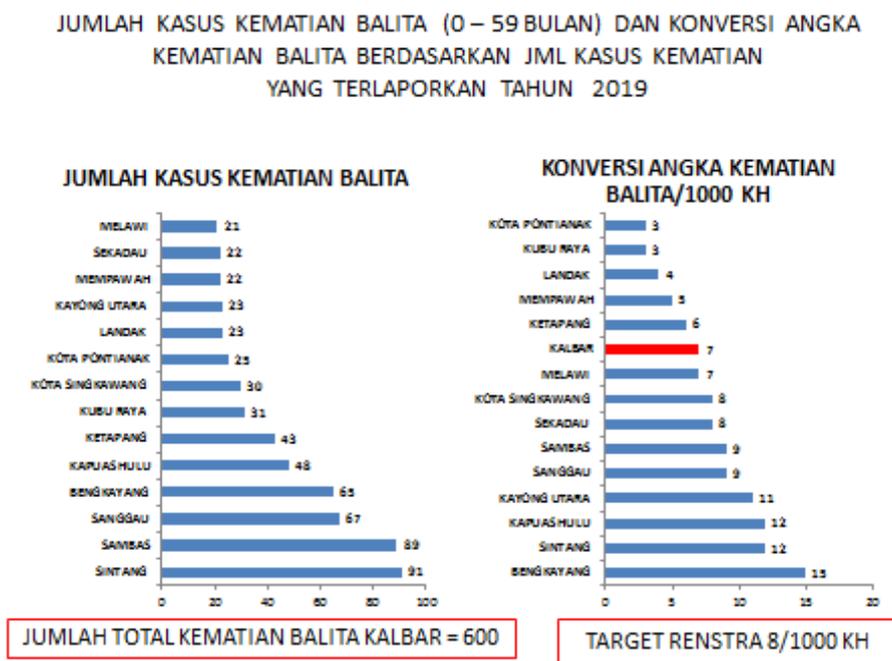
Kegiatan surveilans kesehatan anak merupakan salah satu program kegiatan untuk mengantisipasi permasalahan morbiditas dan mortalitas anak termasuk bayi, dengan system kewaspadaan dini terhadap kejadian penyakit dan kematian serta kondisi yang diprediksi. Berbagai Integrasi program juga dibangun dalam menekan kematian bayi diantaranya melalui program kesehatan yang terkait dengan program kesehatan anak yaitu program gizi, program pengendalian penyakit yang merupakan penyebab langsung maupun tidak langsung terhadap kaematian bayi, program imunisasi melauai program PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi), serta berbagai program terkait lainnya yang mampu menekan kasus kematian bayi, dimulai dari pengelolaan kesejahteraan janin dalam kandungan, melalui Antenatal Care, persalinan ditolong oleh tenaga kompeten, pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terstandar, penanganan kegawatdaruratan neonatal yang optimal.

c) AKBa

Kematian balita merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat. Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan bahwa angka kematian balita di Indonesia masih cukup tinggi bila dibandingkan negara-negara di asia Tenggara, yaitu sebesar 32 per 1000 Kelahiran Hidup (KH).

Berdasarkan data kematian dari Kabupaten/Kota Angka kematian balita berdasarkan penghitungan konversi dari jumlah kasus kematian yang dilaporkan berada di angka 8/1000 Kelahiran Hidup. Untuk melihat sebaran jumlah kasus kematian dan konversi angka kematian balita tahun 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.17



2.3.1.3. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kondisi perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2019 dijelaskan melalui indikator rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat. Capaian tahun 2017 menunjukkan indikator rumah layak huni sebesar 89,59 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk indikator prosentase perumahan sehat, capaian tahun 2017 sebesar 44,31 persen. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 17,03 persen.

Tabel 2.42

Kondisi Perumahan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rumah yang layak huni	%	92,2	89,32	89,83	90,56	89,59
2	Prosentase Perumahan Sehat	%	8,15	12,86	15,94	17,03	44,31

Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat 2017.

Capaian tahun 2018 menunjukkan prosentase rumah tangga yang bersanitasi capaian adalah sebesar 47,52 persen mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 47,36 persen. Sedangkan prosentase Rumah Tangga Air Bersih tahun 2018 sebesar 54,69 persen meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 54,67 persen. Sementara itu Panjang jalan permukiman perkotaan dan perdesaan yang telah dibangun pada tahun 2018 yakni 142.111 Kilometer yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Tabel 2.43

Perkembangan Kondisi Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengguna Rumah Tangga Air Bersih	%	54,54	54,58	54,61	54,67	54,69	66,62
2	Prosentase Rumah Tangga yang Bersanitasi	%	46,72	46,92	47,12	47,36	47,52	61,23
3	Panjang Jalan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Kilometer	82.778	134.797	194.514	296.967	142.111	253.000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Sanitasi adalah perilaku manusia yang disengaja untuk membudayakan kebiasaan hidup bersih dan sehat untuk mencegah manusia terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya dengan harapan bisa menjaga dan memperbaiki tingkat kesehatan manusia. Kondisi pelayanan sanitasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 mencapai 61,23%. Adapun untuk pelayanan sanitasi setiap kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44
Pelayanan Sanitasi Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa) (Jumlah Seluruh Rumah Tangga)	Σ Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Σ Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	Capaian Tahun 2018 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SAMBAS	526,367	131,592	67,509	64,12	51,30
2	MEMPAWAH	255,132	63,783	22,767	44,57	68,94
3	SANGGAU	519,040	129,760	78,784	46,51	60,72
4	KETAPANG	478,108	119,527	23,125	46,06	55,42
5	SINTANG	403,202	100,801	51,014	40,85	64,94
6	KAPUAS HULU	250,400	62,579	45,965	39,34	73,45
7	BENGKAYANG	287,121	71,780	36,610	40,98	51,00
8	LANDAK	394,275	98,569	45,500	48,10	46,16
9	SEKADAU	197,683	49,421	16,484	42,13	74,17
10	MELAWI	234,421	65,734	39,122	63,11	59,52
11	KAYONG UTARA	110,899	27,725	14,198	54,31	60,41
12	KUBU RAYA	604,563	120,913	52,073	46,91	43,07
13	PONTIANAK	764,970	152,994	127,618	56,89	83,41
14	SINGKAWANG	219,061	43,812	17,463	25,02	93,47
	JUMLAH	5,245,242	1,238,992	638,232	48,38	61,23

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat baik untuk minum, maupun mencuci atau mandi serta untuk keperluannya lainnya. Kebutuhan air bersih di Kalimantan Baat pada umumnya masih bersumber pada air sungai, air danau, dan air hujan. Kebutuhan air bersih di Kalimantan Barat pada umumnya disalurkan dan dikelola oleh PDAM, mapapun oleh masyarakat sendiri. Pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kalimantan Barat belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, karena tidak semua wilayah di Kalbar dapat diakses oleh air bersih. Cakupan pelayanan air bersih di Kalimantan Barat pada tahun 2019 mencapai 66,62%.

Tabel 2.45
Data Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

1	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa) (Jumlah Seluruh Rumah Tangga)	Σ Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Σ Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Capaian Tahun 2018 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SAMBAS	526,367	105,273	64,879	61,59	61,63
2	MEMPAWAH	255,132	51,026	29,031	56,89	60,05
3	SANGGAU	519,040	103,808	74,680	61,78	71,94
4	KETAPANG	478,108	95,622	18,705	57,10	61,67
5	SINTANG	403,202	80,640	22,962	37,44	47,39
6	KAPUAS HULU	250,400	62,579	48,763	28,95	77,92
7	BENGKAYANG	287,121	57,424	48,821	53,47	85,02
8	LANDAK	394,275	78,855	58,032	39,00	73,59
9	SEKADAU	197,683	51,759	43,386	51,00	57,88
10	MELAWI	234,421	65,734	46,665	45,14	70,99
11	KAYONG UTARA	110,899	22,180	4,356	61,07	61,35
12	KUBU RAYA	604,563	120,913	57,621	51,71	47,66

1	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa) (Jumlah Seluruh Rumah Tangga)	Σ Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Σ Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Capaian Tahun 2018 (%)	Capaian Tahun 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	PONTIANAK	764,970	152,994	128,454	75,55	83,96
14	SINGKAWANG	219,061	43,812	17,413	73,68	75,10
	JUMLAH	5,245,242	1,092,623	663,772	55,20	66,62

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

a. Jumlah Kabupaten yang Tertangani Infrastruktur Jalan Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun

Jumlah Kabupaten yang Tertangani Infrastruktur Jalan Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun pada tahun 2018 sebanyak 12 kabupaten dan untuk tahun 2019 dengan target sebanyak 12 kabupaten sudah tercapai.

b. Jumlah Permukiman Perkotaan yang Tertangani Infrastrukturnya

Sudah mencapai target sebanyak 2 Kota dengan realisasi luas terbangun seluas 638 m² dalam bentuk jalan, drainase, lapangan *volley*, *play group*.

c. Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menghendaki bahwa perumahan dan kawasan pemukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan. Dinas Perkim mempunyai tugas dan fungsi yang strategis, bagaimana penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang kumuh, bagaimana penanganan rumah tidak layak huni dan bagaimana meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana dan utilitas. Pada tahun 2019 penangan rumah tidak layak huni sebagai berikut:

Tabel 2.46
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah	Jumlah RTLH	Penanganan RTLH Tahun 2018	Penanganan RTLH Tahun 2019	Capaian sampai Tahun 2019	Yang Belum Tertangani
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sambas	192.028	42.634	1.210	514	2.069	40.565
2	Mempawah	65.633	8.427	300	390	1.325	7.102
3	Sanggau	95.348	44.641	747	414	1.666	42.975
4	Ketapang		13.136	900	355	1.805	11.331
5	Sintang	68.985	17.604	1.023	1.262	2.984	14.620
6	Kapuas Hulu	46.998	15.000	953	1.252	2.815	12.185
7	Bengkayang	47.717	4.197	658	385	2.710	1.487
8	Landak	79.496	34.570	1.185	437	2.343	32.227
9	Sekadau	48.172	8.485	200	399	840	7.645
10	Melawi	59.156	14.981	443	1.093	2.059	12.922
11	Kayong Utara	24.875	4.745	598	293	1.052	3.693
12	Kubu Raya	136.423	6.618	487	1.330	2.380	4.238
13	Pontianak	149.937	2.040	320	566	1.478	562
14	Singawang	53.326	4.017	561	434	1.659	2.358
	Jumlah	1.068.094	221.095	9.585	9.124	27.185	193.910

Sumber : SNVT Penyediaan Perumahan Tahun 2019.

2.3.1.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2019 dijelaskan melalui beberapa indikator berikut :

a. Jalan dan Jembatan

Pada tahun 2017 kondisi Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap yakni sebesar 83,54 persen dari total Panjang jalan provinsi sepanjang 1.534,75 Kilometer. Sedangkan dari hasil pembaharuan data yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap adalah 762,98 Kilometer atau 49,71 persen. Hal ini karena di lakukan kembali perhitungan dan evaluasi, bahwa angka tersebut belum tepat sehingga dipakai angka 49,71 persen di awal RPJMD pada tahun 2018. Untuk Jumlah Jembatan yang dikelola pada tahun 2018 yakni sebanyak 906 unit dengan total Panjang jembatan yakni 11.392,74 Meter.

Tabel 2.47

Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2019

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Kilometer	1.260,25	1.266,63	1.255,78	1.282,18	762,98	871,847
2	Panjang Jalan Provinsi	Kilometer	1.562,30	1.562,30	1.562,30	1.534,75	1.534,75	1,534,75
3	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Persen	80,67	81,07	80,38	83,54	49,71	56,81
4	Panjang Jembatan Provinsi	Meter	13.807,59	13.807,59	11.392,74	11.392,74	11.392,74	15.534,75
5	Jumlah Jembatan	Unit	1.179	1.179	906	906	906	1215

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

1. Peningkatan Persentase Kemantapan Jalan

Panjang jalan yang berstatus jalan provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 mencapai 1.534,75 km. Adapun untuk jenis permukaannya, jalan yang sudah di aspal mencapai 929,11 km (60,54%) jalan yang jenis permukaannya beton mencapai 23,41 km (1,53%), dan jalan yang masih kerikil/tanah mencapai 582,23 km (37,94%). Sedangkan jalan yang dalam kondisi baik mencapai 238,89 km (15,57%), jalan dalam kondisi sedang mencapai 632,96 km (41,24%), jalan dalam kondisi rusak ringan mencapai 380,07 km (24,76%) dan jalan dalam kondisi rusak berat mencapai 282,83 km (18,43). Kemantapan jalan provinsi pada tahun 2019 mencapai 56,81% dan jalan tidak mantap provinsi mencapai 43,19%. Berikut tabel jenis dan kondisi jalan di Kalimantan Barat Tahun 2019 :

Tabel 2.48

Jenis permukaan Jalan Tahun 2019

No.	Jenis permukaan	Panjang (km)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aspal	929,110	60,54

No.	Jenis permukaan	Panjang (km)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Beton	23,406	1,53
3	Kerikil/Tanah	582,234	37,94
	Total	1.534,75	100,00

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar Tahun 2020. (BPS belum release untuk tahun 2019).

Tabel 2.49
Kondisi Jalan Tahun 2019

No	Kondisi permukaan	Panjang (km)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Baik	238,886	15,57
2	Sedang	632,961	41,24
3	Rusak Ringan	380,069	24,75
4	Rusak Berat	282,834	18,43
	Total	1.534,75	100,00

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar Tahun 2020. (BPS belum release untuk tahun 2019).

Tabel 2.50
Kondisi Jalan Tahun 2018 dan 2019

No	Kondisi permukaan	Capaian Tahun 2018		Capaian Tahun 2019	
		Panjang (km)	Persentase	Panjang (km)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mantap	762,92	49,71	871,847	56,81
2	Tidak Mantap	771,83	50,29	662,903	43,19
	Total	1.534,75	100,00	1.534,75	100,00

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar Tahun 2020. (BPS belum release untuk tahun 2019).

b. Sumber Daya Air

1) Jenis dan Kriteria Status Daerah Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, jenis dan kriteria status Daerah Irigasi diklasifikasikan sebagai berikut :

Berdasarkan jenisnya, Daerah Irigasi terdiri dari :

- a. Daerah Irigasi Permukaan;
- b. Daerah Irigasi Air Bawah Tanah;
- c. Daerah Irigasi Rawa;
- d. Daerah Irigasi Pompa;
- e. Daerah Irigasi Tambak.

Kriteria penetapan status Daerah Irigasi, yakni sebagai berikut :

- a. Kewenangan Pemerintah Pusat
 - Luasan > 3.000 Ha;
 - Lintas Negara;
 - Lintas Provinsi.
- b. Kewenangan Pemerintah Provinsi
 - Luasan 1.000 - 3.000 Ha;
 - Lintas Kabupaten/Kota.

c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

- Luasan < 1.000 Ha.

2) Daerah Irigasi Provinsi

Luas Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenisnya, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.49 berikut :

Tabel 2.51

Kondisi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No.	Jenis Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi	Luasan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	12	6.765
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	35	54.520
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1	1.350
Total		48	62.635

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar, Tahun 2019.

3) Kondisi Irigasi Provinsi

Kondisi irigasi diklasifikasikan, sebagai berikut :

1. Kondisi baik : Tingkat kerusakan < 10%
2. Kondisi rusak ringan : Tingkat kerusakan 10 - 20%
3. Kondisi rusak sedang : Tingkat kerusakan 21 - 40%
4. Kondisi rusak berat : Tingkat kerusakan > 40%

Kondisi irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per Tahun 2019 berdasarkan jenisnya diuraikan pada 2.50 di bawah.

Tabel 2.52

Kondisi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

No.	Jenis Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Kondisi per Tahun 2019							
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	6.765	2.613,5	38,63	2.404	35,55	356,5	5,26	1.391	20,56
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	54.520	30.407	55,82	6.795	12,45	6.860	12,56	10.459	55,82
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1.350	675,00	50,00	202,50	15,00	67,50	5,00	405,00	50,00
Total		62.635	33.695,5	53,80	9.401,5	15,01	7.284	11,62	12.255	19,57

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar.

Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik tahun 2019 sebesar 53,8%. Pengelolaan jaringan daerah Irigasi rawa, daerah jaringan irigasi dan daerah jaringan irigasi tambak di Kalimantan Barat mempunyai peranan yang strategis, mengingat jaringan tersebut berperan dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.

Secara umum luas jaringan irigasi pada tahun 2019 mencapai 62.635 ha dengan kondisi baik mencapai 33.695 ha (53,80%), kondisi rusak ringan mencapai 9.401,5 (15,01%), kondisi rusak sedang mencapai 7.284 (11,62%) dan kondisi rusak berat mencapai 12.555 ha (19,57%).

Luas jaringan irigasi rawa pada tahun 2019 mencapai 54.520 ha, dengan kondisi baik mencapai 30.407 ha, kondisi rusak ringan mencapai 6.795 ha, kondisi rusak sedang mencapai 6.860 ha dan kondisi rusak berat mencapai 10.459 ha. Sedangkan luas jaringan daerah Irigasi Permukaan pada tahun 2019 mencapai 6.765 ha, dengan kondisi baik mencapai 2.613.5 ha, kondisi rusak ringan mencapai 2.404 ha, kondisi rusak sedang mencapai 3.56.5 ha dan kondisi rusak berat mencapai 1.391 ha dan untuk luas jaringan daerah irigasi tambak pada tahun 2019 mencapai 1.350 ha, dengan kondisi baik mencapai 675 ha, kondisi rusak ringan mencapai 67.5 ha, kondisi rusak sedang mencapai 3.56.5 ha dan kondisi rusak berat mencapai 405 ha.

Tabel 2.53

Kondisi Irigasi Rawa di Kalbar Tahun 2019

No	Kondisi Daerah Irigasi Rawa	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Baik	28.784	30.407
2	Rusak Ringan	6.795	6.795
3	Rusak Sedang	6.860	6.860
4	Rusak Berat	12.082	10.459
	Jumlah	54.520	54.520

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Tabel 2.54

Kondisi Irigasi Permukaan di Kalbar Tahun 2019

No	Kondisi Daerah Irigasi Permukaan	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Baik	2.433	2.613.5
2	Rusak Ringan	2.404	2.404
3	Rusak Sedang	459	3.56.5
4	Rusak Berat	1.469	1.391
	Jumlah	6.765	6.765

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Tabel 2.55

Kondisi Irigasi Tambak di Kalbar Tahun 2019

No	Kondisi Daerah Irigasi Tambak	Capaian 2018 (Ha)	Capaian 2019 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Baik	675	675
2	Rusak Ringan	203	202.5
3	Rusak Sedang	68	67.5
4	Rusak Berat	405	405
	Jumlah	1.350	1.350

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Indikator lainnya untuk sumber daya air digambarkan melalui Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir, kapasitas tersedianya air baku

untuk memenuhi kebutuhan pokok. Untuk capaian selama periode 2014-2018 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.56

Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2019

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	%	56,20	40,05	39,85	35,90	29,57	50,64
2	Kapasitas tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok	Liter/detik	2	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar, Tahun 2019.

Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir tahun 2018 sebesar 46,76% sedangkan capaian tahun 2019 sebesar 50,64%. Capaian tahun 2019 tersebut telah mencapai target (target 2019 49,47%).

c. Bangunan Gedung Pemerintah yang Terbangun (%)

Persentase bangunan gedung Pemerintah yang terbangun tahun 2018 sebesar 14,39% sedangkan capaian tahun 2019 sebesar 18,56%.

d. Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang Bersertifikat

Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang Bersertifikat tahun 2018 sebanyak 67,92% sedangkan untuk tahun 2019 tidak dilakukan pensertifikatan.

2.3.1.5. Sosial

a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi

Fasilitas sosial disediakan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Pemerintah melalui Dinas Sosial menyediakan fasilitas yang dimaksud. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kalimantan Barat berupa Panti Asuhan Anak Berbasis Masyarakat, UPT Panti Sosial Anak, Panti Jompo Berbasis Masyarakat, UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia, dan Rumah Rehabilitasi NAPZA.

Tabel 2.57

Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Panti Asuhan Anak Berbasis Masyarakat	Unit	139	118	120	156	131	118	139	0,57
2	UPT Panti Sosial Anak	Unit	1	1	1	1	1	1	1	0
3	Panti Jompo Berbasis Masyarakat	Unit	2	3	3	2	2	4	9	1.1

4	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia	Unit	0	0	0	0	2	2	2	0
5	Rumah Rehabilitasi NAPZA	Unit	1	1	1	1	5	5	5	400
Jumlah seluruh sarana sosial		Unit	143	123	125	160	143	130	156	80,13

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2019.

Dapat dilihat dalam Tabel 2.56 bahwa dalam kurun waktu 2013-2019 jumlah sarana sosial di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 26. Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yang tersedia di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Panti sosial yang berbasis masyarakat dan panti sosial milik pemerintah daerah dengan status sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Tabel 2.58

Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun		Keterangan
			2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Panti Asuhan Anak	Unit	118	139	Swasta
2.	Panti Asuhan Disabilitas	Unit	3	5	Swasta
3.	Panti Jompo	Unit	4	9	Swasta
4.	Rumah Rehabilitasi NAPZA	Unit	5	5	Swasta
5.	Rumah Singgah	Unit	0	0	Swasta
6.	Panti Sosial Anak	Unit	1	1	Pemerintah
7.	Panti Sosial Lanjut Usia	Unit	2	2	Pemerintah
	Jumlah seluruh sarana sosial	Unit	133	161	

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2019.

b. PKMS yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.59

PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	jiwa	36.372	47.258	54.657	3.822	4.356	1.532	2.196	- 56.96
2.	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	jiwa	351.368	317.817	312.244	327.929	327.889	1.532	2.196	-581.96
3.	PMKS yang memperoleh bantuan	Persen	10,35	14,87	17,50	1,16	1,33	100	100	14.95

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2019.

Pada Tabel 2.59 dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2013-2019 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat di tahun 2013 sampai 2015. Tingginya bantuan sosial pada tahun 2013-2015 dikarenakan pada tahun itu terjadi bencana alam (banjir serta kebakaran lahan dan hutan) yang menimbulkan jumlah korban yang cukup besar. Pada tahun 2013, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 10,35 persen, dan mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2019 menjadi 100 persen. Jumlah penyaluran Bantuan Sosial Rastra di Provinsi Kalimantan Barat periode Januari-September 2018 sebesar 18.642.260 kg atau telah mencapai 93,70 % dari pagu pada periode yang sama sebesar 19.895.940 kg. Masih banyaknya jumlah PMKS di Provinsi Kalimantan Barat mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.60

PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2019

No	Indikator	Satuan	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	jiwa	1.532	2.196
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	jiwa	1.532	2.196
3	PMKS yang memperoleh bantuan	Persen	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2019.

d. Cakupan Anak Terlantar yang Dibina

Sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, seluruh anak terlantar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat seharusnya menjadi tanggungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui dinas-dinas terkait. Berikut inimerupakan data jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2019.

Tabel 2.61

Anak Terlantar yang Dibina di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)
1.	Anak terlantar yang dibina	Jiwa	7.820	7.839	8.019	7.900	6.987	-0,09

Sumber: Dinas Sosial, 2018.

Data pada Tabel 2.61 menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2013-2019 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak 7.820 jiwa dan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 6.987 jiwa pada tahun 2017. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.62

Data Sebaran Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Per September 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sambas	1.181	25,53
2.	Bengkayang	11	0,22
3.	Landak	379	8,19
4.	Mempawah	179	3,87
5.	Sanggau	716	15,48
6.	Ketapang	672	14,53
7.	Sintang	10	0,22
8.	Kapuas Hulu	10	0,22
9.	Sekadau	3	0,06
10.	Melawi	16	0,35
11.	Kayong Utara	5	0,11
12.	Kubu Raya	431	9,32
13.	Singkawang	795	11,65
14.	Pontianak	474	10,25
JUMLAH		4.626	100

Sumber: Dinas Sosial, 2020.

Berdasarkan data di atas sebaran penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Per September 2020 terbanyak di Kabupaten Sambas yakni 1.181 orang (25,53%) disusul Kota

Singkawang 795 orang (11,65%) dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Sekadau yakni 3 orang (0,06%).

Sementara itu penerima baru anak terlantar di Kalimantan Barat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.63
Anak Terlantar Baru Penerima Bantuan (2020*)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sambas	2	14,26
2	Bengkayang	0	0
3	Landak	2	14,26
4	Mempawah	2	14,26
5	Sanggau	0	0
6	Ketapang	0	0
7	Sintang	0	0
8	Kapuas Hulu	0	0
9	Sekadau	0	0
10	Melawi	0	0
11	Kayong Utara	0	0
12	Kubu Raya	6	42,86
13	Singkawang	0	0
14	Pontianak	2	14,26
JUMLAH		14	100

Sumber : Dinas Sosial, 2020.

* Data Sementara

Berdasarkan data pada tabel 2.63 di atas anak terlantar baru penerima bantuan ada di Kabupaten Kubu Raya yakni sebanyak 14 LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) atau 42,86% dari keseluruhan penerima bantuan baru pada tahun 2020 dengan jumlah anak sebanyak 368 anak dengan nominal bantuan sebesar Rp 70 juta berupa sembako. Kabupaten Sambas, Landak, Mempawah, dan Kota Pontianak sama sama terdapat 2 paket bantuan yang sudah dibagikan kepada penerima bantuan.

2.3.1.6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Keamanan dan Ketertiban Umum

Gambaran kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai pelaksanaan urusan wajib bidang pelayanan dasar digambarkan melalui perkembangan jumlah aparatur pamong praja, aparatur linmas serta jumlah kasus unjuk rasa seperti termuat dalam tabel 2.64 berikut :

Tabel 2.64

Perkembangan Kondisi Aparatur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah Aparat Pamong Praja	Orang	105	108	102	109	113	110	101
Jumlah Aparat Linmas	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	4.078	19528	22652
Jumlah Petugas Patroli Satpol PP	Orang	90	91	87	92	95	93	84
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	Orang	n/a	n/a	24.045	24.045	23.045	12	12

Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Politik	Kasus	15	10	8	1	10	-	4
Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Ekonomi	Kasus	30	35	38	21	40	-	2
Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Agama	Kasus	0	0	0	2	0	-	-

Sumber : SIPD - Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar dan Polda Kalbar.

b. Bencana

Kalimantan Barat dengan letak geografis yang berada di daerah tropis dan pada pertemuan dua samudera dan dua benua membuat wilayah ini rawan akan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim dan abrasi yang juga dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana yang dilakukan perlu diawali dengan pemahaman risiko bencana yang ada melalui kajian risiko bencana yang ada, untuk kemudian dijadikan dasar perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana.

Risiko Bencana merupakan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunungapi, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya.

Indeks Risiko Bencana Indonesia merupakan penilaian tingkat risiko bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tingkat risiko bencana dihitung berdasarkan indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas di suatu daerah. Melalui informasi tingkat risiko bencana tersebut, para pelaku penanggulangan bencana dapat menentukan upaya prioritas di daerah masing-masing untuk meningkatkan kapasitas dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas ini, pada akhirnya dapat menurunkan indeks risiko bencana di suatu daerah. Indeks Risiko Bencana Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel xxx di bawah ini.

Tabel 2.65

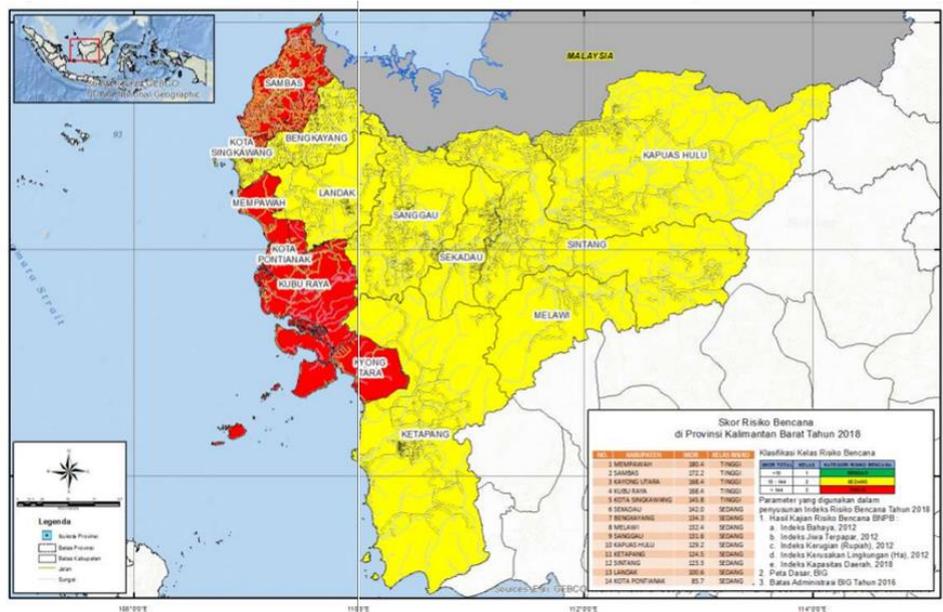
Indeks Resiko Bencana Kalimantan Barat Tahun 2017, 2018 dan 2019

No.	Kabupaten/ Kota	Tahun		
		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	KALIMANTAN BARAT	141,48	138,49	131,40
1	Kab. Sambas	180,40	172,20	120,54
2	Kab. Bengkayang	153,95	134,33	117,96
3	Kab. Mempawah	180,40	180,40	126,28
4	Kab. Landak	107,13	100,64	70,45
5	Kab. Kubu Raya	168,40	168,40	117,88
6	Kab. Sanggau	131,60	131,60	92,12
7	Kab. Sekadau	142,00	142,00	99,40
8	Kab. Sintang	125,56	123,26	86,28
9	Kab. Melawi	132,40	132,40	92,68
10	Kab. Kapuas Hulu	129,23	129,23	90,13
11	Kab. Ketapang	124,15	124,47	87,13

12	Kab. Kayong Utara	168,40	168,40	117,88
13	Kota Pontianak	92,87	85,66	75,05
14	Kota Singkawang	144,19	145,82	102,07

Sumber : IRBI, 2018 dan InaRISK, 2019.

Gambar 2.18
Peta Indeks Resiko Bencana Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018
(Sumber : IRBI 2018 BNPB Tahun 2019)



c. Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

Kondisi Penanggulangan Bencana digambarkan melalui Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana yang meliputi informasi ketersediaan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 2, roda 4, roda >4, kapal penyelamat, alat komunikasi, peralatan kesehatan, mobil tangki air, MCK mobile, dan Perlengkapan pendukung hunian sementara. Informasi dimaksud secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.66
Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kendaraan Roda 2	Unit	4	4	6	6	6	6	6
Kendaraan Roda 4	Unit	5	5	5	5	5	6	6
Kendaraan Roda > 4	Unit	5	5	5	5	5	5	5
Kapal Penyelamat	Unit	4	4	4	4	4	4	4
HandyTalky	Unit	14	14	14	14	14	14	14
Mobil Ambulance	Unit	1	1	1	1	1	1	1
Mobil Tangki Air	Unit	1	1	1	1	1	1	1
MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Unit	1	1	1	1	1	1	1

Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tenda Hunian Sementara	Unit	26	26	26	26	26	26	26
Dapur Umum	Unit	1	1	1	1	1	1	1
Generator	Unit	4	4	4	4	4	6	6

Sumber : SIPD – BPBD Prov. Kalbar.

d. Indeks Kebebasan Sipil

Tabel 2.67
Indeks Kebebasan Sipil

No	Indikator	Capaian (poin)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Kebebasan Sipil	93,87	* 97,35

Sumber: Badan Kesbangpol Prov. Kalbar, Tahun 2020.

(* data sementara, capaian tahun 2019 belum rilis dari BPS)

e. Masyarakat yang memperoleh layanan dalam menegakkan PERDA/PERKADA

Tabel 2.68
Masyarakat Yang Memperoleh Layanan Dalam Menegakkan PERDA/PERKADA

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masyarakat yang memperoleh layanan dalam menegakkan PERDA/PERKADA	100 %	100 %

Sumber: Satpol PP Prov. Kalbar, Tahun 2020.

f. Orang/Kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi

Tabel 2.69
Orang/Kelompok Masyarakat Miskin Yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi Dan Non Litigasi

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masyarakat yang memperoleh layanan dalam menegakkan PERDA/PERKADA	100 %	92,25 %

Sumber: Biro Hukum Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

g. Persentase Pembentukan Pokmas/Destana di daerah rawan bencana

Capaian kinerja penanggulangan bencana yang digambarkan melalui prosentase pembentukan kelompok masyarakat/desa tanggub bencana di daerah rawan bencana pada tahun 2019 adalah sebesar 28,57 % (target 2019 sebesar 27,84%).

h. Persentase jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan

Capaian kinerja penanggulangan bencana yang digambarkan melalui prosentase jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan kebencanaan pada tahun 2019 adalah sebesar 23,75% (target 2019 sebesar 22,40%).

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Gambaran kondisi urusan tenaga kerja selain telah digambarkan sebelumnya melalui Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diamati dari perkembangan jumlah balai latihan kerja, jumlah pelatihan kerja jumlah tenaga kerja di luar negeri serta jumlah perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing seperti termuat dalam tabel 2.69 berikut :

Tabel 2.70
Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat

Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah Balai Latihan Kerja	Lembaga	7	7	7	7	7	7	7
Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja	Orang	1900	1616	2808	3024	888	2000	2214
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terakreditasi	Lembaga	0	8	6	3	5	11	5
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi	Lembaga	42	42	42	42	42	49	54
Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri**								
1. Terdidik	Orang	80	221	142	175	177	1.814	1.421
2. Tidak Terdidik	Orang	576	1114	685	952	857	N/A	N/A
Jumlah Kasus PMI di Luar Negeri	Kasus	852	911	1023	958	1199	906	198
Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing	Perusahaan	41	36	38	50	63	57	40

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, Tahun 2019.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah tingkat partisipasi angkatan kerja dimana unsurnya jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja diatas 15 tahun ke atas. Dapat juga dikatakan bahwa TPAK sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja.

TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Tabel 2.71
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Agustus 2018-2019

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
	2018	2019	+/-
(1)	(2)	(3)	(4)
Sambas	71.29	71.49	0.20
Bengkayang	75.96	73.23	-2.73
Landak	74.46	68.39	-6.07
Mempawah	64.96	62.98	-1.98
Sanggau	72.60	68.97	-3.63
Ketapang	66.20	65.36	-0.84
Sintang	71.64	71.77	0.13
Kapuas Hulu	75.93	76.93	1.00
Sekadau	76.40	77.19	0.79
Melawi	73.55	74.37	0.82
Kayong Utara	65.64	66.17	0.53
Kuburaya	62.22	64.68	2.46
Pontianak	61.19	61.62	0.43
Singawang	61.07	66.97	5.90
Kalimantan Barat	68.65	68.30	-0.35

Sumber: BRS-BPS-Kalbar 2019

Tabel 2.72

Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Terbanyak dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Agustus 2018-2019

Kab/Kota	Angkatan Kerja						Bukan Angk. Kerja	
	Bekerja		Pengangguran		Jumlah		2018	2019
	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sambas	256.560	259.273	8.873	9.640	265.433	268.913	106.885	107.238
Bengkayang	128.501	125.863	3.163	3.506	131.664	129.369	41.666	47.288
Landak	190.837	175.916	4.477	4.977	195.314	180.893	67.007	83.620
Mempawah	111.942	112.154	8.261	6.141	120.203	118.295	64.828	69.534
Sanggau	238.055	228.488	6.024	7.244	244.079	235.732	92.129	106.078
Ketapang	230.233	228.921	7.685	10.855	237.918	239.776	121.484	127.065
Sintang	203.638	205.130	4.870	6.782	208.508	211.912	82.544	83.364
Kapuas Hulu	138.881	142.707	2.223	3.602	141.104	146.309	44.731	43.874
Sekadau	105.926	108.270	3.048	3.506	108.974	111.776	33.656	33.030
Melawi	104.613	108.663	3.401	2.731	108.014	111.394	38.843	38.395
Kayong Utara	48.743	50.031	1.993	2.083	50.736	52.114	26.557	26.649
Kuburaya	239.325	251.770	12.698	15.006	252.023	266.776	153.052	145.691
Pontianak	261.653	271.754	30.272	27.311	291.925	299.065	185.121	186.242
Singawang	87.974	100.075	7.530	6.888	95.504	106.963	60.880	52.763
Kalbar	2.346.881	2.369.015	104.518	110.272	2.451.399	2.479.287	1.119.383	1.150.831

Sumber : BRS – BPS Kalbar, 2019.

Tabel 2.73

Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat

Variabel	Satuan	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Balai Latihan Kerja	Lembaga	7	7
Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja	Orang	2,000	2,214
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terakreditasi	Lembaga	11	5
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi	Lembaga	49	54
Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri**			
1. Terdidik	Orang	1,814	1,421
2. Tidak Terdidik	Orang	n/a	n/a
Jumlah Kasus TKI di Luar Negeri	Kasus	906	198
Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing	Perusahaan	57	40

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar, 2020.

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2018 IPG Kalimantan Barat sebesar 86,74 mengalami peningkatan 2,35 poin dibandingkan kondisi 2013 sebesar 84,39. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian dari tahun 2013 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dari 58,78 pada tahun 2013 menjadi 64,47 pada tahun 2019. Akan tetapi capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional.

Tabel 2.74

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	Kalimantan Barat	Indonesia	Kalimantan Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	84,39	90,19	58,78	70,46
2014	84,72	90,34	64,10	70,68
2015	85,61	91,03	64,44	70,83
2016	85,77	90,82	64,37	71,39
2017	86,28	90,96	64,46	71,74
2018	86,74	90,99	64,47	72,10
2019	86,81	91,07	-	-

Sumber : Dinas PPPA Prov. Kalbar (Data BPS), Tahun 2019.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila IPG=IPM maka dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya bila IPG < IPM maka terjadi kesenjangan gender. Sedangkan IDG merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel 2.75

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Barat dan Nasional

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	Kalimantan Barat	Nasional	Kalimantan Barat	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	86,28	90,96	64,46	71,74
2018	86,74	90,99	64,47	72,10
2019	86,81	91,07	-	-

Sumber : BPS Nasional, data diolah.

Tabel 2.76

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
NASIONAL	90.99	91.07
KALIMANTAN BARAT	86.74	86.81
Sambas	86.96	86.97
Bengkayang	82.81	82.82
Landak	87.90	87.92
Mempawah	87.76	87.78
Sanggau	80.59	80.92
Ketapang	88.41	88.52
Sintang	86.29	86.50
Kapuas Hulu	84.38	84.74
Sekadau	82.07	82.40
Melawi	79.75	80.08
Kayong Utara	85.19	85.73
Kubu Raya	84.57	84.60
Kota Pontianak	93.32	93.81
Kota Singkawang	91.91	92.21

Sumber : BPS Nasional, data diolah.

Tabel 2.77

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Regional Kalimantan

IDG	TAHUN	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
INDONESIA	71.74	72.10
Kalimantan Barat	64.46	64.47
Kalimantan Tengah	79.36	77.03
Kalimantan Selatan	67.56	71.31
Kalimantan Timur	56.64	57.53
Kalimantan Utara	61.09	69.53

Sumber : BPS Nasional, data diolah (2019 belum tersedia).

2.3.1.9. Pangan

Total konsumsi energi, protein maupun skala pola pangan harapan pada tahun 2019 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.78
Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2013-2019

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-Rata Konsumsi Energi	Kal/Kap/Hari	1781,34	1760,62	1893,8	1911	1833,33	1.926	1.926
Rata-Rata Konsumsi Protein	Gram/Kap/Hari	54,40	54,00	53,70	54,50	56,30	1.953	1.953
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		-	82,8	77,8	79,2	83,5	79,43	79,90

Sumber: SIPD - Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Gambar ketersediaan beras sebagai salah satu konsumsi pangan utama masyarakat di Kalimantan Barat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Ketersediaan Beras (Ton) Per Kab/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2014-2019

No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sambas	171.158	158.482	156.322	157.383	81.090	99.247
2	Bengkayang	68.679	44.470	48.741	53.902	13.669	21.336
3	Landak	101.863	113.959	110.696	144.647	47.440	60.536
4	Mempawah	39.039	40.379	43.967	55.385	30.939	40.057
5	Sanggau	58.932	74.026	101.139	105.792	30.802	50.104
6	Ketapang	47.316	45.236	56.843	62.682	36.631	64.061
7	Sintang	53.948	41.155	45.128	45.301	9.416	21.055
8	Kapuas Hulu	29.015	21.091	31.179	31.222	12.652	14.459
9	Sekadau	15.343	14.899	17.803	22.910	12.989	20.276
10	Melawi	14.625	15.318	15.063	14.632	2.416	6.881
11	Kayong Utara	39.280	26.881	32.130	30.075	27.160	24.939
12	Kubu Raya	113.557	99.806	85.397	95.321	54.412	68.539
13	Kota Pontianak	253	257	411	469	507	278
14	Kota Singkawang	6.314	9.715	9.985	9.427	5.975	7.244

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar, Tahun 2019.

Tabel 2.80
Data Konsumsi Beras Per Kabupaten Se Kalimantan Barat Tahun 2014-2019

No	KAB/KOTA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sambas	72.342	65.332	60.322	48.678	49.794	50.139
2	Bengkayang	32.404	29.800	27.824	22.707	23.496	23.890
3	Landak	49.106	44.662	41.569	33.800	34.836	35.312
4	Mempawah	34.721	31.444	29.238	23.730	24.429	24.729
5	Sanggau	61.086	55.526	51.709	42.063	43.379	44.008
6	Ketapang	64.597	59.446	55.595	45.498	47.120	47.991
7	Sintang	54.379	49.505	46.093	37.486	38.646	39.194
8	Kapuas Hulu	33.453	30.723	28.696	23.408	24.213	24.634
9	Sekadau	26.689	24.153	22.417	18.167	18.659	18.866
10	Melawi	26.759	24.478	22.819	18.592	19.194	19.506
11	Kayong Utara	14.372	13.173	12.293	10.026	10.368	10.549
12	Kubu Raya	74.976	68.116	63.581	51.732	53.375	54.220
13	Kota Pontianak	83.225	75.885	70.761	57.623	59.621	60.521
14	Kota Singkawang	28.136	25.927	24.239	19.786	20.480	20.862

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar, Tahun 2019.

Tabel 2.81
Rasio Ketersediaan Pangan Dan Konsumsi Per Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat
Tahun 2014-2017

No	KAB/KOTA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sambas	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
2	Bengkayang	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	DEFISIT	DEFISIT
3	Landak	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
4	Mempawah	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
5	Sanggau	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	DEFISIT	SURPLUS
6	Ketapang	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS	DEFISIT	SURPLUS
7	Sintang	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	DEFISIT	DEFISIT
8	Kapuas Hulu	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS	DEFISIT	DEFISIT
9	Sekadau	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	DEFISIT	SURPLUS
10	Melawi	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT
11	Kayong Utara	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
12	Kubu Raya	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
13	Kota Pontianak	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT
14	Kota Singkawang	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar, Tahun 2019.

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Konsumsi pangan masyarakat tahun 2019 di Kalimantan Barat sesuai dengan data konsumsi pangan sementara menunjukkan peningkatan untuk semua kelompok pangan. Konsumsi ini terbagi menjadi konsumsi energi dan konsumsi protein.

Tabel 2.82
Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2018-2019

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-Rata Konsumsi Energi	Kal/Kap/Hari	1.926	1.953
Angka Kecukupan Energi	%	96,3	97,6
Rata-Rata Konsumsi Protein	Gram/Kap/Hari	55,8	57,2
Angka Kecukupan Protein	%	107,3	110,0
Pola Pangan Harapan (PPH)		79,43	79,90

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat 2020 (diolah).

* Data sementara

2.3.1.10. Pertanian

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah sertifikat hak atas tanah yang cukup signifikan, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ertifikat hak atas tanah bidang. Dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, Kabupateb Kubu Raya merupakan Kabupaten dengan Jumlah Bidnag Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah diberikan yakni sebanyak 20.671 bidang.

Tabel 2.83
Perkembangan Redistribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kalimantan Barat

No	Wilayah	SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (BIDANG)				
		2015	2016	2017	2018	2019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	KAB. SAMBAS	1.030	1.500	10.011	12.363	49.724
2	KAB. MEMPAWAH	709	674	12.692	4.757	43.862
3	KAB. SANGGAU	688	665	9.883	2.285	34.564
4	KAB. KETAPANG	2.200	1.000	14.256	10.086	64.853
5	KAB. SINTANG	406	1.174	13.799	22.565	6.733
6	KAB. KAPUAS HULU	417	600	3.500	12.689	2.209
7	KAB. BENGKAYANG	750	898	4.000	16.979	2.872
8	KAB. LANDAK	1.100	1.995	14.500	21.246	9.270
9	KAB. SEKADAU	950	986	3.902	12.278	2.954
10	KAB. MELAWI	940	900	5.000	12.497	2.777
11	KAB. KAYONG UTARA	602	746	3.000	8.438	4.950
12	KAB. KUBU RAYA	1.500	1.050	20.671	49.853	11.214
13	KOTA PONTIANAK	-	-	2.000	17.914	640
14	KOTA SINGKAWANG	787	750	16.195	16.927	1.613
KALIMANTAN BARAT		12.079	12.938	133.409	277.809	74.723

Sumber : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kanwil Prov Kalbar, Tahun 2019.

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai ukuran indikator kualitas lingkungan hidup apakah dalam kondisi baik atau buruk. Informasi kualitas lingkungan meliputi kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan yang direpresentasikan melalui nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Air (IKA) diukur berdasarkan kualitas air atas parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform, Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan Kualitas Udara atas parameter SO₂ dan NO₂ sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan Kualitas Tutupan Lahan sesuai luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan berdasarkan nilai dari Indeks Pencemaran. Nilai IKA berkisar antara 0 hingga 100. Nilai ideal adalah 100 merupakan gambaran kualitas air terbaik sedangkan 0 merupakan kondisi kualitas air terburuk. Nilai IKA dipengaruhi oleh : (1) penurunan beban pencemaran, (2) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global, (3) penggunaan air, serta (4) tingkat erosi dan sedimentasi.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Begitu juga dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), nilai IKTL berkisar antara 100 hingga 0. Nilai 100 menggambarkan kondisi kualitas tutupan lahan terbaik, sedangkan nilai 0 merupakan kondisi tutupan lahan terburuk. Secara lengkap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.84

Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU),

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No.	Uraian	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	61,0	64,81	82,33	80,80	80,00	69,38	50,00
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,7	84,57	91,57	81,50	89,12	88,68	90,07
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58,73	58,73	59,28	58,87	58,58	64,19	59,76
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,1	68,31	75,88	72,24	74,17	73,09	65,92

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.

IKLH dapat digunakan sebagai informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu IKLH dapat juga menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digambarkan melalui indeks kualitas air tahun 2019 adalah sebesar 50,00 (target 2019 56,20). Capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digambarkan melalui indeks kualitas udara tahun 2019 adalah sebesar 90,04 (target 2019 87,91)

Daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan kesimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan yang selanjutnya disebut daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk dan dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kalimantan Barat dapat dilihat dari Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.85

Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) yang Terkait Langsung Dengan Sumber Daya Lahan
di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

No.	Jasa Ekosistem Prioritas	Indeks (belum termasuk wilayah Laut)
(1)	(2)	(3)
1	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	0,31
2	Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih	0,33
3	Jasa Ekosistem Penyediaan Serat	0,69
4	Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik	0,52
5	Jasa Ekosistem Penyediaan Energi/ Bahan Bakar (Kayu dan Fosil)	0,62
6	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	0,44
7	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	0,48
8	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	0,56
9	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	0,50
10	Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	0,61
11	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air	0,41
12	Jasa Ekosistem Budaya, Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	0,39
13	Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam	0,41
14	Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekoturisme	0,43

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, 2017.

Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Estimasi timbulan sampah berdasarkan teori sebesar 0,7 Kg/hari/orang memprediksi bahwa jumlah sampah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 3.767 m³/hari. Selain itu permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sampah adalah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem *Open Dumping* dan belum ada pengolahan lebih lanjut untuk penanganan masalah sampah tersebut. Sistem open dumping masih dapat dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat karena masih luasnya lahan di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.86
Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Sambas	636,848	852,174
2	Kab. Mempawah	306,358	418,078
3	Kab. Sanggau	487,313	742,392
4	Kab. Ketapang	573,074	806,413
5	Kab. Sintang	410,734	661,390
6	Kab. Kapuas Hulu	246,772	414,374
7	Kab. Bengkayang	288,589	402,112
8	Kab. Landak	401,147	596,174
9	Kab. Sekadau	214,297	319,322
10	Kab. Melawi	233,673	328,477
11	Kab. Kayong Utara	127,301	177,438
12	Kab. Kubu Raya	607,560	913,462
13	Kota Pontianak	668,935	1.020,357
14	Kota Singkawang	237,429	350,498
Jumlah		5,440,030	8.002,662

Sumber : DRKPLH Prov. Kalbar 2019.

Adapun untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan tersebut, telah tersedia tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di 14 Kabupaten/kota dengan kondisi seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.87
TPA dan Sistem Operasi di Provinsi Kalimantan Barat

No	TPA	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sukadana (Kab. Kayong Utara)	-	36,00	<i>Open Dumping</i>
2	Melawi	6,50	35,00	<i>Open Dumping</i>
3	Putussibau (Kab. Kapuas Hulu)	0,00	0,00	<i>Open Dumping</i>
4	Sekadau	4,50	34,00	<i>Open Dumping</i>
5	Sintang	6,00	96,25	<i>Controlled Landfill</i>
6	Bengkayang	10,00	20,80	<i>Open Dumping</i>
7	Tebadak (Kab. Landak)	6,60	300,00	<i>Open Dumping</i>
8	Sorat (Kab. Sambas)	13,00	72,00	<i>Open Dumping</i>
9	Bakau Besar (Kab Mempawah)	2,20	160,00	<i>Open Dumping</i>

No	TPA	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Kubu Raya	4,00		Open Dumping
11	Batulayang (Kota Pontianak)	26,60	1.373,03	Controlled Landfill
12	Sanggau	2,00	60,00	Open Dumping
13	Ketapang	9,00	60,00	Controlled Landfill
14	Wonosari (Kota Singkawang)	8,57	194,60	Controlled Landfill

Sumber : DRKPLH Prov. Kalbar 2019.

Pada tahun 2016 besaran emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Barat untuk sektor energi sebesar 5.888.437,47 Ton CO₂ eq; sektor pertanian sebesar 3.065.096,82 Ton CO₂ eq; sektor kehutanan sebesar 85.782.477,54 Ton CO₂ eq dan limbah sebesar 2.230.633,89 Ton CO₂ eq. Untuk tahun 2017 jumlah emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan untuk sektor energi sebesar 0,00 Ton CO₂ eq; sektor pertanian sebesar 1.190.289,46 Ton CO₂ eq; sektor kehutanan sebesar 451.834.313,06 Ton CO₂ eq dan limbah sebesar 1.444,52 Ton CO₂ eq.

2.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2017 yang telah memiliki E-KTP pada tahun 2017 sebesar 2.344.914 mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 2.201.729 jiwa.

Tabel 2.88
Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP

Wilayah	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KAB. SAMBAS	Orang	333.795	333.324	168.021	265.902	268.399	394,208	410,084
KAB. MEMPAWAH	Orang	135.357	136.210	67.392	142.644	143.186	170,482	178,272
KAB. SANGGAU	Orang	195.156	193.330	93.724	191.271	210.111	272,338	288,073
KAB. KETAPANG	Orang	181.825	179.204	87.223	161.238	198.136	299,243	319,177
KAB. SINTANG	Orang	202.947	203.959	99.848	194.036	197.042	254,124	268,518
KAB. KAPUAS HULU	Orang	130.407	131.016	62.833	135.558	138.910	164,960	173,389
KAB. BENGKAYANG	Orang	120.939	117.055	55.944	119.605	124.296	152,543	159,392
KAB. LANDAK	Orang	177.895	174.791	82.374	170.161	179.870	236,319	245,179
KAB. SEKADAU	Orang	112.532	112.668	53.849	101.723	105.290	134,071	140,410
KAB. MELAWI	Orang	91.560	89.016	43.903	88.785	96.451	122,758	129,181
KAB. KAYONG UTARA	Orang	45.389	43.872	21.795	41.029	46.084	67,709	72,954
KAB. KUBU RAYA	Orang	229.988	242.710	123.916	268.375	293.316	361,105	379,535
KOTA PONTIANAK	Orang	350.527	360.045	178.439	247.161	262.176	433,708	447,380
KOTA SINGKAWANG	Orang	103.634	106.534	53.474	74.241	81.647	144,928	152,088
KALIMANTAN BARAT	Orang	2.411.951	2.423.734	1.192.735	2.201.729	2.344.914	3.208,496	3.363,632

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar, Tahun 2019.

Sementara itu, untuk penduduk yang telah memiliki akte kelahiran pada tahun 2017 adalah 1.043.886 jiwa. Tertinggi berada di Kota Pontianak yakni sebanyak 247.050 jiwa yang telah memiliki akte kelahiran dan terendah di Kabupaten Bengkayang sebesar 39.051 jiwa yang telah memiliki akte kelahiran.

Tabel 2.89
Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akte Kelahiran

Wilayah	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KAB. SAMBAS	Orang	77.888	108.923	130.091	99.889	117.580	246,000	276,352
KAB. MEMPAWAH	Orang	62.946	38.873	44.612	29.276	56.734	111,671	99,689
KAB. SANGGAU	Orang	31.108	15.216	25.361	32.978	47.183	129,167	153,451
KAB. KETAPANG	Orang	107.083	65.811	84.517	55.964	101.625	227,077	238,711
KAB. SINTANG	Orang	134.083	99.326	107.682	62.349	104.883	128,724	144,717
KAB. KAPUAS HULU	Orang	33.955	21.445	26.707	22.853	34.529	92,529	109,484
KAB. BENGKAYANG	Orang	13.613	6.780	14.890	13.170	15.973	44,790	53,979
KAB. LANDAK	Orang	83.369	89.523	102.703	59.277	60.574	130,761	146,044
KAB. SEKADAU	Orang	51.175	54.887	59.919	36.111	39.051	79,757	87,527
KAB. MELAWI	Orang	58.146	34.530	40.438	24.889	27.404	61,319	71,068
KAB. KAYONG UTARA	Orang	30.252	22.749	28.915	17.439	18.920	50,691	55,152
KAB. KUBU RAYA	Orang	40.906	84.186	103.986	74.698	119.601	261,538	280,877
KOTA PONTIANAK	Orang	310.981	184.459	239.697	150.024	247.050	362,877	395,735
KOTA SINGKAWANG	Orang	64.125	70.851	79.848	46.837	52.779	115,895	123,143
KALIMANTAN BARAT	Orang	1.099.630	897.559	1.089.366	725.754	1.043.886	2,042,796	2,235,929

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar, Tahun 2019.

Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga pada tahun 2019 sebanyak 1.516.913 KK meningkat dibandingkan kondisi pada tahun 2013 sebesar 1.450.907 KK.

Tabel 2.90
Jumlah Penduduk Telah Memiliki Kartu Keluarga

Wilayah	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KAB. SAMBAS	KK	174.272	170.666	181.519	174.857	180.384	176.939	178.807
KAB. MEMPAWAH	KK	80.472	80.136	83.936	84.173	85.971	81.003	82.545
KAB. SANGGAU	KK	135.283	136.979	143.738	142.458	147.605	134.408	136.132
KAB. KETAPANG	KK	165.059	162.557	175.245	168.299	174.931	176.844	169.740
KAB. SINTANG	KK	92.510	104.956	117.176	110.241	113.973	114.851	114.594
KAB. KAPUAS HULU	KK	81.139	66.279	68.481	71.250	73.517	76.367	77.615
KAB. BENGKAYANG	KK	72.873	73.379	76.868	76.607	77.539	74.481	75.895
KAB. LANDAK	KK	100.785	98.208	104.151	98.917	102.207	101.280	103.185
KAB. SEKADAU	KK	56.816	54.929	60.105	57.879	59.341	59.980	60.427
KAB. MELAWI	KK	64.309	66.030	66.884	68.397	69.175	67.431	66.657
KAB. KAYONG UTARA	KK	34.830	32.833	35.910	34.713	36.183	35.811	36.216
KAB. KUBU RAYA	KK	160.902	159.128	168.640	165.297	169.631	162.109	163.446
KOTA PONTIANAK	KK	171.742	172.809	182.403	174.205	181.164	185.653	186.646
KOTA SINGKAWANG	KK	59.915	58.892	63.639	62.266	64.094	63.275	65.008
KALIMANTAN BARAT	KK	1.450.907	1.437.781	1.528.695	1.489.559	1.535.715	1.509.432	1.516.913

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar, Tahun 2019.

c. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalimantan Barat.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan

untuk menetap. Persentase kepemilikan dokumen, akurasi, kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan yang dicapai tahun 2018 sebesar 38,99% sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 50,45%.

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun tahun 2019, dari 2.031 desa di Kalimantan Barat 4,28 persen desa berstatus desa mandiri. Sementara itu, sebesar 38,46 persen atau 781 desa di Kalimantan Barat masih berstatus tertinggal.

Tabel 2.91

Status Desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) 2019 di Kalimantan Barat

NO	STATUS DESA	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SANGAT TERTINGGAL	208	10.24%
2	TERTINGGAL	781	38.46%
3	BERKEMBANG	767	37.76%
4	MAJU	188	9.26%
5	MANDIRI	87	4.28%
TOTAL		2031	100,00%

Sumber : Kemendes PDT, Tahun 2019.

Desa Mandiri adalah status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit berdasarkan tiga indeks/dimensi pembentuk, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Berdasarkan data sampai pada tanggal 14 Juni 2020, jumlah desa mandiri di Kalbar bertambah sebanyak 127 desa yaitu menjadi 214. Namun untuk pada tahun 2018 dan 2019 dapat diamati pada tabel 2.91 ini :

Tabel 2.92

Jumlah dan Persentase Status Desa menurut (IDM) Tahun 2018- 2019 di Kalimantan Barat

STATUS DESA	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mandiri	1	0.05	87	4.28
Maju	53	2.60	188	9.26
Berkembang	372	18.32	767	37.76
Tertinggal	928	45.70	781	38.46
Sangat Tertinggal	677	33.33	208	10.24
Jumlah	2,031	100.00	2,031	100.00

Sumber : SK Dirjend P2MD-KemendesPPDT No.201/2019, data diolah.

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. Pada tahun 2017 CPR Kalimantan Barat sebesar 70,93 persen meningkat dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 70,86 persen. Angka CPR tahun 2017 tertinggi berada di Kabupaten Kayong Utara sebesar 77,39

persen. Sedangkan angka CPR terendah pada tahun 2017 berada di Kota Singkawang sebesar 55,10 persen.

Tabel 2.93
Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Kalimantan Barat

No	Wilayah	PREVALENSI PEMAKAIAN KONTRASEPSI (1)				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MEMPAWAH	69,62%	71,14%	71,51%	70,89%	70,52%
2	SAMBAS	69,36%	69,40%	69,62%	71,38%	71,43%
3	KETAPANG	70,76%	72,48%	71,71%	76,23%	79,84%
4	SANGGAU	82,87%	77,74%	73,52%	72,33%	73,12%
5	SINTANG	73,20%	75,63%	76,51%	78,77%	78,45%
6	KAPUAS HULU	76,09%	77,94%	79,14%	78,38%	80,50%
7	PONTIANAK	69,42%	69,54%	69,94%	70,43%	80,99%
8	SINGKAWANG	59,58%	57,26%	55,10%	77,57%	78,38%
9	BENGKAYANG	N/A	71,79%	73,95%	69,66%	71,47%
10	LANDAK	71,15%	72,36%	74,55%	69,48%	69,60%
11	SEKADAU	71,13%	62,98%	67,00%	76,48%	77,66%
12	MELAWI	72,31%	72,73%	71,93%	65,00%	66,75%
13	KAYONG UTARA	80,21%	78,14%	77,39%	70,14%	70,48%
14	KUBU RAYA	63,19%	63,22%	63,67%	56,46%	58,21%
KALIMANTAN BARAT		71,02%	70,86%	70,93%	71,72%	73,12%

Sumber : BKKBN Perwakilan Kalbar.

d. Persentase Fasilitas Perencanaan Program KB, KS, dan Dalduk

Penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kualitas generasi mendatang untuk mensukseskan pembangunan. Terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan. Pertama, bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek yang berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Kedua, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

2.3.1.15. Perhubungan

Terminal di Kalimantan Barat sebanyak 27 unit, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, baik itu tipe A,B dan C. Untuk tipe A sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di Kabupaten Kubu Raya yaitu di Sei Ambawang, sedang tipe B sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan tipe c sebanyak 1 (satu) unit di Sei Pinyuh Kabupaten Mempawah. Sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terminal Tipe B merupakan kewenangan dari pada Pemerintah Provinsi, sehingga untuk pembangunan dan pemeliharaannya di tangani oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.94
Sebaran Terminal di Provinsi Kalimantan Barat 2019

No.	Kab/Kota	Terminal	Type
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Pontianak	Batulayang	B
2	Kabupaten Kubu Raya	ALBN Sei Ambawang	A
		Sungai Durian	B
3	Kabupaten Mempawah	Mempawah	B
		Sei Pinyuh	C
		Jungkat	B
4	Kota Singkawang	Pasiran	B
		Beringin	B
5	Kabupaten Sambas	Sambas	B
		Kartiasa	B
		Aruk	B
		Pemangkat	B
6	Kabupaten Bengkayang	Bengkayang	B
		Seluas	B
7	Kabupaten Landak	Ngabang	B
8	Kabupaten Sanggau	Sosok	B
		Sanggau	B
		Entikong	B
		Tayan	B
9	Kabupaten Sekadau	Lawang Kuari	B
		Sungai Ukoi	B
10	Kabupaten Sintang	Sungai Durian	B
		Tanjung Puri	B
11	Kabupaten Melawi	Sido Mulyo	B
12	Kabupaten Kapuas Hulu	Badau	B
13	Kabupaten Ketapang	Ketapang	B
14	Kabupaten Kayong Utara	Kayong Utara	B

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar, Tahun 2019.

a. Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat

Persentase ketersediaan sarana perhubungan darat tahun 2018 sebesar 56,85% sedangkan untuk capaian tahun 2019 sebesar 59,32%. Sektor Perhubungan merupakan sektor yang mempunyai dan memegang peran sentral dalam menciptakan nilai tambah melalui penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perkembangan antar wilayah serta meningkatkan konektivitas antar daerah. Kebijakan di bidang perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, selain dimaksudkan untuk mendukung pergerakan penduduk dan angkutan barang terutama untuk wilayah pedalaman juga untuk memperlancar arus transportasi antar modal. Untuk itu perlu adanya sarana pendukung baik itu terminal, bandara, pelabuhan serta fasilitas keselamatan maupun armadanya.

Tabel 2.95
Sarana Perhubungan Darat Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe B	Pelabuhan	Bandar Udara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sambas	1	3 (Sintete, Pemangkat, Paloh/sekura)	

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe B	Pelabuhan	Bandar Udara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Mempawah			
3	Sanggau			
4	Ketapang		3 (Ketapang, Kendawangan, Sukaharja)	1 (Rahadi Usman)
5	Sintang	1		1 (Tebelian)
6	Kapuas Hulu	1		1 (Pangsuma)
7	Bengkayang			
8	Landak			
9	Sekadau			
10	Melawi	1		1 (Ng. Pinoh)
11	Kayong Utara		1 (Teluk Melano)	
12	Kubu Raya			1 (Supadio)
13	Pontianak		1 (Pontianak)	
14	Singkawang		1 (singkawang)	
	Jumlah	4	9	5

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar Tahun 2019.

b. Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP

Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP tahun 2018 sebesar 27% sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 33,59%.

c. Persentase Penurunan Jumlah Laka Lintas per Tahun

Persentase Penurunan Jumlah Laka Lintas per Tahun capaian 2018 sebesar 6,69% sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 13,41%.

d. Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum

Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum capaian 2018 sebesar 1:170 sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 1:783.

e. Persentase Penurunan Jumlah Laka SDP per Tahun

Persentase Penurunan Jumlah Laka SDP per Tahun untuk tahun 2018 sebesar 27% sedangkan capaian tahun 2019 sebesar 33,33%.

f. Ratio Jumlah Pelabuhan terhadap Penumpang Angkutan SDP

Ratio Jumlah Pelabuhan terhadap Penumpang Angkutan SDP tahun 2018 sebesar 1:63 sedangkan tahun 2019 sebesar 1:34.

g. Persentase Pengembangan Sistem Transportasi

Persentase Pengembangan Sistem Transportasi tahun 2018 sebesar 10% sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 37,04%.

h. Persentase Kecukupan Angkutan Umum dan Prasarana yang Layak

Persentase Kecukupan Angkutan Umum dan Prasarana yang Layak tahun 2018 sebesar 80% sedangkan tahun 2019 sebesar 88,24%.

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2019 Jumlah Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat yang telah

terlayani telepon seluler sebanyak 1828 desa/kelurahan. Sedangkan untuk jumlah desa/kelurahan yang terlayani internet dari data yang berhasil dikumpulkan diluar Kabupaten pada tahun 2019 adalah sebanyak 913 desa/kelurahan.

Sementara itu, untuk Jumlah BTS yang ada di Kalimantan Barat adalah sebanyak 8013 unit, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Pontianak sebanyak 1419 BTS.

Tabel 2.96

Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler dan Internet serta Jumlah BTS Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler	Jumlah Desa/Kelurahan Terlayani Internet	Jumlah BTS
(1)	(2)	(3)	(4)
KAB. SAMBAS	190	148	768
KAB. MEMPAAH	56	40	519
KAB. SANGGAU	151	40	835
KAB. KETAPANG	229	131	1013
KAB. SINTANG	331	111	606
KAB. KAPUAS HULU	249	143	356
KAB. BENGKAYANG	102	31	486
KAB. LANDAK	128	33	366
KAB. SEKADAU	76	35	223
KAB. MELAWI	108	47	108
KAB. KAYONG UTARA	43	20	120
KAB. KUBU RAYA	110	81	754
KOTA PONTIANAK	29	29	1419
KOTA SINGKAWANG	26	26	440
KALIMANTAN BARAT	1828	913	8013

Sumber : SIPD Dinas Komunikasi dan Informastika Prov. Kalbar, 2019.

2.3.1.17. Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

Pada tahun 2019, capaian indikator prosentase koperasi aktif sebesar 60,54 persen dan prosentase koperasi berkualitas sebesar 23,85 persen. Sedangkan indikator jumlah UKM pelaku usaha tahun 2019 adalah sebesar 68.909 jumlah pelaku UKM. Berdasarkan dari Tabel Jumlah Koperasi Aktif yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Akan 48,23 tetapi pada tahun 2017 jumlah koperasi aktif turun sebesar 16,37 persen dari sebelumnya berjumlah 3.024 unit menjadi 2.529 unit. Dan pada tahun 2019 jumlah koperasi kembali naik sebesar 99 Koperasi dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 2.836 menjadi 2.935.

Sementara itu, jumlah usaha kecil menengah atau UKM pelaku usaha selama periode 2013-2019 mengalami ppenurunan dengan rata-rata penurunannya per tahunnya sebesar 3.03 persen. Pada tahun 2019 jumlah UKM pelaku usaha menurun sebesar 11.64 persen dari sebelumnya sebanyak 80.546 pelaku usaha menjadi 68.909pelaku usaha pada tahun 2019. Capaian tersebut, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki usaha sendiri terus mengalami peningkatan dan didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, diharapkan tingkat ekonomi masyarakat Kalimantan Barat juga meningkat seiring banyaknya lapangan usaha kerja baru dari Usaha Kecil Menengah ini. Jiwa enterprener bagi para pemuda dan remaja, sejak dini perlu ditumbuhkembangkan sehingga ada motivasi untuk membuat usaha atau berusaha sendiri tanpa perlu menunggu menjadi pegawai negeri atau bekerja bersama orang lain.

Tabel 2.97
Capaian Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013-2019 Provinsi Kalimantan Barat

NO	URAIAN	REALISASI						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Koperasi Aktif	2.765	2.872	2.944	3.024	2.578	2.836	2.935
2	Jumlah Koperasi	4.670	4.782	4.616	4.390	3.761	4.713	4.848
3	Persentase Koperasi Aktif	59,2	60,05	63,77	68,88	68,55	60,17	60,54
4	Persentase Koperasi Berkualitas	11,75	12,02	12,97	13,44	17,46	21,72	23,85
5	Jumlah UKM Pelaku Usaha	87.107	107.515	108.010	108.374	*119.396	80.546	68.909
6	Pertumbuhan Pelaku Usaha	9,73	20,92	0,46	0,33	10,17	48,23	16,88

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

2.3.1.18. Penanaman Modal

Melalui penerapan otonomi daerah, diharapkan muncul pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi pemerintah memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peran swasta dimana salah satu aspeknya adalah dibidang investasi. Pemerintah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA), tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian.

Pada tahun 2019 PMDN sebesar Rp. 7.695.834,20 Juta terjadi peningkatan investasi PMDN sebesar 16,75 persen dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp. 6.591.384,10 Juta.

Tabel 2.98
Rencana dan Realisasi Kumulatif
Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

TAHUN	PMDN				
	REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	INDONESIA	ASING	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	144	17.266.076,95	150.410	74	150.484
2014	158	25.233.622,55	158.252	100	158.352
2015	175	31.368.252,43	166.485	119	166.604
2016	187	40.383.786,43	170.616	120	170.736
2017	428	52.764.690,63	203.197	120	203.317
2018	595	6.591.384,10	14.428	3	14.431
2019	1.110	7.695.834,20	11.563	21	11.584
Pertumbuhan %	25.97 %	98.20 %	217,5	13,74%	8,00%

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Keterangan:

- Data Tahun 2013 merupakan data kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.
- Rencana investasi PMDN berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPMRI, DPMPSTSP Provinsi dan DPMPSTSP kabupaten/kota.
- Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat.

- Investasi PMDN/PMA di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga.
- Nilai Investasi PMDN dalam Rp Juta.

Dukungan investasi yang bersumber dari PMA tahun 2017 sebesar 6.197.880,30 US \$ ribu, atau meningkat sebesar 10,10 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5.629.435,10 US\$ ribu. Untuk target capaian pada tahun 2017 baru terealisasi sebesar 57,36 persen.

Tabel 2.99

Rencana dan Realisasi Kumulatif Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2013 2019

TAHUN	P M A				
	REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	INDONESIA	ASING	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2013	91	2.697.816,72	81.946	310	82.256
2014	98	3.663.023,90	86.015	336	86.351
2015	110	4.998.722,10	104.197	537	104.734
2016	121	5.629.435,10	104.886	548	105.434
2017	432	6.197.880,30	125.956	892	126.848
2018	653	491.938.60	14.835	408	15.243
2019	835	532.540.50	13.263	230	13.493
Pertumbuhan %	71,74%	23,74%	11,71%	33,26%	11,81%

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Keterangan:

- Rencana investasi PMA berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPMRI.
- Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- Investasi PMDN/PMA diluar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga.
- Nilai Investasi PMA dalam US \$ Ribu.

Peran swasta dibidang investasi sangatlah diperlukan oleh Pemerintah untuk mendukung pembangunan. Pemerintah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA), tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian.

Tabel 2.100

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2018-2019

TAHUN	PMDN				
	REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	INDONESIA	ASING	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	595	6.591.384,10	14.428	3	14.431
2019	1.110	7.695.834,20	11.563	21	11.584

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Keterangan: Nilai Investasi PMDN dalam Rp Juta

Tabel 2.101

Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2018 2019

TAHUN	PMA				
	REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	INDONESIA	ASING	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	653	491,938.60	14.835	408	15.243
2019	835	532,540.50	13.263	230	13.493

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Keterangan: Nilai Investasi PMA dalam US \$ Ribu

Tabel 2.102

Tabel Target Dan Realisasi Investasi Tahun 2019 (RPJMD 2018-2023)

Indikator	2018	2019	
	Kondisi Awal	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Nilai Investasi (Rp)	13,18 T	18,75 T	15,68 T

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Tabel 2.103

Realisasi Proyek PMDN/PMA Menurut Kab/Kota di Kalimantan Barat Periode Januari-Desember 2019

NO	KABUPATEN / KOTA	PMA				PMDN			
		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (US \$ Ribu)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (Rp, Juta)	TENAGA KERJA	
				INDONESIA	ASING			INDONESIA	ASING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kota Pontianak	69	8,889.50	66	1	146	51,293.60	137	n/a
2	Kota Singkawang	3	0.50	n/a	n/a	21	1,170.00	17	n/a
3	Kabupaten Landak	62	5,441.50	2	2	74	176,210.20	27	n/a
4	Kabupaten Bengkayang	10	132,595.00	105	118	18	316,712.70	57	n/a
5	Kabupaten Mempawah	40	3,550.10	32	3	103	378,526.90	298	n/a
6	Kabupaten Sambas	31	14,437.90	63	n/a	23	400,474.20	n/a	n/a
7	Kabupaten Sanggau	94	54,840.80	423	n/a	104	947,710.10	3,452	14
8	Kabupaten Sintang	57	5,603.90	1,155	n/a	135	2,191,189.70	699	n/a
9	Kabupaten Kapuas Hulu	n/a	n/a	n/a	n/a	118	464,386.50	757	7
10	Kabupaten Ketapang	378	303,520.70	11,264	106	121	771,942.90	4,585	n/a
11	Kabupaten Sekadau	16	5.00	n/a	n/a	37	556,382.50	407	n/a
12	Kabupaten Melawi	29	240.80	45	n/a	15	575,601.40	82	n/a
13	Kabupaten Kayong Utara	3	n/a	n/a	n/a	15	120,592.70	145	n/a
14	Kabupaten Kubu Raya	43	3,414.80	108	n/a	180	743,640.80	900	n/a
	JUMLAH	835	532,540.50	13,263	230	1,110	7,695,834.20	11,563	21

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Kurs PMA = Rp. 15.000

Tabel 2.104

Realisasi Proyek PMDN/PMA Menurut Sektor Di Kalimantan Barat Periode Januari-Desember 2019

NO.	BIDANG USAHA/SEKTOR	PMA				PMDN			
		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (US\$.Ribu)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (US\$.Ribu)	TENAGA KERJA	
				INDONESIA	ASING			INDONESIA	ASING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Sektor Primer								
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan, Dan Peternakan	286	266,461.80	11,177	10	330	4,607,539.50	6,800	9
2.	Kehutanan	44	7,514.40	93	6	18	6,280.00	66	
3.	Perikanan	1	66.70	2		13	95.10	12	
4.	Pertambangan	54	1,626.00			27	14,213.30	15	
II	Sektor Sekunder								
5.	Industri Kendaraan Bermotor Dan Alat Transportasi Lain	10	1.20			11		30	
6.	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik Dan Jam	3	243.30	10					
7.	Industri Karet Dan Plastik	34	222.50			17	434.40	40	
8.	Industri Kayu	21	8,368.20	138		25	196.80	2,310	11
9.	Industri Kertas Dan Percetakan								
10.	Industri Kimia Dan Farmasi	10	45.60	30	2	29	692.60	2	
11.	Industri Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki								
12.	Industri Mineral Non Logam	6	268.80	22		4	2,151.00		
13.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya	29	60,855.20	589	80	26	70,023.60	35	
14.	Industri Makanan	219	35,036.50	818	1	222	1,942,487.40	1,340	1
15.	Industri Tekstil								
16.	Industri Lainnya	6	172.60			7	55.40		
III	Sektor Tersier								
17.	Hotel Dan Restoran	19	626.40	61		12	819.20	1	
18.	Konstruksi	5	23.60		1	18	76,643.00	12	
19.	Listrik, Gas Dan Air	19	132,668.80	169	128	22	700,084.20	403	
20.	Perdagangan Dan Reparasi	29	1,203.80	20	2	250	65,936.50	419	
21.	Perumahan, Kawasan Industri Dan Perkantoran	15	9,396.20	131		19	32,354.60	33	
22.	Transportasi, Gudang Dan	16	7,397.80	2		27	43,500.20	6	

NO.	BIDANG USAHA/SEKTOR	PMA				PMDN			
		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (US\$.Ribu)	TENAGA KERJA		JUMLAH PROYEK	TAMBAHAN (US\$.Ribu)	TENAGA KERJA	
				INDONESIA	ASING			INDONESIA	ASING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Telekomunikasi								
23.	Jasa Lainnya	9	341.10	1		33	132,327.40	39	
	J U M L A H	835	532,540.50	13,263	230	1,110	7,695,834.20	11,563	21

PMA/PMDNSEKTOR Kurs PMA = Rp. 15000.

2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran urusan Kepemudaan dan Olahraga digambarkan melalui indikator indeks pembangunan pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks ini memiliki lima fungsi. Pertama, IPP akan memberikan indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor tentang kemajuan pembangunan pemuda. Kedua, IPP juga berfungsi sebagai pengarah dan insentif bagi domain atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus para pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, serta kelompok pemuda sendiri. Ketiga, IPP berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan pemuda yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak yang telah disepakati bersama di antara para pemangku kepentingan. Keempat, IPP dapat pula memberikan arah penelitian mengenai berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan pemuda yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program pemuda yang berbasis data. Kelima, IPP dapat mengukur dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2016 IPP Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 Nasional dengan skor 47,50.

Tabel 2.105

Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Pemuda	45,17	47,50	47,50	47,50	48,00
2	Peringkat Indeks Pembangunan Pemuda	26	28	28	28	27

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sementara itu untuk sebaran fasilitas olahraga, data yang berhasil dikumpulkan untuk tahun 2019 digambarkan melalui tabel 2.109 berikut:

Tabel 2.106

Sebaran Fasilitas Olahraga di Kalimantan Barat Tahun 2019

Wilayah	Lapangan Bola Voli	Lapangan Bola Basket	Lapangan Tenis	Lapangan Futsal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KAB. SAMBAS	28	2	3	5
KAB. MEMPAWAH	1	3	1	3
KAB. SANGGAU	1	0	0	0
KAB. KETAPANG	136	20	2	10
KAB. SINTANG	1	0	0	0

Wilayah	Lapangan Bola Voli	Lapangan Bola Basket	Lapangan Tenis	Lapangan Futsal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KAB. KAPUAS HULU	2	2	3	2
KAB. BENGKAYANG	1	0	0	0
KAB. LANDAK	12	0	2	0
KAB. SEKADAU	2	2	1	3
KAB. MELAWI	1	1	1	3
KAB. KAYONG UTARA	26	0	0	2
KAB. KUBU RAYA	18	0	4	2
KOTA PONTIANAK	10	19	11	18
KOTA SINGKAWANG	5	2	3	6

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, Tahun 2019.

2.3.1.20. Kebudayaan

Gambaran kondisi kebudayaan dapat dijelaskan, jumlah museum sebanyak 2 unit dan jumlah pusat kebudayaan/taman budaya sejumlah 1 unit:

Tabel 2.107

Gambaran Kondisi Urusan Kebudayaan di Kalimantan Barat

Variabel Data	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Sanggar Kesenian	n/a						
Jumlah Gedung Kesenian	n/a						
Jumlah Museum	n/a	2	2	2	2	2	2
Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya	n/a	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (Data SIPD, Tahun 2019).

a) Koleksi Daerah yang dilestarikan

Gambaran kondisi kebudayaan dapat dijelaskan, jumlah museum sebanyak 2 unit dan jumlah pusat kebudayaan/taman budaya sejumlah 1 unit. Selain itu, terdapat sejumlah objek yang menjadi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di Kalimantan Barat dengan sebaran seperti berikut ini:

Tabel 2.108

Sebaran Cagar Budaya/ yang Diduga Cagar Budaya

No	Kabupaten/Kota	Cagar Budaya/ yang Diduga Cagar Budaya	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Singkawang	14	14 Laporan Inventarisasi
2	Sambas	7	2 SK Menteri : PM.26/PW.007/MKP/2008, 5 Laporan Inventarisasi
3	Bengkayang	7	7 Laporan Inventarisasi.
4	Sekadau	6	6 Laporan Inventarisasi.
5	Ketapang	108	106 SK Bupati : 07 Tahun 2009, 2 Laporan Kajian
6	Melawi	2	2 Laporan Inventarisasi
7	Landak	7	1 SK Menteri : PM.26/PW.007/MKP/2008, 6 Laporan Inventarisasi
8	Kapuas Hulu	15	2 SK Menteri : KM.10/PW.007/MKP/2003, 13 SK Bupati : 212 Tahun 2012
9	Kota Pontianak	12	2 SK Menteri : PM.26/PW.007/MKP/2008, 10 Laporan inventarisasi

No	Kabupaten/Kota	Cagar Budaya/yang Diduga Cagar Budaya	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Sintang	20	1 SK Menteri : KM.10/PW.007/MKP/2003, 19 SK Bupati : 432.21/189/2012
11	Kubu Raya	3	3 Laporan Inventarisasi
12	Mempawah	9	1 SK Menteri : PM.26/PW.007/MKP/ 2008, 8 Laporan Inventarisasi
13	Kayong Utara	6	5 Laporan Identifikasi dan 1 informasi masyarakat.
14	Sanggau	25	2 SK Menteri : KM.10/PW.007/MKP/ 2003, 23 SK Bupati : 333 Tahun 2010
Jumlah		241	

Sumber : Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

Berdasarkan tabel di atas terdapat 241 Cagar Budaya/Objek Diduga Cagar Budaya. Objek-objek tersebut memiliki status yang berbeda. Dari 241 objek yang ada hanya 11 objek cagar budaya atau 4,56 % yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Cagar Budaya Tingkat Pusat, Selebihnya baru ditetapkan dengan oleh Bupati melalui SK Bupati sebagai Objek Diduga Cagar Budaya, karena Objek Diduga Cagar Budaya bisa disebut sebagai cagar budaya harus diteliti dan mendapatkan rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya, baik untuk Tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019 diukur dari 8 indikator, yaitu Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan, Cagar Budaya yang direvitalisasi, Dokumentasi Budaya, Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan, Karya Seni baru yang diinventarisir, Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional, Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional, dan Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat.

b) Peningkatan Warisan Budaya yang diapresiasi

Dalam melaksanakan urusan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah sebanyak 9 buah.
- 2) Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 4 (empat) kali.
- 3) Karya Seni baru yang diinventarisir pada tahun 2019 adalah sebanyak 14 (empat belas) karya.

Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan di tingkat internasional yang diperoleh pada tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) medali.

2.3.1.21. Perpustakaan

Jumlah kunjungan perpustakaan selama periode 2014-2019 menunjukkan peningkatan dari 64.563 kunjungan orang pada tahun 2014 meningkat menjadi 84.534 kunjungan orang pada tahun 2019. Sementara itu jumlah koleksi buku yang terdata dari 7.637 buku pada tahun 2014 meningkat menjadi 87.737 buku pada tahun 2017 hingga pada tahun 2019 peningkatan koleksi buku menjadi 155.966. Sedangkan koleksi daerah yang dilestarikan pada tahun 2019 adalah sebanyak 336 buah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yakni sebanyak 486 buah.

Tabel 2.109
Gambaran Kondisi Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2019

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	64.563,00	89.938,00	97.632,00	90.981,00	87.908	84.534
2	Jumlah Koleksi Buku (Buku)	7.637	16.496	37.768	87.737	88.817	155.966
3	Koleksi Daerah yang dilestarikan (Buah)	309	440	152	338	486	336

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, Tahun 2019.

2.3.1.22. Kearsipan

Pada tahun 2017, persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup yakni sebesar 55 persen meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2014 dan 2015 sebesar 46 persen. Sedangkan persentase Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota se Kalimantan Barat dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup adalah sebesar 7 persen. Selain itu, jumlah arsip vital pada tahun 2017 sebanyak 10 dokumen dan jumlah arsip statis pada tahun 2017 sebanyak 26.048 dokumen. Meningkat dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebesar 20.394 dokumen.

Tabel 2.110
Gambaran Kondisi Urusan Kearsipan di Kalimantan Barat

No	Jenis Data	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup	Persen	46	46	55	55	43	46
2	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup	Persen	7	7	7	7	14	14
3	Jumlah Arsip Vital	Dokumen	10	10	10	10	10	10
4	Jumlah Arsip Statis	Dokumen	19.049	20.204	20.394	26.048	28.176	28.775

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, 2019.

2.3.1.23. Statistik

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memulai membangun kebijakan satu data melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data statistik sektoral PD dan Kabupaten Kota dalam aplikasi portal satu data yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

Capaian kinerja sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui penerbitan buku Kalimantan Barat Dalam Angka.

2.3.1.24. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah.

Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Provinsi Kalimantan Barat.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kelautan dan Perikanan menunjukkan *trend* turun naik. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan PDRB sub sector perikanan sebesar 3,37 lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2018 sebesar 3,65 persen. Sedangkan NTP Perikanan pada tahun 2019 telah mencapai angka di atas 100 persen yang berarti nilai indeks yang dikeluarkan petani perikanan lebih rendah dibandingkan nilai yang diterima oleh petani perikanan. Sementara itu, total produksi perikanan pada tahun 2019 mengalami kenaikan 4,62 persen dibandingkan total produksi pada tahun 2018.

Tabel 2.111
Perkembangan Kondisi Indikator Kelautan dan Perikanan

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	5,38	4,58	1,92	3,02	3,18	3,65	3,37
NTP Perikanan		103,14	98,65	100,01	102,59	102,03	103,5	109,12
Total Produksi Perikanan	Ton	242.689	281.050,14	251.633,37	250.850,49	240.294,37	248.699	246.128

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar, Tahun 2019(1&2 Data BPS) Data Sementara.

2.3.2.2. Pariwisata

Perkembangan pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun tercatat terus tumbuh bahkan daya saing sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan. Pesatnya perkembangan kondisi pariwisata nasional disinyalir sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang disertai peningkatan daya beli masyarakat serta didukung dengan kondisi keamanan yang cukup kondusif, maka hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, khususnya kunjungan penduduk Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata di wilayah teritorial Indonesia atau yang biasa disebut kunjungan wisatawan nusantara (wisnus).

Tabel 2.112
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Tahun 2013-2019

TAHUN	*WISMAN	**WISNUS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	30.678	2.459.995	2.490.673
2014	31.021	2.471.403	2.502.424
2015	34.472	2.509.323	2.543.795
2016	32.261	2.935.588	2.967.849
2017	58.492	2.979.621	3.038.113
2018	70.740	3.226.934	3.297.674
2019	76.764	3.426.794	3.503.558

Sumber: *BPS Prov. Kalbar **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, Tahun 2019.

Terkait perkembangan pariwisata Kalimantan Barat, statistik menunjukkan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar 30,687 kunjungan meningkat menjadi 31,021 kunjungan di tahun 2014. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan mancanegara kembali mengalami peningkatan 34.472 kunjungan, akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 32.261 kunjungan. Data kunjungan wisatawan mancanegara Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 8.48 persen dari tahun sebelumnya menjadi 76.764 kunjungan.

Selain jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Kalimantan Barat adalah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) termasuk juga wisatawan lokal Kalimantan Barat. Peranan wisnus dan wislok merupakan yang terbesar dalam menciptakan dampak ekonomi, maka Kementerian Pariwisata semakin gencar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2013 sejumlah 2.459.995 kunjungan, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 2.471.403 kunjungan. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.509.323 kunjungan dan kembali mengalami peningkatan menjadi 2.935.588 kunjungan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara 2.979.621 kunjungan dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 3.426.794.

Dengan makin giatnya promosi dari pemerintah daerah dibantu instansi terkait untuk mengenalkan daerah serta tempat-tempat wisata lainnya, serta didukung oleh prasarana dan sarana yang ada, maka diharapkan jumlah pergerakan wisnus semakin meningkat.

Selain jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata juga mempengaruhi sektor pariwisata. Pada tahun 2017 jumlah obyek wisata di Kalimantan Barat mengalami perubahan dimana pada tahun 2016 jumlah objek daya tarik wisata sebanyak 462 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 556 dengan penambahan 92 obyek wisata. Adapun Kabupaten yang memiliki obyek wisata terbanyak adalah Kabupaten Landak dengan jumlah 67 obyek wisata.

Tabel 2.113
Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata

No	Kabupaten/Kota	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kota Pontianak	12	12	17	17	18	23	22
2	Kab. Mempawah	23	13	29	29	23	23	17
3	Kota Singkawang	20	6	26	26	53	61	51
4	Kab. Bengkayang	59	145	62	62	32	41	42
5	Kab. Sambas	23	24	28	28	25	33	33
6	Kab. Kubu Raya	10	32	14	14	59	68	80
7	Kab. Landak	32	29	36	36	67	70	70
8	Kab. Sanggau	32	32	36	36	62	62	62
9	Kab. Melawi	7	7	12	12	31	34	45
10	Kab. Sekadau	26	32	29	29	30	32	32
11	Kab. Sintang	31	62	35	35	26	32	32
12	Kab. Kapuas Hulu	48	31	48	48	48	105	108
13	Kab. Ketapang	55	25	59	59	55	53	53

14	Kab. KKKU	27	27	31	31	27	28	41
15	TOTAL	405	476	462	462	556	665	668

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, Tahun 2019.

Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan Pariwisata suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Didalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha penyusun PDRB, nilai pertumbuhan sektor Pariwisata dihitung berdasarkan kategori Penyediaan Akomodasi, Makan Minum dan Subsektor Transportasi dengan pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 2.114

Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pariwisata Kalimantan Barat

TAHUN REALISASI / TARGET	PERKEMBANGAN PARIWISATA	
	KONTRIBUSI PADA PDRB (%)	LAJU PERTUMBUHAN PARIWISATA (%)
(1)	(2)	(3)
2016	5.65	5.28
2017	5.63	4.70
2018	5.77	7.63
2019	5.72	4.17

Sumber : BPS Provinsi Kalbar Tahun 2020.

Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan hasil penjabaran dari total hunian hotel (berbintang dan non berbintang) dengan total kunjungan para wisatawan. Wisatawan yang menjadi sasaran utama adalah Wisatawan Mancanegara dimana diharapkan para wisatawan mancanegara dapat menjadi wisatawan tetap untuk mengunjungi Kalimantan Barat.

Wisatawan Mancanegara yang mengunjungi Kalimantan Barat didominasi oleh Wisatawan Mancanegara yang berasal dari Negara Asean yang sementara ini didata melalui pintu masuk Supadio *International Airport*, PLBN Entikong, PLBN Masuk Badau dan PLBN Masuk Aruk.

Tabel 2.115

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus Kalbar

TAHUN	*WISMAN	**WISNUS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	70.740	3.226.934	3.297.674
2019	76.764	3.426.794	3.503.558

Sumber: *BPS Prov. Kalbar.

**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar

2.3.2.3. Pertanian

a. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Total Produksi tanaman pangan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 terus mengalami penurunan. Dari 1.784.838 ton menjadi 1.572.446, akan tetapi pada tahun 2016 mulai mengalami peningkatan kembali dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 1.736.867 ton. Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan menjadi 4,6 persen pada tahun 2019. Sedangkan NTP Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2019 masih dibawah angka 100 yang berarti nilai yang diterima petani tanaman pangan lebih kecil dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani tanaman pangan.

Tabel 2.116
Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2013-2019

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persen	9,71	3,66	5,20	8,19	8,55	9,8	4,6
NTP Sektor Tanaman Pangan		95,28	98,92	98,70	97,34	94,41	95,42	95,02
Total Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.784.838	1.721.852	1.572.446	1.656.009	1.700.753	1.758.127	1.736.867

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 2019, diolah.

*Data Sementara

b. Sub Sektor Hortikultura

Total Produksi Hortikultura pada tahun 2013 hingga tahun 2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 total produksi Hortikultura sebesar 460.310 ton lebih tinggi dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 397.123 ton, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2013, total produksi hortikultura pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2013 sebesar 4.666.839 ton. Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2018 yakni dari 0,51 persen menjadi 5,47 persen pada tahun 2019. Sedangkan NTP Sektor Hortikultura pada tahun 2019 konisten diatas 100 yang berarti nilai yang diterima petani hortikultura lebih besar dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani hortikultura.

Tabel 2.117
Realisasi Produksi Sub Sektor Holtikultura dan Sub Sektor Florikultura Tahun 2013-2019

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persen	2,70	7,08	11,64	6,33	14,71	4,96	5,47
NTP Sektor Hortikultura	n/a	103,08	104,64	n/a	103,04	101,09	100,76	100,85
Total Produksi Hortikultura	Ton	466.839	500.867	499.962	368.767	453.642	397.123	460.310

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat 2019.

*data sementara

c. Sub Sektor Perkebunan

1) Produksi Sub Sektor Perkebunan

Usaha perkebunan pada umumnya dikelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar. Perkembangan produksi jenis perkebunan besar komoditas Kelapa Sawit sebesar 580.343 ton tahun 2013 meningkat menjadi 2.680.844 ton tahun 2019, dengan produksi rata-rata 2.075.759,20 ton/tahun atau rata-rata pertumbuhan meningkat 13,67 persen setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan produksi kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi di sektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar kelapa sawit.

Selanjutnya jenis Perkebunan Rakyat dari tahun 2013 sebesar 828.387 ton sampai tahun 2019 sebesar 1.668.924 ton mengalami kenaikan sebesar 330.598 ton bila dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 24,7%. Komoditi yang dominan pada perkebunan rakyat adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada dan kakao.

Tabel 2.118
Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013-2019

JENIS PERKEBUNAN/ KOMODITI	Realisasi (Ton)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Perkebunan Besar	581.755	682.962	1.122.026	1.359.019	1.497.955	2.499.220	2.680.859
[01] Karet	1.412	1.456	1.464	1.000	1.017	460	15
[05] Kelapa Sawit	580.343	681.506	1.120.562	1.359.019	1.496.938	2.498.760	2.680.844
Perkebunan Rakyat	828.387	843.390	1.056.026	1.109.923	1.141.583	1.338.326	1.668.924
[01] Karet	260.166	258.728	257.896	260.717	269.163	265.082	257.685
[02] Kelapa	78.897	80.026	82.317	87.664	85.862	86.354	86.444
[03] Kelapa Sawit	477.530	492.993	703.770	748.850	772.633	973.442	1.311.338
[04] Kakao	2.678	2.664	2.685	2.645	2.557	2.517	2.439
[05] Lada	3.470	3.416	3.621	4.351	5.499	5.446	5.338
[06] Kopi	3.841	3.720	3.790	3.736	3.688	3.617	3.802
[07] Cengkeh	230	226	272	275	277	289	288
[08] Kemiri	244	193	185	170	173	146	151
[09] Pinang	667	702	755	811	936	936	936
[10] Tebu	441	415	416	418	410	111	1111
[11] Sagu	150	231	241	210	308	308	308
[12] Kapuk	10	10	10	5	5	5	5
[13] Jarak	1					-	-
[14] Enau/Aren	58	57	52	53	49	47	52
[15] Pala	4	10	16	18	23	26	27
TOTAL	1.410.142	1.526.352	2.178.052	2.468.942	2.639.538	3.837.546	4.349.783

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018 yakni dari 0,21 persen menjadi 7,54 persen pada tahun 2019. Sedangkan NTP Sektor Perkebunan pada tahun 2019 berada dibawah angka 100 yang berarti nilai yang diterima petani perkebunan lebih kecil dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani perkebunan.

Tabel 2.119
Perkembangan Capaian Indikator Sub Sektor Perkebunan (Ton) Tahun 2013-2019

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	14,43	5,91	9,36	9,21	13,26	7,75	7,54
NTP Sektor Perkebunan	Persen	104,46	92,83	93,38	91,46	97,88	94,44	89,38

Sumber : SIPD – Dinas Perkebunan Prov. Kalbar (Data BPS).

* data sementara

d. Sub Sektor Peternakan

Kondisi Umum Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat pada Tahun 2013-2019 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- Populasi ternak pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 kecuali Kambing, Babi, Ayam Buras dan Ayam secara keseluruhan.

- b. Produksi daging di tahun 2019 juga menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2018 kecuali Kambing dan Ayam secara keseluruhan.
- c. Untuk produksi daging kerbau pada tahun 2016, masih dalam satu pendataan dengan daging sapi, sedangkan di tahun 2017 data produksi daging kerbau telah didata secara terpisah dengan data produksi daging sapi
- d. Produksi telur di tahun 2019 untuk semua jenis telur menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2018 terkecuali telur itik.
- e. Produksi susu di tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 dengan produktivitas yang sama. Peningkatan produksi didorong adanya peningkatan populasi ternak sapi perah laktasi.
- f. Kondisi pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tahun 2019 meningkat lebih baik dibandingkan tahun 2018
- g. Untuk tren peningkatan populasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang meningkat dari 2,23% untuk ayam buras dan 55,11% untuk ayam ras pedaging. Sedangkan perlambatan populasi dari tahun 2013-2019 tertinggi pada ternak sapi perah (15,74%).

Kondisi umum peternakan dan kesehatan hewan ditunjukkan pada tabel 2.123 berikut:

Tabel 2.120
Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton) Tahun 2013-2019

No.	Jenis Data	Realisasi								Rata2 %	Pertumb %
		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017**	2018	2019*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Populasi Ternak										
1)	Sapi Potong	Ekor	140.204	151.376	160.018	164.113	170.174	143.307	154.382	157.177	4,98
2)	Sapi Perah	Ekor	169	49	43	50	52	111	170	73	15,74
3)	Kambing	Ekor	167.471	148.153	152.368	156.631	182.833	155.444	148.086	161.491	2,71
4)	Domba	Ekor	227	109	106	121	146	125	154	142	4,98
5)	Babi	Ekor	413.508	533.686	560.566	570.714	540.524	493.786	465.530	523.800	7,66
6)	Ayam Buras	Ekor	6.778.650	4.064.558	5.916.097	5.852.916	6.194.202	5.920.669	5.790.527	5.761.285	2,57
7)	Ayam Ras Petelur	Ekor	2.475.690	3.383.306	2.525.786	2.349.681	2.526.367	3.793.955	3.611.908	2.652.166	2,97
8)	Ayam ras Pedaging	Ekor	12.545.991	33.542.658	44.500.041	53.309.630	54.939.395	55.551.015	50.317.979	39.767.543	55,72
9)	Total Ayam	Ekor	21.800.331	40.990.522	52.941.924	61.512.227	63.659.964	65.265.639	59.720.414	48.180.994	34,22
10)	Itik (Bebek)	Ekor	617.481	582.396	580.828	545.298	576.960	566.059	556.149	580.593	1,57
2.	Hasil Produksi Ternak										
1)	Daging Sapi Potong	Ton	6.680	7.274	5.532	5.306	5.675	5.447	5.350	6.093	3,05
2)	Daging Kambing	Ton	43.955	31.690	265	358	401	411	417	15.334	19,99
3)	Daging Babi	Ton	1.653	3.410	22.425	18.058	16.176	12.079	11.435	12.344	158,51
4)	Daging Ayam Buras	Ton	6.680	8.109	4.891	3.744	3.899	3.417	3.478	5.465	9,40
5)	Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	43.955	31.690	44.436	40.778	45.034	53.396	55.535	41.179	3,63
6)	Total Daging Ayam	Ton	50.635	39.799	49.327	44.522	48.933	59.898	62.139	46.643	0,68
7)	Daging Itik	Ton	509	458	265	221	272	285	287	345	11,42
8)	Ternak Ruminansia Kecil	Ton	25.089	28.153	22.690	18.417	16.577	-	-	22.185	9,00
3.	Produksi Telur										
1)	Telur Ayam Buras	Ton	3.125	2.816	3.577	3.528	3.632	3.320	3.500	3.336	4,68
2)	Telur Ayam Ras Petelur	Ton	24.527	43.800	31.850	27.776	29.892	29.161	29.936	31.569	11,53
3)	Telur Itik	Ton	3.245	3.356	2.664	2.578	2.647	2.801	2.620	2.898	4,44
4.	Produksi Susu										
1)	Sapi Perah	Kg	36.000	42.000	34.992	43.200	44.928	62.464	76.968	40.224	6,86
5.	Produktivitas Susu										
1)	Sapi Perah	lt/ekor/hari	5.800	5.800	5.800	6.915	6.915	4.300	4.300	6.246	4,81
6.	Pemotongan										
1)	Sapi Potong	Ekor	53.221	47.919	40.061	37.123	38.583	36.033	35.657	43.381	7,44
2)	Kambing	Ekor	36.328	19.521	22.761	31.095	32.173	28.400	28.323	28.376	2,60
3)	Domba	Ekor	31			10	15	11	19	11	0,0
4)	Babi	Ekor	318.984	337.648	324.647	263.838	233.659	150.712	154.944	295.755	
7.	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular										
1)	Penyakit Avian Influenza										Bebas
2)	Penyakit Brucellosis										Bebas

3) Penyakit Hog Cholera	menurun 2%	Turun 100 %	menurun 5%	Bebas	Bebas	Bebas	Bebas
4) Penyakit Parasiter		Turun 27,73 %	Turun 50,43 %	Turun 100 %	Turun 24,97%		Turun 5%
5) Penyakit Rabies				Terkendali, kab Ktp, Mlw, Stg, KH, Ldk, Bky Skd, Sgu, Mpw, KKR, KKKU			

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat 2019.

* Data Sementara

Produksi Peternakan Kalimantan Barat terbagi menjadi produksi daging dan produksi telur, selain itu kinerja peternakan juga dilihat dari wilayah yang dapat dikendalikan Zoonosisnya. Laju pertumbuhan PDRB Peternakan merupakan bagian dari laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dikeluarkan datanya oleh BPS setahun sekali. NTP Peternakan merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan peternak dengan membandingkan antara harga yang diterima oleh peternak dengan harga yang dikeluarkan oleh peternak.

Tabel 2.121
Capaian Sektor Peternakan Tahun 2018-2019

Indikator	Realisasi Capaian	
	2018	2019*
(1)	(2)	(3)
Jumlah Wilayah Terkendali PHMS/ Zoonosis	4	6
Produksi Daging Peternakan (Ton)	78.526	79.556
Produksi Telur (Ton)	35.242	36.058
Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan (%)	5,51	5,02
NTP Peternakan	94,26	94,92

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dan BPS 2020.

* Data Sementara

2.3.2.4. Kehutanan

Sektor kehutanan memiliki empat indikator yang mengukur keberhasilan program dibidang kehutanan. Lahan kritis di Kalimantan Barat pada tahun 2017 secara umum capaiannya sama dengan tahun 2016, baik luas potensi lahan kritis, luas lahan kritis, lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan. Potensi lahan kritis tahun 2017 sebesar 859.578,46 ha, luas lahan kritis sebesar 835.635,23 ha, lahan kritis di dalam kawasan hutan sebesar 23.943,23 ha.

Kerusakan hutan tahun 2017 menunjukkan penurunan. Penurunan sekitar 1.160 hektar atau 39,46 persen dari tahun 2016 seluas 2.940 hektar. Penurunan kerusakan hutan disebabkan adanya penurunan jumlah titik api penyebab kebakaran hutan dan luas kebakaran hutan jika dibanding tahun sebelumnya. Titik api penyebab kejadian kebakaran hutan turun sebesar 62,62 persen, dari jumlah titik api 1.022 titik di tahun 2016 menjadi 640 titik tahun 2017. Luas kebakaran hutan juga menunjukkan perkembangan positif, terjadi penurunan luas kebakaran hutan sebesar 24,67 persen, dari luas kebakaran 1.841,85 Ha tahun 2016 menjadi 454,2 Ha tahun 2017.

Tabel 2.122
Kondisi Umum Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lahan Kritis					
1. Potensi Lahan Kritis (Ha)	2742035,88	2742035,88	2742035,88	2742035,88	2742035,88
2. Luas Lahan Kritis (Ha)	859.575,46	859.575,46	859.575,46	859.575,46	859.575,46
3. Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan (Ha)	835.632,23	835.632,23	835.632,23	835.632,23	835.632,23
4. Lahan Kritis di luar Kawasan Hutan (Ha)	23.943,23	23.943,23	23.943,23	23.943,23	23.943,23
Kerusakan Hutan					

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Luas Kerusakan Hutan (Ha)	550	520	580	490	500
2. Titik Api Penyebab Kejadian Kebakaran Hutan (Unit)	3.219	5.277	2.724	1.022	640
3. Luas Kebakaran Hutan (Ha)	178,45	2.948,00	2.894,56	1.841,85	454,2
Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
1. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	61.928,20	22.124,18	13.221,87	11.382,84	17.351,50
2. Luas Penghijauan (Ha)	557	8.931,43	143	1230	1840
3. Luas Lahan Reboisasi (Ha)	61.371,20	13.192,75	13.078,87	10.152,84	15.547,50
Produksi Kayu Bulat Asal Kayu (M³)					
Hak Pengusaha Hutan (M ³)	241.696,21	219.561,55	333.203,99	128.087,90	137.884,39
Hutan Tanaman Industri (M ³)	207.654,76	117.949,82	196.724,97	784.737,00	1.079.658,34
IPK/Hutan Hak/Hutan Adat (M ³)	817.370,68	338.667,09	218.030,75	34.541,17	35.318,86

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.123

Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Per Kabupaten Se Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapuas Hulu	2,248.00	260.00	510.00	870.00	
2	Sintang	2,360.00	235.00	860.00	240.00	260.00
3	Melawi	1,647.00	120.00	400.00	480.00	-
4	Sekadau	8,837.38	100.00	275.00	150.00	-
5	Sanggau	4,000.00	430.00	855.00	-	-
6	Landak	4,000.00	800.00	809.00	-	-
7	Mempawah	400.00	170.00	389.00	90.00	-
8	Kubu Raya	2,640.00	200.00	280.00	525.00	-
9	Sambas	1,620.00	80.00	665.00	50.00	375.00
10	Bengkayang	4,764.00	206.00	212.00	-	-
11	Ketapang	7,630.30	291.00	879.10	685.00	-
12	Kayong Utara	3,840.00	100.00	200.00	-	-
13	Kota Singkawang	175.00	-	37.50	37.50	-
14	Kota Pontianak	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kalbar.

Catatan: Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prov. Kalbar termasuk pembangunan HTI dan Hasil kegiatan BPDAS Kapuas.

Tabel 2.124

Kerusakan Hutan Per Kabupaten Se Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapuas Hulu	5,120.00	101.00	66.00	220.00	200.00
2	Sintang	4,980.00	2,620.00	860.00	460.00	320.00
3	Melawi	4,310.00	4,200.00	620.00	320.00	220.00
4	Sekadau	1,120.00	220.00	220.00	120.00	100.00
5	Sanggau	500.00	800.00	300.00	250.00	120.00
6	Landak	2,280.00	900.00	55.00	100.00	100.00
7	Mempawah	142.00	307.00	225.00	120.00	60.00
8	Kubu Raya	2,590.00	100.00	55.00	55.00	20.00
9	Sambas	3,120.00	780.00	500.00	260.00	120.00
10	Bengkayang	2,010.00	2,800.00	7.50	210.00	80.00
11	Ketapang	5,230.00	1,390.50	70.00	220.00	120.00
12	Kayong Utara	774.00	840.00	120.00	125.00	100.00
13	Kota Singkawang	200.00	2,063.11	330.00	480.00	220.00
14	Kota Pontianak	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kalbar.

Produksi Kehutanan Kalimantan Barat masih dilihat dari produksi kayu bulat selama setahun. Laju pertumbuhan PDRB Kehutanan merupakan bagian dari laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dikeluarkan datanya oleh BPS setahun sekali. Sedangkan Indeks Tutupan Hutan merupakan luas tutupan yang dipengaruhi oleh Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prov. Kalbar termasuk pembangunan HTI dan Hasil kegiatan BPDAS Kapuas.

Tabel 2.125
Capaian Sektor Kehutanan Tahun 2018-2019

INDIKATOR	REALISASI CAPAIAN	
	2018	2019*
(1)	(2)	(3)
Produksi Kayu Bulat (M ³)	981.200	1.114.280
Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK	(0,98)	(0,88)
Indeks Tutupan Hutan (ITH) Pembentuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,03	47,09

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Kalbar 2020.

* Data Sementara

Catatan: Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prov. Kalbar termasuk pembangunan HTI dan Hasil kegiatan BPDAS Kapuas.

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

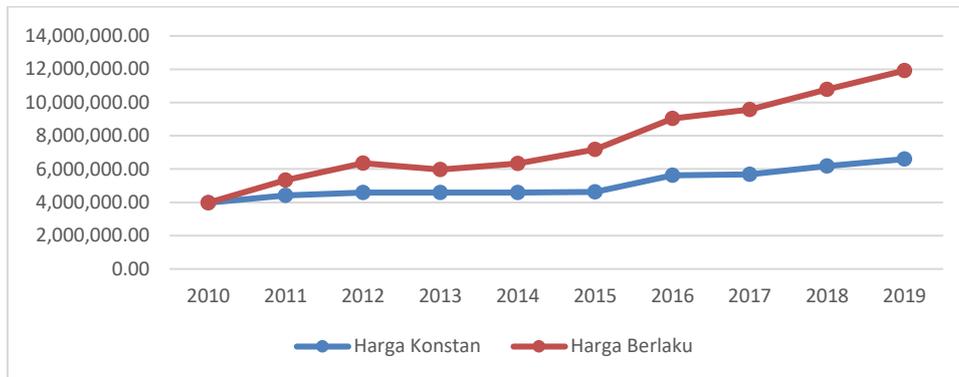
Sektor Pertambangan dan Penggalan sampai dengan tahun 2019 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.126
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertambangan dan Penggalan
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019

Tahun (Juta Rupiah)	PDRB	
	Harga Konstan	Harga Berlaku
(1)	(2)	(3)
2010	3,977,959.46	3,977,959.46
2011	4,411,733.16	5,334,935.74
2012	4,590,725.54	6,351,206.79
2013	4,590,067.65	5,966,680.44
2014	4,594,850.96	6,333,793.51
2015	4,622,382.74	7,181,002.80
2016	5,616,900.98	9,046,110.08
2017	5,675,012.53	9,582,723.22
2018	6,171,038.00	10,782,611.40
2019	6,596,833.50	11,916,492.62

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2019.

Gambar 2.19
Perkembangan PDRB Sektor Pertambangan dan Pengalihan
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2019



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020.

Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya mineral yang berlimpah dengan potensi yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota.Kalimantan Barat, sebagaimana tabel 2.131 di bawah ini.

Tabel. 2.127
Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalimantan Barat

Komoditas (1)	Lokasi (2)	Sumber Daya/ Potensi (3)	
Radio aktif			
Uranium	Kabupaten Melawi	24.112,00	Ton
Logam			
Emas	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	37.359.135,00	Kg
Timbal/Timah Hitam	Kabupaten Ketapang dan Kota Singkawang	444.393	Ton
Besi	Kab. Ketapang ,Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang & Sambas	102.880.224,00	Ton
Mangan	Kab. Bengkayang dan Sambas	2.409.735,00	Ton
Seng	Kabupaten. Ketapang	35.064	Ton
Bauksit	Kab. Pontianak, Bengkayang, Sanggau, Landak, Ketapang, Sekadau, Kuburaya & Kayong Utara	4.376.036.722,00	Ton
Antimoni	Kabupaten. Kapuas Hulu	149.990,00	Ton
Cinnabar	Kabupaten. Kapuas Hulu	5.306.283,00	Ton
Barit	Kabupaten. Ketapang	1.932,00	Ton
Non Logam			
Mika	Kabupaten. Sanggau dan Sintang	524,00	Ton
Batu Gamping	Kabupaten Kapuas Hulu, Bengkayang, Sambas, Ketapang	30.000.000,00	Ton
Zirkon	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	1.570.210.100,00	Ton
Feldspar	Kabupaten Sanggau, Sintang dan Sambas	2.333.667,00	Ton
Kaolin	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	316.858.857,00	Ton
Ball Clay	Kabupaten Bengkayang	10.569.307,00	Ton
Pasir Kuarsa	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	629.581.456,75	Ton
Intan	Kabupaten Landak	8.311,25	Karat
Kristal Kuarsa	Kabupaten Ketapang, Landak dan Melawi	810,06	Ton

Komoditas	Lokasi	Sumber Daya/ Potensi	
(1)	(2)	(3)	
Batubara			
Batubara	Kabupaten Sintang, Melawi, Kapuas Hulu	186.662.875,00	Ton
Gambut	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	12..577.145.000,00	Ton
Batuan			
Andesit	Kabupaten Pontianak, Sintang, Melawi, Sanggau, Bengkayang & Sambas	1.040.989.262.858,59	Ton
Basal	Kabupaten Sanggau, Sambas & Bengkayang	6.448.838.134,00	Ton
Granit	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	1.565.404.407.811,21	Ton
Pasir Sungai	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	17.681.122.810,96	Ton
Sirtu	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	110.851.194.260,90	Ton
Minyak dan Gas Bumi			
Minyak dan Gas Bumi	Cekungasn Ketungau dan Cekungan Melawi	1.073.700.000,00	STBM

Sumber : Dinas ESDM, 2017.

Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan di Kalimantan Barat baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, dan Penjualan serta Kegiatan Pasca Tambang.

Jumlah Perizinan sektor Pertambangan Mineral & batubara Provinsi Kalbar yang telah dikeluarkan atau diberikan kepada Perusahaan sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebanyak 484 IUP yang terdiri dari 147 IUP Komoditas Mineral Logam dan Batubara, 337 IUP Komoditas Mineral Non Logam dan Batuan, 2 IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian Logam, 6 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan 9 Izin SKT Pertambangan.

Sedangkan berdasarkan tahap kegiatannya, jumlah IUP di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 195 IUP Eksplorasi dan 289 IUP Operasi Produksi. Dari jumlah 147 IUP Komoditas Logam dan Batubara di Kalimantan Barat, berdasarkan status perizinan di Dirjen Minerba KESDM diketahui rincian status IUP kategori CNC sebanyak 143 izin dan IUP kategori Non CNC sebanyak 4 izin (sedang proses rekonsiliasi).

Jumlah IUP yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota, namun belum disesuaikan menjadi Izin Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebanyak 107 IUP. Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data terakhir yang belum menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang adalah sebanyak 239 IUP.

Dilihat dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tersebut, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (luran tambang) Kalimantan Barat (Prov/Kab/Kota) tahun 2017 sebesar Rp. 773.450.203.849,50 terdiri dari Landrent (luran tetap) sebesar Rp. 130.543.818.487,50 dan Royalti (luran produksi) sebesar Rp. 278.806.069.537,00,. Sedangkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sebesar Rp. 123.752.031.016, terdiri dari Landrent (luran tetap) sebesar Rp. 20.887.010.958, dan Royalti (luran produksi) sebesar Rp. 4.278.617.154,-. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 sebesar Rp. 143.297.221.065,- terdiri dari Landrent (luran tetap) sebesar Rp. 32.640.192.473,- dan Royalti (luran produksi) sebesar Rp. 110.657.028.592,-. Realisasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (luran tambang) Kalimantan Barat (Prov/Kab/Kota) periode Januari 2019 hingga 31 Desember 2019 sebesar Rp. 279.446.609.788,00 terdiri dari Landrent (luran tetap) sebesar Rp.48.816.904.040,00 dan Royalti (luran produksi) sebesar Rp. 230.446.609.788,00.

Untuk potensi cekungan air tanah, berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) titik cekungan air tanah yaitu cekungan air tanah Paloh seluas 561 km², cekungan air tanah Sambas (3.178 km²), cekungan air tanah Singkawang (728 km²), cekungan air tanah Pontianak (22.620 km²), cekungan air tanah Sintang (24,74 km²), cekungan air tanah Kapuas Hulu (7.107 km²) dan PalangkarayaBanjarmasin (95.980 km²).

Dalam misi mewujudkan masyarakat sejahtera melalui meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara. Kinerja pencapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertambangan atas dasar harga berlaku. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan ADHK Kalimantan Barat sebesar 7,45 persen. Sedangkan pada tahun 2019, angka laju pertumbuhan PDRB sektor pertambangan atas dasar harga berlaku Kalimantan Barat sebesar 7,47 persen.

2.3.2.5.1. Ketenagalistrikan

Pembangkit listrik terdiri pembangkit listrik PLN, pembangkit listrik swasta dan *captive power* serta pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan. Sampai dengan akhir tahun 2019, produksi energi listrik sebesar 2,887,957,047 kWh meningkat 5,37% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.128

Persentase Peningkatan Produksi Listrik Per Tahun Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2019

Tahun	Produksi Listrik (kWh)	Persentase Peningkatan (%)
(1)	(2)	(3)
2012	1,835,600,289	10.38
2013	2,105,959,618	14.73
2014	2,225,902,325	5.70
2015	2,340,324,532	5.14
2016	2,552,311,860	9.06
2017	2,683,548,654	5.14
2018	2,740,840,423	2.13
2019	2,887,957,047	5.37

Sumber : BPS Provinsi Kalbar, 2020.

Dari jumlah tersebut, produksi energi listrik ini didominasi pembelian dan sewa dari luar PLN sebesar 84,8 %. Untuk Produksi sendiri 9 % oleh pembangkit tenaga diesel (PLTD), Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) 5,9 % Pembangkit Tenaga Gas (PLTG) 0,2 %, pembangkit PLTMH sebesar 0,1 % dan PLTS sebesar 0,001 %.

Ratio elektrifikasi pada akhir tahun 2019 sebesar 98,68 % dengan jumlah pelanggan 1.190.318 pelanggan. Sementara Ratio Desa Berlistrik pada tahun 2017 berdasarkan data PLN sebesar 77 %.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi Energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan berdasarkan inventarisasi potensi tersebut adalah sebagai berikut :

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 MW, suatu potensi yang tidak kecil nilainya sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal.

Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m². Kalimantan Barat yang dilintasi Garis Khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m² sampai dengan 9.583,9 Wh/m² sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaic atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut. Pada tahun 2017, potensi tenaga surya di Kalimantan Barat telah dimanfaatkan dengan adanya 11 (sebelas) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dari 11 unit PLTS tersebut, tiga diantaranya merupakan milik PT. PLN dengan total kapasitas terpasang sebesar 180 kilowatt.

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 megawatt. Pemanfaatan potensi energi air di Kalimantan Barat telah dilakukan PT. PLN dengan adanya enam pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas total 2.030 kilowatt. Selain itu pemanfaatan energi air juga dimanfaatkan melalui pembangunan satu unit pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) berkapasitas total 200 kilowatt.

Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Supadio, secara umum kecepatan angin rata-rata 26 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 626 knot.

Dengan melihat potensi perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat yaitu sebesar 921.560 ton per tahunnya, maka dapat diperkirakan besar potensi daya listrik yang mampu dihasilkan. Dari 921.560 ton produksi TBS (Tandan Buah Segar) per tahun akan dihasilkan CPO sebanyak 22% atau sekitar 202.743 ton CPO. Jika kita memperkirakan bahwa 50% dari CPO tersebut dapat digunakan sebagai biodiesel, maka dapat dihasilkan sekitar 101.371 ton biodiesel. Jika kita anggap 1 liter = 1 kg, maka biodiesel yang dihasilkan setara dengan 101.371.000 liter per tahunnya. Potensi daya yang dihasilkan dari biodiesel tersebut adalah 893.907.909,09 kWh per tahunnya.

Dampak lain perkembangan pesat produksi minyak sawit mentah adalah limbah cair kelapa sawit, yang sering disebut sebagai Palm Oil Mill Effluent atau POME. Setiap ton tandan buah segar yang diolah menghasilkan limbah cair sekitar 50% dibandingkan dengan total limbah lainnya, sedangkan tandan kosong sebanyak 23% (Sutarta dalam Wibisono, 2013).

Limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent atau POME) adalah limbah cair yang berminyak dan tidak beracun, berasal dari proses pengolahan minyak kelapa sawit, namun limbah

cair tersebut dapat menyebabkan bencana lingkungan apabila tidak dimanfaatkan dan dibuang di kolam terbuka karena akan melepaskan sejumlah besar gas metana dan gas berbahaya lainnya ke udara yang menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca. Tingginya kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) sebesar 50.00070.000 mg/l dalam limbah cair kelapa sawit memberikan potensi untuk dapat di konversi menjadi listrik dengan menangkap biogas (gas metana) yang dihasilkan melalui serangkaian tahapan proses pemurnian. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit berkisar 600 700 liter/ton tandan buah segar (TBS). Limbah cair kelapa sawit ini kemudian dimanfaatkan menjadi tenaga listrik melalui proses anaerob digestion dengan teknologi *covered lagoon* atau *continuos stirred tank reactor* (CSTR). Limbah cair sawit memiliki kandungan organik kemudian difermentasi dengan bakteri untuk menghasilkan biogas yang mengandung gas methane.

Potensi biomassa di Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki potensi yang cukup besar jika dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Potensi ini didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antara lain : sekam padi yang memiliki potensi setara dengan 73.107.507,20 SLM atau dalam bentuk energi listrik setara dengan 664.613.701,82 kWh setiap tahunnya, karet setara dengan 101.766.582 SLM atau dalam bentuk energi setara dengan 925.150.745,45 kWh per tahun, kelapa setara dengan 1.808.400 SLM atau 16.440.000 kWh per tahun, kopi setara dengan 1.628.676 SLM atau 14.806.145,45 kWh per tahunnya, coklat/kakao setara dengan 974.970 SLM atau 8.863.363,64 kWh per tahunnya.

Potensi energi biogas di Provinsi Kalimantan Barat dapat diperoleh dari limbah ternak yaitu sapi, kerbau, babi, maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, pengumpulan data dan analisa yang dilakukan maka potensi energi dari pemanfaatan limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai 6.084.067,95 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan 55.309.708,64 kWh.

Selain tenaga surya dan tenaga air, sistem kelistrikan di Kalimantan Barat juga mencakup pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar biomassa dengan kapasitas total 7.000 kilowatt.

2.3.2.5.2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Berdasarkan hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengklasifikasikan kandungan uranium di Kalimantan Barat (Kecamatan Nanga Ella, Kabupaten Melawi) sebagai cadangan terukur/terbukti sebesar 900 ton, dengan cadangan terindikasi sebesar 6.962 ton, cadangan tereka sebesar 1.737 ton, dan cadangan hipotetik sebesar 14.517 ton. Seiring dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pemerintah Kalbar mendorong Pemerintah Pusat agar pemanfaatan potensi uranium tersebut di atas dapat dioptimalkan sebagai bahan bakar pengembangan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu upaya penerapan kebijakan ini adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN) BATAN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 298.3/SEN/RN01.01/12/2016 dan 01/PKBAPPEDA/2016 tentang Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

Sebelumnya, sudah pernah dilakukan Kajian Tapak oleh BATAN berupa Penentuan Tapak Potensial PLTN dengan Metode SIG Di Wilayah Pesisir Provinsi Kalimantan Barat (Susiaty, 2014). Dalam kajian tersebut, pemilihan tapak PLTN, IAEA telah mengeluarkan pedoman (IAEA

Safety Guide NSR3) dan peraturan BAPETEN (Perka BAPETEN No. 5 tahun 2007) tentang evaluasi tapak untuk mendapatkan tapak PLTN yang aman dan menjamin keselamatan. Untuk mempersiapkan program PLTN di Kalimantan Barat, BATAN telah melakukan penelitian di sepanjang pesisir Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan tapak potensial PLTN di wilayah pesisir Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berdasarkan kriteria pembobotan dan pemodelan spasial dan SIG. Penentuan tapak potensial didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: kemiringan lereng, litologi, geologi, topografi, curah hujan, kerawanan bencana, jarak ke badan air, posisi daerah pemukiman, tataguna lahan, lahan gambut, hidrogeologi, dll. Berdasar hasil pembobotan dan pemeringkatan diperoleh 4 lokasi yang sesuai untuk dijadikan sebagai tapak potensial PLTN, diantaranya berada di wilayah pesisir yang terdapat di Kecamatan Kendawangan, Sukadana Matan Hilir Utara dan Matan Hilir Selatan.

2.3.2.6. Perdagangan

Sektor perdagangan Kalimantan Barat pada sisi ekspor banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Akan tetapi kinerja nilai ekspor di Kalimantan Barat dari tahun 2014 dan 2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, total nilai ekspor sebesar 564.043.454 US\$ mengalami penurunan sebesar 13,49 % dibandingkan tahun 2014 dengan nilai ekspor 651.986.280 US \$, namun di tahun 2016 kinerja dalam ekspor Kalimantan Barat sudah mulai membaik dengan kenaikan nilai ekspor sebesar 623.422.909 US \$, kenaikan nilai ekspor sebesar 10,53 persen dibandingkan tahun 2015, begitu juga volume ekspor meningkat 61,43 persen dibandingkan tahun 2015. Peningkatan nilai ekspor terus mengalami perkembangan positif pada tahun 2017, dimana tercatat terjadi peningkatan 32,70 persen menjadi 827,300 Juta US\$. Hingga perkembangan volume ekspor pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar 5.561.220.000 menjadi 15.326.240.000 dengan nilai 1.168.660.000 US \$ sedangkan impor juga naik menjadi 408.740.000 dengan nilai 482.250.000 US \$.

Sedangkan nilai dari kegiatan impor dari Tahun 2013 sampai tahun 2019, mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tren penurunan terjadi mulai tahun 2015 dan berlanjut hingga tahun 2019.

Tabel 2.129

Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat Tahun 2013 s/d 2019

Tahun	Ekspor		Impor	
	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	16.775.583.120	1.348.607.972	611.590.475	498.236.319
2014	1.171.286.892	651.986.280	752.952.826	500.262.690
2015	679.809.314	564.043.454	680.401.373	627.817.186
2016	1.097.403.262	623.422.909	475.098.044	351.835.578
2017	3.243.290.000	827.300.000	440.410.000	269.070.000
2018	9.765.020.000	1.006.960.000	537.010.000	463.070.000
2019	15.326.240.000	1.168.660.000	408.740.000	482.250.000

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Sektor perdagangan Kalimantan Barat pada sisi ekspor banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Ekspor Kalimantan Barat didominasi oleh 4 (empat) golongan barang yaitu Bahan Kimia Anorganik; Bijih, Kerak dan Abu Logam; Kayu, Barang dari Kayu; dan Lemak dan Minyak Hewan/Nabati.

Tabel 2.130
Ekspor Kalimantan Barat Menurut Golongan Barang

Golongan Barang (HS)	Nilai FOB (Juta US \$)	
	JanDes 2018	JanDes 2019
(1)	(2)	(3)
Bahan Kimia Anorganik (HS28)	457.69	375.77
Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26)	253.55	427.77
Kayu, Barang dari Kayu (HS44)	103.12	62.79
Lemak & Minyak Hewan / Nabati (HS15)	76.70	131.87
Karet dan Barang dari Karet (HS40)	55.46	86.27
Ampas / Sisa Industri Makanan (HS23)	21.30	25.13
Buahbuahan (HS08)	13.56	15.74
Ikan dan Udang (HS03)	3.52	3.95
Tembakau (HS24)	13.77	17.24
Berbagai Makanan Olahan (HS21)	1.45	2.25
Lainnya	13.11	19.88
Total	1,013.23	1,168.66

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2020.

Tujuan Negara Ekspor Kalimantan Barat masih didominasi oleh Negara di Asia yaitu China, Malaysia, Jepang dan India.

Tabel 2.131
Ekspor Kalimantan Barat Menurut Menurut Negara Tujuan

NEGARA TUJUAN	Nilai FOB (Juta US\$)	
	JanDes 2018	JanDes 2019
(1)	(2)	(3)
TIONGKOK	41.21	499.79
MALAYSIA	8.76	342.62
JEPANG	9.46	77.67
INDIA	15.02	169.08
VIETNAM	1.14	11.39
THAILAND	0.53	8.19
TAIWAN	0.54	7.38
ARGENTINA	0.82	15.38
HUNGARIA		4.52
LAINNYA	935.75	32.64
Total	1,013.23	1,168.66

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2020.

Dari sisi Impor Kalimantan Barat masih mengalami peningkatan nilai transaksi dengan didominasi dengan 4 (empat) golongan barang yaitu Mesinmesin/Pesawat Mekanik; Bahan Bakar Mineral; Mesin/Peralatan Listrik; dan Kapal Laut dan Bangunan Terapung.

Tabel 2.132
Impor Kalimantan Barat Menurut Golongan Barang

Golongan Barang (HS)	Nilai CIF (Juta US\$)	
	JanDes 2018	JanDes 2019
(1)	(2)	(3)
Mesinmesin / Pesawat Mekanik (HS84)	59.41	134.1
Bahan Bakar Mineral (HS27)	224.78	198.48
Mesin / Peralatan Listrik (HS85)	8.04	30.71
Bahan Kimia Anorganik (HS28)	1.69	11.21
Perangkat Optik (HS90)	0.69	5.59
Besi dan Baja (HS72)	1.86	10.27
Bendabenda dari Besi dan Baja (HS73)	11.87	25.77
Kapal Laut dan Bangunan Terapung (HS89)	48.29	5.91
Bijihbijian berminyak (HS12)	10.38	10.02
Plastik dan Barang dari Plastik (HS39)	5.26	5.9
Lainnya	90.85	44.29
Total	463.12	482.25

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2020.

Negara Asal Impor Kalimantan Barat masih didominasi oleh Negara di Asia yaitu China, Malaysia dan Singapura.

Tabel 2.133
Impor Kalimantan Barat Menurut Menurut Negara Asal Barang

NEGARA ASAL BARANG	Nilai CIF (Juta US\$)	
	JanDes 2018	JanDes 2019
(1)	(2)	(3)
TIONGKOK	141.58	195.16
MALAYSIA	144.60	195.61
JEPANG	6.10	5.12
INDIA	9.07	8.69
SINGAPURA	124.17	44.74
THAILAND	2.51	1.26
JERMAN	0.65	3.28
KANADA	0.02	0.01
AMERIKA SERIKAT	7.05	5.47
LAINNYA	27.37	22.91
Total	463.12	482.25

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2020.

Peningkatan nilai ekspor Kalimantan Barat terus mengalami perkembangan positif (surplus). Diharapkan trend positif ini terus berlanjut dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi Kalimantan Barat.

Tabel 2.134
Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat Tahun 2018 s/d 2019

Tahun	Ekspor		Impor		Total Transaksi
	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Nilai (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	9.765.020.000	1.006.960.000	537.010.000	463.070.000	1.476.350.000
2019	15.326.240.000	1.168.660.000	408.740.000	482.250.000	1.650.910.000

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2020.

Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan Perdagangan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Didalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha penyusun PDRB, nilai pertumbuhan sektor Perdagangan dihitung berdasarkan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel 2.135

Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Perdagangan Kalimantan Barat

TAHUN REALISASI / TARGET	PERKEMBANGAN PERDAGANGAN	
	KONTRIBUSI PADA PDRB (%)	LAJU PERTUMBUHAN PERDAGANGAN (%)
(1)	(2)	(3)
2018	14,01	4,59
2019	14,26	5,54

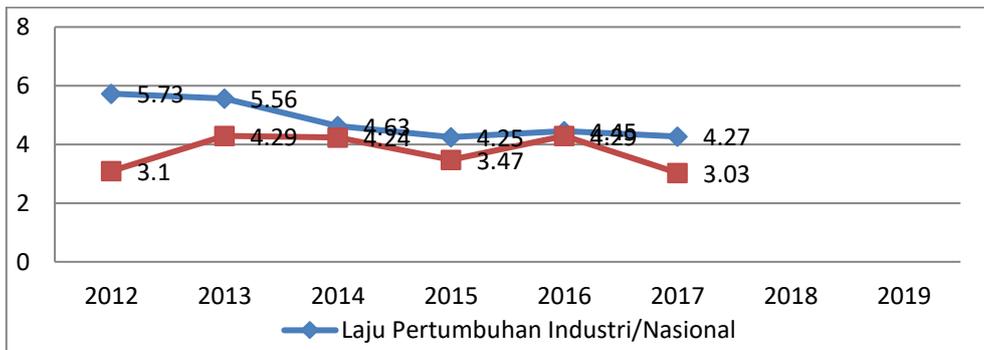
Sumber : BPS Provinsi Kalbar Tahun 2020.

2.3.2.7. Perindustrian

Sektor industri sampai dengan tahun 2017 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian, dalam satu dasawarsa terakhir peranannya terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan pertumbuhan setiap tahunnya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Pada tahun 2000 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 24,15 persen, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 16,21 persen. Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 sebesar 16,12 persen.

Gambar 2.20

Perkembangan Laju Pertumbuhan Industri Nasional dan Kalimantan Barat



Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2019. (Data Diolah)

Selain berakibat pada lambannya pergerakan perekonomian Kalimantan Barat, kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari komoditas primer Kalimantan Barat yang cenderung meningkat akhirakhir ini terutama sektor pertanian (termasuk perkebunan) dan pertambangan. Penurunan peranan sektor industri terutama disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan Kalimantan Barat mencari alternatif bagi pengembangan

industri lain yang memberi dayaungkit terhadap perekonomian. Bagaimanapun kedepan daerah Kalimantan Barat harus segera menerapkan strategi percepatan proses transformasi sektor industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah produksi, berdaya saing dan efisien. Percepatan penumbuhan Kawasan Industri untuk lokalisasi pemenuhan infrastruktur dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah.

Sebagai langkah dalam penumbuhan dan pengembangan industri Kalimantan Barat, Pemprov Kalimantan Barat melalui Dinas Perindag Prov. Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat 2017-2037 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. RPIP tersebut telah mengakomodir 7 (tujuh) komoditi industri unggulan serta sebagai wadah sinergitas antar stakeholder dalam menentukan langkah dan arah kedepannya dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri Kalimantan Barat. Hal tersebut juga merupakan langkah dalam mencapai Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang pada Tahun 2025 yang mencanangkan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang ditandai dengan Kemampuan seimbang antara IKM dan Industri Besar.

RPIP Kalimantan Barat 2017-2037 juga diharapkan dapat menjadi wadah sinergitas antar stakeholder dalam pemecahan masalah-masalah lainnya terkait dengandengan kendala yang dihadapi sektor industri seperti : kurang memadainya sarana infrastruktur daerah seperti jalan, pelabuhan, energi, ketersediaan air bersih, pembangunan kawasan industri, kemudahan investasi, dll, dimana dengan diatasinya permasalahan-permasalahan yang ditemui akan dapat menumbuhkembangkan unit usaha industri baik Industri Kecil, Menengah, maupun Besar termasuk hilirisasi komoditas yang ada di Kalimantan Barat.

Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan Industri suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Didalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha penyusun PDRB, nilai pertumbuhan sektor Industri dihitung berdasarkan kategori Industri Pengolahan.

Tabel 2.136

Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Kalimantan Barat

TAHUN REALISASI / TARGET	PERKEMBANGAN INDUSTRI	
	KONTRIBUSI PADA PDRB (%)	LAJU PERTUMBUHAN INDUSTRI (%)
(1)	(2)	(3)
2018	16,50	2,75
2019	16,40	7,49

Sumber : BPS Provinsi Kalbar Tahun 2020.

2.3.2.8. Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Sejak Pra Pelita s/d tahun 2013 telah datang transmigran sebanyak 127.554 KK / 536.540 jiwa ke Kalimantan Barat. Sepanjang tahun tahun 2008-2013 sebanyak 5.277 KK / 20.380 jiwa (TPS 3.142 KK / 12.620 jiwa dan TPA 2.135 KK / 5.277 jiwa). Sejak adanya program transmigrasi sampai pada tahun 2013 telah dibangun Unit Pemukiman Transmigrasi sebanyak 344 UPT. Dari jumlah tersebut 216 UPT telah menjadi desa baru dan 11 kecamatan baru.

Tabel 2.137
Penempatan Transmigrasi di Kalimantan Barat 2013-2019

Tahun	Jenis Transmigrasi		Jumlah
	Umum (jiwa)	Swakarsa Mandiri (jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	455	133	588
2014	160	-	160
2015	245	-	245
2016	371	-	371
2017	170	-	170
2018	258	-	258
2019	-	-	-

Sumber: olahan dari BPS. statistikmobilitaspendudukantenagakerja, Tahun 2019.

Dalam menyukseskan program transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah bekerja sama dengan Pemerintah provinsi dengan Daerah Asal Transmigrasi. Ada 10 Pemprov. Daerah Asal Transmigrasi: Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Transmigrasi Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

2.3.3. Fokus Urusan Penunjang, Pengawasan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

2.3.3.1. Sekretariat Daerah

- a. Penataan perundang-undangan.

Tabel 2.138
Penataan Perundang-Undangan

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penataan perundangundangan.	100%	162%

Sumber : Biro Hukum Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- b. Presentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui media Cetak Elektronik Online dan Media Luar Ruang.

Tabel 2.139

Presentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan Melalui Media Cetak Elektronik Online dan Media Luar Ruang

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Presentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media Cetak Elektronik Online dan Media Luar Ruang.	77,50%	97,06%

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- c. Presentase Pelayanan pimpinan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standar Pelayanan.

Tabel 2.140

Presentase Pelayanan Pimpinan Pemprov Kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standar Pelayanan

No.	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Presentase Pelayanan Pimpinan Pemprov Kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standar Pelayanan.	82,50%	70,40%

Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- d. MOU dan Perjanjian Kerjasama.

Tabel 2.141

MoU dan Perjanjian Kerjasama

No	Indikator	Capaian Jumlah (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MoU dan Perjanjian Kerjasama	100 %	100 %

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- e. Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tabel 2.142

Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan.	100%	100%

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- f. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum).

Tabel 2.143

Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum)

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum).	AMPRAS	20%

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- g. Pembentukan Kabupaten.

Tabel 2.144

Pembentukan Kabupaten

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembentukan Kabupaten	3 AMPRAS	20 %

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- h. Segmen Batas Daerah.

- i.

Tabel 2.145
Segmen Batas Daerah

No	Indikator	Capaian (Jumlah)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Segmen Batas Daerah	27	3

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- j. Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Tabel 2.146
Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota Yang Penyelenggarakan Kerjasama

No	Indikator	Capaian (Jumlah)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri.	1	100

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- k. Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan.

Tabel 2.147
Persentase Peningkatan Pengelolaan Wilayah Perbatasan

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan.	100%	100%

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- l. Persentase pelayanan pelayanan umum dan pimpinan.

Tabel. 2.148
Persentase Pelayanan Pelayanan Umum dan Pimpinan

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase pelayanan pelayanan umum dan pimpinan.	87,81%	65,27%

Sumber : Biro Umum Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- m. Presentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran.

Tabel 2.149
Presentase Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Ditata Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Presentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran.	41%	73%

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

n. IKM Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.150

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IKM Provinsi Kalimantan Barat.	80,33 (baik)	83,22

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

o. Presentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem.

Tabel 2.151

Presentase Perangkat Daerah Yang Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Berdasarkan Merit Sistem

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit system.	20%	20%

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020.

p. Nilai SAKIP.

Tabel 2.152

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2019

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,04	21,55
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,72	14,44
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,31	10,52
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,32	6,62
e.	Capaian Kinerja	20	12,61	12,72
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,01	65,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber : (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2020).

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa **Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai 65,85 atau predikat B**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat **menunjukkan hasil yang baik**.

q. Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja.

Tabel 2.153

Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja

No	Indikator	Capaian (Nilai)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja.	10,31	10,52%

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar, Tahun 2020. (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2020).

2.3.3.2. Sekretariat DPRD

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD.

Tabel 2.154

Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD

No	Indikator	Capaian	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD.	0	79

Sumber : Sekretariat DPRD Prov. Kalbar, Tahun 2020.

2.3.3.3. Pengawasan

- a. Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 2.155

Persentase Penyelesaian Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan BPK

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK.	85%	85,42%

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- b. Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti.

Tabel 2.156

Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP Yang Selesai Ditindaklanjuti

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti.	85%	95,02%

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- c. Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP.

Tabel 2.157

Persentase Penyelesaian Temuan Keuangan Hasil Pemeriksaan APIP

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP.	85%	81,79%

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- d. Level maturitas SPIP.

Tabel 2.158

Level Maturitas SPIP

No	Indikator	Capaian (Level)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Level maturitas SPIP.	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2020.

e. Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional

Tabel 2.159

Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional

No	Indikator	Capaian (Jumlah)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional.	5	5

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2020.

f. Level Kapabilitas APIP

Tabel 2.160

Level Kapabilitas APIP

No	Indikator	Capaian (Level)	
		Tahun 2018	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Level Kapabilitas APIP	Level 3 DC	Level 3

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2020.

g. Jumlah pedoman/standar pengawasan internal

Tabel 2.161

Jumlah Pedoman/Standar Pengawasan Internal

No	Indikator	Capaian (Jumlah)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah pedoman/standar pengawasan internal.	10	19

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2020.

h. Hasil survey kepuasan eksternal (dari PD)

Tabel 2.162

Hasil Survey Kepuasan Eksternal

No	Indikator	Capaian (Jumlah)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hasil survey kepuasan eksternal (dari PD).	10	n.a

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2020.

i. Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti

Tabel 2.163

Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK Yang Selesai Ditindaklanjuti

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti.	88%	90,58%

Sumber : Inspektorat Prov. Kalbar, Tahun 2020.

2.3.3.4. Keuangan Daerah

a. Pencapaian target pendapatan daerah

Persentase pencapaian target pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2018 sebesar 100 % sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 106,32 % untuk pajak daerah dan 96,23% untuk retribusi daerah. Gubernur Kalbar berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan layanan publik di perangkat daerah (PD) dengan menyisir masalah berdasarkan pengaduan masyarakat agar layanan publik di seluruh PD dapat mencapai 90% pada akhir RPJMD.

2.3.3.5. Perencanaan

a. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja

Tabel 2.164

Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja

No	Indikator	Capaian (Nilai)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,04	21,55%

Sumber : Bappeda Prov. Kalbar, Tahun 2020. (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2020).

b. Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja

Tabel 2.165

Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja

No	Indikator	Capaian (Nilai)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	21,04	21,55%

Sumber: Bappeda Prov. Kalbar, Tahun 2020. (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Tahun 2020).

2.3.3.6. Penelitian dan Pengembangan

a. Jumlah Rekomendasi mendukung kebijakan daerah

Tabel 2.166

Jumlah Rekomendasi Mendukung Kebijakan Daerah

No	Indikator	Capaian	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah.	n.a	14

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar, Tahun 2020.

b. Jumlah Inovasi

Tabel 2.167

Jumlah Inovasi

No	Indikator	Capaian (Jumlah)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inovasi	n.a	21

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- c. Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta

Tabel 2.168

Persentase Sistem Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan Yang Baik Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.	n.a	89,40%

Sumber : Badan Penghubung Prov. Kalbar, Tahun 2020.

- d. Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta

Tabel. 2.169

Persentase Kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta

No	Indikator	Capaian (%)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.	n.a	92,16%

Sumber : Badan Penghubung Prov. Kalbar, Tahun 2020.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Indeks Wiliamson

Tujuan dari pada pembangunan tidak hanya semata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tetapi mengurangi kesenjangan antar wilayah juga harus menjadi perhatian penting bagi para pengambil kebijakan. Pembangunan yang hanya bertumpu pada pertumbuhan tinggi namun mengabaikan pemerataan sama artinya memperlebar jurang ketidakadilan, dalam bahasa sederhana akan menciptakan suatu kondisi dimana kelompok yang berpendapatan tinggi akan semakin kaya dan kelompok berpendapatan rendah akan semakin tertekan (miskin). Fenomena ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat akan sangat mudah memicu konflik sosial yang bersifat horisontal maupun vertikal, bahkan yang sangat dikhawatirkan adalah meningkatnya masalah-masalah sosial di masyarakat. Karena itu membangun keadilan sosial bagi setiap warga masyarakat merupakan tugas konstitusional yang harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara negara. Penyelenggaraan pembangunan yang terus menerus dilakukan perlu mendapat umpan balik yaitu dengan mengetahui sejauhmana hasil-hasil pembangunan telah dirasakan secara merata oleh sebagian besar penduduk atau bahkan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari capaian produk domestik regional, pertumbuhan ekonomi atau bahkan sejumlah infrastruktur yang berhasil

dibangun tetapi menjadi jauh lebih penting ketika hasilhasil pembangunan tersebut diatas sudah dinikmati secara merata kepada seluruh warga masyarakat. Untuk mengetahui capaian tingkat pemerataan pembangunan daerah di Kalimantan Barat dapat digunakan salah satu pendekatan yaitu indeks ketidakmerataan pembangunan Williamson suatu indeks yang mengukur tingkat pembangunan daerah dilihat dari pendapatan per kapita yang diterima oleh masyarakat. Perkembangan Pemerataan Pembangunan di Kalimantan Barat Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.170

Perkembangan Kemerataan Pembangunan di Kalimantan Barat Tahun 2016-2018

No	Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
1.	2016	0,43709	Tingkat ketimpangan termasuk katagori sedang
2.	2017	0,28987	Tingkat ketimpangan termasuk katagori rendah
3.	2018	0,27156	Tingkat ketimpangan termasuk katagori rendah.
4.	2019	0.27648	Tingkat ketimpangan termasuk katagori rendah.

Sumber : Bappeda Prov. Kalbar Tahun 2020.

Berdasarkan hasil analisis seperti pada tabel diatas menghasilkan Indeks Williamson pada tahun 2017 sebesar 0,28987, 2018 sebesar 0,27156 dan 2019 sebesar 2,7648 dimana angka indeks ini mendekati nol. Ini berarti perkembangan pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat relatif baik. Terutama dari tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan kecenderungan pembangunan yang terjadi antar kabupaten kota di Kalimantan Barat relatif semakin merata. Dengan kata lain penduduk sebagai obyek penerima hasil pembangunan semakin banyak yang menikmati hasilhasil pembangunan.

Pemerataan dan ketimpangan pembangunan adalah hal yang terkait dengan persoalan distribusi, karena itu upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya selalu disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat tidak mampu.

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Secara umum nilai NTP dapat diartikan, jika $NTP > 100$ maka petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Sebaliknya jika nilai $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. Perkembangan nilai NTP di Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.171
 Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2013-2019

Uraian	Indeks						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)
Nilai Tukar Petani Palawija (NTPP)	95.28	98.92	98.70	97.34	94.40	95,42	94,58
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	103.08	104.64	103.31	103.04	101.09	100,76	100,39
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	106.58	92.83	93.38	91.46	97.89	94,44	89,38
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	79.19	95.07	95.49	95.38	93.95	94,26	94,92
Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN)	103.14	98.65	100.01	102.59	102.03	104,91	109,12
NTP	98.01	96.63	96.73	95.58	96.67	95,72	93,76

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2019.

Selama kurun 2013 hingga 2019, Nilai tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat masih dibawah nilai 100 yang berarti Petani masih mengalami defisit yakni kenaikan harga produksinya lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Jika dilihat dari NTP per sektor, maka NTP sektor Hortikultura dan NTP sektor Perikanan nilainya telah melebihi angka 100 yang berarti petani mengalami surplus yakni harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sementara untuk NTP sektor Palawija, NTP sektor Perkebunan dan NTP sektor Peternakan masih dibawah nilai 100, yang berarti petani pada 3 (tiga) sektor tersebut mengalami defisit.

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.172
 Nilai Tukar Petani Tahun 2018-2019 (tahun Dasar = 2012)

URAIAN	TAHUN	
	2018	2019*
(1)	(2)	(3)
Nilai Tukar Petani Palawija (NTPP)	95,42	94,58
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	100,76	100,39
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	94,44	89,38
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	94,26	94,92
Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN)	104,91	109,12
NTP	95,72	93,76

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020 (diolah)

* Data Sementara

2.4.1.3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besarnya tingkat pengeluaran rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga per kapita di tahun 2013 sampai dengan 2019 di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.173

Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

URAIAN	Satuan	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Makanan/Food	Rp.	367.018	418.014	472.142	451.223	519.469	535.534	561.142
Non Makanan/Non Food	Rp.	305.193	430.078	376.247	409.006	409.666	493.138	519.227
Total Pengeluaran RT	Rp.	672.211	848.092	848.388	860.229	929.135	1.028.672	1.080.370

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020.

Secara rata-rata selama periode 2013-2016 total pengeluaran rumah tangga per kapita dalam sebulan, konsumsi makanan lebih mendominasi dibandingkan konsumsi non makanan. Sedangkan perkembangan total rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 terus menunjukkan peningkatan. Rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 68.026 rupiah atau 9,2 persen per tahunnya.

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan Rata-rata Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan dengan formula Atkinson. Capaian Angka pengeluaran per kapita tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.174

Capaian Angka pengeluaran per kapita tahun 2018 dan 2019

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
(1)	(2)	(3)
Pengeluaran Per Kapita	8.860.000	9.055.000

Sumber : BPS Nasional, data diolah.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Indeks Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program prioritas dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan pusat pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah. Pembangunan infrastruktur tidak hanya bertumpu dan terpusat pada salah satu wilayah atau daerah dengan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, melainkan berdasarkan aspek pemerataan pembangunan wilayah.

Indeks infrastruktur merupakan gabungan dari beberapa sektor atau bidang, baik itu perumahan dan permukiman, Bina Marga, Sumber Daya Air maupun energi listrik. Indeks infrastruktur merupakan salah satu cermin dari pada kondisi daya saing daerah, semakin daya saing tinggi maka kondisi infrastruktur akan semakin baik, namun apabila daya saing rendah maka kondisi infrastrukturnya semakin terbatas.

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi infrastruktur Kalimantan Barat pada dasarnya masih relatif terbatas, baik itu di sektor jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, energi listrik, sumber daya air, serta infrastruktur pendukung lainnya. Berdasarkan hasil kajian dan penelitian Asia Competitiveness Institute Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, bahwa Daya Saing Kualitas Hidup dan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 menduduki peringkat 31 dari 34 Provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan

oleh terbatasnya penyediaan infrastruktur, yang mana akan berpengaruh dalam upaya penyelesaian beberapa permasalahan, baik itu penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

Untuk mengetahui kondisi indeks infrastruktur di Kalimantan Barat, berikut capaian indeks infrastruktur Kalimantan Barat tahun 2018 dan tahun 2019 :

Tabel 2.175
Indeks Infrastruktur Kalbar Tahun 2018

NO (1)	Indikator Kinerja (2)	Capaian Tahun 2018 (3)	Faktor pengali (4)	Jumlah (5)
	INDEKS INFRASTRUKTUR			56,61
1	Rasio Elektrifikasi	83%	0,2	16,6
2	Persentase kemandapan jalan provinsi	49,71%	0,2	9,94
3	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46,76%	0,2	9,35
4	Persentase rumah tangga berakses air minum	55,20%	0,2	11,04
5	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	48,38%	0,2	9,68

Sumber : Bappeda Prov. Kalbar Tahun 2019.

Tabel 2.176
Indeks Infrastruktur Kalbar Tahun 2019

NO (1)	Indikator Kinerja (2)	Capaian Tahun 2019 (3)	Faktor pengali (4)	Jumlah (5)
	INDEKS INFRASTRUKTUR			66,23
1	Rasio Elektrifikasi	98,68%	0,2	19,74
2	Persentase kemandapan jalan provinsi	56,81%	0,2	11,36
3	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	53,80%	0,2	10,76
4	Persentase rumah tangga berakses air minum	60,62%	0,2	12,12
5	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	61,23%	0,2	12,25

Sumber : Bappeda Prov. Kalbar Tahun 2019.

2.4.2.2. Jalan Mantap Provinsi

Jalan merupakan salah satu instrumen penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu semua.

Kondisi jalan Provinsi dari tahun 2013 hingga tahun 2019 dalam kondisi mantap terus mengalami perbaikan akan tetapi pada tahun 2018 persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 49,71%.

Tabel 2.177
Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019

No (1)	Indikator (2)	Satuan (3)	2014 (4)	2015 (5)	2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)
1	Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Kilometer	1.260,25	1.266,63	1.255,78	1.282,18	762,98	871,847
2	Panjang Jalan Provinsi	Kilometer	1.562,30	1.562,30	1.562,30	1.534,75	1.534,75	1.534,75
3	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Persen	80,67	81,07	80,38	83,54	49,71	56,81

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, 2019

2.4.2.2.1. Peningkatan Persentase Kemantapan Jalan

Panjang jalan yang berstatus jalan provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 mencapai 1.534,75 km. Adapun untuk jenis permukaannya, jalan yang sudah di aspal mencapai 929,11 km (60,54%) jalan yang jenis permukaannya beton mencapai 23,41 km (1,53%), dan jalan yang masih kerikil/tanah mencapai 582,23 km (37,94%). Sedangkan jalan yang dalam kondisi baik mencapai 238,89 km (15,57%), jalan dalam kondisi sedang mencapai 632,96 km (41,24%), jalan dalam kondisi rusak ringan mencapai 380,07 km (24,76%) dan jalan dalam kondisi rusak berat mencapai 282,83 km (18,43). Kemantapan jalan provinsi pada tahun 2019 mencapai 56,81% dan jalan tidak mantap provinsi mencapai 43,19%. Berikut tabel jenis dan kondisi jalan di Kalimantan Barat Tahun 2019 :

Tabel 2.178
Jenis permukaan Jalan Tahun 2019

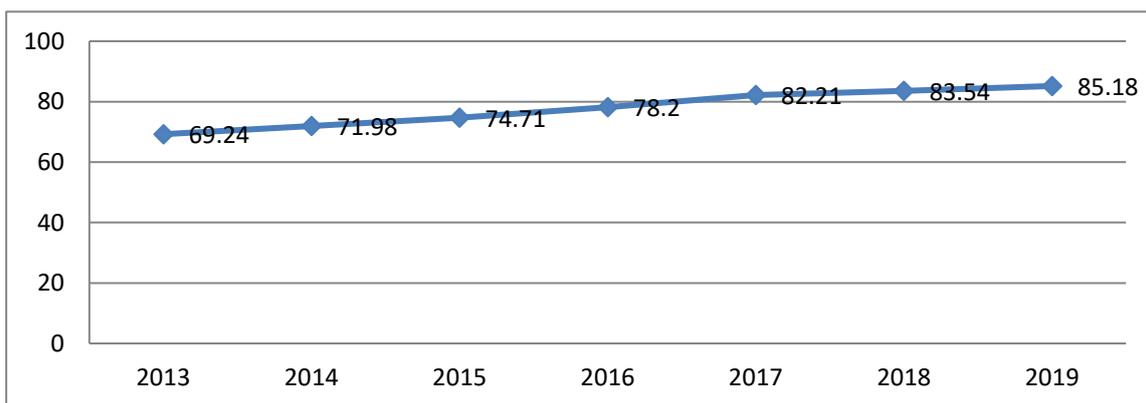
No.	Jenis permukaan	Panjang (km)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aspal	929,110	60,54
2	Beton	23,406	1,53
3	Kerikil/Tanah	582,234	37,94
	Total	1.534,75	100,00

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar Tahun 2020. (BPS belum release untuk tahun 2019).

2.4.2.3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus mengalami kenaikan, rata-rata pertumbuhan rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2013-2019 adalah sebesar 2,66 poin. Pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 85,18% naik dari tahun 2018 yang hanya sebesar 83,54% rumah tangga telah menggunakan listrik.

Gambar 2.21
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2019



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2019.

Pada Tahun 2019 jumlah desa/kelurahan yang sudah berlistrik PLN di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1.526 desa/kelurahan atau mencapai 71,40%. Desa/kelurahan berlistrik Non PLN sebanyak 591 desa/kelurahan atau sebesar 27,66%. Namun, masih terdapat desa belum berlistrik sebanyak 20 desa

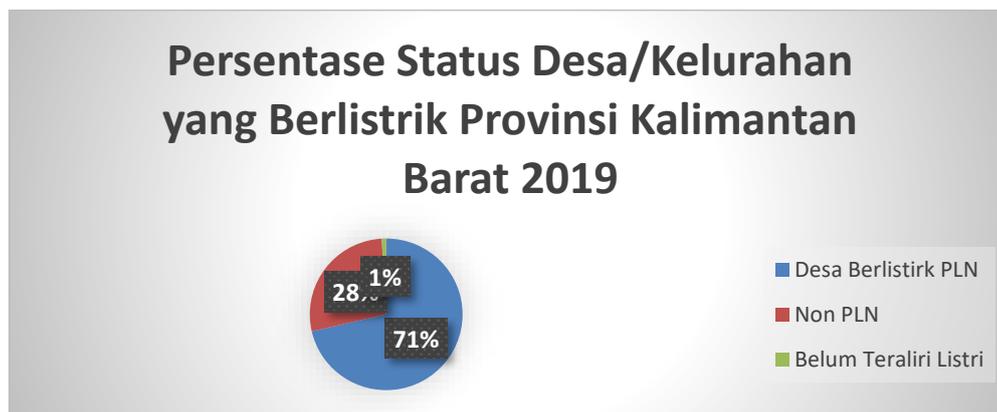
atau sebesar 0,94% yang banyak tersebar di beberapa kabupaten pedalaman, contohnya di Kabupaten Sintang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.179
 Status Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa Berlistrik PLN	Desa Berlistrik Non PLN	Desa Belum Berlistrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sambas	193	192	1	n/a
Bengkayang	124	87	37	n/a
Landak	156	115	40	1
Mempawah	67	67	n/a	n/a
Sanggau	169	132	37	n/a
Ketapang	262	185	76	1
Sintang	407	191	206	10
Kapuas Hulu	282	190	87	n/a
Sekadau	87	59	28	n/a
Melawi	169	101	65	3
Kayong Utara	43	37	6	n/a
Kubu Raya	123	115	8	n/a
Pontianak	29	29	n/a	n/a
Singkawang	26	26	n/a	n/a
TOTAL	2137	1526	591	20
Persentase (%)		71,40%	27,66%	0,94%

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2019.

Gambar 2.21
 Persentase Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2019.

2.4.2.3.1 Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi (RE) merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik, baik yang disalurkan dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun dari sumber lain, dengan jumlah rumah tangga pada satuan wilayah tertentu, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat.

Rasio elektrifikasi total Kalimantan Barat pada akhir tahun 2018 sebesar 87,22 persen (RE PLN: 87,21%), sedangkan RE total Kalimantan Barat pada akhir tahun 2019 sebesar 98,68% (RE PLN: 91,17%; RE NonPLN: 7,51%). Rasio elektrifikasi Kalimantan Barat berdasarkan kabupaten/kota dirinci lebih lanjut dalam Tabel 2.184 di bawah ini :

Tabel 2.180
Rasio Elektrifikasi (Re) Kalimantan Barat 2018-2019

NO.	PROVINSI/KAB/KOTA	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		RE PLN	RE TOTAL	RE PLN	RE TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Mempawah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Kab. Landak	51,81%	61,31%	56,07%	65,04%
3	Kab. Kubu Raya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Kota Pontianak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Kab. Sambas	85,49%	88,34%	100,00%	100,00%
6	Kab. Bengkayang	65,88%	77,11%	78,04%	89,57%
7	Kota Singkawang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Kab. Sanggau	65,03%	80,83%	73,27%	89,02%
9	Kab. Sintang	62,84%	76,09%	70,21%	83,17%
10	Kab. Kapuas Hulu	63,04%	74,16%	72,84%	83,39%
11	Kab. Sekadau	53,97%	67,00%	68,65%	82,78%
12	Kab. Melawi	60,29%	72,44%	67,56%	79,68%
13	Kab. Ketapang	74,17%	88,00%	77,64%	89,85%
14	Kab. Kayong Utara	74,37%	77,14%	85,54%	88,24%
Kalimantan Barat		87,21%	87,22%	91,17%	98,68%

Sumber : Dinas EDSM Prov. Kalbar Tahun 2020.

2.4.2.4. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah Kalimantan Barat adalah seluas 147.307 km² atau 14.730.700 Ha, dengan arahan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.181
Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat

Status Lahan	Luas (Ha)
(1)	(2)
Kawasan Lindung	3.931.919
Hutan Lindung	2.310.873
Suaka Alam (daratan + perairan)	1.621.046
Kawasan Budidaya	4.457.681

Status Lahan	Luas (Ha)
(1)	(2)
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.132.398
Hutan Produksi Biasa (HPB)	2.127.365
Hutan Produksi Konversi (HPK)	197.918
Jumlah	8.389.600

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.936/Menhut/II/2013 dan SK.733/Menhut/II/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan, bahwa untuk peruntukan Luas Kawasan Hutan adalah seluas 8.389.600 Ha, yang terbagi atas Kawasan Lindung seluas 3.931.919 Ha (46,87%) dan Kawasan Budidaya seluas 4.457.681 Ha (53,13%).

Tabel 2.182

Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar)

Kabupaten/kota	Pemanfaatan Kawasan Lindung	Luas Wilayah Budidaya
(1)	(2)	(3)
Sambas	25.701	520.142
Kota Singkawang		57.264
Bengkayang	34.138	469.966
Landak	54.852	715.442
Mempawah	4.300	199.365
Kubu Raya	143.124	703.660
Kota Pontianak		11.149
Sanggau	99.142	1.170.461
Sekadau	52.834	508.369
Sintang	472.057	1.662.850
Melawi	220.945	739.305
Kapuas Hulu	801.270	1.372.897
Ketapang	327.333	2.512.571
Kayong Utara	75.177	234.908
JUMLAH	2.310.873	10.878.349

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Catatan: Kawasan lindung hanyalah hutan lindung (tidak termasuk kawasan konservasi berupa Taman Nasional, Suaka Alam dan Taman Wisata Alam). Luas Kawasan Budidaya terdiri dari HPT, HP, HPK dan APL).

Berdasarkan tabel 2.186 diatas sesuai data terakhir tahun 2016 dari 14 kabupaten/kota, diperoleh pemanfaatan untuk Kawasan Lindung terluas terletak di kabupaten Kapuas Hulu (801.270 Ha) atau 34,67 persen, diikuti kab Sintang seluas (472.057 Ha) atau 20,43 persen dan

terkecil di kabupaten Mempawah seluas (4.300 Ha) atau 0,19 persen dari total pemanfaatan Kawasan Lindung 2.310.873 Ha.

Berikutnya untuk pemanfaatan Kawasan Budidaya terluas terletak di kabupaten Ketapang (1.662.850 Ha) atau 23,10 persen, diikuti kabupaten Sintang (91.662.850 Ha) atau 15,29 persen dan terkecil di kota Pontianak seluas (11.149 Ha) atau 0,10 persen dari total pemanfaatan Kawasan Budidaya 10.878.349 Ha.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pertumbuhan Pendapatan Daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2015–2019 rata-rata sebesar 10,05% (Tabel 3.1). Dari kurun waktu tersebut, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat terjadi peningkatan sebesar 8,08%. Kemudian, pertumbuhan Dana Perimbangan terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam pada kurun waktu 2015–2019 sebesar 25,69%. Kenaikan ini ditopang pada komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami pertumbuhan 47,60. Kenaikan PAD dan Dana Perimbangan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

harus terus meningkatkan kemandirian fiskal dengan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2015-2019 Provinsi Kalimantan Barat

No	URAIAN (dalam Rp. Miliar)	2015 (Juta)	2016 (Juta)	2017 (Juta)	2018 (Juta)	2019 (Juta)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PENDAPATAN	4.073,15	4.494,43	5.389,10	5.660,06	5.939,75	10,05
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.702,54	1.664,34	1.945,65	2.194,87	2.301,31	8,08
1.1.1.	Pajak Daerah	1.459,36	1.424,30	1.660,42	1.919,26	1.959,34	7,96
1.1.2.	Retribusi Daerah	120,98	33,53	39,22	40,48	45,88	-9,69
1.2.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	66,06	70,82	71,55	79,73	92,44	8,90
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	56,14	135,68	174,46	155,40	203,64	47,60
1.2.	Dana Perimbangan	1.644,66	1.860,79	3.420,09	3.444,98	3.620,12	25,69
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	153,48	167,54	170,19	212,23	177,72	4,80
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.405,59	1.493,49	1.720,70	1.724,40	1.756,07	5,88
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	85,58	199,77	1.529,21	1.508,35	1.686,33	202,34
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	725,95	969,30	23,36	20,21	18,32	-21,73
1.3.1.	Hibah	5,44	4,77	1,33	2,36	3,05	5,58
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	720,51	964,53	7,50	7,25	15,27	10,49
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	14,53	10,60	0,00	
No	URAIAN (dalam Rp. Miliar)	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2.	BELANJA	4.123,64	4.320,62	5.259,79	5.341,40	5.677,40	8,59
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3.078,18	2.837,48	2.916,80	3.783,71	3.238,04	2,57
2.1.1.	Belanja Pegawai	794,14	771,75	1.239,13	1.303,88	1.165,82	13,09
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	1.116,08	1.043,73	970,30	1.516,04	1.074,43	3,40
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1,90	0,41	0,67	1,39	5,66	100,15
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	845,41	681,16	702,67	958,43	969,92	5,33
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	320,66	340,43	1,71	2,98	22,20	156,63
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga			2,32	1,00	0,02	-
2.2.	Belanja Langsung	1.045,45	1.483,14	2.342,99	1.557,69	2.439,36	30,73

Rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan tetap > 89,57%. Akan tetapi kinerja dari Rasio Efektivitas ini harus terus ditingkatkan karena masih terus berfluktuasi pada kisaran 89,57%-122,51%. Untuk mendapatkan rasio

efektivitas yang cenderung linier, perlu terus diperbaiki kinerja perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan titik berat pada upaya peningkatan Pajak Daerah.

Tabel. 3.2.

Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

TAHUN	TARGET PAD (Rp)	PERTUMBUHAN (%)	REALISASI PAD (Rp)	PERTUMBUHAN (%)	RASIO EFEKTIVITAS (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	1.900,84	14,22	1.702,54	4,99	89,57
2016	1.760,03	-7,41	1.664,34	-2,24	94,56
2017	1.757,92	-0,12	1.945,65	16,90	110,68
2018	1.791,58	1,91	2.194,87	12,81	122,51
2019	2.178,98	21,62	2.301,31	4,85	105,61
RATA-RATA		6,05		7,46	

Sumber: BPKAD Prov. Kalbar, 2020 (yang telah diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2015-2019 seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.4.1	ASET	6.467,49	7.593,57	8.896,63	11.394,53	12.135,14	17,29
5.4.1.1	ASET LANCAR	446,09	592,92	400,88	566,18	787,45	20,21
5.4.1.1.1	Kas dan Setara Kas	9,24	172,91	112,32	214,92	581,95	499,74
5.4.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	8,08	157,84	107,61	207,51	568,14	
5.4.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.4.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,08	4,81	2,80	1,12	7,77	
5.4.1.1.1.4	Kas di BLUD	0,00	10,25	1,90	6,29	1,36	
5.4.1.1.1.5	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	
5.4.1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
5.4.1.1.3	Piutang Pendapatan	146,67	125,58	109,14	119,47	155,40	
5.4.1.1.3.1	Piutang Pajak Daerah	0,20	0,19	0,17	0,16	0,17	
5.4.1.1.3.2	Piutang Retribusi	20,39	12,71	11,20	10,61	9,85	
5.4.1.1.3.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	69,96	70,64	78,38	91,36	91,86	
5.4.1.1.3.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1,97	0,02	16,63	14,50	33,43	
5.4.1.1.3.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	35,60	30,62	0	0	15,36	
5.4.1.1.3.7	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	18,55	11,39	2,77	2,85	4,74	
5.4.1.1.4	Piutang Lainnya	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	
5.4.1.1.5	Penyisihan Piutang	-11,33	-8,85	-12,88	-15,34	-17,14	
5.4.1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	1,15	1,62	1,53	1,13	1,49	
5.4.1.1.7	Persediaan	300,23	301,55	90,64	95,90	65,63	
5.4.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	898,28	1.058,84	1.239,36	1.508,84	1.649,97	16,51
5.4.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	898,28	1.058,84	1.239,36	1.508,84	1.649,97	
5.4.1.3	ASET TETAP	4.611,40	4.989,14	6.069,83	8.147,13	8.523,68	17,17
5.4.1.3.1	Tanah	2.590,31	2.599,06	2.755,05	4.225,53	4.228,64	
5.4.1.3.2	Peralatan dan Mesin	624,50	730,69	1.035,45	1.193,94	1.424,87	
5.4.1.3.3	Gedung dan Bangunan	929,62	986,12	1.584,22	2.246,11	2.477,55	
5.4.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.841,19	1.795,34	2.063,31	2.683,43	2.906,30	
5.4.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	268,00	270,66	251,79	322,39	357,66	
5.4.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	178,44	466,95	795,38	46,11	139,17	
5.4.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-2.570,39	-3.010,51	
5.4.1.4	ASET LAINNYA	957,81	952,67	1.186,56	1.172,37	1.174,33	5,75
5.4.1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	3,30	0,12	0,10	3,26	3,24	
5.4.1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	557,56	560,71	567,11	550,41	549,96	
5.4.1.4.3	Aset Tidak Berwujud	5,24	3,82	3,68	3,24	5,83	
5.4.1.4.4	Aset Lain-Lain	391,71	388,02	615,67	615,46	614,87	
	JUMLAH ASET	6.913,58	7.593,57	8.896,63	11.394,53	12.135,14	15,39
5.4.2	KEWAJIBAN	252,38	252,27	2,81	230,87	245,88	2.007,29
5.4.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	228,74	252,27	2,81	230,87	245,88	2.009,87
5.4.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,03	23,64	0,01	0,01	4,69	
5.4.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,13	0,13	0,19	0,27	0,59	
5.4.2.1.3	Utang Belanja	228,58	228,50	2,61	230,59	240,60	
5.4.3	EKUITAS	6.661,21	7.341,30	8.893,82	11.163,66	11.889,26	15,84
5.4.4	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.913,58	7.593,57	8.896,63	11.394,53	12.135,14	15,39

Sumber: BKAD Prov. Kalbar, diolah (2020)

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2015-2019, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 17,29% setiap tahunnya. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Komponen aset yaitu aset lancar mengalami pertumbuhan sebesar 20,21%, investasi jangka panjang meningkat rata-rata sebesar 16,51%, aset tetap meningkat rata-rata 17,17%, dan asset lainnya meningkat sebesar 5,75%. Pertumbuhan aset lancar dalam kecenderungan yang positif ini menunjukkan bahwa kondisi aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi sehat.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) selalu dapat diselesaikan, dari tahun 2015 kewajiban jangka pendek adalah sebesar Rp.228,74 miliar pada tahun 2017 turun menjadi Rp.2,81 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu.

Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2015–2019 mengalami pertumbuhan sebesar 15,84% yang berarti bahwa ekuitas dananya cukup tinggi.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) pendapatan transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa serta transfer antar- daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik

daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI, PT. Jasa Raharja dan Bank Kalbar.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota.

3.2.1. Proporsi Penyusunan Anggaran

Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata proporsi realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah yaitu Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah adalah sebesar 21,55%. Proporsi dalam jumlah besar mulai terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 23,16%, hal ini terjadi karena perubahan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satunya adalah pengalihan status Guru SMA/SMK menjadi Aparatur Sipil Negara Provinsi.

Tabel 3.4.

Analisis Proporsi Belanja Pegawai Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Belanja Pegawai (dalam Rp. Miliar)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (dalam Rp. Miliar)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015	794,14	4.131,14	19,22%

2	2016	771,75	4.330,62	17,82%
3	2017	1.239,13	5.349,79	23,16%
4	2018	1.303,88	5.507,27	23,68%
5	2019	1.368,12	5.727,40	23,89%
Rata - Rata				21,55%

Sumber: BKAD Prov. Kalbar, diolah (2020)

Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah adalah sebesar 22,03%. Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung tidak jauh berbeda setiap tahunnya, antara 16,39 % pada tahun 2015 sampai dengan paling besar 25,95 % pada tahun 2017 dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (dalam Rp. Miliar)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (dalam Rp. Miliar)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015	676,91	4.131,14	16,39%
2	2016	1.008,34	4.330,62	23,28%
3	2017	1.388,07	5.349,79	25,95%
4	2018	1.139,19	5.507,27	20,69%
5	2019	1.365,45	5.727,40	23,84%
Rata - Rata				22,03%

Sumber: BKAD Prov. Kalbar, diolah (2020)

Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata proporsi realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah adalah sebesar 17,85% pada tahun 2017. Proporsi belanja modal dibandingkan total pengeluaran daerah mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu menjadi 12,28%, namun pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 15,22%.

Tabel. 3.6
Analisis Proporsi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Belanja Modal (dalam Rp. Miliar)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (dalam Rp. Miliar)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015	368,54	4.131,14	8,92%
2	2016	474,80	4.330,62	10,96%
3	2017	954,92	5.349,79	17,85%
4	2018	676,49	5.507,27	12,28%
5	2019	871,61	5.727,40	15,22%
Rata - Rata				13,05%

Sumber: BKAD Prov. Kalbar, diolah (2020)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2015 - 2019 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.7 di bawah ini. Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan realisasi rata-rata Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 368,84% dengan komponen Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) memberikan kontribusi terbesar pada Penerimaan Pembiayaan Daerah yang sama dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah tersebut.

Tabel 3.7.
Realisasi (dalam Rp. Miliar) dan Persentase Pertumbuhan Pembiayaan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

No	PEMBIAYAAN	2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PENERIMAAN DAERAH											
a	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	134,60	38,67	9,08	-93,25	172,89	1.804,07	212,12	22,69	364,91	72,03	368,84
b	Penerimaan Piutang Daerah											
c	Penerimaan Lain-lain											
	JUMLAH PENERIMAAN	134,60	38,67	9,08	-93,25	172,89	1.804,07	212,12	22,69	364,91	72,03	368,84
2	PENGELUARAN DAERAH											
a	Pembentukan Dana Cadangan											
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75,00	25,00	10,00	-86,67	90,00	800,00	165,87	84,30	50,00	-69,86	150,56
3	PEMBIAYAAN											
c	Pembiayaan Pokok Hutang											
	JUMLAH PENGELUARAN	75,00	25,00	10,00	-86,66	90,00	800,00	165,87	84,30	50,00	-69,86	150,56

Sumber: BKAD Prov. Kalbar, diolah (2020)

Kondisi realisasi pendapatan dan belanja daerah sepanjang kurun tahun 2015-2019 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.8 di bawah ini. Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2015 mencapai Rp. 9,11 milyar lebih dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 577,26 milyar lebih. Besarnya SiLPA pada tahun 2019 dikarenakan ada beberapa proyek fisik yang gagal lelang dan sangat rendahnya penyerapan anggaran oleh pada beberapa PD.

Tabel 3.8.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

No	URAIAN (dalam Rp. Miliar)	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	4.073,15	4.494,43	5.389,10	5.660,06	5.939,75
2	Realisasi Belanja Daerah	4.123,64	4.320,62	5.259,79	5.341,40	5.677,40

	Surplus (Defisit)	-50,49	173,81	129,31	318,65	262,36
3	Penerimaan pembiayaan daerah	134,60	9,08	172,89	212,12	364,91
4	Pengeluaran pembiayaan daerah	75,00	10,00	90,00	165,87	50,00
	Pembiayaan Netto	59,60	-0,91	82,90	46,25	314,91
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	9,11	172,90	212,31	364,91	577,26

Sumber: BKAD Prov. Kalbar, diolah (2020)

3.3. Kerangka Pendanaan

Setelah menyampaikan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu dari periode tahun 2013-2017, berdasarkan hal tersebut maka Pendapatan Daerah diupayakan meningkat dan Belanja Daerah dalam lima tahun ke depan lebih berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan sesuai perkiraan kondisi pada tahun mendatang. Kondisi Kerangka Keuangan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018 s.d Tahun 2020

No. (1)	Uraian (nilai dalam Miliar Rp) (2)	2018* (3)	2019* (4)	2020** (5)
I	PENDAPATAN	5.660,06	5.939,75	5.744,07
1	PAD	2.194,87	2.301,31	2.214,18
1.1	Pajak daerah	1.919,26	1.959,34	1.912,72
1.2	Retribusi daerah	40,48	45,88	36,18
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	79,73	92,44	92,75
1.4	Lain-lain PAD yang sah	155,40	203,64	172,54
2	Dana Perimbangan	3.444,98	3.620,12	3.524,75
2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	212,23	177,72	172,12
2.2	Dana alokasi umum	1.724,40	1.756,07	1.568,57
2.3	Dana alokasi khusus	1.508,35	1.686,33	1.784,06
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	20,21	18,32	5,13
3.1	Hibah	2,36	3,05	5,13
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,25	15,27	-
3.3	Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	10,60	-	-
II	BELANJA	5.341,40	5.677,40	6.271,33
1	Belanja Tidak Langsung	3.783,71	3.238,04	3.738,18
1.1	Belanja Pegawai TL	1.303,88	1.165,82	1.384,21
1.2	Belanja Hibah	1.516,04	1.074,43	1.165,16
1.3	Belanja Bantuan sosial	1,39	5,66	9,00
1.4	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	958,43	969,92	816,88
1.5	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	2,98	22,20	53,32
1.6	Belanja tidak terduga	1,00	0,02	309,61
2	Belanja Langsung	1.557,69	2.439,36	2.533,14
2.1	Belanja Pegawai L	-	202,30	212,31
2.2	Belanja Barang dan jasa	881,21	1.365,45	1.506,47
2.3	Belanja Modal	676,49	871,61	814,36
	Surplus/Defisit	318,65	262,36	(527,26)
III	PEMBIAYAAN	46,25	314,91	527,26
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	212,12	364,91	577,26
1.1	SiLPA TA sebelumnya	212,12	364,91	577,26
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	165,87	50,00	50,00
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	165,87	50,00	50,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	364,91	577,26	0

Keterangan: * = Sudah Realisasi

** = Berdasarkan Perubahan APBD tahun 2020

Selanjutnya digambarkan proyeksi Keuangan Daerah (Pendapatan dan Belanja Daerah) dari tahun 2022–2023 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

No.	Uraian (nilai dalam Miliar Rp)	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	6.680,49	6.818,53	7.001,71
1	PAD	2.865,96	2.760,71	2.836,43
1.1	Pajak daerah	2.206,65	2.352,46	2.401,47
1.2	Retribusi daerah	41,26	43,67	45,65
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	93,39	101,50	106,97
1.4	Lain-lain PAD yang sah	524,65	263,08	282,34
2	Pendapatan Transfer	3.810,75	4.054,02	4.160,87
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.810,75	4.054,02	4.160,87
2.1.1	Dana Perimbangan	3.794,12	4.054,02	4.141,15
a	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	232,08	309,27	320,49
b	Dana alokasi umum	1.624,27	1.717,81	1.768,80
c	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	429,93	489,25	509,25
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.507,83	1.537,69	1.542,60
	Dana Insentif Daerah (DID)	16,64	18,56	19,72
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	3,78	3,80	4,41
3.1	Pendapatan Hibah	3,78	3,80	4,41
II	BELANJA	7.035,49	7.113,53	7.196,71
1	Belanja Operasi	4.074,01	4.131,54	4.193,19
1.1	Belanja Pegawai	1.807,84	1.839,14	1.875,49
1.2	Belanja Barang dan jasa	2.051,15	2.074,77	2.098,04
1.5	Belanja Hibah	213,00	215,54	217,56
1.6	Belanja Bantuan sosial	2,02	2,09	2,09
2	Belanja Modal	1.693,95	1.699,80	1.707,00
3	Belanja tidak terduga	133,24	140,00	145,00
4	Belanja Transfer	1.134,29	1.142,20	1.151,52
4.1	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	1.035,04	1.040,57	1.045,89
4.2	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	99,25	101,63	105,63
	Surplus/Defisit	(355,00)	(295,00)	(195,00)
III	PEMBIAYAAN	355,00	295,00	195,00
1	Penerimaan Pembiayaan	410,00	350,00	250,00
1.1	SilPA TA sebelumnya	410,00	350,00	250,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	55,00	55,00	55,00
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	55,00	55,00	55,00
	SILPA	0,00	0,00	0,00

Keterangan: *= Struktur APBD tahun 2021 dalam SIPD

**= Hasil proyeksi berdasarkan analisis data (2020)

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mulai berlaku tanggal 12 Maret 2019 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang didalamnya terdapat perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dengan demikian struktur APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyesuaikan hal tersebut dalam Perubahan RPJMD. Struktur APBD meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah sebagaimana tabel di atas, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada periode 2018-2023 yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang dan meniyasati penurunan PAD akibat dampak Covid-19, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
2. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kalimantan Barat;
3. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (Public Private Partnership) dan swasta maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR). Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:
 - a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kalimantan Barat;
 - b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati;
 - c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
 - d. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
 - e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018-2023 diarahkan untuk menjaga kondisi dan penanganan kesehatan masyarakat terkait dampak Covid-19, pemulihan dan stabilitas ekonomi, mendukung pencapaian sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan target pembangunan lainnya yang menjadi prioritas Gubernur. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan - kegiatan yang berorientasi ekonomi produktif, padat karya, serta memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018 - 2023 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang - undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Harga Satuan Umum (HSU) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB);
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak penempatan dan peningkatan kompetensi tenaga medis;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan dan peningkatan peran koperasi dalam hal ini termasuk *Credit Union* (CU) dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
8. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;

9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembiayaan yang berkelanjutan;
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada masyarakat/kelompok masyarakat/ UMKM/Koperasi tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan meningkat daya saingnya. Penentuan kelompok-kelompok tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
 - d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
 - e. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Penjabaran dari Alokasi belanja hibah tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
 - f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasi belanja tidak terduga tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
 - g. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada

kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah; Penjabaran dari alokasi belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;

- h. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik yang duduk di Parlemen, kabupaten dan kota serta Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota, dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten, kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penjabaran dari alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, kota dan pemerintah desa tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman apabila terjadi surplus anggaran;

3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD;
4. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.

Berdasarkan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang akan digunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan untuk periode 2018-2023.

Tabel 3.11
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kalimantan Barat untuk Mendanai Pembangunan 2018-2023

No	Uraian (Rp dalam Miliar)	2018	2019*	2020**	2021***	2022****	2023****
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendapatan	5.660,06	5.938,64	5.744,07	6.680,49	6.818,53	7.001,71
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	212,12	364,91	577,26	410,00	350,00	250,00
	TOTAL PENERIMAAN	5.872,18	6.303,54	6.321,33	7.090,49	7.168,53	7.251,71
	Dikurangi						
4	Belanja Operasi (Belanja Pegawai)	1.303,88	1.367,19	1.596,53	1.807,84	1.839,14	1.875,49
5	Pengeluaran Pembiayaan	50,00	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.518,31	4.886,35	4.674,80	5.227,65	5.274,39	5.321,22

Keterangan: * = Sudah realisasi

** = Sesuai dengan Perubahan APBD tahun 2020

***= Struktur APBD tahun 2021 dalam SIPD

****= Hasil proyeksi berdasarkan analisis data (2020)

Hasil dari proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah maka rencana arah kebijakan pengelolaan keuangan secara garis besar periode lima tahun mendatang diarahkan kepada:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah

pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental dan berskala besar (termasuk memenuhi kebutuhan rencana untuk pemindahan pusat perkantoran), dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat PD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi PD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu;
- c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan 2018-2023 terdapat isu besar dengan adanya wabah virus Covid-19 di Tahun 2020, sehingga perencanaan yang dibuat mengantisipasi terjadinya virus dan dampak yang diakibatkan pasca berakhirnya virus terutama perbaikan perekonomian dan target-target capaian di tahun 2021, 2022 dan 2023.

Terkait permasalahan pembangunan akibat wabah virus Covid-19, maka untuk Kalimantan Barat sendiri, sampai tanggal 2 Desember 2020 ini, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2.461 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.098 orang dinyatakan sembuh dan 22 orang diantaranya meninggal. Jika dilihat dari perkembangan kasus di Kalimantan Barat maka sebanyak 83% dari total kasus terkonfirmasi sembuh sehingga ada keoptimisan pemerintah provinsi dapat melakukan recovery ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

Penyebaran Covid-19 yang semakin pasif membuat beberapa negara mengambil kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) atau satu negara penuh, sehingga roda perekonomian menurun drastis. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi global akan melambat, bahkan resesi hampir pasti terjadi. *Internasional Monetary Fund* (IMF) merilis *World Economic Outlook* (WEO) edisi April 2020 telah merubah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dampak dari Pandemi Covid-19 di tahun 2020 yaitu 3,3% dan tahun 2021 adalah 3,4 % menjadi sebesar (-3%) di tahun 2020 dan 5,8% untuk tahun 2021.

Proyeksi perbaikan ekonomi global yang dibuat IMF memperhitungkan skenario dasar pandemi virus *Corona*. Dalam asumsinya bahwa pandemi akan mereda pada semester kedua tahun 2020. Ekonomi sejumlah negara yang ditutup akibat karantina untuk mencegah penyebaran Covid-19 mulai dibuka. Namun pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada periode pandemi Corona berakhir. Hingga kini belum ada yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir.

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,02 persen pada tahun 2019 (lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 5,17 persen) artinya belum mencapai target pertumbuhan sebagaimana dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 8,00 persen. Berdasarkan data BPS tahun 2020, dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen. Distribusi perekonomian Indonesia tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa (59,00 persen) dan Pulau Sumatera (21,32 persen) sedangkan Pulau Kalimantan sebesar 8,05 persen. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi antar pulau, kelompok pulau Kalimantan tumbuh sebesar 4,99 persen. Pertumbuhan ekonomi dan kinerja perdagangan Indonesia tahun 2020 dan tahun 2021 diprediksi turut lesu sebagai dampak melorotnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Dalam skenario outlook indikator utama ekonomi makro nasional oleh Kementerian Keuangan dinyatakan pertumbuhan PDB (% yoy) tahun 2020 dengan dua skenario yaitu skenario berat (*moderat scenario*) tumbuh 2,3% dan sangat berat (*low scenario*) berkontraksi -0,4%. Sedangkan dalam proyeksi *high scenario* tahun 2021

pertumbuhan ekonomi diperkirakan di range 4,5 - 5,5 persen dan inflasi 2- 4 persen, dengan catatan kondisi penanganan Covid-19 sudah membaik di kuartal ketiga dan akselerasi di kuartal keempat.

Sebagaimana yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Video Konfrensnya disaat pembukaan Musrenbang RKPD 2021 Provinsi Kalimantan Barat bahwa dampak Covid-19 terhadap perekonomian domestik secara umum dapat meliputi :

- 1) Terhadap rumah tangga seperti pendapatan yang hilang karena PHK dan kenaikan harga barang dan pembatasan pergerakan masyarakat.
- 2) Terhadap perusahaan/UMKM seperti permintaan barang/jasa untuk ekspor dan domestik turun, neraca keuangan perusahaan terganggu, PHK dan ancaman kebangkrutan, gangguan *supply chain* bagi perusahaan/UMKM yang melakukan ekspor dan impor
- 3) Terhadap pemerintah seperti pendapatan negara turun sebagai dampak turunnya aktivitas ekonomi dan harga komoditas global, belanja meningkat untuk memberikan bantuan stimulus pada masyarakat rentan dan dunia usaha
- 4) Terhadap Lembaga Keuangan menyebabkan *capital out flow* dan depresiasi rupiah
- 5) *Rest of the world* dari aktifitas manusia misalnya aktivitas pariwisata dan pergerakan manusia di dalam dan antar wilayah turun, perdagangan dan investasi dunia turun serta harga komoditas internasional turun.

Terkait Covid-19, maka Kalimantan Barat juga terkena dampak pandemi ini yang secara umum meliputi:

1. Kalimantan Barat mengalami resesi karena mengalami kontraksi sebesar 3,40 persen (y-o-y) pada kuartal pertama dan 4,46 persen (y-o-y) pada kuartal kedua.
2. Pertumbuhan pariwisata Kalbar menurun drastis dari 4,17 persen pada tahun 2019 menjadi - 23,44 persen pada Triwulan ke-III tahun 2020.
3. Terjadinya peningkatan pengangguran sebanyak 33.222 orang.
4. Daya beli masyarakat turun dan cenderung hanya membeli kebutuhan pokok saja.
5. Belanja jenis barang dan modal berkurang akibat adanya refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah.

Dampak tersebut diatas mengakibatkan penurunan PDB sisi Pengeluaran seperti konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor. Hanya konsumsi pemerintah saja yang melonjak naik karena banyaknya belanja sosial dalam upaya recovery dampak Covid 19 tahun 2020. Selain permasalahan wabah covid-19 tersebut permasalahan pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

4.1.1. Permasalahan Bidang Politik, Ketentraman, dan Ketertiban

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa pengaruh/implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga masyarakat, antara kelompok warga masyarakat dengan aparat dan antara kelompok warga masyarakat dengan sektor privat karena adanya kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan,

juga mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berpotensi untuk muncul di daerah-daerah yang terkait dengan bidang-bidang seperti: perkebunan, pertambangan serta berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara.

4.1.2. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

Dalam Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, masih terdapat permasalahan antara lain:

a. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan Tiga Tertib Administrasi Kependudukan meliputi: Tertib Administrasi Kependudukan, Tertib Penerbitan NIK dan Tertib Penerbitan Dokumen Kependudukan, masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Belum tertatanya jumlah penduduk secara maksimal.
- 2) Intensitas sosialisasi tentang berbagai kebijakan administrasi kependudukan belum maksimal.
- 3) Masih terjadi multi tafsir terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- 4) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan teknologi informasi komunikasi
- 5) Belum adanya regulasi tentang standar kompetensi dan jenjang karier ASN pengelolaan dan perencanaan TIK.
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan, baik sarana teknologi maupun informasi.
- 7) Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domisilinya lebih dari 1 tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara *de facto* terdata di domisili yang baru, tetapi secara *de jure* mereka masih terdata di daerah asalnya.
- 8) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi kependudukan.

b. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan arsip merupakan rekaman informasi seluruh kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh para penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Hal ini berarti, melalui urusan kearsipan, masyarakat dapat mengetahui keberhasilan, kegagalan ataupun penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Urusan kearsipan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses manajemen pemerintahan dan pembangunan, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Kesadaran dan kepedulian aparat pemerintah masih rendah sehingga menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik
- 2) Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara kearsipan masih belum memenuhi standar;

3) Pembinaan SDM kearsipan belum berkesinambungan.

c. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah serta kekayaan koleksi buku-buku yang dimiliki serta dalam upaya menumbuh-kembangkan minat baca bagi masyarakat. Pengembangan perpustakaan meliputi beberapa hal diantaranya upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Secara umum, permasalahan pembangunan urusan kepustakaan adalah bagaimana membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat serta penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu sebagai penunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

d. Fungsi Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan

Adapun permasalahan pembangunan fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan, sebagai berikut:

- 1) Masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 2) Selama ini dirasakan pelayanan publik belum maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya kapasitas SDM belum merata, fasilitas yang terbatas serta prosedur yang belum baku;
- 3) Masih belum optimalnya reformasi birokrasi Undang-undang tentang Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Pemerintah belum disikapi secara baik dan benar oleh pihak-pihak terkait sehingga prosesnya berjalan lambat. Adapun tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah sebagai arahan dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan publik.
- 4) Perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang ditunjukkan dengan meningkatnya capaian indikator kinerja sehingga pembiayaan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif;
- 5) Belum optimalnya sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka diharapkan kinerja birokrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan diperkuat dengan pengawasan oleh masyarakat serta diikuti dengan peningkatan tunjangan kesejahteraan aparatur (TKD).
- 6) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
Pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja seharusnya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dimulai dari perencanaan anggaran (penyusunan RAPBD) dengan melibatkan *stakeholders* pembangunan daerah dalam bedah RAPBD sebelum ditetapkan dan evaluasi pelaksanaan APBD setelah selesai dilaksanakan.
- 7) Penegakan hukum dan HAM;
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan demikian kepastian hukum, rasa aman dan ketentraman masyarakat dapat kita wujudkan. Pelaksanaan penegakan hukum yang transparan diharapkan dapat menekan dampak negatif, sekaligus membangun citra positif bagi pemerintah. Hukum pada dasarnya memberikan jaminan

kepastian, dalam rangka melindungi setiap warga negara dan pemenuhan HAM.

8) Luas wilayah.

Luasnya wilayah menyebabkan panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik sehingga perlu ditempuh dengan pembentukan daerah otonom baru. Demikian juga pada aspek luasnya wilayah provinsi, diperlukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan terbentuknya provinsi baru di Kalimantan Barat.

4.1.3. Permasalahan Pembangunan Bidang Ekonomi

Sejumlah permasalahan mendasar dan faktor ketidakpastian masih berlanjut dan menjadi kendala bagi proses pemulihan ekonomi secara lebih cepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, secara makro pembangunan bidang ekonomi lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan diharapkan mampu mencapai capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan secara mikro, lebih diarahkan pada peningkatan perkembangan masing-masing sektor perekonomian, yang mengarah pada peningkatan ekspor maupun hilirisasi industri. Permasalahan pembangunan bidang ekonomi akan dibahas dalam 9 (sembilan) urusan yaitu: penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, dan pariwisata.

1) Urusan Penanaman Modal

Keberhasilan pengembangan bidang investasi atau penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari sektor konsumsi, bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor. Untuk mendorong pembangunan bidang ekonomi dalam lima tahun mendatang, maka fokus masalah yang menjadi perhatian adalah bagaimana upaya meningkatkan kinerja perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, peningkatan perdagangan dan ekspor daerah, serta pengembangan kegiatan UMKM dan koperasi serta lembaga keuangan mikro masyarakat lainnya. Kalimantan Barat menghadapi permasalahan klasik yang dialami oleh hampir semua provinsi di Indonesia yaitu terbatasnya modal yang dimiliki dengan pencapaian target investasi rata-rata kurang dari lima puluh persen, sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak maksimal. Untuk investasi pemerintah, perkembangan alokasi belanja pembangunan/belanja publik menunjukkan komposisi belanja publik terhadap total belanja terus membaik. Investasi pemerintah (belanja pembangunan) cukup tinggi, dimana sebagian besar investasi pemerintah diperuntukkan mengatasi permasalahan struktural seperti persoalan perekonomian, sosial, pembangunan infrastruktur publik dan prasarana pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan urusan penanaman modal diantaranya perlunya dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, realisasi investasi dengan fasilitasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) mulai menampilkan peningkatan namun pencapaiannya belum optimal karena realisasinya belum mampu mencapai lima puluh persen. Seperti realisasi investasi PMDN, pada tahun 2013 baru mencapai 11,93 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 20,68 persen. Demikian pula realisasi investasi PMA, tahun 2013 mencapai 31,55 persen dan meningkat menjadi 36,38 persen di tahun 2017.

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Disamping itu, pengembangan kerjasama antar pemerintah swasta dan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

2) Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (KUMKM)

Pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena terkait pada penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dengan kebutuhan modal investasi yang kecil serta dapat menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat pembangunan urusan KUMKM, termasuk lembaga pembiayaan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam maupun *Credit Union* (CU), tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal, bahkan justru mampu menangkap berbagai peluang. Oleh sebab itu, pengembangan KUMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Perkembangan kemajuan KUMKM yang meningkat belum diimbangi dengan perkembangan kualitas yang masih menghadapi permasalahan klasik yaitu rendahnya produktivitas. Hal ini berkaitan dengan: masih rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi dan pemasaran; lemahnya kompetensi kewirausahaan; serta terbatasnya kapasitas KUMKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya.

Sementara itu, selain permasalahan internal terdapat pula permasalahan eksternal yang dihadapi seperti kurang mendukungnya iklim usaha, masih terdapat beberapa praktik usaha yang tidak sehat dan keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha. Selain itu, KUMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya perkembangan teknologi.

3) Urusan Pangan

Urusan pangan terkait dengan rumah tangga atau individu yang memiliki akses ketersediaan pangan yang cukup, aman serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kehidupan yang aktif dan sehat. Namun, pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat tidak boleh terlupakan. Hal ini menunjukkan konsepsi ketahanan pangan merupakan konsep sangat luas dan beragam serta merupakan masalah yang kompleks. Walaupun demikian, intinya terletak pada bagaimana mewujudkan terjaminnya ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan utama daerah serta mengurangi ketergantungan impor atau masuknya bahan pangan antar pulau, maka daerah diharapkan mampu menyediakan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berasal dari sumberdaya lokal/produksi daerah. Ada beberapa aspek yang menjadi hambatan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah adalah: aspek produksi, aspek distribusi, dan konsumsi. Dalam pembahasan

permasalahan urusan pertanian, perlu dilihat pada aspek tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan. Dalam pembahasan permasalahan urusan pertanian, perlu dilihat pada aspek tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan adalah masih rendahnya tingkat kualitas dan kuantitas SDM baik dari aspek teknologi, permodalan, serta pengairan sehingga produktivitas pertanian masih rendah jika dilihat dari rasio produksi sektor pertanian terhadap jumlah tenaga kerja disektor pertanian. Serta permasalahan terkait alih fungsi lahan tanaman pangan ke sektor lain seperti jasa dan perdagangan yang cukup berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas.

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Salah satu produk peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan daerah adalah produksi telur ayam dengan produksi 21.810 ton/tahun, 20% diantaranya dijual antar pulau seperti Natuna, Bangka Belitung, Tambelan, Pangkalanbun, dan Jakarta. Namun untuk daging sapi, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi setiap tahun harus mendatangkan dari luar (Jawa Timur, pulau Madura dan NTB). Permasalahan dalam mengembangkan ternak di Kalimantan Barat adalah faktor sumber bibit yang belum mampu disediakan oleh para penangkar bibit ternak di daerah, akibatnya sebagian besar masih mengimpor dari luar Kalimantan Barat. Permasalahan ini disebabkan oleh usaha ternak yang berbasis kerakyatan yang memenuhi standar belum berkembang, serta masih adanya kasus.

4) Urusan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak yang sangat strategis, dimana bagian sebelah Barat berbatasan dengan laut Cina Selatan, sedangkan di daerah pedalaman dibelah oleh aliran sungai Kapuas, sehingga Kalbar memiliki sumber daya perikanan tangkap yang cukup melimpah baik di laut maupun di perairan umum, serta memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan usaha perikanan budidaya di laut, di perairan payau dan di perairan air tawar. Permasalahan dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari ikan bagi masyarakat Kalimantan Barat diantaranya: hilirisasi produk perikanan yang masih belum berkembang, kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi sarana penangkapan dan adaptasi terhadap anomali iklim yang terjadi masih belum memadai. Hal ini menyebabkan mutu produk yang masih belum memenuhi standar yang juga disebabkan oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang belum berjalan secara optimal.

5) Urusan Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kalimantan Barat \pm 62 persen dari luas total Provinsi Kalimantan Barat. Namun dari luas tersebut masih terdapat \pm 20 persen merupakan lahan kritis. Selain itu dengan mulai berkurangnya potensi tegakan hutan alam pada hutan produksi, maka menyebabkan kontribusi sektor kehutanan menjadi menurun. Permasalahan utama pada urusan kehutanan adalah terjadinya degradasi hutan dan lahan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah belum mantapnya keberadaan fisik kawasan hutan akibat belum selesainya penataan batas kawasan hutan sehingga menyebabkan konflik kepentingan masyarakat disekitar hutan. Masalah kepastian kawasan hutan juga semakin diperparah dengan rendahnya taraf sosial-ekonomi masyarakat disekitar hutan, sehingga konflik antara masyarakat hutan dengan petugas kehutanan menjadi tinggi. Di satu sisi masyarakat hutan yang sebagian besar adalah petani ladang

berpindah semakin terbatas lahan yang dapat disuksesi pengelolaannya dalam jangka waktu tertentu, tetapi disisi lain berbenturan dengan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah pusat beserta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait. Permasalahan lainnya adalah masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan konservasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

6) Urusan Perdagangan

Secara umum pembangunan sektor perdagangan daerah melalui pengembangan pasar yang terintegrasi, penciptaan iklim usaha yang kompetitif, mendorong penumbuhan dan pengembangan sektor produksi perdagangan dalam dan luar negeri guna peningkatan ekspor, penciptaan tertib usaha dan upaya perlindungan konsumen. Namun yang menjadi isu penting adalah yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan sub sektor perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 nilai ekspor tercatat sebesar US\$.1.348,61 juta, kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi US\$.651,99 juta atau 51,65 persen, pada tahun 2015 nilai ekspor menurun menjadi US\$.565,96 juta. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi US\$.623,420 juta. Peningkatan ekspor Kalbar kembali dilanjutkan pada tahun 2017 sebesar US\$ 203,88 Juta atau sebesar

- b) 32,70% dengan nilai ekspor sebesar US\$ 827,30 Juta. Sedangkan pada tahun 2018, ekspor diperkirakan masih akan meningkat dibandingkan tahun 2017. Hal tersebut tergambar dari pencapaian ekspor sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar US\$ 658,29 Juta yang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar US\$ 571,05 Juta atau meningkat sebesar 15,27%.

Selanjutnya kekhawatiran terhadap penurunan kinerja ekspor daerah dalam tahun-tahun mendatang patut menjadi fokus perhatian, terkait dengan:

- a) Adanya kecenderungan semakin protektifnya perdagangan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terutama terhadap komoditi yang berasal dari Cina, Korea Selatan dan Jepang yang merupakan pasar tradisional utama ekspor Kalbar;
- b) Struktur ekspor Kalbar masih didominasi oleh 3 (tiga) komoditi utama yang bersifat primer yaitu karet, hasil tambang dan produk perkayuan (diatas 80% nilai ekspor total Kalbar) sehingga perkembangan nilai ekspor Kalbar sangat rentan terhadap fluktuasi harga ketiga komoditi tersebut di pasar dunia;
- c) Pembatasan ekspor bahan tambang utamanya bauksit sebagai dampak kebijakan/regulasi nasional;
- d) Dari sisi perdagangan dalam negeri dihadapkan sistem logistik daerah yang tidak efisien yang menyebabkan pada rentannya ketersediaan dan fluktuasi harga bahan pokok dan bahan strategis masyarakat serta permasalahan daya saing produk daerah akibat dari tingginya biaya distribusi. Permasalahan lainnya adalah tuntutan akan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang semakin tinggi, dimana saat ini semakin banyak beredarnya barang dan jasa baik dari luar maupun dalam daerah yang dikonsumsi yang perlu diawasi peredarannya sehingga tidak merugikan masyarakat.

7) Urusan Industri

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan pembangunan sektor industri

belum begitu mengembirakan, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata dibawah 3%. Pertumbuhan ini jauh dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5-6% per tahun. Sebagai dampak dari kondisi pertumbuhan sektor industri dimaksud, kontribusinya terhadap perekonomian (PDRB total) Kalimantan Barat antara 16-17% dan belum menunjukkan kecendrungan membaik. Dalam garis besarnya permasalahan pembangunan urusan industri yang menyebabkan kondisi kinerja sektor industri dimaksud disebabkan oleh:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan atau pengembangan pelaku industri kecil menengah di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini disebabkan belum optimalnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia pada sektor industri. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya kerjasama antara pemerintah – swasta serta asosiasi-asosiasi yang bergerak di sektor industri;

Belum optimalnya infrastruktur energi dan sistem logistik perindustrian di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan dua hal utama. Pertama, terbatasnya fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri antara lain belum tersedianya kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan minimnya investasi pada sektor industri, belum optimalnya pengembangan perwilayahan industri serta terbatasnya konektivitas pelaku usaha industri. Kedua, masalah sarana dan prasarana pelabuhan, pasokan air bersih, serta infrastruktur yang masih terbatas serta belum mampu memenuhi standar industri

8) Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata di daerah Kalimantan Barat termasuk sektor yang potensial untuk dikembangkan agar lebih maju lagi. Provinsi ini memiliki potensi wisata yang beragam, yakni berupa wisata alam, agrowisata, wisata budaya dan wisata minat khusus. Berdasarkan obyek dan daya tarik wisata yang ada, Kalimantan Barat telah ditetapkan sebagai 10 (sepuluh) besar daerah tujuan wisata nasional, maka kegiatan pariwisata di daerah ini cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. Dalam pengembangan potensi kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Barat masih terkendala terhadap akses menuju lokasi destinasi wisata, sumberdaya manusia penggerak pariwisata minat khusus dan pengembangan desa wisata yang berinovasi masih minim. Disisi lain, pengembangan dan pengelolaan urusan pariwisata akan lebih memiliki nilai strategi, apabila dalam kemasannya juga dikaitkan dengan ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif di Kalimantan Barat cukup banyak dan mempunyai keahlian spesifik sesuai keahlian masing-masing, namun karena belum seluruhnya dilakukan pembinaan secara intensif maka pembuatan kerajinannya masih secara tradisional. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten/Kota se-Kalbar.

4.1.4. Permasalahan Bidang Sosial dan Budaya

Berbagai upaya pembangunan selama diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, yang secara komposit ditandai oleh makin membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi penting dalam pembangunan bidang sosial dan budaya. Dalam mendukung pembangunan bidang sosial dan budaya ada 10 (sepuluh) urusan pemerintahan yang akan disinergikan yaitu: urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, serta transmigrasi.

1) Urusan Pendidikan

Dimensi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan aspek angka melek huruf. Dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan urusan pendidikan perlu diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

a) Perluasan akses dan pemerataan pendidikan masih terbatas;

Peningkatan angka serapan atau angka masukan (*intake rate*) dan angka transisi (*transition rate*) terjadi di semua jenjang pendidikan, namun belum seluruh anak mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Angka Serapan /angka masukan (*intake rate*) yang meliputi: APK, APM, dan APS jenjang pendidikan menengah dan Angka Transisi (*transition intake*) yang meliputi: salah satunya masih tingginya angka putus sekolah di semua jenjang. Meningkatnya cakupan pelayanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti yang diharapkan. Disisi lain keberlanjutan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (Wajar 9 Thn) dan Wajib Belajar 12 Tahun (Wajar 12 Thn) tidak hanya diarahkan pada segi kuantitas tetapi juga kualitas.

b) Mutu dan Relevansi Pendidikan masih rendah

Berbicara masalah mutu dan relevansi pendidikan, maka ada dua hal pokok yang harus mendapat perhatian serius, yaitu mutu SDM PTK dan relevansi pendidikannya serta mutu sarana dan prasarana pendidikannya. Untuk mutu SDM PTK dan relevansinya, secara proporsional mutu guru sesuai kualifikasi akademik terus mengalami peningkatan namun dari segi profesionalismenya masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya tenaga guru yang belum mendapatkan sertifikasi guru sesuai dengan bidang keilmuan dan mata pelajaran yang diampunya belum lagi ditambah dengan masih sangat minimnya pengembangan keprofesionalisme guru melalui program diklat, bimtek maupun *workshop*. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan rehabilitasi ruang kelas senantiasa dilaksanakan setiap tahunnya, namun rehabilitasi ruang kelas belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Selain itu, penyediaan bahan ajar, laboratorium, dan perpustakaan masih terbatas. Untuk mutu sarana dan prasarana pendidikan terkait terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas terutama di masa pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh dalam kualitas mutu pendidikan. Menanggapi hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 121 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri sehingga sebanyak 85,4 persen sekolah telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

c) Manajemen dan tata kelola pendidikan belum optimal.

Perlunya peningkatan kapasitas aparatur di satuan pendidikan terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) guna mewujudkan tatakelola pendidikan yang

efektif. Untuk tata kelola yang berkaitan dengan manajemen ketenagaan, kalau dilihat dari kuantitasnya secara proporsional jumlah tenaga guru cukup, namun secara persebarannya belum merata keseluruh daerah karena masih terdapat penumpukan guru di daerah perkotaan sementara di daerah seperti perbatasan, terpencil dan terluar masih terdapat kekurangan guru. Sedangkan tata kelola dari segi keuangan, maka masih perlu pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan perlu disederhanakan dalam rangka mendukung efisiensi alokasi dan akuntabilitas yang lebih baik. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan gratis harus tetap mengacu dan memenuhi komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi input, proses, output dan outcome proses pembelajaran. Dari isu-isu strategis tersebut, secara umum dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan urusan pendidikan yaitu peningkatan pemerataan layanan akses, mutu dan relevansi serta optimalisasi tata kelola pendidikan yang belum optimal.

2) Urusan Kesehatan

Kualitas Kinerja pelayanan publik, termasuk pembangunan urusan kesehatan, memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan selama ini, disatu sisi menunjukkan peningkatan, namun dibebberapa aspek perlu perbaikan serta kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Sebagaimana pembangunan urusan pendidikan yang terkait dengan pembentukan IPM, pembangunan urusan kesehatan pun sangat terkait dengan indikator pembentukan IPM diantaranya dari aspek angka harapan hidup. Ada beberapa permasalahan pokok urusan kesehatan yang perlu ditangani dan dicarikan pemecahannya, terkait dengan pembangunan urusan kesehatan, yaitu:

- b) Status kesehatan ibu dan anak masih rendah;
Kesehatan ibu ditandai dengan indikator AKI (Angka Kematian Ibu), dimana jika dibanding dengan angka nasional, maka kematian ibu di Kalimantan Barat masih relatif tinggi. Kondisi yang sama terjadi pada indikator AKB (Angka Kematian Bayi) masih lebih tinggi sedikit dibanding dengan AKB Nasional. Demikian pula dengan AKABA (Angka Kematian Balita), dimana AKABA Kalimantan Barat lebih tinggi dari AKABA Nasional.
- c) Status gizi masyarakat masih rendah;
Kekurangan gizi pada anak balita masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup penting di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) menunjukkan prevalensi gizi buruk Kalimantan Barat relatif membaik, namun cenderung meningkat di tahun 2015.
- d) Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi;
Beberapa penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat, diantaranya Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, malaria, tuberculosis (TB), dan HIV/AIDS. Sedangkan pada penyakit tidak menular, yang masih menjadi tantangan terutama diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan kanker.
- e) Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk untuk dokter, dokter spesialis, dokter gigi,

perawat dan bidan mengalami peningkatan, namun kesenjangan tenaga kesehatan lebih jelas terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, penempatan tenaga kesehatan di daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan terus ditingkatkan.

- f) Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;
- g) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal;
- h) Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif;
- i) Kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah masih lebar;
- j) Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas relatif masih rendah.
- k) Adanya wabah pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal bulan Februari tahun 2020 menyebabkan adanya rencana aksi penanganan Covid-19 dengan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 841/DINKES/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rumah Sakit Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Covid-19)

NO.	KABUPATEN/KOTA	RUMAH SAKIT	
1.	KOTA PONTIANAK	1.	RSUD Sultan Syarif Mohammad Alkadri Pontianak
		2.	RS Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak
		3.	RS UNTAN Pontianak
2.	KUBU RAYA	1.	RS Tk. II Kartika Husada Kubu Raya
3.	MEMPAWAH	1.	RSUD dr. Rubini Mempawah
4.	KOTA SINGKAWANG	1.	RSU Harapan Bersama Singkawang
5.	BENGKAYANG	1.	RSUD Bengkayang
6.	SAMBAS	1.	RSUD Sambas
		2.	RSUD Pemangkat
7.	LANDAK	1.	RSUD Landak
8.	SANGGAU	1.	RSUD M. Th. Djaman Sanggau
9.	SEKADAU	1.	RSUD Sekadau
10.	MELAWI	1.	RSUD Melawi
11.	KAPUAS HULU	1.	RSUD dr. A. Diponegoro Putussibau

3) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam pembaharuan dan pembangunan, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan peranannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Dalam proses pembangunan, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggungjawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan.

Sedangkan pembangunan keolahragaan merupakan instrumen sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara

jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Terdapat beberapa permasalahan terkait pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu: meningkatnya krisis moral atau karakter di kalangan pemuda. Pembentukan karakter pemuda melalui pelatihan kewirausahaan belum optimal, prestasi dan budaya olahraga masih rendah; pembudayaan olahraga rekreasi baru menyentuh masyarakat perkotaan.

4) Urusan Tenaga Kerja dan transmigrasi

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial. Terdapat beberapa permasalahan terkait pembangunan urusan ketenagakerjaan, diantaranya: masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, iklim hubungan industrial yang kurang kondusif, lokasi transmigrasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum *clear* dan *clean*, serta belum optimalnya pengelolaan potensi kawasan transmigrasi.

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari penduduk usia kerja di Kalimantan Barat yang mencapai 3,79 juta, terdapat 326,21 ribu orang yang terdampak Covid-19 atau 8,60 persen. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak Covid-19 lebih besar dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 12,94 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 6,15 persen.

Tabel 4.2

Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kalimantan Barat, Agustus 2020

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
1	2	3	4	5	6
Pengangguran ² Karena Covid- 19	22.152	11.070	23.898	9.324	33.222

Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
	Laki-Laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
1	2	3	4	5	6
Bukan Angkatan Kerja (BAK) ³ karena Covid-19	2.030	6.490	5.414	3.106	8.520
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	8.861	6.393	7.585	7.669	15.254
Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19	170.005	99.207	140.604	128.608	269.212
Total	203.048	123.160	177.501	148.707	326.208
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.925.044	1.866.612	172.166	2.419.490	3.791.656
Persentase terhadap PUK	10,55%	6,60%	12,94%	6,15%	8,60%

Keterangan:

1. Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015
2. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari- Agustus 2020
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selama bulan Februari-Agustus 2020

Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 269,21 ribu orang atau sebesar 82,53 persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak 33,22 ribu orang atau sekitar 21,92 persen terhadap total penganggur (151,56 ribu orang) di Kalimantan Barat. Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, daerah perkotaan lebih banyak terdampak Covid-19 dibandingkan dengan di perdesaan.

Selain itu terkait fenomena pemulangan PMI dari Luar Negeri saat Covid-19 menambah pencari kerja di daerah. Hal ini disebabkan karena adanya pemutusan hubungan kerja. Saat ini jumlah PMI (Pekerja Migran Indonesia) asal Kalimantan Barat yang pulang dari Januari-November Tahun 2020 sebanyak 392 orang. Pada tahun 2020 ini, terjadi peningkatan pemulangan PMI bermasalah baik karena deportasi maupun repatriasi asal Kalbar sebesar 84 persen yakni dari 1141 orang di tahun 2019 menjadi 2061 di tahun 2020 (30 November 2020). Hal ini terjadi karena Malaysia mengalami resesi akibat pandemik Covid-19 dimana pertumbuhan ekonomi Malaysia pada Kuartal II sebesar 17,1 persen dan Kuartal II sebesar 2,7 persen.

4.1.5. Permasalahan Pembangunan Bidang Infrastruktur

Permasalahan pembangunan bidang infrastruktur melingkupi 7 (tujuh) urusan yaitu:

1) Urusan Penataan Ruang

Adapun permasalahan pembangunan urusan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengaturan dan pembinaan penataan ruang Sesuai UU No. 26 Tahun 2007, serta masih kurangnya pemahaman mengenai UU No. 26 Tahun 2007 oleh pemangku kepentingan, serta lemahnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antar sektor dan

- antar wilayah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- b. Belum optimalnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Masih lemahnya pengawasan penataan ruang. Perda RTRW Prov Kalbar No.10 Tahun 2014 belum operasional dan belum menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan RTRW Provinsi Kalbar belum menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
 - d. Perencanaan (Masterplan) kawasan budidaya untuk sektor tertentu sebagai turunan Perda RTRW Prov Kalbar belum semuanya disusun (seperti perkebunan, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya).
 - e. Terdapatnya perbedaan penentuan kawasan hutan dengan Perda RTRW Prov Kalbar Nomor 10 Tahun 2014 sehingga memerlukan peninjauan kembali (PK) RTRWP.
 - f. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) tidak dapat melakukan tugas pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang karena belum didukung dengan kebijakan daerah.
 - g. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang berupa Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kalbar dan Kabupaten/Kota belum ada yang ditetapkan.
 - h. *One map policy* RT/RW yang berbasis spasial dan terintegrasi belum dilaksanakan dalam penyusunan disemua sektor sesuai Keppres yang telah ditetapkan dikarenakan Kabupaten/kota belum secara rutin menyampaikan laporan penyelenggaraan penataan ruang daerah.
 - i. Belum disusunnya rencana tata ruang di pulau-pulau pesisir untuk keperluan wisata.
 - j. Perlunya perencanaan dalam pembangunan terminal khusus (Tersus) di laut dan di sungai dalam RTRW.
 - k. Perlunya integrasi perencanaan jalan khusus pertambangan, perkebunan, serta kehutanan tentunya dalam RTRW juga.
- 2) Urusan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kualitas Air
 - 1) Belum ditetapkannya kelas mutu kualitas air di sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi (melalui Perda).
 - 2) Belum adanya *database* kualitas air di sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi.
 - 3) Belum adanya *database* berbasis spasial perusahaan-perusahaan yang mencemari air di sungai-sungai kewenangan provinsi.
 - 4) Belum adanya *database* berbasis spasial terkait pencemaran air yang menyebabkan sedimentasi.
 - 5) Masih terdapatnya perusahaan penghasil limbah belum melakukan pengelolaan limbah sebelum di buang ke lingkungan.
 - 6) Masih terdapat perusahaan penghasil limbah yang membuang limbahnya dengan belum memenuhi baku mutu lingkungan.
 - 7) Masih terdapat kegiatan usaha/perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dokumen lingkungan.
 - 8) Masih terdapat kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan belum memiliki

dokumen lingkungan.

- 9) Limbah rumah tangga (domestik) dibuang langsung ke lingkungan sebelum diolah terlebih dahulu.
- 10) Masih banyak kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan yang menyebabkan pencemaran sumber air (erosi).
- 11) Masih banyak terdapat aktifitas pertambangan ilegal yang merusak dan mencemari lingkungan.
- 12) Belum adanya database status mutu kualitas air/indeks kualitas air di Kalbar

b. Kualitas Udara

Belum adanya *database* berbasis spasial sumber pencemar udara dari sektor industry (perusahaan), belum adanya *database* berbasis spasial sumber pencemar udara dari sektor energi (perusahaan), belum adanya *database* berbasis spasial sumber pencemar udara dari sektor transportasi, belum optimalnya pengawasan sumber pencemaran udara perusahaan oleh pemerintah, masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan, belum adanya *database* status mutu kualitas udara/indeks kualitas udara.

c. Bencana dan Kebencanaan

- 1) Belum adanya *database* berbasis spasial mengenai daerah banjir dan daerah rawan banjir, intensitas dan luasan daerah/wilayah terjadi bencana banjir semakin meningkat.
- 2) Belum adanya *database* berbasis spasial untuk lokasi bencana tanah longsor dan daerah rawan tanah longsor, serta lokasi bencana puting beliung dan daerah rawan puting beliung. Intensitas terjadi bencana tanah longsor dan puting beliung cenderung semakin meningkat. Selain itu, bencana kebakaran hutan dan lahan serta permukiman selalu berulang terjadi.
- 3) Masih belum adanya *database* indeks resiko bencana daerah.

d. Perubahan Iklim dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

- 1) Masih terus terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, belum adanya database berbasis spasial penyebab emisi disektor lahan (pertanian, perkebunan, dan kehutanan).
- 2) Masih terdapat areal berhutan di kawasan budidaya (APL), Kalbar masih merupakan provinsi pengemisi Gas Rumah Kaca. Belum adanya *database* berbasis spasial daerah-daerah terdampak perubahan iklim (adaptasi perubahan iklim).
- 3) Belum adanya database berbasis spasial aksi-aksi mitigasi perubahan iklim.
- 4) Belum adanya database berbasis Permasalahan Lingkungan Hidup Lainnya.
- 5) Belum adanya *database* berbasis spasial kerusakan lingkungan pesisir dan kerusakan lahan akibat pertambangan *illegal* (kerusakan lahan akses terbuka), daerah resapan air (resapan air cenderung berkurang), belum ada perlindungan gambut pada kawasan APL (budidaya).
- 6) Belum ada pengendalian pemanfaatan lahan gambut melalui kebijakan fiskal; misalnya melalui PBB kehutanan, perkebunan dan pertambangan.
- 7) Belum adanya data sampah untuk kab/kota, data kinerja pengelolaan sampah. Masih ada sampah yang tidak tertangani, belum ada data sarana dan prasarana pengelolaan

sampah. Pengelolaan sampah akhir perkotaan (TPA) masih bersifat *open dumping* dan partisipasi *stakeholder* dalam pengelolaan sampah masih belum optimal. Masih adanya pengelolaan sampah dengan cara dibakar.

- 8) Belum adanya data dan informasi penanganan/kinerja pengelolaan sampah di wilayah provinsi.
 - 9) Belum adanya *database* berbasis spasial pengguna B3 dan penghasil limbah B3, masih terdapat limbah B3 yang tidak ditangani dan dibuang langsung ke lingkungan, belum adanya data kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3, belum terintegrasinya pengelolaan lingkungan hidup dengan NGO/Swasta/masyarakat.
 - 10) Belum terpenuhinya luasan minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Masih terdapatnya konflik kepentingan antara mempertahankan keanekaragaman hayati dengan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga perlindungan *biodiversity* masih lemah. Mendorong pengelolaan TAHURA, KEE, Kebun Raya, Ekowisata, untuk kepentingan food, water, dan energy.
 - 11) Masih terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), belum terdapatnya kearifan-kearifan dan pengetahuan local dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - 12) Masih terdapatnya Rencana Strategis (Renstra) daerah yang belum dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terutama pada kawasan- kawasan strategis provinsi.
- 3) Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
- Permasalahan pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, yaitu: provinsi Kalimantan Barat belum mempunyai Rencana Umum Energi Daerah (RUED), angka rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik PLN terus mengalami peningkatan, namun masih berada dibawah rata-rata nasional, pertumbuhan kebutuhan listrik Kalbar lebih pesat dibandingkan pertumbuhan pasokan energinya, proporsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi listrik Kalbar masih rendah, dan pada saat bersamaan ketergantungan pada energy listrik berbahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan masih tinggi, belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, banyaknya desa disekitar perkebunan, kawasan hutan dan pulau- pulau kecil yang belum teraliri listrik, belum terpetakannya lokasi-lokasi kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI).
- 4) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Jalan
 - a) Belum tersedianya *database* teknis jalan (umur jalan, penanganan dan pembiayaan jalan). Sumber daya manusia yang relative terbatas terutama untuk tenaga teknis di OPD, konsultan, maupun di pihak kontraktor. Ketersediaan material yang terbatas, hal ini terbentur oleh permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana tidak semua kontraktor mempunyai IUP pertambangan, sehingga ada sebagian yang mendatangkan material dari luar seperti dari Serawak-Malaysia (untuk lokasi proyek yang ada di daerah perbatasan Negara). Hal tersebut tentunya merugikan kontraktor dari segi

- waktu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama dengan biaya yang besar. Kendaraan yang lewat melebihi daripada kapasitas tonase jalan, sehingga jalan menjadi cepat rusak, tidak sesuai dengan umur rencana jalan yang telah direncanakan.
- b) Alih status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sudah ditetapkan Gubernur, namun aset jalan kabupaten belum diserahkan ke provinsi. Hal ini tentunya akan menghambat dalam proses penganggaran. Penyiapan lahan untuk pelebaran/pembangunan jalan dan jembatan masih mengalami kendala. Perlunya peningkatan kondisi kemantapan jalan provinsi, karena kondisi kemantapannya masih relative rendah (56,81%) dibawah kondisi mantap jalan nasional (92,87%).
 - c) Lambatnya progres pembangunan jalan lingkaran luar, jembatan Kapuas III, Jembatan Duplikasi Kapuas I di Pontianak dan sekitarnya, hal ini disebabkan oleh belum tuntasnya permasalahan pembebasan lahan. Selain itu juga masih belum optimalnya progress fisik pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar
 - d) Masih adanya jalan nasional yang belum memenuhi standar teknis (lebar 7 meter), perlunya pelebaran jalan dalam kota (Sanggau, Sekadau, dan Sintang). Masih adanya *missing link* jalan lintas tengah (Nanga Pinoh-Batas Kalteng). Belum semua kawasan strategis/kawasan industri/kawasan ekonomi khusus maupun pusat kegiatan nasional yang dapat didukung dengan akses jalan.
 - e) Belum tuntasnya pembangunan jalan parallel perbatasan dan akses parallel perbatasan. Belum adanya pembangunan jalan tol/bebas hambatan di Kalbar, Belum terealisasinya pembangunan *fly over* di Kota Pontianak
- b. Urusan Sumberdaya Air
- Belum adanya database berbasis spasial tentang irigasi, rawa, cakupan sawah, air baku, dan luasan daerah wilayah banjir. Kondisi irigasi yang baik 2.202 Ha, rusak ringan 1.492 Ha, rusak sedang 481 Ha dan rusak berat 2.590 Ha. Kondisi rawa yang baik 24.821 Ha, rusak ringan 6.795 Ha, rusak sedang 6.860 Ha, dan rusak berat 16.044 Ha. Belum dapat diketahui kondisi saah di Kalbar. Selain itu, belum tersedia *database* air baku berbasis spasial (untuk pemanfaatan dan potensi). Kondisi ketersediaan/kemampuan air baku belum juga diketahui.
- c. Urusan Keciptakarya, yang mencakup Komunikasi dan Informatika
- Belum optimalnya capaian air bersih dan sanitasi sesuai dengan Program Nawacita yaitu 100 - 0 – 100. Hal ini bermakna bahwa pada Tahun 2019 capaian pengguna air bersih dan sanitasi mencapai 100%. Berdasarkan BPS Nasional bahwa Capaian Rumah Tangga Air Bersih menurut RPJMD Tahun 2017 adalah 54,67%. Sedangkan untuk sanitasi adalah 49,65% dan realisasi RPJMD Tahun 2017 rumah tangga bersanitasi mencapai 47,525. Kemudian, belum adanya *database* pelayanan rumah tangga air bersih, bersanitasi, dan persampahan berbasis spasial serata belum terbangunnya TPA Regional di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau.

5) Urusan Perhubungan, yang terdiri dari:

a. Perhubungan Darat

Belum adanya *database* bidang lalu lintas berbasis spasial, jumlah sumber daya manusia bidang perhubungan masih terbatas/kurang (data kebutuhan ASN) Standard pelayanan minimal perlengkapan jalan masih terbatas (faskes: marka jalan, guardrail, strumbel strip, dll) baru tersedia 30%. Serah terima asset dermaga provinsi ke kabupaten belum terlaksana, padahal operasionalnya sudah menjadi kewenangan kab/kota, yang akan mempengaruhi penilaian BPK. Belum ditetapkannya terminal tipe B di Kalbar, sehingga perlu mendorong terbitnya SK Gubernur tentang hal tersebut.

Angkutan *feeder* antara Negara belum tersedia di Terminal Sei. Ambawang, hal ini disebabkan karena pihak swasta belum ada yang bersedia karena dinilai tidak bernilai ekonomi (belum menguntungkan swasta). Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus dapat menyediakannya. Belum operasionalnya angkutan/trayek antar Negara (orang dan barang) di Badau dan Aruk. Belum dibangunnya terminal barang export-import di Aruk, Badau, Jagoi Babang, dan Sei Kelik-Jasa. Belum operasionalnya terminal barang export-import di Entikong.

b. Perhubungan Laut

- a) Belum adanya *database* bidang pelayaran berbasis spasial;
- b) Jumlah sumberdaya manusia bidang perhubungan masih terbatas/kurang (data kebutuhan ASN);
- c) Belum adanya standar minimal pelayanan (SPM) bidang pelayaran;
- d) Masalah tata hubungan kerja pemerintah provinsi (Dishub) dengan UPP-KSOP belum optimal, hal ini disebabkan oleh koordinasi yang belum begitu intens sehingga menghambat proses kegiatan rutin.
- e) Banyaknya permohonan pembangunan terminal khusus (tarsus) yang belum ada aturan;
- f) Belum ditetapkannya kelas alur sungai di Kalbar (perlu survey). Masih banyaknya pelabuhan-pelabuhan Pelindo II yang belum optimal pemanfaatannya.

c. Perhubungan Udara

Kapasitas bandara Rahadi Oesman-Ketapang sudah melebihi kapasitas tampungnya (*overload*), sehingga perlu segera dikembangkan, hal ini sudah disetujui dan direkomendasi oleh gubernur. Sedang rencana pembangunan Bandara Kabupaten Kayong Utara sudah dilengkapi dengan studi perencanaan dan sudah ada rekomendasi dari Gubernur akan tetapi realisasinya masih belum maksimal, sehingga rencana pembangunan Bandara Kayong Utara perlu dipercepat.

Rencana pembangunan Bandara Singkawang juga masih belum mengalami kemajuan yang signifikan padahal Kota Singkawang mempunyai potensi daerah wisata yang menjanjikan sebagai tempat pariwisata di Kalimantan Barat, untuk itu rencana pembangunan Bandara Singkawang juga perlu segera direalisasikan.

Sedang untuk pengembangan Bandara Paloh belum optimal padahal

bandara ini telah masuk kedalam tataran kebandaraan nasional. Kondisi landasan pacunya mencapai 750 meter x 30 meter dengan dana pembangunannya dari Angkatan Udara Republik Indonesia, Bandara ini diusulkan menjadi bandara perintis dan sudah ada MoU antara Kabuapten Sambas dengan pihak Angkatan Udara Republik Indonesia.

Bandara Sanggau Ledo di Kabupaten Bengkayang merupakan Bandara milik Angkatan Udara Republik Indonesia. (AURI) yang pengelolaan dan pemanfaatannya oleh AURI. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan AURI pernah melakukan MoU terkait pemanfaatannya oleh Sipil, akan tetapi dalam realisasinya masih belum optimal sehingga perlu dikaji lagi MoU tersebut. Sedang untuk proses pembangunan rel kereta api juga masih belum mengalami kemajuan yang signifikan padahal FS dan DED nya sudah tersedia.

6) Urusan Perumahan Permukiman

Belum ada SK Penetapan Kawasan Kumuh di Prov. Kalbar. Belum adanya data yang valid tentang jumlah rumah layak huni. Belum optimalnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang lingkungan perumahan sehat, untuk menyampaikan indicator lingkungan perumahan sehat.

7) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika adalah belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana serta layanan komunikasi dan informatika. Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah (masih banyak terdapat blankspot) terutama di kawasan terdepan, terluar, dan terdapat. Hal ini dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Pelebaran signal di daerah perbatasan Negara. Kemudian masih kurangnya penanganan berita-berita *hoax, cyber security*. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya berita atau informasi *hoax* perlu ditangani dan diklarifikasi secara cepat oleh pemerintah. Masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi berkaitan dengan sosialisasi, literasi, dan diseminasi. Contohnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu, masih kurangnya teknologi pengamanan data Prov. Kalbar dan belum adanya *database* eksisting BTS serta kurangnya koordinasi untuk menangani *databaseblankspot*. Penetrasi internet di Kalbar baru mencapai 17% saja, dan kondisi ini masih tergolong rendah. Hal ini juga di kuatkan dengan kenyataan bahwa belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informatika.

4.1.6. Permasalahan Utama Pembangunan Kalimantan Barat

Berdasarkan permasalahan pembangunan bidang-bidang pembangunan di Kalimantan Barat, perlu dirumuskan permasalahan utama pembangunan. Perumusan permasalahan utama pembangunan ini diarahkan agar implementasi program dan kegiatan dapat lebih terarah, fokus, sinergi dan berkelanjutan. Adapun permasalahan utama pembangunan Kalimantan Barat dirumuskan berdasarkan kriteria: 1). Berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD,

2). Merupakan tugas dan tanggungjawab PD Provinsi. 3). Dampak yang ditimbulkan terhadap publik, 4). Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, 5). Kemungkinan atau kemudahan pelaksanaannya.

Dari rumusan diatas maka permasalahan pembangunan utama Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pada posisi perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 yang mengakibatkan maraknya praktek-praktek ilegal dan potensi ancaman terhadap wawasan kebangsaan;
2. Wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil, pesisir dan kepulauan yang belum berkembang secara optimal;
3. Rentang kendali pemerintahan yang panjang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat serta kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang belum memadai;
4. Pemerataan Layanan Akses, Kualitas dan Relevansi serta Tata Kelola Pendidikan dan Tata Kelola Kesehatan yang belum optimal;
5. Rendahnya minat investasi di Kalimantan Barat, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
6. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM), termasuk pemberdayaan ekonomi kreatif yang masih rendah;
7. Produksi dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah, belum mendukung peningkatan ketahanan pangan;
8. Nilai dan volume perdagangan Kalimantan Barat keluar negeri maupun dalam negeri masih rendah;
9. Masih belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi, termasuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN;
10. Belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa dan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan;
11. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan;
12. Derajat kesejahteraan masyarakat masih rendah serta ketimpangan pendapatan yang cenderung stagnan.

4.1.7. Permasalahan Dimensi Kewilayahan

Pembahasan dimensi kewilayahan dikelompokan berdasarkan kawasan yaitu pedalaman, perbatasan antar negara, serta pesisir dan kepulauan. Secara umum, Kalimantan Barat diklasifikasikan sebagai Daerah Tertinggal, disebabkan dari 14 (empat belas) kab/kota terdapat 8 (delapan) yang masih berstatus Tertinggal. Penyebab ketertinggalan beberapa daerah tersebut antara lain (i) letak geografis yang sulit dijangkau atau terisolir; (ii) kepadatan penduduk relatif rendah; (iii) memiliki potensi sumber daya alam namun tidak dikelola secara optimal; (iv) tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang sederhana, (v) minimnya ketersediaan akses prasarana perhubungan, transportasi, komunikasi, listrik, dan air bersih; (vi) karena beberapa faktor pembangunan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah, termasuk pula prioritas

penanganan dan pendekatan yang dilakukan.

a. Wilayah Pedalaman

- 1) Rendahnya Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana;
- 2) Terbatasnya Alternatif Lapangan Kerja;
- 3) Rendahnya Akses terhadap Permodalan;
- 4) Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat;
- 5) Rendahnya Tingkat Ketahanan Pangan;
- 6) Degradasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 7) Belum Optimalnya Peran Kelembagaan;
- 8) Masih lemahnya kemandirian desa;
- 9) Masih lemahnya perencanaan pembangunan desa;
- 10) Lemahnya kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga Lembaga kemasyarakatan;
- 11) Lemahnya komitmen pemerintah daerah.

b. Wilayah Perbatasan antar Negara

Permasalahan dalam pengembangan wilayah perbatasan, antara lain meliputi yaitu:

- 1) Belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar negara; Penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan;
- 2) Rendahnya kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- 3) Belum optimalnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat perbatasan, belum optimalnya koordinasi antar Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- 4) Belum jelasnya mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan serta masih belum optimalnya keberpihakan dari kepemimpinan lokal dan kelembagaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

c. Wilayah Pesisir dan Kepulauan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah pesisir dan kepulauan, antara lain:

- 1) Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan dengan wilayah yang relatif lebih maju;
- 2) Kepadatan penduduk relatif rendah dan terpencar di pulau-pulau kecil;
- 3) Kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang belum dikelola secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas;
- 4) Masih belum memadainya ketersediaan energi dan kelistrikan. Masih ada wilayah pesisir dan kepulauan yang belum teraliri listrik, sementara pengelolaan energi terbarukan masih belum berkembang;
- 5) Rendahnya Akses terhadap Modal Usaha;
- 4) Rendahnya akses terhadap permodalan, akan menghambat pengembangan usaha

- masyarakat nelayan dan berpengaruh terhadap produktivitas nelayan;
- 5) Belum optimalnya pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan;
 - 6) Belum memadainya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih termasuk prasarana komunikasi dan informasi yang akan memperlancar dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan;
 - 7) Degradasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 8) Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

4.2. Isu-Isu Strategis Daerah

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat. Dalam mengidentifikasi isu strategis tersebut, terdapat dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimantan Barat dan perlu pengembangan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat.

4.2.1. Identifikasi Lingkungan Internal

a. Kekuatan Daerah

- 1) Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Uranium, Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;
- 2) Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
- 3) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah;
- 4) Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti *Eco Tourism* dengan alamnya yang masih potensial;
- 5) Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (*tropical rainforest*) yang cukup luas yang memiliki berbagai *biodiversity* endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta memiliki peran sebagai paru-paru dunia.

b. Kelemahan Daerah

- 1) Terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- 2) Lemahnya daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri;
- 3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih terbatas;
- 4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
- 5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi

- dalam memberikan pelayanan publik;
- 6) Prasarana wilayah yang dimiliki belum mendorong peningkatan investasi;
 - 7) Investasi belum optimal dalam mendukung perekonomian daerah;
 - 8) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan lahan;
 - 9) Belum optimalnya pelayanan akses dan pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
 - 10) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
 - 11) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
 - 12) Panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat.

4.2.2. Identifikasi Lingkungan Eksternal

a. Peluang Daerah

- 1) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Kalimantan Barat merupakan provinsi yang mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, sehingga memiliki peluang sebagai berikut:
 - a) Interaksi sosial ekonomi yang didukung dengan bis antar kota-antar negara yang semakin meningkat.
 - b) Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.
 - c) Terbukanya pintu gerbang internasional yang meliputi: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong-Tebedu, PLBN Aruk-Biawak, PLBN Badau-Lubuk Antu dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jagoi Babang-Serikin.
 - d) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
 - e) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
 - f) Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, tujuan pengembangan Wilayah Pulau adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

b. Ancaman Daerah

Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kalimantan Barat, yaitu:

- a) Perlambatan ekonomi pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia belum pulih sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian daerah;
- b) Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
- c) Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;
- d) Kurangnya koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah dalam rangka pengawasan perairan teritorial Kalimantan Barat, sehingga masih terjadi *Illegal Fishing, Unreported Fishing and Unregulated Fishing* di wilayah perairan Kalimantan Barat;
- e) Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi *illegal trading, trafficking*, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
- f) Pengelolaan daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal.

4.2.3. Rumusan Isu-Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan dan permasalahan utama serta identifikasi lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis, sebagai berikut:

- 1) Perlambatan ekonomi menjadi dampak pandemi Covid-19 yang berasal dari penurunan konsumsi Rumah Tangga seiring dengan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menurunkan penyebaran virus dan terjadinya penurunan permintaan ekspor akan barang dari luar negeri.
- 2) Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran.
- 3) Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relatif rendah sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing daerah.
- 4) Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas pertanian.
- 5) Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Pendidikan dan Kesehatan.
- 6) Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi.
- 7) Peranan perindustrian, perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian belum optimal.
- 8) Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perencanaan pembangunan daerah.
- 9) Masih kurangnya sinergitas antar sektor pemangku kepentingan sehingga masih banyaknya Desa tertinggal dan Sangat tertinggal di Kalimantan Barat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Masa jabatan gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, kondisi Kalimantan Barat saat ini sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018-2023, yaitu:

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan

kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat
Visi: "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan"

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD	Status Indikator	Data Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Akhir Periode	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
(1) Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur													
(1.1) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan													
		1.1.01	Ketersediaan Infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkat										
			1	Rasio Elektrifikasi (<i>Persen</i>)	Kumulatif	83	85	87	89	91	93	93	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
			2	Daya Mampu Listrik di Kalimantan Barat (Mega Watt) (<i>Mega Watt</i>)	Positif	-	670	915	1093	1193	1296	1296	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
		1.1.02	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan Sesuai Standart										
			1	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap (<i>Persen</i>)	Positif	49.71	56.68	59.89	65.79	72.18	80.00	80.00	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
		1.1.03	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air										
			1	Persentase Irigasi Provinsi Dalam Kondisi Baik (<i>Persen</i>)	Positif	46.76	48.26	49.83	53.22	55.04	61.21	61.21	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
			2	Persentase Peningkatan/Pemeliharaan Sungai sebagai Pengendalian Banjir (<i>Persen</i>)	Positif	46.76	49.47	56.52	52.58	52.70	52.81	52.81	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
			3	Persentase Penduduk yang berakses air minum	Positif	-	-	-	68	69	70	70	Program Baru PMDN 90/2019
		1.1.04	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pemukiman Perdesaan Sesuai Dengan Indeks Desa Membangun dan Pemukiman Perkotaan										
			1	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (sesuai standar)	Positif	-	-	-	50	51	52	52	Program Baru PMDN 90/2019
			2	Persentase Penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota	Kumulatif	-	-	-	10	11	12	12	Program Baru PMDN 90/2019
		1.1.05	Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Konstruksi										
			1	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat (<i>Persen</i>)	Positif	67.92	67.92	69.29	70.65	72.01	73.37	73.37	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
			2	Persentase Data Yang Tersedia di SIPJAKI (<i>Persen</i>)	Positif	21.43	35.71	50.00	64.29	78.57	92.86	92.86	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
			3	Persentase Pelayanan Mutu Jasa Konstruksi (<i>Persen</i>)	Positif	66	66	74	78	88	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		1.1.06	Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan Keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat										
			1	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (<i>Persen</i>)	Positif	-	-	-	52	67	71	71	Program Baru PMDN 90/2019
			2	Persentase Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum (<i>Persen</i>)	Negatif	-	-	-	90	83	72	72	Program Baru PMDN 90/2019
			3	Persentase Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP (<i>Persen</i>)	Negatif	-	-	-	98	87	79	79	Program Baru PMDN 90/2019
(2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip Good Governance													
(2.2) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah													
		2.2.01	Meningkatkan kualitas kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah										
			1	Persentase Rekomendasi hasil Penelitian yang ditindak lanjuti dalam Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.	Kumulatif	-	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.02	Terlaksananya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta										
			1	Terlaksananya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta									
			1	Persentase Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakart (<i>Persen</i>)	Positif	100	100	100	100	100	100	100	Program Baru PMDN 90/2019

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD	Status Indikator	Data Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Akhir Periode	KETERANGAN
		2.2.03	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah									
		1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Positif	21,04	21,07	22	23	24	25	25	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.04	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah									
		2	Nilai SAKIP Capaian Kinerja	Positif	12,61	13	14	15	16	17	17	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.05	Meningkatnya kualitas laporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar									
		3	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Positif	10,28	10,5	11	10	10	10	10	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.06	Meningkatnya Nilai SAKIP Pengukuran Kinerja (Nilai)									
		1	Nilai SAKIP Unsur Pengukuran Kinerja	Positif	13,72	14,44	15,00	15,50	16,00	16,50	16,50	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.07	Meningkatnya Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Internal									
		2	Nilai SAKIP unsur Evaluasi Internal	Positif	6,32	6,62	7,32	7,62	8,32	8,62	8,62	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.08	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi									
		1	Nilai IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	Positif	80,33	83	83,5	84	84,2	84,5	84,5	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2	Nilai LPPD (Persen)	Positif	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Program Baru PMDN 90/2019
		3	persentase Pelayanan pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standart Pelayanan (Persen)	Positif	80	90	94	96	98	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		4	Level Maturitas SPIP (Level)	Positif	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		5	Persentase dokumentasi dan publikasi pemberitaan melalui media cetak elektronik, online dan media luar ruang (Persen)	Positif	77,5	85	89,5	95	98	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		6	Level Kapabilitas APIP (Level)	Positif	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		7	Indeks Persepsi Korupsi (Indeks)	Positif	-	-	40	42	44	46	46	Program Baru PMDN 90/2019
		8	Opini BPK RI (Opini)	Positif	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		9	Rasio PAD Terhadap APBD (Persen)	Positif	37,60%	37,60%	33,78%	34,00%	35%	37%	37%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) (PTSP)	Positif	B	B	B	A	A	A	A	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		11	Indeks Pengawasan Kearsipan (Nilai)	Positif	CC	Cukup	B	B	BB	BB	BB	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
		12	Indeks Profesionalitas ASN	Positif	0%	0%	55%	60%	65%	70%	70%	Program Baru PMDN 90/2019
		2.2.09	Meningkatnya kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan									
		1	Persentase kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.	Positif	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.10	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota									
		1	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	Positif	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.11	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah									
		1	Nilai LPPD	Positif	-	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD	Status Indikator	Data Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Akhir Periode	KETERANGAN
		2.2.12	Meningkatnya penilaian Reformasi Birokrasi yaitu area penguatan pengawasan internal.									
		1	Level Maturitas SPIP (<i>Level</i>)	Positif	Level 3	Level 4	Level 4	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019				
		2	Level Kapabilitas APIP	Positif	level 3	Level 4	Level 4	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019				
		3	Nilai Persepsi Korupsi	Positif	5.79	6.17	6.3	6.4	6.5	6.6	46	Program Baru PMDN 90/2019
		8	Opini BPK RI (<i>Opini</i>)	Positif	WTP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019						
		9	Rasio PAD Terhadap APBD (<i>Persen</i>)	Positif	30%	30%	31%	31.50%	32%	33%	33.50%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		10	Indeks Kepuasan Masyarakat (<i>Indeks</i>) (<i>PTSP</i>)	Positif	B	B	B	A	A	A	A	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		11	Indeks Pengawasan Kearsipan (Nilai)	Positif	CC	Cukup	B	B	BB	BB	BB	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
		12	Indeks <u>Profesionalitas</u> ASN	Positif	0%	0%	55%	60%	65%	70%	70%	Program Baru PMDN 90/2019
		2.2.13	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Anggota DPRD Provinsi Kalbar									
		1	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD	Positif	78 (Baik)	81	82	83	84	85	85	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.14	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.									
		1	Penataan peraturan perundang-undangan	Positif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.15	Meningkatnya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi									
		1	Persentase orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Positif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.16	Meningkatnya pelayanan umum dan pimpinan									
		1	Persentase pelayanan umum dan pimpinan	Positif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.17	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah									
		1	Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	Positif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.18	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Administrasi Umum									
		1	Persentase Pelayanan terhadap pimpinan dan Adminisrasi Umum	Positif	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.19	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan di Kalimantan Barat									
		1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalimantan Barat (<i>Persen</i>)	Positif	48.66	48.66	61.32	68.97	75.2	79.29	82.14	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2.2.20	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi									
		1	Predikat keterbukaan informasi publik	Positif	Informatif / Zona Hijau	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019						
		2	Predikat penilaian SPBE	Positif	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		3	Integrasi data statistik sektoral	Positif	15%	70%	80%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		4	Indeks Keamanan Informasi	Positif	-	-	-	Tingkat 3 / Cukup	Tingkat 4 / Baik	Tingkat 4 / Baik	Tingkat 4 / Baik	Program Baru PMDN 90/2019
		2.2.21	Meningkatnya Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)									
		1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Positif	-	-	-	60%	70%	80%	80%	Program Baru PMDN 90/2019

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD	Status Indikator	Data Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Akhir Periode	KETERANGAN
(3) Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Inovatif												
(3.1) Meningkatkan Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)												
		3.1.01	Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Literasi									
		1	Rata-rata Lama Sekolah (<i>Tahun</i>)	Positif	7.12	7.31	7.53	7.75	7.95	8.2	8.2	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2	Harapan Lama Sekolah (<i>Tahun</i>)	Positif	12.55	12.58	12.73	12.88	13.03	13.20	13.20	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		3	Skor Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (<i>Angka</i>)	Positif	-	5,36	5,52	5,68	5,84	6,00	6,00	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (<i>Indeks</i>)	Positif	44,88	44,96	45,04	45,12	45,20	45,28	45,28	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		5	Nilai Budaya Literasi (<i>Persen</i>)	Positif	-	-	-	53	53,5	54	54	Program Baru PMDN 90/2019
		3.1.02	Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Kesehatan									
		1	Angka Harapan Hidup (<i>tahun</i>) (<i>Persen</i>)	Positif	69.92	69,95	70.66	70,76	70.87	70.99	70.99	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	-	-	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		3	Status Akreditasi Rumah Sakit	Utama	-	-	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		4	Status Akreditasi Rumah Sakit	Madya	-	-	-	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	-	-	-	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		3.1.03	Meningkatnya Kualitas Pemuda									
		1	Indeks pembangunan pemuda (<i>Persen</i>)	Positif	48	49	50	51	52	53	53	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		3.1.04	Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender									
		1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (<i>Angka</i>)	Positif	68.5	68.5	70	70.5	80	80.5	80.5	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		3.1.05	Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender									
		1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (<i>Angka</i>)	Positif	64.46	64.46	65.96	66.46	66.96	67.46	67.46	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		3.1.06	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah									
		1	Indeks Ketahanan Pangan Provinsi (<i>Indeks</i>)	Positif	-	55.17	56.79	57.69	59.04	60.91	60.91	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
(4) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera												
(4.1) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat yang Merata Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran												
		4.1.01	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan									
		1	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Pangan (<i>Persen</i>)	Positif	9.8	4.58	1,43 - 3,46	4,13 - 4,81	4,14 - 4,82	4,39 - 5,20	4,39 - 5,20	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Hortikultura (<i>Persen</i>)	Positif	4.96	5.47	2,55 - 6,24	6,42 - 8,68	6,76 - 8,95	7,17 - 9,43	7,17 - 9,43	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		3	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Perkebunan (<i>Persen</i>)	Positif	7.75	7.54	2,66 - 6,44	5,79 - 8,94	6,09 - 9,27	6,45 - 9,67	6,45 - 9,67	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD	Status Indikator	Data Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Akhir Periode	KETERANGAN
		4	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Peternakan (Persen)	Positif	5.51	5.02	1,99 - 4,83	5,77 - 6,71	6,06 - 6,98	6,19 - 7,26	6,19 - 7,26	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		5	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (Persen)	Positif	3.65	3.37	1,27 - 3,09	3,73 - 4,29	3,92 - 4,52	4,09 - 4,64	4,09 - 4,64	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		6	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan (Persen)	Positif	-0.98	-0.88	-0,97 - (-1,1)	-0,92 - (-1,06)	-0,88 - (-1,02)	-0,30 - (-0,73)	-0,30 - (-0,73)	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		7	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (Persen)	Positif	5.54	5.54	0,97 - 3,72	3,99 - 5,53	4,20 - 5,76	4,51 - 5,99	4,51 - 5,99	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		8	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri (Persen)	Positif	7.49	7.49	2,85 - 4,80	7,61 - 7,67	7,74 - 7,75	7,83 - 7,86	7,83 - 7,86	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		9	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata (Persen)	Positif	4.17	4.17	1,19 - 3,02	3,30 - 3,81	3,47 - 3,97	3,68 - 4,13	3,68 - 4,13	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		10	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Persen)	Positif	7.45	6.09	1,07 - 3,67	3,10 - 4,69	3,26 - 4,88	3,45 - 5,07	3,45 - 5,07	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		4.1.02	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi									
		1	Laju Pertumbuhan Investasi (Persen)	Positif	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		4.1.03	Meningkatnya kualitas pembangunan desa									
		1	IKE	Kumulatif	42.15	45.25	49.98	53.92	57.86	63.08	63.08	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2	IKS	Kumulatif	60.08	63.18	67.91	71.85	75.79	81.01	81.01	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		3	IKL	Kumulatif	56.65	59.74	64.48	68.42	72.36	77.36	77.36	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		4.1.04	Meningkatnya Perekonomian Sektor Koperasi dan UMKM									
		1	Persentase Volume Usaha Koperasi (Persen)	Positif	-	-	-	11	12	13	13	Program Baru PMDN 90/2019
		2	Persentase Pertumbuhan UMKM yang Berkualitas (Persen)	Positif	-	-	-	5	7	9	9	Program Baru PMDN 90/2019
		4.1.05	Meningkatnya Kesejahteraan petani dan nelayan									
		1	NTP Tanaman Pangan (Angka)	Positif	94.41	94.58	95.08	95.11	95.14	95.17	95.17	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2	NTP Tanaman Hortikultura (Angka)	Positif	101.02	100.4	100.9	101.4	101.9	102.4	102.4	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		3	NTP Perkebunan Rakyat (Angka)	Positif	94.44	95.55	96.66	97.78	98.89	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		4	NTP Peternakan (Angka)	Positif	93.95	95.16	96.37	97.58	98.79	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		5	NTP Perikanan (Angka)	Positif	103.5	104	101	102	103	104	104	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		4.1.06	Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat									
		1	Persentase pemberdayaan sosial	Positif	12,77	13,20	2,50	50%	52,5%	55%	55%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2	Persentase PPKS, PSKS dan Penyelenggara Kesejahteraan sosial lainnya yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan	Positif	-	-	-	26,7%	26,75%	26,8%	26,8%	Program Baru PMDN 90/2019
		4.1.07	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tenaga kerja									
		1	Persentase kualitas dan ketersediaan tenaga kerja	Positif	90%	90%	91,59%	91,66%	91,75%	92,02%	92,02%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		4.1.08	Ketersediaan lahan transmigrasi									

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran RPJMD	Status Indikator	Data Awal	2019	2020	2021	2022	2023	Akhir Periode	KETERANGAN
		2	Persentase ketersediaan kawasan transmigrasi	Kumulatif	-	-	-	284.66 Ha 7.76 %	164 Ha 4.47 %	845.608 Ha 23.04 %	845.608 Ha 23.04 %	Program Baru PMDN 90/2019
	4.1.09	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan										
		1	Ratio Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Wilayah Perbatasan	Negatif	0.4096	0.2108	0.1506	0.0904	0.0301	0.0301	0.0301	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
(5) Mewujudkan Masyarakat yang Tertib												
	(5.1) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat											
	5.1.01	Meningkatnya Pemahaman terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik										
		1	Indeks Pemahaman terhadap kesatuan Bangsa dan Politik (<i>Angka</i>)	Positif	-	-	-	97.75%	97.95%	98,25%	98,35	Program Baru PMDN 90/2019
	5.2.02	Meningkatkan Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik										
		1	Meningkatkan Persentasi Pemahaman Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik (<i>Angka</i>)	Positif	97.15	97.55	97.75	97,75%	97,95%	98,25%	98,35	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
	5.1.03	Menurunnya Resiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat										
		1	Indeks Resiko Bencana (<i>Indeks</i>)	Negatif	138.49	131.40	130	129	128	127	127	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
	5.1.04	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat										
		1	Presentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (<i>Persen</i>)	Positif	100	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
(6) Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan												
	(6.1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup											
	6.1.01	Meningkatkan Kualitas Air dan Udara										
		1	Indeks Kualitas Air (<i>Angka</i>)	Positif	55.8	56.2	56.6	57	57.4	57.8	57.8	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		2	Indeks Kualitas Udara (<i>Angka</i>)	Positif	87.9	87.914	87.928	87.942	87.956	87.97	87.97	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
	6.1.02	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan										
		1	Indeks Tutupan Kualitas Lahan (<i>Persen</i>)	Positif	63,371	65,588	65,311	65,035	64,759	64,483	64,483	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
	6.1.03	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkatkan										
		1	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkatkan (<i>Persen</i>)	Positif	50	55	60	65	70	75	75	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dirumuskan strategi pembangunan yang digunakan. Strategi pembangunan yang dipilih merupakan panduan bagi penyusunan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dimaksud maka dirumuskan Prioritas Pembangunan yang berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, agenda prioritas yang akan dilaksanakan, untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan pada lima tahun kedepan, terdapat 3 (tiga) prioritas pembangunan yaitu: “Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung Perekonomian serta Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik”

Prioritas 1: Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat

Untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif dan berdaya saing dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah serta pengelolaan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi serta pemanfaatan hutan secara lestari. Kesejahteraan masyarakat juga ditunjang dari peningkatan kualitas dan daya saing SDM dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan berdaya saing, peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak dan pemuda.

Prioritas 2: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendukung Perekonomian

Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara adil dan bijaksana guna mendukung aktivitas perekonomian serta pengurangan ketimpangan melalui pengembangan wilayah. Hal tersebut akan diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengembangan konektivitas multimoda, pemanfaatan energi alternatif, pengembangan pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah-wilayah yang belum berkembang dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Prioritas 3: Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik

Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan pelayanan publik. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang handal untuk memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha secara cepat, sederhana, melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan, penyederhaan prosedur pelayanan, peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara,

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pelaksanaan Sistem pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

6.1.1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur.

Maksud dari misi ini adalah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur di daerah termasuk daerah perbatasan yang ditandai dengan indikator Indeks Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah.

6.1.2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance.

Maksud dari misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selain itu juga untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan yang akan diwujudkan melalui pemekaran daerah, sehingga pelayanan pembangunan daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang ditandai dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya.

6.1.3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.

Maksud dari misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya sumber daya manusia yang ditandai dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, dimana indeks tersebut tersusun dari 3 dimensi pembangunan manusia yaitu pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan dan pembangunan kesejahteraan. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah.

6.1.4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera

Maksud dari misi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor

pertambangan dengan sektor industri pengolahan. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata yang ditandai dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Jumlah Desa Mandiri. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya.

6.1.5. Mewujudkan masyarakat yang tertib.

Maksud dari misi ini adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan kejadian konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya.

6.1.6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Maksud dari misi ini adalah dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan yang ditandai dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut. Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan maka dipilih strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan untuk 5 tahun kedepan. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1.

Pemetaan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arahan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arahan Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	MISI 1 : MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR							
1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan	1.1.1 Ketersediaan infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkat	1.1.1.1 Penyediaan tenaga listrik Non PLN; peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan; serta pengembangan penyediaan energy listrik berbasis tenaga surya dan juga berbasis nuklir	1.1.1.1.1 Mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
			1.1.1.2 Diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTN, PLTB)	1.1.1.1.2 Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah 3T	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
		1.1.2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	1.1.2.1 Pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur jalan dan jembatan	1.1.2.1.1 Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dan Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		1.1.3 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	1.1.3.1 Pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur yang mendukung sektor agraris	1.1.3.1.1 Mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
				1.1.3.1.2 Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Irigasi dan Rawa Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
				1.1.3.1.3 Mengoptimalkan normalisasi sungai dan saluran drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		1.1.4 Meningkatkan kualitas Infrastruktur pemukiman perdesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan pemukiman perkotaan	1.1.4.1 Meningkatkan kapasitas pelayanan sanitasi	1.1.4.1.1 Meningkatkan layanan sanitasi ke rumah tangga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			1.1.4.2 Meningkatkan kapasitas pelayanan air bersih	1.1.4.2.1 Peningkatan layanan air bersih ke rumah tangga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.04.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			1.1.4.3 Meningkatkan kapasitas pelayanan persampahan	1.1.4.3.1 Peningkatan layanan persampahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			1.1.4.4 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan Pemukiman Pedesaan dan Perkotaan	1.1.4.4.1 Peningkatan Kualitas Jalan Pemukiman Pedesaan dan Perkotaan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN	1.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7		8	
			1.1.4.5 Peningkatan Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program provinsi/Rumah Khusus/Rumah Susun/Rumah Swadaya dan PSU-nya	1.1.4.5.1 Peningkatan Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi RTLH bagi korban bencana dan korban relokasi program pemerintah provinsi	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PENYEDIAAN DAN FASILITASI RUMAH LAYAK HUNI DAN RELOKASI	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN	
		1.1.5 Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Konstruksi	1.1.5.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bangunan Gedung Pemerintah melalui Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Gedung Pemerintah	1.1.5.1.1 Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Prasarana Gedung Pemerintahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
		1.1.6 Meningkatkan Pelayanan, Konektivitas dan keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	1.1.6.1 Meningkatkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	1.1.6.1.1 Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				1.1.6.2 Meningkatkan pelayanan angkutan yang aman, nyaman dan terjangkau	1.1.6.2.1 Peningkatan pelayanan terminal tipe B	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN DARAT	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				1.1.6.3 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelabuhan SDP	1.1.6.3.1 Peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan pelabuhan SDP	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN LAUT DAN SDP	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
				1.1.6.6 Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pusat dan daerah	1.1.6.6.1 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pusat dan daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2	MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE								
2.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	2.1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2.1.1.1 Interaktif, komunikatif dan informatif terhadap pembinaan administrasi pembangunan.	2.1.1.1.1 Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan terintegrasi.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PROGRAM BINA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		2.1.2 Meningkatkan pengadaan Barang dan Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money)	2.1.2.1 Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	2.1.2.1.1 Menjadikan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PROGRAM PENGEMBANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		2.1.3 Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi	2.1.3.1 Peningkatan Sumber- Sumber Pendapatan Daerah	2.1.3.1.1 Mengoptimalkan upaya intensifikasi penerimaan pada objek-objek pendapatan	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			2.1.3.1.2 Mengembangkan pengelolaan pendapatan berbasis teknologi informasi	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM KUALITAS PELAYANAN	5.02.04			
			2.1.3.1.3 Mengoptimalkan sistem pelayanan pendapatan daerah	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI PEMUNGUTAN				

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
						BADAN PENDAPATAN DAERAH		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD			
		2.1.4	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	2.1.4.1	Peningkatan kualitas Penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dokumen penganggaran daerah	2.1.4.1.1	Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
						2.1.4.1.2	Pembinaan terhadap proses penyusunan dokumen penganggaran kabupaten/kota	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA		
						2.1.4.1.3	Meningkatkan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI BANSOS DAN HIBAH		
				2.1.4.2	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	2.1.4.2.1	Pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROGRAM MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		2.1.5	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa	2.1.5.1	Memantapkan kemajuan penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	2.1.5.1.1	Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA
						2.1.5.1.2	Membina penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DESA	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		2.1.6	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	2.1.6.1	Peningkatan sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan	2.1.6.1.1	Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		2.1.7	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	2.1.7.1	Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM serta pembinaan aparatur	2.1.7.1.1	Meningkatkan pengelolaan rekrutmen dan pengembangan karier aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
						2.1.7.1.2	Meningkatkan kesejahteraan dan disiplin aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA		
						2.1.7.1.3	Optimalisasi sistem dan layanan administrasi kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019		
1	2	3	4	5	6	7		8		
			2.1.7.2	Peningkatan kompetensi aparatur	2.1.7.2.1	Optimalisasi pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi aparatur	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
					2.1.7.2.2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN		
							BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN INSTITUSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI		
			2.1.7.3	Peningkatan pengelolaan kearsipan daerah yang kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1.7.3.1	Peningkatan Pengelolaan Arsip Sesuai Penyelenggaraan Sistem Kearsipan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN KEARSIPAN	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
	2.1.8	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	2.1.8.1	Menata Sistem Penentuan Pilihan Jenis dan Topik Kelitbangan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan kelitbangan prioritas secara selektif	2.1.8.1.1	Optimalisasi Kelitbangan untuk memenuhi kebutuhan daerah	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			2.1.8.2	Memperkuat fasilitasi inovasi daerah yang Terintegrasi dan Sistem Informasi Database Kelitbangan	2.1.8.2.1	Optimalisasi Penyelenggara Fasilitasi Inovasi daerah secara Berkesinambungan	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		
							BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI		
							BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
		2.1.9	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	2.1.9.1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	2.1.9.1.1	Meningkatkan Fasilitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
						2.1.9.1.2	Meningkatkan dukungan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
		2.1.10	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	2.1.10.1	Peningkatan Peran kehumasan dalam penyampaian Informasi /pemberitaan kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan	2.1.10.1.1	Meningkatkan Penyebaran Informasi melalui media Cetak, Elektronik, Media Luar Ruang dan Online	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				2.1.10.2	Peningkatan Koordinasi, Sinergitas Pelayanan Keprotokolan sesuai dengan standar pelayanannya.	2.1.10.2.1	Meningkatkan layanan Tamu, Pimpinan dan pengaturan Acara	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
						2.1.10.2.2	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Intitusi Pemerintah	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTIRTUSI PEMERINTAH	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				2.1.10.3	Peningkatan penataan peraturan perundang undangan daerah	2.1.10.3.1	meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR	PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
								BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM		
								BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KALBAR	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA SE-KALBAR		
		2.1.11	Meningkatnya sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	2.1.11.1	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga	2.1.11.1.1	Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur dengan pejabat eksekutif dan legislatif untuk memperoleh keahlian dan keterampilan dibidang Hubungan antar lembaga	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA	5.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
				2.1.11.2	Penugasan pegawai di luar kantor untuk melakukan koordinasi terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Jakarta	2.1.11.2.1	Memfasilitasi pertemuan antara Gubernur dengan pejabat eksekutif dan legislatif lainnya dengan lembaga – lembaga pemerintahan,masyarakat antara swasta di Jakarta dan daerah lainnya	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGHUBUNG		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7		8
		2.1.12	Meningkatnya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	2.1.12.1 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lain	2.1.12.1.1 Pembinaan terhadap Mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGHUBUNG
				2.1.12.2 Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan Mess	2.1.12.1.2 Disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang pengolaan Mess daerah dan anggaran yang tersedia	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGHUBUNG
		2.1.13	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	2.1.13.1 Penguatan kebijakan di bidang pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan Penataan Daerah.	2.1.13.1.1 Penguatan sistem koordinasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan	BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
				2.1.13.2 Meningkatkan pelaksanaan kerjasama pengembangan potensi daerah	2.1.13.1.2 Penyusunan kebijakan yang mendukung kerjasama daerah	BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
				2.1.13.3 Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas untuk kepentingan umum pimpinan dan tamu-tamu pimpinan	2.1.13.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum, Pimpinan dan Tamu Tamu Pimpinan	SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALBAR	1.01.11	PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
					2.1.13.1.4 Meningkatkan Disiplin Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
					2.1.13.1.5 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan Pengendalian Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV KALBAR	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
			2.1.13.4	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Akuntabel	2.1.13.4.1 Peningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah.	BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
						BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
					2.1.13.4.1 Peningkatan Penerbitan Aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan.	BIRO UMUM SETDA PROV KALBAR	4.01.04	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
		2.1.14	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal	2.1.14.1	Peningkatan kinerja rutin pengawasan	2.1.14.1.1	Meningkatkan kualitas reviu dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan dan kinerja	INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA RUTIN PENGAWASAN	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
				2.1.14.2	Peningkatan pengawasan prioritas nasional	2.1.14.1.2	Optimalisasi monitoring dan evaluasi dana BOS dan dana desa	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL		
						2.1.14.1.3	Optimalisasi evaluasi perencanaan dan penganggaran <i>responsif gender</i>	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL		
						2.1.14.1.4	Optimalisasi partisipasi kegiatan pencegahan anti korupsi	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL		
				2.1.14.3	Peningkatan kapabilitas APIP	2.1.14.3.1	Meningkatkan Kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
						2.1.14.3.2	Penyusunan pedoman/standar pengawasan internal	INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)		
						2.1.14.3.3	Meningkatkan pelayanan melalui survey kepuasan eksternal	INSPEKTORAT	PROGRAM PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)		
				2.1.14.4	Peningkatan pengawasan reformasi birokrasi	2.1.14.4.1	Optimalisasi penilaian mandiri reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan masyarakat	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
				2.1.14.5	Peningkatan penegakkan integritas	2.1.14.5.1	Optimalisasi penanganan laporan gratifikasi dan monev aksi pencegahan korupsi	INSPEKTORAT	PROGRAM PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI		
						2.1.14.4.2	Optimalisasi evaluasi pelaporan RAD PPK dan penilaian ZI	INSPEKTORAT	PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
						2.1.14.5.2	Melaksanakan verifikasi LHKASN/ LHKPN	INSPEKTORAT	PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS		
						2.1.14.4.3	Penanganan benturan kepentingan	INSPEKTORAT	PROGRAM PENEGAKAN INTEGRITAS		
		2.1.15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2.1.15.1	Memastikan ketersediaan acuan dalam proses perencanaan pembangunan	2.1.15.1.1	Pemantapan proses penyusunan dokumen perencanaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				2.1.15.2	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid	2.1.15.1.2	Pengelolaan Data dan Informasi berbasis teknologi informasi	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PEMBANGUNAN		
								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019		
1	2	3	4	5	6	7		8		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KERJASAMA WILAYAH SE-KALIMANTAN	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	5.1.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN EKONOMI	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	5.01.03	PROGRAM FASILITASI DAN MONEV PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN KEWILAYAHAN		
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
			2.1.15.3	Melaksanakan dan mengintensifkan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Secara Transparan, Partisipatif dan Terintegrasi;	2.1.15.3.1	Memaksimalkan Proses Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Yang Koordinatif, Akuntabel, Transparan dan Partisipatif ;	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			2.1.15.4	Meningkatkan mutu layanan melalui pengelolaan data statistik berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi.	2.1.15.4.1	Memaksimalkan Proses Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Yang Koordinatif, Akuntabel, Transparan dan Partisipatif ;	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA PEMBANGUNAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			2.1.15.5	Menyusun Perencanaan Pembangunan Yang responsif, Inovatif dan Partisipatif;	2.1.15.5.1	Mengoptimalkan terlaksananya pengelolaan data statistik berbasis system yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi;	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KERJASAMA WILAYAH SE-KALIMANTAN	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019		
1	2	3	4	5	6	7		8		
			2.1.16.1	Meningkatkan Koordinasi baik antar SKPD Provinsi, antar Pemerintah Kab/Kota, Regional dan Pusat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan	2.1.16.1.1	Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Komprehensif pada tiap tahapan jangka pembangunan yang telah ditentukan sesuai prioritas yang telah ditetapkan;	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN MANUSIA, SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	5.1.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
							BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN EKONOMI	5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
					2.1.16.1.2	Mengoptimalkan terlaksananya Kegiatan koordinasi program dan kegiatan pembangunan Lintas SKPD dan kerjasama baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Regional dan Pusat secara sinergi dan terintegrasi.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
							BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			2.1.17.1	Peningkatan kelembagaan perangkat daerah provinsi/kabupaten/ kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	2.1.17.1.1	Meningkatnya penataan kelembagaan perangkat daerah	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
			2.1.18.2	Peningkatan penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	2.1.18.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kualitas standarisasi, sistem dan prosedur	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
							BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR	PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN		
			2.1.19.1	Peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	2.1.19.1.1	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR		
			2.1.20.1	Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.1.20.1.1	Meningkatnya perangkat daerah yang menerapkan Akuntabilitas Kinerja di Prov. Kalbar	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI KALBAR	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7		8
		2.1.16 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terintegrasi	2.1.16.1 Peningkatan pembinaan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi	2.1.16.1.1 Mengoptimalkan pembinaan perangkat daerah agar informatif dalam memberikan layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			2.1.16.2 Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik sesuai standar dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.1.16.2.1 Mengoptimalkan pengembangan inovasi teknologi informasi dan komunikasi sesuai standar dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMATIKA	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			2.1.16.3 Peningkatan keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan persandian	2.1.16.3.1 Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi keamanan informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PERSANDIAN	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
			2.1.16.4 Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Kalimantan Barat	2.1.16.4.1 Pengelolaan data statistik sektoral Kalimantan Barat terintegrasi dan mudah diakses oleh perangkat daerah dan masyarakat	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN STATISTIK SEKTORAL KALIMANTAN BARAT	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
		2.1.17 Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi	2.1.17.1 Meningkatkan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro;	2.1.17.1.1 Sinkronisasi dan Koordinasi Percepatan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro;	BIRO PEREKONOMIAN	BINA PENANAMAN MODAL, INVESTASI, LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DAN BUMD	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			2.1.17.2 Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pendorong Perekonomian Kalimantan Barat (Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Energi dan Air);	2.1.17.2.1 Sinkronisasi Percepatan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro;	BIRO PEREKONOMIAN	PROGRAM BINA PENINGKATAN SUMBER DAYA PERTANIAN, SUMBER DAYA ALAM, MINERAL DAN ENERGI, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, SERTA KETAHANAN PANGAN	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			2.1.17.3 Meningkatnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengelolaan dan Pendirian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha, BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi serta BLUD.	2.1.17.3.1 Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, kelautan dan Perikanan;	BIRO PEREKONOMIAN	PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN DAERAH	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				2.1.17.3.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;	BIRO PEREKONOMIAN	PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH, PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA		
				2.1.17.3.3 Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Energi dan Air;	BIRO PEREKONOMIAN	PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
				2.1.17.3.4 Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;	BIRO PEREKONOMIAN	PROGARAM BINA SARANA PEREKONOMIAN					
				2.1.17.3.5 Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Air Mlimum, Limbah dan Sanitasi;	BIRO PEREKONOMIAN	PROGARAM BINA SARANA PEREKONOMIAN					
				2.1.17.3.6 Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD;	BIRO PEREKONOMIAN	PROGARAM BINA SARANA PEREKONOMIAN					
				2.1.17.3.7 Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD;	BIRO PEREKONOMIAN	PROGARAM BINA SARANA PEREKONOMIAN					
				2.1.17.3.8 Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD.	BIRO PEREKONOMIAN	PROGARAM BINA SARANA PEREKONOMIAN					
3	MISI 3 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF, DAN INOVATIF										
3.1	Meningkatnya derajat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan dan literasi	3.1.1.1	Peningkatan akses layanan pendidikan	3.1.1.1.1	Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan vokasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN MENENGAH	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				3.1.1.2	Peningkatan dan penjaminan mutu serta relevansi layanan pendidikan menengah, vokasi dan layanan khusus	3.1.1.2.1	Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
						3.1.1.2.2	Peningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
						3.1.1.2.3	Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
				3.1.1.3	Mendorong pemerintah kabupaten/kota meningkatkan APK pada PAUD dan Dikdas serta bersama-sama meningkatkan APK Perguruan Tinggi	3.1.1.3.1	Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Non Formal	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI, DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				3.1.1.4	Pelestarian dan Pengembangan warisan budaya benda dan tak benda	3.1.1.4.1	Peningkatan pengembangan dan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya, warisan budaya benda dan tak benda	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
					DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			3.1.1.5	Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat dan tata kelola perpustakaan	3.1.1.5.1	Peningkatan peran perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca					
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM KOLEKSI DAERAH	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
		3.1.2	Meningkatnya kualitas dan Pelayanan kesehatan	3.1.2.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	3.1.2.1.1	Meningkatkan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
						3.1.2.1.2	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat pada masyarakat	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PROMOSI KESEHATAN	1.02.05	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
						3.1.2.1.3	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
						3.1.2.1.4	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN
						3.1.2.1.5	Pengembangan dan pembinaan olahraga	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA	2.19.03	PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
				3.1.2.2	Peningkatan status kesehatan masyarakat	3.1.2.2.1	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat	RSJ PROVINSI RSJ SUGAI BANGKONG	PROGRAM PENINGKATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
						3.1.2.2.2	Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan rumah sakit	RSJ PROVINSI RSJ SUGAI BANGKONG	PROGRAM DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	1.02.03	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	RSUD dr. SOEDARSO	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
							Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan rumah sakit	RSUD dr. SOEDARSO	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDMK
											PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
			3.1.3.3	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	3.1.3.3.1	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					3.1.3.3.2	Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan rumah sakit	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			3.1.3.3	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	3.1.3.3.1	Pengembangan dan pembinaan olahraga	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		3.1.3	Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	3.1.3.1	Meningkatkan peran pemuda	3.1.3.1.1	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM KEPEMUDAAN DAN PRAMUKA	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
				3.1.3.2	Meningkatkan peran pramuka	3.1.3.2.1	Pengembangan dan fasilitasi kepramukaan	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM KEPEMUDAAN DAN PRAMUKA	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
		3.1.4	Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender	3.1.4.1	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan; Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha; melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender;	3.1.4.1.1	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penyediaan regulasi dan kebijakan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan anggaran responsif gender dan pendampingan implementasi PPRG	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				3.1.4.2	Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah; Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender; Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi PUG	3.1.4.1.2	Peningkatan sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak untuk penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM DATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
		3.1.5	Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	3.1.5.1	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan; Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, masyarakat, dunia usaha dalam meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan; Meningkatkan peran serta organisasi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.	3.1.5.1.1	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penyediaan regulasi dan kebijakan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan anggaran responsif gender dan pendampingan implementasi PPRG	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7		8
				3.1.5.1.2	Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan: Penguatan dan pengembangan lembaga untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04	PROGRAM KUALITAS KELUARGA
		3.1.6	Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3.1.6.1	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan; dan Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
				3.1.6.2	Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan menyediakan berbagai regulasi, kebijakan, penguatan kelembagaan, peningkatan sarana dan prasarana penunjang layak anak.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				3.1.6.2.2	Peningkatan perumusan kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan perlindungan anak terhadap tindak kekerasan; Peningkatan sarana dan prasarana penyediaan pelayanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		3.1.7	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	3.1.7.1	Peningkatan peran serta OPD dan mitra kerja/swasta dalam program KB dan KS, serta sinkronisasi kebijakan bidang pengendalian penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		3.1.8	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	3.1.8.1	Menguatkan pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan,	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
							2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
							2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
							2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
4	MISI 4 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA							
4.1	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	4.1.1.1	Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak serta skala usaha peternakan	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
							3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7		8
			Meningkatkan daya saing dan nilai tambah hewan dan produk hewan	Penjaminan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
							3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas kelompok ternak / usaha ternak	Percepatan Adaptasi Teknologi budidaya usaha peternakan dan berorientasi pasar	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN	PROGRAM PENINGKATAN	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
							3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		4.1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	4.1.2.1 Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	4.1.2.1.1 Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Sarana Prasarana , Inovasi Teknologi Tepat Guna, peningkatan Kualitas SDM serta pengembangan kelembagaan bidang perikanan tangkap	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			4.1.2.2 Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif	4.1.2.2.1. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut, pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal, peningkatan sarana dan prasarana serta Pengembangan produksi benih unggul tahan penyakit	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		4.1.3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	4.1.3.1 Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	4.1.3.1.1 Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan konsumsi ikan, peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			4.1.3.2 Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut	4.1.3.2.1 Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
			4.1.3.3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.	4.1.3.3.1 Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
		4.1.4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	4.1.4.1	Memfasilitasi Usaha Perkebunan Rakyat yang berorientasi agribisnis serta mendorong peningkatan kinerja Perkebunan Besar	4.1.4.1.1	Mensinergikan sumberdaya perkebunan untuk pengembangan komoditi unggulan perkebunan yang produktif melalui pemanfaatan teknologi dan pengolahan hasil budidaya yang baik dengan didukung pengembangan kemitraan usaha serta penanganan gangguan usaha dan dampak perubahan iklim	DINAS PERKEBUNAN	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
										3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
										3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
					Peningkatan mutu dan nilai tambah hasil perkebunan		Menynergikan sumberdaya perkebunan melalui pengembangan	DINAS PERKEBUNAN	PROGRAM PENINGKATAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
										3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
		4.1.5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	4.1.5.1	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	4.1.5.1.1	Pengawasan dan pengelolaan sarana pertanian (pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan sarana pendukung pertanian lainnya)	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
						4.1.5.1.2	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman melalui Pengelolaan penerbitan sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih				
						4.1.5.1.3	Pengelolaan sumberdaya genetik dan sumber benih tanaman pangan dan hortikultura				
				4.1.5.2	Meningkatkan produktivitas sumberdaya pertanian melalui pengembangan prasarana pertanian	4.1.5.2.1	Penataan dan pengendalian pemanfaatan prasarana pertanian (lahan, air, kawasan, komoditas pertanian)	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				4.1.5.3	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	4.1.5.3.1	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (dampak iklim dan serangan OPT)	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		4.1.6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	4.1.6.1	Pengembangan Penyuluhan dan SDM Pertanian	4.1.6.1.1	Pengembangan ketenagaan dan penerapan penyuluhan pertanian serta kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				4.1.6.2	Pengembangan kapabilitas terkait ijin usaha pertanian	4.1.6.2.1	Pengelolaan penerbitan ijin usaha pertanian	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
		4.1.7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	4.1.7.1	Pemantapan kawasan hutan dan peningkatan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;	4.1.7.1.1	Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung secara lestari	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
				4.1.7.2	Peningkatan kualitas penyelenggaraan	4.1.7.2.1	Pemberian akses pengelolaan sumber	DINAS LINGKUNGAN	PROGRAM PENYULUHAN	3.28.04	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019
1	2	3	4	5	6	7		8
			penyuluhan kehutanan dan	daya hutan yang berkerakyatan dan	HIDUP DAN KEHUTANAN	DAN PENGEMBANGAN		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
		4.1.8 Meningkatkan nilai Investasi	4.1.8.1 Pengembangan iklim penanaman modal dan peningkatan kualitas promosi serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal	4.1.8.1.1 Penguatan kebijakan, perencanaan, promosi, dan pemantauan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta sistem informasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI	2.18.03	PROMOSI PENANAMAN MODAL
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
		4.1.9 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.1.9.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	4.1.9.1.1 Peningkatan standar pelayanan perizinan dan non perizinan yang memenuhi kualitas pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		4.1.10 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	4.1.10.1 Peningkatan inventarisasi dan pemetaan geologi dan air tanah	4.1.10.1.1 Meningkatkan pemanfaatan pengelolaan dan konservasi air tanah	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN GEOLOGI AIR TANAH	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN
						PROGRAM PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH		
			4.1.10.2 Peningkatan produksi dan pengusaha sumber daya mineral melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara	4.1.10.2.1 Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
			4.1.10.3 Melakukan reklamasi terhadap lahan yang terganggu serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	4.1.10.3.1 Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pengusaha mineral dan batubara pada Perlindungan lingkungan dan konservasi terhadap izin usaha pertambangan.	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN, PERTAMBANGAN, MINERAL DAN BATU BARA		
		4.1.11 Meningkatkan Perekonomian Sektor Koperasi dan UMKM	4.1.11.1 Peningkatan Pelayanan, Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	4.1.11.1.1 Pembinaan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
			4.1.11.2	Peningkatan Pengawasan, Pemeriksaan Dan Penilaian Kesehatan Koperasi	4.1.11.2.1	Pembinaan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
							DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPJUSP KOPERASI	
			4.1.11.3	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi	4.1.11.3.1	Pembinaan Koperasi	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI	
			4.1.11.4	Pendampingan Dan Penguatan Kapasitas UMKM	4.1.11.4.1	Pembinaan UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
							DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		4.1.12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	4.1.12.1	Peningkatan Pertumbuhan Usaha Pariwisata dan Destinasi Wisata Unggulan	4.1.12.1.1	Meningkatkan Jumlah Usaha Pariwisata dan Destinasi Wisata Unggulan	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PENINGKATAN PERTUMBUHAN USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				4.1.12.2	Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	4.1.12.2.1	Meningkatkan kualitas atraksi dan promosi pariwisata	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
				4.1.12.3	Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	4.1.12.3.1	Pembinaan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM EKONOMI KREATIF	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				4.1.12.4				DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PROGRAM EKONOMI KREATIF	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				4.1.12.5	Meningkatkan Aktivitas dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri serta Daya saing Perdagangan Luar Negeri yang didukung dengan upaya-upaya peningkatan perlindungan Konsumen dan tertib niaga serta peningkatan peran UKM dalam perdagangan luar negeri	4.1.12.4.1	Meningkatkan Volume Ekspor	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
						4.1.12.4.2	Meningkatkan kemudahan berusaha di sektor perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
						4.1.12.4.3	Memperkuat data dan informasi serta meningkatkan pelayanan Sarana Distribusi Perdagangan Daerah	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
				4.1.12.4.4	Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
				4.1.12.4.5	Meningkatkan keberdayaan konsumen daerah dan kemampuan pelayanan & pengujian laboratorium penguji daerah yang didukung upaya-upaya peningkatan mutu komoditi/produk daerah kalbar	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
				4.1.12.4.6	Meningkatkan Pemasaran Produk Daerah melalui Promosi online dan kerjasama antar daerah perdagangan antar pulau	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			4.1.12.5	Penumbuhan dan Pengembangan Industri	4.1.12.5.1	Meningkatkan Pertumbuhan Industri sesuai kebijakan RPIP	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
						DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
						DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
		4.1.13	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan tenaga kerja	4.1.13.1	Pendayagunaan Tenaga Kerja	4.1.13.1.1	Kerjasama Lintas Sektor terkait pelatihan dan kesempatan kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENEMPATAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			4.1.13.2	Meningkatkan hubungan industrial antara perusahaan/pengusaha dan pekerja.	4.1.13.2.1	Menciptakan hubungan industrial dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
			4.1.13.3	Mewujudkan perlindungan bagi terciptanya ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan usaha	4.1.13.3.1	Menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan Pekerja/Buruh	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
			4.1.13.4	Optimalisasi SDM dan pemanfaatan lahan pada UPT Bina	4.1.13.4.1	Kerjasama Lintas Sektor terkait peningkatan SDM dan penyediaan lahan perikanan transmigrasi pada UPT Bina	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
							DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
		4.1.14	Meningkatnya pemberdayaan, perlindungan, jaminan dan rehabilitasi sosial masyarakat	4.1.14.1	Meningkatnya pemberdayaan dan kemampuan potensi Kesejahteraan Sosial	4.1.14.1.1	Meningkatkan pemberdayaan dan kemampuan potensi Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSIAL	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		4.1.15	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	4.1.15.1	Memantapkan pembangunan dan kemandirian masyarakat desa	4.1.15.1.1	Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara ketahanan sosial	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
						4.1.15.1.2	Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
						4.1.15.1.3	Membina dan memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
		4.1.16	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Perbatasan	4.1.16.1	Mengurangi Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di Kawasan Perbatasan	4.1.16.1.1	Peningkatan koordinasi pemangku kepentingan pengelola perbatasan	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN	5.07.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
5	MISI 5 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TERTIB										
5.1	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	5.1.1	Meningkatnya Pemahaman terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	5.1.1.1	Peningkatan ideologi dan Wawasan Kebangsaan	5.1.1.1.1	Meningkatkan Edukasi Pancasila dan Cinta Tanah Air serta wawasan kebangsaan bagi Pelajar dan Masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
						5.1.1.1.2	Meningkatkan pendidikan politik dan fasilitasi kelembagaan dan partai politik	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
			5.1.1.2	Peningkatan pembinaan terhadap ormas	5.1.1.2.1	Meningkatkan Peran Organisasi Masyarakat	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN, PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL DAN AGHT	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			5.1.1.3	Peningkatan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	5.1.1.3.1	Meningkatkan peran Masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN, TANTANGAN)	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			5.1.2.1	Peningkatan koordinasi dalam pencegahan konflik	5.1.2.1.1	Meningkatkan peran Masyarakat dalam kewaspadaan Nasional di Daerah dan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial dan Kerjasama Intelijen.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
		5.1.2	Meningkatnya kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat	5.1.2.1	Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang sinergi dan inklusif di Kalbar	5.1.2.1.1	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam upaya penciptaan kondisi trantibum yang kondusif di Kalimantan Barat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENCIPTAAN, PEMELIHARAAN SERTA PENGENDALIAN KONDUSIFITAS KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KALBAR DAN PENGAMANAN OBJEK VITAL DAERAH	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
					5.1.2.1.2	Optimalisasi Peran PPNS Daerah dalam Penegakan Perda/Perkada di Kalimantan Barat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA PROVINSI DI KALIMANTAN BARAT	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					5.1.2.1.3	Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran masyarakat terhadap budaya tertib dan Peran Aktif Masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DETEKSI DINI DAN PEMBINAAN DALAM PENYELENGGARAAN TRANTIBUMLINMAS	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					5.1.2.1.4	Meningkatkan Kapasitas Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas dan Revitalisasi regulasi teknis dan operasional penyelenggaraan trantibum di Kalimantan Barat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN/KOTA	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		5.1.3	Menurunnya Resiko Bencana di Provinsi Kalimantan Barat	5.1.3.1	Peningkatan kapasitas kawasan/ desa rawan bencana melalui peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, serta penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	5.1.3.1.1	Meningkatkan pelayanan informasi bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban, serta penguatan kelembagaan bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
6	MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN										
6.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	6.1.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	6.1.1.1	Meningkatkan pelayanan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan	6.1.1.1.1	Meningkatkan kepastian hukum lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PENATAAN DAN PEGAKAN HUKUM	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
				6.1.1.2	Mengharusutamakan prinsip-prinsip berkelanjutan di dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program serta dalam pengkajian dampak lingkungan rencana usaha dan atau kegiatan	6.1.1.2.1	Meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN	2.11.02 2.11.06	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
				6.1.1.3	Meningkatkan pembinaan kepada dunia usaha dalam pengelolaan limbah B3	6.1.1.3.1	Mendorong peran serta dan kesadaran dunia usaha dalam pengelolaan limbah B3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	2.11.11 2.11.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
				6.1.1.4	Mendorong terbangunnya fasilitas pengelolaan sampah regional di Kalimantan Barat	6.1.1.4.1	Peningkatan fasilitasi, koordinasi pembangunan pengelolaan sampah regional di Kalimantan Barat serta Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				6.1.1.5	Meningkatkan peran masyarakat/kelompok masyarakat, sekolah dan swasta untuk menjaga	6.1.1.5.1	Mendorong peningkatan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat, sekolah dan swasta dalam pengelolaan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				6.1.1.6	Meningkatkan peran masyarakat dalam PPLH untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang lebih baik	6.1.1.6.1	Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA LINGKUNGAN HIDUP	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
								DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD	PMDN Nomor 13 Tahun 2006	kode 90	PMDN Nomor 90 Tahun 2019			
1	2	3	4	5	6	7		8			
			6.1.1.7	Meningkatkan kualitas air, udara dan menurunkan emisi gas rumah kaca	6.1.1.7.1	mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui kerjasama stakeholder terkait untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN, PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.03 2.11.04	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		6.1.2	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	6.1.2.1	Peningkatan perlindungan hutan dan penegakan hukum di bidang kehutanan serta pengelolaan kawasan ekosistem esensial	6.1.2.1.1	Optimalisasi perlindungan hutan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
								DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
				6.1.2.2	Peningkatan produktifitas lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan serta pengelolaan daerah aliran sungai	6.1.2.2.1	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta daya dukung daerah aliran sungai	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
		6.1.3	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	6.1.3.1	Melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.1.3.1.1	Peningkatan Rencana Tata Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
						6.1.3.1.2	Peningkatan Kesesuaian Rencana Pembangunan Sektor Dengan RTRW Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
						6.1.3.1.3	Peningkatan Kesesuaian RTR Kab/Kota Dengan RTRW Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
						6.1.3.1.4	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW Prov	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005-2025. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan diperlukan arah kebijakan untuk efektifitas dan efisiensi pencapaian pembangunan selama 5 tahun. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun tahapan-tahapan pembangunan tahunan dalam RPJMD 2018-2023 diarahkan pada:

1. Tahun Pertama (2019): Tahap Konsolidasi (Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah).

Tahap konsolidasi merupakan upaya memperkuat, memperteguh, mempersatukan dan menghubungkan berbagai elemen atau anggota masyarakat agar semakin erat dan solid. Unsur penting dalam tahap ini adanya kesepakatan bersama atau komitmen bersama menyangkut sebuah “nilai” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen atau anggota masyarakat tersebut menjadi suatu kekuatan yang realtif padu. Sehingga semua actor yang signifikan, baik pada level masa maupun elite memiliki derap langkah yang sama menuju “nilai” yang telah ditetapkan.

Untuk menuju “nilai” yang telah disepakati bersama tersebut, diperlukan penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini didasari karena tatakelola pemerintahan yang buruk memiliki dampak pada inefisiensi dalam kelembagaan untuk mencapai kesejahteraan publik, serta efisiensi dalam menciptakan pasar sangat sulit terwujud. Maka, pada tahap konsolidasi ini, penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi bila dikaitkan dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan guna meningkatkan daya saing daerah.

Arah pengembangan dalam penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas diantaranya pembenahan birokrasi, penataan kelembagaan, tatakelola anggaran, peningkatan sumberdaya aparatur termasuk mencegah budaya koruptif. Melalui tata kelola pemerintah yang berkualitas diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi peningkatan daya saing daerah. Penguatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah dengan sendirinya menjadi titik tolak peletakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan dalam tahap-tahap selanjutnya.

2. Tahun Kedua (2020): Tahap Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri).

Tahap ini menghendaki adanya suatu tindakan *affirmative* untuk mengejar kondisi ketertinggalan pembangunan karena jika dijalankan secara normal saja niscaya tidak akan dapat mengejar ketertinggalan. Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar mampu mencapai 6% - 6,15% sampai dengan 2023. Infrastruktur sangat

berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Memacu akselerasi pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli ekonomi pembangunan, sejak lama.

Telah mengkampanyekan pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama *big-push theory*. Berkenaan dengan peningkatan status desa mandiri di Kalimantan Barat, yang saat ini baru terdapat 1 (satu) desa mandiri. Maka pembangunan dalam tahap kedua lebih diarahkan pada upaya peningkatan status desa menuju desa mandiri. Apalagi bila dikaitkan dengan target RPJMD, yang menetapkan sasaran pada pencapaian desa mandiri tahun 2023 kurang lebih 400 desa mandiri. Oleh karena itu, salah satu pilihan strategi yang memiliki dampak bagi peningkatan status desa mandiri diantaranya melalui Pemerataan infrastruktur dasar serta Pemerataan aksesibilitas antar wilayah.

3. Tahun Ketiga (2021): Tahap Pengembangan (Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera)

Tahap ini lebih mengharapkan suatu kondisi kemampuan daerah agar mampu untuk menumbuhkan dirinya sendiri, baik karena pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar. Adapun ukuran pengembangan tentu dilihat dari berbagai aspek atau indikator apakah mengalami peningkatan atau perkembangan. Dan, melalui tahap ketiga ini sasaran utama mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Seiring dengan penguatan tata kelola pemerintahan dalam tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pada tahap kedua, maka pada tahap ketiga lebih diarahkan pada pengembangan kedua aspek tersebut. Sehingga pada tahap ketiga yang merupakan tahap pengembangan lebih memfokuskan pada optimalisasi infrastruktur daerah yang telah dibangun (tahap kedua) yang didukung peningkatan pelayanan public (tahap pertama) dengan harapan mampu mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera.

Masyarakat sejahtera pada tahap ini merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua untuk membangun suatu kehidupan yang layak. Maka, pada tahun ketiga ini melalui tahap pengembangan yaitu upaya Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan pelayanan public dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera menjadi langkah taktis dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat.

4. Tahun Keempat (2022): Tahap Penguatan (Meningkatkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja).

Tahap penguatan merupakan tahap peningkatan terhadap berbagai hasil capaian

sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata. Pada tahap ini menjadi sebuah bentuk respon dari berbagai modifikasi pelaksanaan pembangunan, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik sebagai suatu dorongan atau koreksi guna menuju tahap berikutnya. Melalui tahap penguatan ini mampu memberikan peningkatan partisipasi dalam aktivitas pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan PDRB tetapi kurang memperhatikan masalah pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja termasuk pemerataan pendapatan. Banyak wilayah yang terjebak dalam ekonomi eksklusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian yang tinggi dengan mendorong kepada pertumbuhan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi lebih kepada sector yang padat modal.

Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka, menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memperhatikan lingkungan.

5. Tahun Kelima (2023): Tahap Pematapan (Meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah)

Tahap pematapan sebagai upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat. Tahap pematapan ini tidak terlepas dari proses identifikasi dan inventarisasi berbagai masalah-masalah pembangunan yang dihadapi pada tahap-tahap sebelumnya sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya persoalan disekitarnya serta dapat merespon dengan cepat dan efektif. Penangan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk meminimalisir permasalahan yang lebih parah dengan segala dampak yang mengikutinya.

Maka, pada tahap terakhir ini upaya pencapaian visi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat menjadi prioritas pembangunan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat serta daya saing daerah. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat dan terutama meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah dapat dipercepat. Tentunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.

Untuk mencapai kondisi tahap pematapan ini, sudah menjadi keharusan bagi Kalimantan Barat menjalin sinergitas antar pemerintah daerah, antar pemangku kepentingan. Langkah ini dapat dilakukan dengan Meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah. Dengan demikian rumusan terwujudnya

kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sebagaimana yang diharapkan dari visi pembangunan Kalimantan Barat 2018-2023.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan program pembangunan daerah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan menggunakan proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dimana telah diproyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada bab ini akan disampaikan hubungan antara Program Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dengan Kerangka Pendanaan yang dibutuhkan.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Belanja Tahun 2018-2023

No.	Uraian	2019*	2020*	No.	Uraian	2021**	2022**	2023**
		(Rp.)	(Rp.)			(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
5.	BELANJA	5.677,40	6.271,31	5.	BELANJA	7.035,49	7.113,53	7.196,71
5.1.	Belanja Tidak Langsung	3.238,04	3.738,17	5.1.	BELANJA OPERASI	4.074,01	4.131,54	4.193,19
5.1.1	Belanja Pegawai	1.165,81	1.384,20	5.1.1	Belanja Pegawai	1.807,84	1.839,14	1.875,49
5.1.2	Belanja Bunga			5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.051,15	2.074,77	2.098,04
5.1.3	Belanja Subsidi			5.1.3	Belanja Bunga			
5.1.4	Belanja Hibah	1.074,43	1.165,16	5.1.4	Belanja Subsidi			
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5,66	9,00	5.1.5	Belanja Hibah	213,00	215,54	217,56
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	969,92	816,88	5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,02	2,09	2,09
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	22,20	53,32	5.2.	BELANJA MODAL	1.693,95	1.699,80	1.707,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,02	309,61	5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	133,24	140,00	145,00
5.2.	Belanja Langsung	2.439,36	2.533,14	5.4.	BELANJA TRANSFER	1.134,29	1.142,20	1.151,52
5.2.1	Belanja Pegawai			5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.035,04	1.040,57	1.045,89
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa			5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	99,25	101,63	105,63
5.2.3	Belanja Modal							
Ket:	* Sudah Realisasi							
	** Hasil Proyeksi Berdasarkan Analisis Data (2020)							

TABEL 7.2.																		
RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT																		
Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				2019		2020		2021		2022		2023						
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		
1	Pendidikan																	
1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pemenuhan ketersediaan sarpras pendidikan Menengah Atas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019		
		Skor penilaian mutu pendidikan SMA	-	5.47	5.63	5.79	5.95	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11		Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020		
		Persentase Pemenuhan ketersediaan sarpras pendidikan Khusus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2021		
		Skor penilaian mutu pendidikan Khusus	-	-	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2		Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2022		
		Persentase Pemenuhan ketersediaan sarpras pendidikan Menengah Kejuruan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2023		
		Skor penilaian mutu pendidikan SMK	-	5.24	5.4	5.56	5.72	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88	5.88		5.88	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2024	
		Rasio guru terhadap siswa SMA/SMK	1 : 20	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17	1 : 17		
1.2	Program Pengembangan Kurikulum	persentase pengajaran program baru yang di verifikasi	-	100	0	100	0	100%	599	100%	659	100%	725	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2026		
1.3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	persentase pengajaran sekolah baru yang dipospos	-	100	0	100	0	100%	149	100%	164	100%	180	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2027		
1.4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru terhadap siswa SLB	-	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	1 : 6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2028		
		Persentase Guru bersertifikat pendidik	66.7	66.8	0	66.9	0	67	149	67.1	164	67.2	180	67.2	180	67.2	180	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2029
		Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	53.8	54.03	54.11	54.25	54.35	54.55	54.55	54.55	54.55	54.55	54.55	54.55	54.55	54.55	54.55	54.55
2	Kesehatan																	
2.1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal sesuai standar	-	-	0%	-	21,43%	796	36%	12	50%	1,144	50%	50%	Dinas Kesehatan	Program Baru PMDN 90/2019		
		Persentase Kab/kota menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	-	-	64,29%	-	78,57%	-	85%	307	93%	337	93%	93%		93%	Program Baru PMDN 90/2020	
		Persentase Kab/kota melaksanakan asuhan gizi sesuai standar	-	-	100%	-	100%	IDR 11,051,778,340	100%	IDR 12,278,277,514	100%	IDR 13,482,876,791	100%	IDR 13,482,876,791		100%	100%	
		Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan layanan pengelolaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	-	-	60%	-	64%	IDR 1,162,207,755	71%	IDR 1,903,048,793	78%	IDR 1,791,822,050	78%	IDR 1,791,822,050		78%	78%	
		Persentase keberhasilan pelayanan kesehatan penyakit menular	-	-	82%	-	82%	IDR 3,063,916,275	85%	IDR 3,882,362,767	88%	IDR 3,648,671,992	88%	IDR 3,648,671,992		88%	88%	
		Persentase keberhasilan pelayanan kesehatan penyakit Tidak menular	-	-	30%	-	30%	IDR 1,255,366,984	50%	IDR 1,760,153,733	60%	IDR 1,384,042,100	60%	IDR 1,384,042,100		60%	60%	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	0%	-	50%	51,599	60%	56,734	65%	62,516	65%	62,516		65%	65%	
		Persentase Penduduk / Warga Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana / Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	100%	-	100%	340	100%	66	100%	73	100%	73		100%	100%	Program Baru PMDN 90/2026
		Persentase data dan Informasi Kesehatan yang tersedia	-	-	93%	-	100%	513	100%	207	100%	336	100%	336		100%	100%	Program Baru PMDN 90/2027
		Persentase Kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat	-	-	7%	-	21%	-	35%	-	50%	-	50%	-		50%	50%	Program Baru PMDN 90/2028
2.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	60%	-	70%	285	75%	785	80%	605	80%	80%	Dinas Kesehatan	Program Baru PMDN 90/2030		
2.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	Persentase sarana produksi distribut kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar	-	-	82%	-	84%	-	86%	172	88%	156	88%	88%	Dinas Kesehatan	Program Baru PMDN 90/2031		
2.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM	-	-	0%	-	14%	1,373	28%	1,706	42%	1,514	42%	42%	Dinas Kesehatan	Program Baru PMDN 90/2032		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program Pemenuhan UKP dan UKM	Persentase pemenuhan UKP dan UKM	-	-	-	-	-	80%	118	83%	3.397	>85%	2.385	>85%	RSUD Dr. Soedarso	Program Baru PMDN 90/2033
								76%	26.248	79%	28.873	80%	31.760	80%	RSJ Provinsi	Program Baru PMDN 90/2034
								75%	10.383	82%	16.046	82%	15.064	85%	RSJ Sel. Bangkong	Program Baru PMDN 90/2035
								76%	2.592	79%	3.068	85%	3.180	85%	RSUD Dr. Soedarso	Program Baru PMDN 90/2036
								76%	97	80%	106	85%	117	85%	RSJ Provinsi	Program Baru PMDN 90/2037
								60%	445	80%	900	85%	950	80%	RSJ Sel. Bangkong	Program Baru PMDN 90/2038
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
3.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Kondisi jalan mantap	49.71%	56.68%	354	59.89%	784	65.79%	717	72.18%	766.800	80.00%	938.400	80.00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46.76%	48.26%	119.540	49.83%	125.517	53.22%	131.793	55.04%	138.383	61.21%	145.302	61.21%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendapan banjir	46.76%	49.47%		56.52%		52.58%		52.70%		52.81%		52.81%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	67.92%	67.92%	138	69.29%	120	70.65%	145	72.01%	145	73.37%	145	73.37%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Keluasan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Provinsi	50%	55%	1.607	60%	2.550	65%	2.550	70%	2.550	75%	2.550	75%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.5	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah luasan bangunan Gedung yang dibangun dan ditata	14.392.00	13.096.69	91.022	21.576.76	149.959	13.015.26	84.599	20.824.42	135.359	20.824.42	135.359	89.337.55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah Luasan kawasan yang dibangun dan ditata	-	-	-	1079.13	7.500	3147.01	20.456	5035.21	32.729	5035.21	32.729	14296.55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Persentase Penduduk yang terlayani Sampah sesuai standar	-	16	-	17.00	-	18.00	-	19.00	-	20.00	-	20.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang berakses air minum	-	-	-	-	-	68.00	2.700	69.00	4.000	70.00	5.200	70.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
3.9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (sesuai standar)	-	-	-	49.00	0	50.00	491	51.00	1.500	52.00	1.950	52.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2021
3.10	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota	-	-	-	9.00	-	10.00	8.800	11.00	9.500	12.00	10.000	12.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2022
3.11	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah Kecamatan yang dikembangkan/ tingkatkan kualitas Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi	-	-	-	-	-	13 Kecamatan	-	14 Kecamatan	-	13 Kecamatan	-	40 Kecamatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2023
4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman															
4.1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase jumlah proposal rumah korban bencana/relokasi program provinsi/rumah swadaya/rumah khusus/rumah susun dan PSU yang tertangani	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	6.192	100.00%	6.811	100.00%	7.492	100.00%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Baru PMDN 90/2019
4.2	Program Kawasan Pemukiman	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	-	-	-	-	-	1 Kawasan	33.593	1 Kawasan	38.304	2 Kawasan	70.649	4 Kawasan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Baru PMDN 90/2019
4.3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah Ketersediaan PSU di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	12 PKL	144	14 PKL	168	14 PKL	168	40 PKL	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Baru PMDN 90/2019
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat															
5.1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	100	1.550	100	1.770	100	1.930	100	Satpol PP	Program Baru PMDN 90/2019
5.2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	9.80%	27.84%	-	45.88%	-	63.92%	3.618	81.96%	3.980	100.00%	4.378	100.00%	BPBD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Persentase Masyarakat yang mendapat pengetahuan/ keterampilan/ pelatihan	3.01%	22.40%	-	41.80%	-	61.20%	-	80.60%	-	100.00%	-	100.00%	BPBD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Rata-rata waktu respon time ke lokasi kejadian bencana (14 Kab/ Kota)	11 Jam	11 Jam	-	11 Jam	-	11 Jam	-	11 Jam	-	11 Jam	-	11 Jam	BPBD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	BPBD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
5.3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	100.00%	0	100.00%	250	100.00%	250	100.00%	BPBD	Program Baru PMDN 90/2019
5.4	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	97,15%	-	-	-	-	97,75%	1,729	100%	2,318	100%	2,760	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Baru PMDN 90/2019

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.5.	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase pemahaman terhadap pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	97,15%					97,85%	4,610	97,95%	4,916	98,25%	5,118	98,25%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5.6.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	97,15%					97,85%	418	97,95%	994	98,25%	1,231	98,25%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5.7.	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	97,15%					97,85%	1,285	97,95%	2,011	98,25%	2,286	98,25%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5.8.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pemahaman Masyarakat di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah	97,15%	-	-	-	-	97,85%	3,287	97,95%	4,095	98,25%	4,230	98,25%		
6	Sosial															
6.1.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	12,77	13,20	543,00	2,50	257	20%	677	25%	800	30%	1,000	30%	Dinas Sosial	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN PMDN 90/2019
6.2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Cakupan Layanan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	100%	454	100%	550	100%	600	100%	Dinas Sosial	Program Baru PMDN 90/2019
6.3.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0,98	1,40	545,36	9,02	845	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	Program Awal dari PMDN 13/2006
6.4.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase peningkatan PPKS (tertentu) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	-	-	-	3,2%	1	3,25%	1,500	3,3%	1,700	3,3%	Dinas Sosial	Program Baru PMDN 90/2019
6.5.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin	0,0033	0,018	544,85	0,038	617	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	Program Awal dari PMDN 13/2006
6.6.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	0,25 %	1,500	0,28%	2,100	0,28%	2,300	0,28%	Dinas Sosial	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi	100	100	251,013	100	315	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	Program Awal dari PMDN 13/2006
6.7.	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan penanganan	-	-	-	-	-	100%	850	100%	1,000	100%	1,150	100%	Dinas Sosial	Program Baru PMDN 90/2019
6.8.	Program Pengembangan dan Keresahan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kabupaten /Kota yang Terkoordinir dalam Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial	66,67	66,67	250,217	73,80	347	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	Program Awal dari PMDN 13/2006
6.9.	Program Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan	Jumlah kelembagaan yang Berperan Serta dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan	-	-	-	712	442	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Sosial	Program Awal dari PMDN 13/2006
6.10.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Cakupan Layanan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	-	-	-	100	198	100	215	100	235	100	Dinas Sosial	Program Baru PMDN 90/2019
6.11.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	773,56	100	1,029	-	-	-	-	-	-	-	UPT.PSRLU Mula Dharma	Program Awal dari PMDN 13/2006
6.12.	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-	-	100	1,142	100	3,365	100	1,900	100	UPT.PSRLU Mula Dharma	Program Baru PMDN 90/2019
6.13.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	841,56	100	1,205	-	-	-	-	-	-	-	UPT.PSRLU Mustika Dharma	Program Awal dari PMDN 13/2006
6.14.	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-	-	100	1,316	100	3,248	100	1,703	100	UPT.PSRLU Mustika Dharma	Program Baru PMDN 90/2019
6.15.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	1,118	100	1,138	-	-	-	-	-	-	-	UPT Panti Sosial Anak	Program Awal dari PMDN 13/2006
6.16.	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-	-	100	1,840	100	3,659	100	2,153	100	UPT Panti Sosial Anak	Program Baru PMDN 90/2020
Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar																
7.	Tenaga Kerja															
7.1.	Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	-	-	-	-	-	75%	3,850	75%	4,819	75%	5,562	75%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Baru PMDN 90/2019
7.2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja pada Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-	-	-	55,70%	316	63,77%	1,484	67,75%	1,551	67,75%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Baru PMDN 90/2019
7.3.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	2 Dokumen	100	2 Dokumen	130	2 Dokumen	140	2 Dokumen	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Baru PMDN 90/2019

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.4.	Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial antara Pengusaha dengan Pekerja secara Bipartit	-	-	-	-	-	80.00%	942	85.00%	1,443	90.00%	1,540		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Baru PMDN 90/2019
7.5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang sudah menerapkan aturan ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	35.00	2,843	36.50	2,957	37.00	3,065		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Baru PMDN 90/2019
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															Program Baru PMDN 90/2019
8.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah Yang melaksanakan PUG (%)	65	65	-	75	-	85	123	90	135	100	148		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Perempuan yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas pada Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (%)	10	10	-	20	-	75	50	85	54	100	60		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (%)	10	10	-	20	87	75	42	85	46	100	50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
8.2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (%)	83	-	-	-	-	90	200	94	220	96	242	96	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	79	-	-	-	-	90	179	92	196	94	200	94	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi (%)	87	-	-	-	-	90	533	94	585	96	643	96	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
8.3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi (%)	45	-	-	-	-	75	367	85	403	100	443	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi (%)	21	-	-	-	-	21	51	36	55	50	61	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang wilayah kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/kota (%)	-	-	-	-	-	21	80	36	92	50	101	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
8.4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi (%)	20	-	-	-	-	23	340	32	360	50	375	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
8.5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (%)	21,42	-	-	-	-	42,85	261	50	286	57,14	315	64,28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (%)	100%	-	-	-	-	100%	175	100%	174	100%	209	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
8.6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penegakan Kekerasan Terhadap Anak (%)	40%	-	-	-	-	-	-	40%	145	60%	160	60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (%)	20%	-	-	-	-	33%	102	46%	101	60%	121	60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (%)	40%	-	-	-	-	40%	57	60%	56	67%	67	67%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Program Baru PMDN 90/2019
9.	Pangan															Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Konsumsi energi Kkal/Kap/Hari	1,833	1,857.00		1,895.83		1,916.66		-	-	-	-	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Konsumsi Protein prot/kap/hari	56	56.07		56.30		56.53		-	-	-	-	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Konsumsi beras penduduk	84	83.08		82.24		81.53		-	-	-	-	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persen tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	79	80.00		82.00		84.00		-	-	-	-	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9.1.	Program Peningkatan Kelangkaan Pangan	Persen Tingkat Keamanan Produk Asal Hewan (PAH)	71	70	5,709	75	5,498	80	5,533	-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Ketersediaan Energi (KKAL/Kap/Hari)	2,975	3,054,23		3,084,77		3,131,04		-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	77	78,70		79		79,60		-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase Penduduk Rawan Pangan	17	16,00		15,00		14,00		-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Coefficient Varian (CV) harga beras di tingkat konsumen	1,67	5		5		5		-	-	-	-	-	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006
9.2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Kelangkaan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi penduduk	-	-	-	-	-	1917,00	-	1938,00	-	-	1958,00	-	1958,00	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Konsumsi Protein Penduduk	-	-	-	-	-	56,53	-	56,70	-	-	57,00	-	57,00	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
		Konsumsi Beras Penduduk	-	-	-	-	-	93,14	-	93,02	-	-	92,90	-	92,78	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2021
		Coefficient Varian (CV) harga beras di tingkat konsumen	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-	4,674	5,00	-	5,035	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2022
		Penguatan Cadangan Pangan Provinsi	-	-	-	-	-	40,00	-	40,00	-	-	40,00	-	40,00	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2023
		Ketersediaan Energi	-	-	-	-	-	3131,00	-	3178,00	-	-	3226,00	-	3226,00	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2024
		Ketersediaan Protein	-	-	-	-	-	79,60	-	80,06	-	-	80,51	-	80,51	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2025
9.3.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	-	-	-	-	-	84,00	364	88,00	475	90,00	505	90,00	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
9.4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Tingkat Kerawanan Pangan	-	-	-	-	-	14,00	276	13,00	305	12,00	355	12,00	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
9.5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Indeks Ketersediaan Pangan Provinsi	-	-	-	-	-	79,00	6,099	79,00	60,997,300	80,00	11,300	80,00	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
10	Pertanahan																
10.1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan bagi untuk Kepentingan Umum	-	-	-	-	-	100%	140	100%	153	100%	169	100%	Biro Pemerintahan Seldta Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
10.2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	-	-	-	100%	99	100%	109	100%	109	100%	Biro Pemerintahan Seldta Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
11	Lingkungan Hidup																
11.1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun	20,00%	40,00%	-	60,00%	-	70,00%	580	80,00%	638	90,00%	702	90,00%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
11.2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Status Mutu Air	50,0	50,4	-	50,8	-	51,2	973	51,6	1,022	52,0	1,073	52,0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		Status Kualitas Udara	85,0	85,4	-	85,8	-	86,2		86,6		87,0		87,0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
11.3.	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Ketersediaan Taman Kehati Provinsi	-	-	-	-	-	1	0	1	150	1	150	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
11.4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah b3 yang terkelola dari penghasil limbah b3 yang bekerja sama dengan pengumpul limbah b3 skala provinsi	100,00%	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	706	100,00%	777	100,00%	854	100,00%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
11.5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase investasi kewenangan provinsi yang memiliki dokumen lingkungan	70%	75%	-	80%	-	85%	846	90%	931	95%	1,024	95%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
11.6.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Jumlah Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam PPLH	-	-	-	-	-	2	0	3	150	4	150	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapat pengetahuan/ keterampilan/ pelatihan Masyarakat	-	-	-	-	-	20.00%	0	30.00%	150	40.00%	150	40%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
11.8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	11.11	22.22	-	33.33	-	44.44	506	55.55	557	66.66	612	66.66	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
11.9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang ditangani	80%	80%	-	82%	-	84%	200	86%	220	88%	242	88%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
11.10.	Program Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah pada kondisi khusus	-	-	-	-	-	100.00%	124	100.00%	136	100.00%	150	100.00%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil															
12.1	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan KTP-el	-	84%	284	100%	970	-	-	-	-	-	-	84%		Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	18%	30	50%	431	-	-	-	-	-	-	50%		Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	-	86%	131	89.21%	0	-	-	-	-	-	-	89.21%		Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Peperangan dan Kematian	-	25%	71	30%	652	-	-	-	-	-	-	30%		Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	-	15%	226	20%	220	-	-	-	-	-	-	20%		Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	-	83%	54,510	90%	1,014	-	-	-	-	-	-	90%		Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalbar	-	30%	57,692	50%	640	-	-	-	-	-	-	50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Awal dari PMDN 13/2006
12.2	Program pendaftaran penduduk	Jumlah administrasi pendaftaran penduduk se Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	733 Orang, 5 Kab/Kota, 1 Dokumen	484	733 Orang, 5 Kab/Kota, 1 Dokumen	532	733 Orang, 5 Kab/Kota, 1 Dokumen	585	2.199 Orang, 15 Kab/Kota, 1 Dokumen		Program Baru PMDN 90/2019
12.3	Program pencatatan sipil	Jumlah administrasi pencatatan sipil di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	335 Orang/ 4 Kab/Kota	586	615 Orang/ 2 Kab/Kota	1,056	615 Orang/ 2 Kab/Kota	1,162	1.565 Orang/ 6 Kab/Kota		Program Baru PMDN 90/2019
12.4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah sistem informasi dan pelaporan administrasi kependudukan di Provinsi Kalimantan Barat yang berkualitas	-	-	-	-	-	323 orang, 14 dokumen, 1 website, 1 unit server, 2 kabupaten	2.501	281 orang, 18 dokumen, 1 website, 1 unit server, 2 kabupaten	3.191	281 orang, 18 dokumen, 1 website, 1 unit server, 2 kabupaten	3.525	801 orang, 50 dokumen, 1 website, 6 kabupaten		Program Baru PMDN 90/2019
12.5	Program pengelolaan profil kependudukan	Jumlah buku profil kependudukan untuk perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	225 Buku	-	225 Buku	-	225 Buku	-	675 Buku		Program Baru PMDN 90/2019
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
13.1	Program Pengelolaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	34 Desa	100 Desa	1118	175 Desa	2.555	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	Program Awal dari PMDN 13/2006
13.2	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Ketahanan Sosial	60.08%	63.18%	688	67.91%	3.495	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	Program Awal dari PMDN 13/2006
13.3	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Ketahanan Ekonomi	42.15%	45.25%	621	49.98%	5.096	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	Program Awal dari PMDN 13/2006
13.4	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang dibina	18 Kawasan Perdesaan	26 Kawasan Perdesaan	847	33 Kawasan Perdesaan	1.450	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PMD	Program Awal dari PMDN 13/2006
13.5	Program Penataan Desa	Jumlah Penataan Desa	-	-	-	-	-	60 Desa	1.500	72 Desa	1.905	84 Desa	2.110	84 Desa	Dinas PMD	Program Baru PMDN 90/2019
13.6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Peningkatan Kerjasama Desa	-	-	-	-	-	5 Kerjasama Desa	2.700	6 Kerjasama Desa	2.900	7 Kerjasama Desa	3.100	7 Kerjasama Desa	Dinas PMD	Program Baru PMDN 90/2019
13.7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	-	-	-	-	-	500 Desa /Kelurahan	7.810	600 Desa /Kelurahan	8.560	700 Desa /Kelurahan	8.341	700 Desa /Kelurahan	Dinas PMD	Program Baru PMDN 90/2019
13.8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	-	100%	5,075	100%	7,265	100%	8,380	100%	Dinas PMD	Program Baru PMDN 90/2019
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
14.1.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase perangkat daerah dan mitra kerja/ swasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana	-	15%	52	20%	59	-	-	-	-	-	-	130 Orang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Persentase pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	15%	87	20%	43	-	-	-	-	-	-	130 Orang		Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Persentase sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan kab/kota dengan pemerintah pusat dibidang pengendalian penduduk	-	15%	55	50%	181	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen		Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
14.2.	Program pengendalian penduduk	Jumlah laju pertumbuhan penduduk yang stabil	-	-	-	-	-	180 Orang	233	180 Orang	248	180 Orang	273	540 Orang		Program Baru PMDN 90/2019
14.3.	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Jumlah penduduk yang terbita melalui Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	65 Orang	60	65 Orang	66	65 Orang	73	195 Orang		Program Baru PMDN 90/2019
15.	Perhubungan															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (IKU1)	-	-	-	-	-	52%	1.980	67%	3.000	71%	4.000	71%	Dinas Perhubungan	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kapasitas Terminal	-	-	-	-	-	90%	500	83.00%	550	72.00%	1.100	72.00%	Dinas Perhubungan	Program Baru PMDN 90/2019
15.2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Jumlah Penumpang Angkutan SDP Terhadap Kapasitas Pelabuhan SDP	-	-	-	-	-	98.00%	144	87.00%	144	79.00%	192	79.00%	Dinas Perhubungan	Program Baru PMDN 90/2019
16	Komunikasi dan Informatika															
16.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD dengan zona hijau / nilai 85-100	22%	60%	Rp 336	70%	180	80%	449	90%	898	100%	578	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
16.2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase total bobot domain evaluasi SPBE	2,55	-	-	-	-	60%	6,905	76%	7,070	92%	7,076	92%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Baru PMDN 90/2021
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
17.1	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	60.17%	62%	653.52	64%	1.000.00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase Kepatuhan Koperasi	21%	23%	730.94	25%	1.019.03	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase Kualitas Usaha Koperasi	7,6 T	1%	792.65	2%	1.000.00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	855 Peserta	89.39%	56.76	92.96%	688.70	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	Program Awal dari PMDN 13/2006
17.2	Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	Persentase pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	60.17%	62.00%	825.78	64%	1.300.00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase Peserta Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil yang Meningkatkan Pemahamannya	705 Peserta	88.88%	336.51	90.65%	945.90	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi dan UKM	Program Awal dari PMDN 13/2006
17.3	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Meningkatnya Koperasi bergerak di bidang Sektor Jasa Keuangan yang memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	-	61.38%	135	74.87%	135	91.25%	140	91.25%	Dinas Koperasi dan UKM	Program Baru PMDN 90/2019
17.4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang meningkatkan jumlah Omzet	-	-	-	-	-	3%	1,027	4%	1,026	5%	1,129	5%	Dinas Koperasi dan UKM	Program Baru PMDN 90/2019
17.5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	-	-	-	-	-	2%	406	5%	406	8%	446	8%	Dinas Koperasi dan UKM	Program Baru PMDN 90/2019
17.6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	-	-	-	5%	350	15%	349	25%	384	25%	Dinas Koperasi dan UKM	Program Baru PMDN 90/2019
17.7	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	-	-	-	-	-	83.33%	389	88.89%	388	95.24%	427	95.24%	Dinas Koperasi dan UKM	Program Baru PMDN 90/2019
17.8	Program Pemberdayaan UMKM	Persentase Volume Usaha kecil yang meningkat	-	-	-	-	-	1.370%	1,165	1.450%	1,165	1.470%	1,281	1.047%	Dinas Koperasi dan UKM	Program Baru PMDN 90/2019
17.9	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil yang berkembang	-	-	-	-	-	0.03%	1,250	0.04%	1,249	0.050%	1,374	0.005%	Dinas Koperasi dan UKM	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Peserta Pelatihan UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya	-	-	-	-	-	86.67%	648	89.39%	647	90.28%	712	90.28%	Dinas Koperasi dan UKM	Program Baru PMDN 90/2019
18	Penanaman Modal															
18.1	Program Pengelolaan Investasi	Data Potensi Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1,544.45	1 Dokumen	1,777.80	1 Dokumen	1,862.75	1 Dokumen	2,016.40	1 Dokumen	2,448.43	5 Dokumen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Jumlah Kebijakan yang mendukung investasi	2 Kebijakan	3 Kebijakan	-	3 Kebijakan	-	3 Kebijakan	-	3 Kebijakan	-	3 Kebijakan	-	15 Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Promosi Investasi yang dilaksanakan	5 Kali	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	20 Kali	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Jumlah Fasilitas kerjasama	1 kali	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	5 Kali	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Jumlah perusahaan yang dipantau dan dibina	-	13 Perusahaan	-	13 Perusahaan	-	13 Perusahaan	-	14 Perusahaan	-	14 Perusahaan	-	67 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Jumlah laporan LKPM	1248 LKPM	1.137 LKPM	-	1.251 LKPM	-	1.376 LKPM	-	1.514 LKPM	-	1.665 LKPM	-	6.943 LKPM	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
18.2	Program Pelayanan Perizinan	Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	A	B	1,084.77	B	1,288.00	A	1,353.00	A	1,423.00	A	1,608.00	A	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Jumlah izin dan Non izin yang diterbitkan	1.424 Izin dan Non Izin	1.000 Izin dan Non Izin	-	1.350 Izin dan Non Izin	-	1.350 Izin dan Non Izin	-	1.350 Izin dan Non Izin	-	1.350 Izin dan Non Izin	-	6.400 Izin dan Non Izin	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
18.3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase sektor unggulan Kalimantan Barat yang dipromosikan	-	-	-	-	-	100%	561.69	100%	589	100%	621.3	100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Baru PMDN 90/2019
18.4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi	-	-	-	-	-	100%	489	100%	534	100%	838.130	100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Baru PMDN 90/2019
18.5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi	-	-	-	-	-	4 laporan	191	4 laporan	200,800	4 laporan	210,830	12 laporan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Baru PMDN 90/2019
18.6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pemetaan potensi investasi berdasarkan komoditas di Kalbar	-	-	-	-	-	80%	749	80%	633	80%	659	100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Baru PMDN 90/2019

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.7	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Izin dan Non Izin yang diproses sesuai SOP Wilayah I dan II	-	-	-	-	-	100%	1.405	100%	1.475	100%	1.658	100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Baru PMDN 90/2019
		Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan wilayah I dan Wilayah II	-	-	-	-	-	-	-	A	-	A	-	A	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Program Baru PMDN 90/2019
19	Kepemudaan															
19.1	Program Kepemudaan dan Pramuka	Jumlah Pemuda dan Pramuka yang dibina	284.748	285.745	1.800	286.745	1.980	287.748	2.178	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Awal dari PMDN 13/2006
19.2	Program Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	Pemuda yang dibina	2438	-	-	-	-	2462	200	2487	410	2512	435	7.461	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Baru PMDN 90/2019
	Program Pengembangan kapasitas kegrammukaan	Persentase kwarda dan kwarcab yang dibina	-	-	-	-	-	33.33%	600	33.33%	750	33.33%	820	99.99%		Program Baru PMDN 90/2019
20	Olahraga															
20.1	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan olahraga rekreasi dan tradisional	0.7142	0.7857	700	0.8571	770	0.8571	847	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Prestasi olahraga pelajar yang diperoleh (medali)	11	11	1.000	12	1.100	11	1.210	-	-	-	-	-		Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga	-	2%	3.000	2%	3.300	2%	3.630	-	-	-	-	-		Program Awal dari PMDN 13/2006
20.2	Program Pengembangan Daya Saing Olahraga	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan olahraga rekreasi dan tradisional	71.42%	-	-	-	-	85.71%	1.748	92.85%	1.922	92.85%	2.155	100.00%	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Baru PMDN 90/2019
		Prestasi olahraga pelajar yang diperoleh	11 medali	-	-	-	-	11 medali	1.748	13 medali	1.922	11 medali	2.155	11 medali		Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga	-	-	-	-	-	2%	1.748	2%	1.922	2%	2.155	8%		Program Baru PMDN 90/2019
21	Statistik															
21.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi	-	-	-	-	-	100%	760	100%	808	100%	825	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Baru PMDN 90/2019
22	Persandian															
22.1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD dengan kategori baik, cukup, perlu perbaikan dan tidak layak.	-	-	-	-	-	Baik 0% Cukup 21% Perlu Perbaikan 38% Tidak Layak 40%	691	Baik 0% Cukup 26% Perlu Perbaikan 38% Tidak Layak 36%	658	Baik 2% Cukup 32% Perlu Perbaikan 34% Tidak Layak 32%	725	Baik 2% Cukup 32% Perlu Perbaikan 34% Tidak Layak 32%	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Baru PMDN 90/2019
23	Kebudayaan															
23.1	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang di apresiasi	5	5		5		5	4.989	5	5.488	5	6.037	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Tenaga Kebudayaan yang	3	3		3		3		3		3		3		Program Baru PMDN 90/2020
		Jumlah sanggar yang dibina	28	28		28		28		28		28		140		Program Baru PMDN 90/2021
23.2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pagarlan/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan	7	3		3		3	301	3	331	3	364	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Baru PMDN 90/2022
		Jumlah Fasilitas komunitas kesenian	14	14		14		14		14		14		14		Program Baru PMDN 90/2023
23.3	Program Pembinaan Sejarah	Data sejarah yang diventarisasi	2	2		2		2	66	2	73	2	80	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Baru PMDN 90/2024
		Even sejarah yang di fasilitasi	3	3		3		3		3		3		3		Program Baru PMDN 90/2025
23.4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	7	2		2		2	1.186	2	1.305	2	1.435	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Baru PMDN 90/2026
		Cagar Budaya yang direvitalisasi	1	2		2		2		2		2		2		Program Baru PMDN 90/2027
		Cagar Budaya yang dilestarikan	7	7		7		7		7		7		7		Program Baru PMDN 90/2028
23.5	Program Pengelolaan Permuseuman	Even cagar budaya dan museum yang diapresiasi masyarakat	5	5		5		5	2.383	5	2.621	5	2.883	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Baru PMDN 90/2029
24	Perpustakaan															
24.1	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang dibina	65 Orang	65 Orang	195	65 Orang	205	65 Orang	0	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan	87.906 Orang	96.696 Orang	312	106.365 Orang	327	117.000 Orang	0	-	-	-	-	-		Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat Baca	15 Kali	15 Kali	650	15 Kali	683	15 Kali	0	-	-	-	-	-		Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	37.098 Judul	500 Judul	452	500 Judul	475	500 Judul	0	-	-	-	-	-		Program Awal dari PMDN 13/2006
24.2	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan sesuai Standar	-	-		-		80%	30	90%	32	100%	34	100%		Program Awal dari PMDN 13/2007
24.3	Program Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah	Jumlah Koleksi Daerah yang Dilestarikan	5.192 Judul	300 Judul	207	300 Judul	218	300 Judul	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Awal dari PMDN 13/2006
24.4	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Daerah yang Dilestarikan	-	-	-	-	-	17.33%	196	23.11%	210	28.89%	226	28.89%		Program Awal dari PMDN 13/2007
25	Kearsipan															
25.1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	28.176 Item	28.376 Item	-	28.576 Item	-	28.776 Item	-	-	-	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Awal dari PMDN 13/2007

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25.2	Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Kearsipan	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku Jumlah Pengguna Layanan Jasa Kearsipan	6 Orang 3 LKD 600 orang	6 Orang 1 LKD 650 orang	- - -	6 Orang 2 LKD 700 orang	- - -	6 Orang 2 LKD 700 orang	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Awal dari PMDN 13/2008 Program Awal dari PMDN 13/2009 Program Awal dari PMDN 13/2010
25.3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan arsip yang dikelola, dirawat dan dibersihkan	-	-	-	-	2.13%	11	2.84%	1,427	3.55%	1,573	3.55%	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Baru PMDN 90/2019
25.4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	-	-	-	-	-	-	-	50	440	100	550	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Baru PMDN 90/2019
25.5	Program Perizinan penggunaan Arsip	Persentase Layanan Penggunaan Arsip Tertutup	-	-	-	-	-	-	-	76	70	86	80	86	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Baru PMDN 90/2019
URUSAN PILIHAN																
26.	Kelautan dan Perikanan															
26.1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	165,445	165,614.34	1,838	168,926.63	3,896	172,305.16	4,091	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Awal PMDN 13/2006
		Jumlah Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan (Ton)	4,705	4,750.00		4,800.00		4,850.00		-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Awal PMDN 13/2006
26.2	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	83,227	84,000.00	3,070	85,680.00	4,840	87,393.60	5,082	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Awal PMDN 13/2006
		Jumlah Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ekor)	2,663	12,200.00		12,444.00		12,692.88		-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Awal PMDN 13/2006
26.3	Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Angka Konsumsi makan ikan (Kg/Kapita/Thn)	39	39	2,739	39	3,590	39	3,770	-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Awal PMDN 13/2006
		Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan ikan dan Masyarakat (kali)	315	325.00		335.00		345.00		-	0	-	0	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Awal PMDN 13/2006
26.4	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengendalian yang efektif (Kawasan) Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yangawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	-	1.00	1,796	2	2,060	3.00	2,163	-	0	-	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Awal PMDN 13/2006
26.5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Perikanan terhadap ketentuan peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku	43	44.00	724	48.00	1,730	52.00	1,817	-	0	-	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Awal PMDN 13/2006
26.6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	-	-	-	-	0	150,380	10,782	154,891	12,631	159,538	159,538	159,538	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan perikanan	-	-	-	-	0	4,850	4,900	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
26.7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	-	-	-	-	0	77,245	3,867	78,789	3,059	80,365	80,365	80,365	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2021
		Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut	-	-	-	-	0	4,537,500	4,764,375	5,002,594	5,002,594	5,002,594	5,002,594	5,002,594	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2022
26.8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	-	-	-	-	0	16,037	2,169	16,358	3,323	16,685	16,685	16,685	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2023
		Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan ikan dan Masyarakat	-	-	-	-	0	600	525	650	650	650	650	650	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2024
26.9	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase kawasan Ruang Laut dan Konservasi yang dikelola	-	-	-	-	0	30	3,591	40	3,172	50	50	50	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di berdayakan	-	-	-	-	0	20	0	30	0	40	40	40	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Baru PMDN 90/2019
26.10	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan terhadap ketentuan peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku	-	-	-	-	0	55	1,157	60	1,853	65	1,951	65	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Baru PMDN 90/2019
27.	Pariwisata															
27.1	Program Peningkatan Pertumbuhan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	Persentase Jumlah Usaha yang dibina	86.49%	89.19%	1,171.76	91.89%	2,549.21	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Dari PMDN 13/2006
		Persentase Kelompok Sadar Wisata yang dibina	65.85%	72.68%	-	79.50%	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Dari PMDN 13/2006
		Persentase Saka Pariwisata yang dibina	21.42%	35.71%	-	50.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Dari PMDN 13/2006
27.2	Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Nusanantara dan Mancanegara	3,160,895	3,573,000	1,703.79	4,078,000	2,111.62	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Dari PMDN 13/2006
		Persentase Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	12.59%	13.49%	955.43	14.39%	844.84	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Dari PMDN 13/2006

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
27.3	Program Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	-	74	760.65	102	865.08	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Dari PMDN 13/2006
27.4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Jumlah Usaha yang dibina	-	-	-	-	-	94.59%	1,872	97.30%	1,966	100%	2,064	291.89%	-	Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Jumlah Destinasi Wisata Unggulan Yang Dikelola	-	-	-	-	-	15.29%	-	16.19%	-	17.09%	-	48.57%	-	Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Baru PMDN 90/2019
27.5	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Nusanantara dan Mancanegara	-	-	-	-	-	1,520,000	4,440	2,025,000	4,662	2,530,000	4,895	6,075,000	-	Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Baru PMDN 90/2019
27.6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	-	-	-	-	-	130	1,766	158	1,854	186	1,947	4615.7	-	Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Baru PMDN 90/2019
27.7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf dan Pariwisata yang mendapat pengembangan kompetensi	-	-	-	-	-	143	-	173.8	-	204.6	-	-	-	Dinas Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata	Program Baru PMDN 90/2019
28.	Pertanian																
28.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit ternak/Hewan	Persentase cakupan vaksinasi rabies	29	25.00		30.00				35.00							Program Dari PMDN 13/2006
		Persentase hewan/ternak yang terbebas hogcholera	90	90.00		90.00				90.00							Program Dari PMDN 13/2006
		Persentase penanganan parasiter pada ternak	-	2.00		2.00				2.00							Program Dari PMDN 13/2006
		Persentase Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak	2	5.00	2,665	5.00	3,037		3,125	5.00						Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Dari PMDN 13/2006
		Jumlah Farm Pengungasan Kompartemen Avian Influenza	2	2		2				3							Program Dari PMDN 13/2006
		Jumlah ternak yang dilayani pada Klinik Hewan	2,392	1,000.00		1,200.00				1,300.00							Program Dari PMDN 13/2006
		Jumlah sampel produk ternak yang diujikan pada Lab. Kesawan dan Kesmatvet	6,856	2,150.00		2,350				2,450.00							Program Dari PMDN 13/2006
28.2	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor)	173,566	173,801.00		175,539.00				177,294.00							Program Dari PMDN 13/2006
		Jumlah Populasi Ternak Kambing (Ekor)	161514	163950		165590				167246							Program Dari PMDN 13/2006
		Jumlah Populasi Ternak Babi(Ekor)	544058	550208		555710				561267							Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras(Ekor)	6139850	6210821		6272929				6336659							Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Petelur (Ekor)	2,376,995	2,389,691.00		2,413,588.00				2,437,724.00							Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Pedaging (Ekor)	56,570,468	57,193,051.00	7,280	57,764,981.00	10,003			58,342,631.00	10,936						Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Itik (Ekor)	605,571	586,880.00		592,748.00				598,676.00							Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Bibit kambing yang diproduksi (ekor)	25	35.00		65.00				80.00							Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Bibit itik yang diproduksi (ekor)	17,333.00	12,615.00		22,000.00				24,000.00							Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Bibit Babi yang diproduksi (ekor)	320.00	350.00		400.00				500.00							Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang diproduksi	20000	71000		73000				73000							Program Baru PMDN 90/2019
28.3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Jenis Penyakit Ternak/ Hewan yang dikendalikan	-	-	-	-	-	7	2,686	7	3,195	7	3,510	7		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Tingkat Keamanan Pangan Produk Hewan dan olahannya	-	-	-	-	-	80.00	-	85.00	-	90.00	-	90.00		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
28.4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanggulangan hewan terdampak bencana	-	-	-	-	-	-	1,046	60.00	1,331	60.00	1,518	60.00		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2021
28.5.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Sapi	-	-	-	-	-	159,810		165,723		171,855		171,855			Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2023
		Kambing	-	-	-	-	-	167,246		168,918		170,607		170,607			Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2024
		Babi	-	-	-	-	-	561,267		566,879		572,548		572,548			Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2025
		Ayam Buras	-	-	-	-	-	6,335,659		6,399,015		6,463,006		6,463,006			Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Ayam Ras Petelur	-	-	-	-	-	2.437.724	-	2.462.101	-	2.486.722	-	2.486.722	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2027	
		Ayam Ras Pedaging	-	-	-	-	-	58.342.631	-	58.926.057	-	59.515.318	-	59.515.318	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2028	
		Itik Itik Manila	-	-	-	-	-	598.676	-	604.663	-	610.709	-	610.709	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2029	
28.6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jenis Kawasan Peternakan yang ditumbuhkembangkan	-	-	-	-	-	1 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Baru PMDN 90/2019	
28.7.	Program perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan berizin	-	-	-	-	-	50	-	60	-	70	-	70	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Baru PMDN 90/2019	
28.8.	Program Penyuluhan Pertanian	Jenis Teknologi Pengembangan Peternakan yang didiseminasi ke kelompok ternak	-	-	-	-	-	1 Jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Baru PMDN 90/2019	
28.9	Peningkatan Produksi dan Agribisnis Tanaman Pangan	Persentase kenaikan produktivitas padi sawah	-	0.13	-	0.13	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006	
		Persentase kenaikan produktivitas jagung	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006	
		Persentase kenaikan Produktivitas kedelai	-	0.50	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006	
		Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006	
		Luas Lahan Sawah Ditanami 2 kali Setahun (Ha)	136,472.00	138,472.00	7,677	140,472.00	7,831	142,472.00	7,987	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi	-	6.50	-	6.50	-	6.50	-	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006
		Produktivitas Benih Sumber Tanaman Pangan (Ku/Ha)	20.40	20.90	-	21.40	-	21.90	-	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006
		Persentase Serangan OPT Tanaman Pangan	3.32	3.27	-	3.22	-	3.17	-	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006
28.10	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	145.00	155.00	4,023	165.00	175.00	4,185	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006	
		Persentase penambahan kelompok tani dari kelas pemula ke kelas lanjut	9.80	10.00	-	10.00	4,103	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik	40.00	47.00	-	55.00	-	60.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006
28.11	Peningkatan Produksi dan Agribisnis Hortikultura	Persentase peningkatan luas panen hortikultura	-	2.00	3,635	2.00	2.00	3,782	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006	
		Persentase Peningkatan Produksi Florikultura	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006	
		Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina	-	10.00	-	10.00	3,708	10.00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu	-	3.64	-	3.64	3,708	3.64	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006	
		Persentase Pertambahan benih tanaman hortikultura yang diawasi	-	9.50	-	9.50	-	9.50	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006	
		Persentase serangan OPT Tanaman Hortikultura	-	1.44	-	1.40	1.36	-	-	-	-	-	-	-	Program Dari PMDN 13/2006		
28.12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peredaran pestisida yang kadaluarsa, palsu dan ilegal (%)	-	-	-	-	35	30	-	30	-	20	-	20	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2029	
		Persentase Peningkatan Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan (%)	-	-	-	-	10.00	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2030	
		Produktivitas Padi (Ku/Ha)	-	-	-	-	30.43	31.03	8,777	31.03	9,659	31.63	31.63	10.625	31.63	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2031	
		Persentase luas panen tanaman pangan (%)	-	-	-	-	97.34	97.57	-	97.57	-	97.80	-	97.80	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2032	
		Persentase Peningkatan Luas Panen Hortikultura (%)	-	-	-	-	2.00	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2033	
		Persentase Peningkatan Benih Tanaman Pangan Yang Diawasi (%)	-	-	-	-	6.5	6.5	-	6.5	-	6.5	-	6.5	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2034	
		Persentase Peningkatan Benih Hortikultura Yang Diawasi (%)	-	-	-	-	6.5	6.5	-	6.5	-	6.5	-	6.5	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2035	
		Persentase Peningkatan produksi benih sumber hortikultura bermutu (%)	-	-	-	-	3.5	3.5	-	3.5	-	3.5	-	3.5	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2036	
28.13	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas lahan sawah ditanami 2x (%)	-	-	-	-	1.79	12,927	1.79	1.79	5,539	1.79	1.79	6,063	1.79	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2037	
		Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas (%)	-	-	-	0	2.00	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2038	
		Angka Produktivitas Benih Sumber Tanaman Padi (Ku/Ha)	-	-	-	-	21.90	22.40	-	22.40	-	22.90	-	22.90	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2039	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
				2019		2020		2021		2022		2023						
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
28.14	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Serangan Opt Dan Dampak Perubahan Iklim	-	-	-	-	-	3.17	1,046	3.12	1,151	3.07	1,266	3.07	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2040		
28.15	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Penggunaan Benih Bermutu (%)	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2041	
		Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	-	-	-	-	-	175	4,696	185	5,166	195	5,683	195.00	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2042		
		Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut (%)	-	-	-	-	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-	10.00	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2043	
		Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik (%)	-	-	-	-	-	60.00	-	70.00	-	80.00	-	80.00	-	80.00	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2044	
28.16	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Peningkatan Perimbangan Teknis Untuk Usaha Pertanian Yang Diberikan (%)	-	-	-	-	-	10.00	242	10.00	266	10.00	293	32.56	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2045		
29.	Perkebunan																	
29.1	Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	1,272,006	1,314,303	1,358,151	1,403,608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkebunan	Program Dari PMDN 13/2006	
		Jumlah Produksi Perkebunan Besar	2,043,680	2,125,411	2,210,411	2,298,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkebunan	Program Dari PMDN 13/2006
		Jumlah Luas Areal Perkebunan Rakyat	1,273,359	1,307,924	1,343,589	1,380,391	18,990	-	0	-	-	-	-	0	-	-	Dinas Perkebunan	Program Dari PMDN 13/2006
		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi dan tersertifikasi	800,000	850,000	900,000	950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	Indeks harga yang diterima petani	123	123	2,245	123	2,469	123	2,716	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkebunan	Program Dari PMDN 13/2006	
29.2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi perkebunan rakyat (Ton)	-	-	-	-	0	1,403,608	-	1,450,736	-	1,499,600	-	1,499,600	-	Dinas Perkebunan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2045	
29.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi (Batang)	-	-	-	-	0	950,000	-	1,000,000	-	1,050,000	-	1,050,000	-	Dinas Perkebunan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2046	
		Tingkat produktivitas perkebunan rakyat (Ton/ha)	-	-	-	-	0	2,32	-	2,36	-	2,41	-	2,41	-	Dinas Perkebunan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2047	
29.4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan luas serangan OPT komoditi perkebunan (Ha)	-	-	-	-	0	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	Dinas Perkebunan	Program Baru PMDN 90/2019	
29.5	Program Penyuluhan Pertanian	Penurunan luas lahan perkebunan yang mengalami dampak perubahan iklim (Ha)	-	-	-	-	0	2,000	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-	Dinas Perkebunan	Program Baru PMDN 90/2019	
		Jumlah kelompok usaha komoditi perkebunan yang terfasilitasi kelembagaannya	-	-	-	-	0	84	-	84	-	84	-	84	-	Dinas Perkebunan	Program Baru PMDN 90/2019	
29.6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perimbangan teknis / rekomendasi perimbangan teknis yang diberikan	-	-	-	-	0	25	-	25	-	30	-	30	-	Dinas Perkebunan	Program Baru PMDN 90/2019	
30	Kehutanan																	
30.1	Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan	Luas peningkatan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung	1,559,700	1,660,000.00	3,635	1,760,000.00	3,708	1,860,000.00	3,782	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Dari PMDN 13/2006	
30.2	Fasilitas Operasional KPH (DBHDR)	KPH beroperasi dengan baik	-	2.00	3,635	2.00	3,708	2.00	3,782	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Dari PMDN 13/2006	
30.3	Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan	78	88.00	4,704.20	98.00	5,175	108.00	5,892	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Dari PMDN 13/2006	
	Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat Dalam Kegiatan RHL (DBH-DR)																Program Dari PMDN 13/2006	
30.4	Peningkatan Informasi dan Sinergi Pembangunan Kehutanan	Persentase peningkatan publikasi informasi bidang kehutanan (%)	70 %	75 %	1176.59	80 %	1,294	85 %	1,424	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Dari PMDN 13/2006	
		Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan	85 %	87 %	-	89 %	-	91 %	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Dari PMDN 13/2006	
30.5	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian (DBH-DR)	Terbit pengelolaan program dan kegiatan DBH DR	-	2.00	3,635	2.00	3,708	2.00	3,782	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Dari PMDN 13/2006	
30.6	Pengelolaan Hutan	Rencana Tata Hutan KPH	-	-	-	-	-	19 unit	-	26 unit	-	34 unit	-	34 unit	-	34 unit	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	1,860,000	-	1,960,000	-	2,060,000	-	2,060,000	-	2,060,000	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		Lahan kritis yang direhabilitasi	-	-	-	-	-	1000 ha	-	1000 ha	-	1000 ha	-	1000 ha	-	1000 ha	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		Perindungan pada HP dan HL	-	-	-	-	-	3 kab	-	5 kab	0	7 kab	0	7 kab	-	7 kab	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	-	-	-	-	-	90%	-	92%	-	95%	-	95%	-	1	1	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Industri pengolahan hasil hutan kapasitas <6.000 m3 yang beroperasi	-	-	-	-	-	53	-	54	-	54	-	54	-	54	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		Penyediaan Perbenihan Tanaman Hutan	-	-	-	-	-	1 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
30.7	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan	Tumbuhan dan Satwa Liar kewenangan daerah	-	-	-	-	-	5 jenis	-	5 jenis	-	5 jenis	-	5 jenis	-	5 jenis	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Ekosistemnya	Kawasan bernilai ekosistem penting	-	-	-	-	-	20.000 ha	-	23.000 ha	-	24.000 ha	-	24.000 ha	Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
30.8	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Petugas pelaksana penyuluh kehutanan yang meningkatnya Kapasitas	-	-	-	-	-	26	-	26	-	26	-	26	26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
30.9	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Persentase pengelolaan kegiatan pada DAS lintas daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
31	Energi dan Sumber Daya Mineral																
31.1.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Penyedia dan Penerima Tenaga Listrik Non PLN Yang Memiliki Perizinan Ketenagalistrikan (%)	23.37%	32.00%	-	41.20%	-	50.50%	3.273	59.80%	3.600	69.10%	3.960	69.10%	Dinas ESDM	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		Persentase Energi Baru Terbarukan dalam Pembangkitan Energi Listrik Kalimantan	3.00%	4.00%	-	5.00%	-	8.00%	-	9.00%	-	10.00%	-	10.00%	Dinas ESDM	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		Persentase Desa Berlistrik	79.00%	81.00%	-	83.00%	-	85.00%	-	87.00%	-	89.00%	-	89.00%	Dinas ESDM	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
31.2.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah penurunan Emisi GRK di sektor energi (Ton CO2 Eq)	-	12	-	12	-	12	258	12	284	12	312	12 (1CO2eq)	Dinas ESDM	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
31.3	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Total Penerimaan PNSP sektor Pertambangan wilayah Kalbar (Milyar Rupiah)	-	105	-	110	-	115	643	120	707	125	778	125 Milyar	Dinas ESDM	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		Persentase Luas Wilayah yang telah direklamasi oleh pemegang IUP	-	25	-	30	-	35	-	40	-	45	-	45%	Dinas ESDM	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
31.4	Program Pengelolaan Geologi	Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Zona	-	1 Zona	Dinas ESDM	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
32	Perdagangan																
32.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Nilai Transaksi Perdagangan (US\$ Juta)	-	1150	1.397.53	1200	4.240.00	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
		Nilai Ekspor Kalbar (US\$ Juta)	-	850	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
32.2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Negeri	Inflasi Bahan Makanan (%)	-	3.8%	1,070.35	3.7%	1,925.57	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
		Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan (Sertifikat)	1.454	800	-	900	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
32.3	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang difasilitasi	-	-	-	-	-	100%	50	100%	50	100%	50	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2019	
32.4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peta Spasial Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	-	35%	100	50%	100	100%	100	100%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2019	
		kebijakan peningkatan sarana distribusi perdagangan (laporan)	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2020	
32.5	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Inflasi Bahan Makanan (%)	-	-	-	-	-	3.60%	1,115	3.50%	1,500	3.50%	1,500	3.50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2019	
32.6	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Kalbar (US\$ Juta)	-	-	-	-	-	1000	700	1100	800	1200	850	1200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2019	
32.7	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Indek Keberdayaan Konsumen	-	-	-	-	-	40	840	41	955	42	1,040	42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2019	
		persentase kabupaten/kota yang terlayani perlindungan konsumen	-	-	-	-	-	14	-	29	-	43	-	43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2020	
		Jumlah ruang lingkup layanan	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4	-	4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2021	
32.8	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah perjanjian kerjasama antar daerah (Provinsi)	-	-	-	-	-	1	140	2	150	3	160	3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2022	
		pengelolaan sistem informasi dan promosi perdagangan	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2023	
33	Perindustrian																
33.1.	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Industri	Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU)	-	1	3.372	1	6.104	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
		Jumlah Pengawasan dan Fasilitas Perijinan Perusahaan Industri (Perusahaan)	-	30	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
		Nilai Investasi PMA Bidang Industri (US\$ Juta)	-	199.68	-	205.67	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
		Nilai Investasi PMDN Bidang Industri (Rp Milyar)	-	1803.09	-	1857.18	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
		Pengembangan SDM Industri (Tenaga Kerja / Konsultan Industri)	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006	
		Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan SDA Sebagai Bahan Baku Industri (Komoditi)	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pengembangan, Pemberdayaan, dan Pemanfaatan Teknologi Industri, Kreativitas, dan Inovasi Industri Unggulan provinsi (KOMPORI)	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Pembangunan dan Pemberdayaan IKM Unggulan Provinsi (Unit Usaha IKM)	-	25	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Pengembangan Perwilyahan Industri (WPPI, KI, SIKIM)	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Standarisasi dan Fasilitas Penerapan Industri Hijau (Perusahaan)	-	12	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Pengelolaan data dan Sistem Informasi Industri (Sistem Informasi)	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Fasilitas Kemasan Produk Industri (Produk)	-	24	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Peningkatan Kapasitas IKM (Orang)	-	174	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
33.2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah regulasi perencanaan industri yang disusun kabupaten dan provinsi	-	-	-	-	-	7	2.780	8	3.410	8	3.510	8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2019	
		persentase kontribusi industri unggulan (RPIPI) kalbar terhadap total kontribusi industri	-	-	-	-	-	90.0	-	90.2	-	90.3	-	90.3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2020	
33.3.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	laporan pengendalian ijin usaha industri	-	-	-	-	-	1	100	1	180	1	190	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2019	
33.4.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	sistem data dan informasi yang dikelola	-	-	-	-	-	1	350	1	350	1	350	1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Baru PMDN 90/2019	
34	Transmigrasi																
34.1.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Ketersediaan Lahan yang Clear dan Clean untuk Transmigrasi						284.66 Ha 7.76 %		164 Ha 4.47 %		845.608 Ha 23.04 %			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Baru PMDN 90/2019	
PENUNJANG URUSAN																	
1.	Sekretariat Daerah																
1.1	Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan Pemerintah Prov. Kalbar	-	-	-	-	-	100%	3.901	100%	4.291	100%	4.728	100%	Biro Pemerintahan Setda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
1.2	Program Kesejahteraan Rakyat.	Persentase Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Movev Kebijakan dan Kegiatan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar	93.61%	100%	5.488	100%	5.869	100%	6.137	100%	6.137	100%	6.137	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
1.3	Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral	Tersedianya Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral, Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian.	-	75.00%	1.061.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
1.4	Program Bina Sarana Perekonomian Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah Kalimantan Barat	-	60.00%	781.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Perekonomian	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
1.5	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal	-	-	-	79.00%	222	83.00%	200	87.00%	200	93.00%	200	93.00%	Biro Perekonomian	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		% Kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	-	-	-	79.00%	-	83.00%	-	87.00%	-	93.00%	-	93.00%	Biro Perekonomian	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor BUMD	-	-	-	82.50%	-	90.00%	-	95.00%	-	100.00%	-	100.00%	Biro Perekonomian	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
1.6	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kelangkaan	% Terlaksananya Kebijakan Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam yang Di Lindakanjuti	-	-	-	75.00%	1.285.00	83.00%	1.431.00	91.00%	1.431.00	100.00%	1.431.00	100.00%	Biro Perekonomian	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		% Terlaksananya Kebijakan Sektor Mineral dan Energi yang Ditindaklanjuti	-	-	-	75.00%	-	83.00%	-	91.00%	-	100.00%	-	100.00%	Biro Perekonomian	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kelistrikan dan Gas yang Ditindaklanjuti	-	-	-	75.00%	-	83.00%	-	91.00%	-	100.00%	-	100.00%	Biro Perekonomian	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kehutanan yang Ditindaklanjuti	-	-	-	75.00%	-	83.00%	-	91.00%	-	100.00%	-	100.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	-	-	-	77.00%	-	85.00%	-	94.00%	-	100.00%	-	100.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	77.00%	-	85.00%	-	95.00%	-	100.00%	-	100.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.7	Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi Daerah	-	-	-	83.00%	270	90.00%	297	95.00%	297	100.00%	297	100.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Terlaksananya Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	-	-	-	45.00%	-	50.00%	-	55.00%	-	61.00%	-	61.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Dokumen Perimbangan Kebijakan Penyelesaian Persoalan Pelaksanaan Berusaha	-	-	-	53.00%	-	58.00%	-	65.00%	-	72.00%	-	72.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Dokumen Perimbangan Kebijakan Penyelesaian Persoalan Pelaksanaan Berusaha	-	-	-	53.00%	-	58.00%	-	65.00%	-	72.00%	-	72.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.8	Program Bina Sarana Perekonomian	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	66.00%	305	73.00%	328	80.00%	328	88.00%	328	88.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perindustrian Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	50.00%	-	55.00%	-	61.00%	-	67.00%	-	67.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Koperasi Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	66.00%	-	73.00%	-	80.00%	-	88.00%	-	88.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	83.00%	-	90.00%	-	95.00%	-	100.00%	-	100.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Pariwisata Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	33.00%	-	36.00%	-	40.00%	-	45.00%	-	45.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Fisik Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	45.00%	-	50.00%	-	55.00%	-	61.00%	-	61.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Terlaksananya Kebijakan Perhubungan Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	33.00%	-	36.00%	-	40.00%	-	45.00%	-	45.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Komunikasi Yang Ditindaklanjuti	-	-	-	33.00%	-	36.00%	-	40.00%	-	45.00%	-	45.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.9	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian Mikro dan Makro	-	-	-	-	-	80.00%	2,410	85.00%	2,540	90.00%	3,156	90.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Persentase pengelolaan kebijakan perekonomian di bidang Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	80.00%	-	85.00%	-	90.00%	-	90.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Persentase Pengelolaan kebijakan perekonomian di bidang BUMD dan BLUD	-	-	-	-	-	80.00%	-	85.00%	-	90.00%	-	90.00%	Biro Perencanaan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.10	Program Bina Administrasi Pembangunan	Persentase OPD dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan	-	100% OPD Tepat Waktu	1,500.00	100% OPD Tepat Waktu	1,575.00	100% OPD Tepat Waktu	1,653.75	100% OPD Tepat Waktu	1,736.44	100% OPD Tepat Waktu	1,823.26	100% OPD Tepat Waktu	Biro Administrasi Pembangunan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Persentase OPD dalam ketepatan sasaran antara realisasi dan target pelaksanaan pembangunan	-	100% OPD Tepat Sasaran	1,100.00	100% OPD Tepat Sasaran	1,155.00	100% OPD Tepat Sasaran	1,212.75	100% OPD Tepat Sasaran	1,273.39	100% OPD Tepat Sasaran	1,337.06	100% OPD Tepat Waktu	Biro Administrasi Pembangunan	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.11	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase OPD dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah:	-	-	-	-	-	90% OPD Tepat Sasaran	1,925.000	92% OPD Tepat Sasaran	2,059,750,000	94% OPD Tepat Sasaran	2,203,932,500	94% OPD Tepat Sasaran	Biro Administrasi Pembangunan	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Kab/Kota dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan wilayah:	-	-	-	-	-	90% OPD Tepat Sasaran	-	92% OPD Tepat Sasaran	-	94% OPD Tepat Sasaran	-	94% OPD Tepat Sasaran	Biro Administrasi Pembangunan	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase OPD dalam lingkup kepatuhan pada sistem pelaporan pelaksanaan pembangunan	-	-	-	-	-	96% OPD Tepat Waktu	-	97% OPD Tepat Waktu	-	98% OPD Tepat Waktu	-	98% OPD Tepat Waktu	Biro Administrasi Pembangunan	
1.12	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP (%)	-	-	-	93%	1,260	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
1.13	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah.	Persentase Perluasan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah.	-	-	-	94%	691	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
1.14	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem (%)	-	-	-	36%	642	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
1.15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi Publikasi Pemberitaan melalui Media Cetak Elektronik, Online dan Media Luar Ruang (%)	-	-	-	89.50%	2,010	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.16	Program Penataan Administrasi Umum	Persentase Informasi publikasi pemberitaan Melalui media cetak, Media elektronik dan media on line, media luar ruang; Prosentase peningkatan jumlah media publikasi (%)	-	-	-	-	95%	2.460	98%	2.706	100%	2.977	100%	Biro Administrasi Pimpinan Selda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase Perluasan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	-	-	-	-	96%	606	98%	667	100%	734	100%	Biro Administrasi Pimpinan Selda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP (%)	-	-	-	-	95%	1.505	98%	1.656	100%	1.821	100%	Biro Administrasi Pimpinan Selda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	-	-	-	-	44%	642	44%	707	44%	777	44%	Biro Administrasi Pimpinan Selda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
1.17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Persentase pelayanan bantuan Hukum dan HAM yang berkualitas (%)	100%	100%	950,00	100%	959,67	-	-	-	-	-	-	Biro Hukum	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.18	Program penataan kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum (%)	100%	100%	450,00	100%	460,00	-	-	-	-	-	-	Biro Hukum	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.19	Program peningkatan kualitas produk hukum	Persentase produk hukum daerah yang harmonis (%)	100%	100%	1.183,35	100%	1.200,00	-	-	-	-	-	-	Biro Hukum	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.20	Program peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota Se Kalbar	Persentase produk hukum Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan (%)	100%	100%	1.120,50	100%	1.135,00	-	-	-	-	-	-	Biro Hukum	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.21	Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	-	-	-	-	100%	484	100%	500	100%	500	100%	Biro Hukum	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	-	-	-	-	100%	259	100%	275	100%	275	100%	Biro Hukum	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum	-	-	-	-	100%	652	100%	675	100%	675	100%	Biro Hukum	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	-	-	-	-	100%	1.032	100%	1.050	100%	1.050	100%	Biro Hukum	Program Baru PMDN 90/2019	
1.22	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata dan berbasis kinerja	15 PD	17 PD	-	19 PD	-	21 PD	-	-	-	-	-	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.23	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah IKM Perangkat Daerah yang berkategori baik	82,49	85	-	87	-	89	-	-	-	-	-	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.24		Jumlah kebijakan ketatalaksanaan yang dirumuskan	5 kebijakan	6 kebijakan	-	6 kebijakan	-	6 kebijakan	-	-	-	-	-	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.25	Program Penataan Ketatalaksanaan	Jumlah kebijakan penerapan standar, sistem dan prosedur	2 kebijakan	3 kebijakan	-	4 kebijakan	-	5 kebijakan	-	-	-	-	-	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.26	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	100%	20%	-	40%	-	60%	-	-	-	-	-	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.27	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Selda yang mengikuti kegiatan peningkatan	10%	16%	-	32%	-	48%	-	-	-	-	-	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.28	Program Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka	Persentase peningkatan pengelolaan bahan pustaka	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.29	Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah di reviu	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.30	Program Penataan Organisasi	Persentase Kelembagaan provinsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	41%	41%	-	46%	-	51%	1.214	100%	1.163	100%	1.115	100%	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Kab/kota yang di fasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perundang-undangan	14 Kab/kota	-	-	-	-	-	732	100%	407	100%	448	100%	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LKJ tepat waktu	-	-	-	-	-	-	584	100%	397	100%	437	100%	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan RB	-	-	-	-	-	-	1.188	100%	944	100%	1.038	100%	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM sangat baik	13%	-	-	-	-	1.500	20%	1.149	25%	1.144	30%	Biro Organisasi Selda Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
1.31	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Persentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP (%)	-	-	-	93%	1.260	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pimpinan Selda Prov Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.32	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	Persentase Perluasan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	-	-	-	94%	691	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pimpinan Selda Prov Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
1.33	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem (%)	-	-	-	36%	642	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pimpinan Selda Prov Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.34	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi Publikasi Pemberitaan melalui Media Cetak, Elektronik, Online dan Media Luar Ruang (%)	-	-	-	89.50%	2.010	-	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
1.35	Program Penataan Administrasi Umum	Persentase Informasi publikasi pemberitaan Melalui media cetak, Media elektronik dan media on line, media luar ruang, Prosentase peningkatan jumlah media publikasi (%)	-	-	-	-	-	95%	2.460	98%	2.706	100%	2.977	100%	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	-	-	-	-	-	96%	606	98%	667	100%	734	100%	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP (%)	-	-	-	-	-	95%	1.505	98%	1.656	100%	1.821	100%	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya asaratur	-	-	-	-	-	44%	642	44%	707	44%	777	44%	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
1.36	Program Pengembangan Unit Kerja Pengadaan	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	-	100.00%	2.501.00	100.00%	1.900.00	100.00%	1.995.00	100.00%	2.094.75	100.00%	2.199.49	100.00%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	-	100.00%	523.59	100.00%	2.060.00	100.00%	2.163.00	100.00%	2.271.15	100.00%	2.384.71	100.00%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
		Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	-	100.00%	527.93	100.00%	3.880.00	100.00%	4.074.00	100.00%	4.277.70	100.00%	4.491.59	100.00%	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019	
1.37	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	75%	-	-	-	-	75%	700	80%	1.000	85%	1.200	85%	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase Capaian Efisiensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6%	-	-	-	-	6%	500	7%	750	7%	900	7%	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase penggunaan SPSE	20%	-	-	-	-	75%	1.174	85%	1.741	95%	2.440	95%	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
		Persentase UKPBJ di Kalimantan Barat yang memenuhi level kematangan minimal 3 (Pro Adif)	13%	-	-	-	-	20%	3.451	33%	8.300	53%	9.400	53%	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019	
2	Sekretariat DPRD																
2.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rancangan PERDA (RAPERDA) yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah (Raperda)	12	12	8.397,67	12	8.817,55	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Program Awal dari PMDN 13/2006	
2.2	Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan DPRD	Persentase Penyelenggaraan Layanan Sekretariat DPRD (%)	82%	85%	56.129,24	85%	58.935,70	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD	Program Awal dari PMDN 13/2006	
2.3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penyelenggaraan layanan Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	83	76.168	84	83.785	85	92.164	85	Sekretariat DPRD	Program Baru PMDN 90/2019	
2.4	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase Penyelenggaraan layanan Sekretariat DPRD (%)	-	-	-	-	-	100%	54.407	100%	59.847	100%	65.832	100%	Sekretariat DPRD	Program Baru PMDN 90/2019	
3.	Perencanaan																
3.1	Program Penyusunan Rencana Pembangunan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang walid disusun	-	100%	2.186	100%	2.239	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
3.2	Program Pengembangan Data Pembangunan Pembangunan	Persentase Data yang termanipulasi dalam dokumen perencanaan Pembangunan	-	40%	864	45%	1.133	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
3.3	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Manusia, Sosial Dan Pemerintahan	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RAKPD pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP)	94,96 %	95%	1.406	96%	2.465	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA Prov. Kalbar (Bidang Sosbud)	Program Awal dari PMDN 13/2006	
3.4	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RAKPD pada Bidang Pembangunan Ekonomi	90%	100%	1.793	100%	2.408	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
3.5	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wilayah	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RAKPD pada Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	100%	100%	1.580	100%	2.473	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	
3.6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja fungsional perencanaan Bapocda Prov. Kalbar	-	82%	191	84%	493	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.7	Program Perencanaan Pembangunan Kerjasama Wilayah Se-Kalimantan	Persentase Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Wilayah Se Kalimantan yang di Akomodir Dalam Dokumen Perencanaan	20%	25%	346	30%	530	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
3.8	Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Tingkat Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah	75%	80%	751	85%	1.062	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
3.9	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang waib disusun	-	-	-	-	-	97%	1.670	98%	1.730	99%	2.725	100%	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Data yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	-	97%	1.229	98%	1.286	99%	1.546	100%	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Tingkat Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah; Persentase Data yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	-	97%	977	98%	1.002	99%	1.127	100%	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Wilayah Se Kalimantan yang di Akomodir Dalam Dokumen Perencanaan	-	-	-	-	-	97%	285	98%	299	99%	314	100%	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
3.10	Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSPI); Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSPI) (%)	-	-	-	-	-	97%	2.836	98%	2.978	99%	3.127	99%	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
3.11	Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd pada Bidang Pembangunan Ekonomi; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Ekonomi (%)	-	-	-	-	-	95 %	2.492	97.50%	2.520	100%	2.550	90%	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
3.12	Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPd pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	-	-	-	-	-	100%	2.815	100%	2.815	100%	2.815	100%	BAPPEDA Prov. Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
4.	Keuangan															
4.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	80	80.00%	951.72	80.00%	985	80.00%	1.024.28	80.00%	1.065.25	80.00%	1.107.86	80.00%	BAPENDA	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
4.2	Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan	Persentase tercapainya pajak daerah	90	90.00%	801.04	90.00%	1.732.01	90.00%	1.801.29	90.00%	1.873.35	90.00%	1.948.28	90.00%	BAPENDA	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
4.3	Program Peningkatan Pengelolaan PAD	Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah	100	100.00%	2.841.16	100.00%	4.395.93	100.00%	4.571.77	100.00%	4.754.64	100.00%	4.944.83	100.00%	BAPENDA	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
4.4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan pendapatan daerah	80	-	-	-	-	80.2	2.261.55	80.3	2.374.6	80.4	2.493	80.4	BAPENDA	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Kontribusi Realisasi Retribusi terhadap Realisasi PAD	1.84%	-	-	-	-	1.80%	497.61	1.85%	522.49	1.90%	548.62	1.90%	BAPENDA	Program Baru PMDN 90/2020
		Persentase Kontribusi Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap Realisasi PAD	7.08%	-	-	-	-	10.50%	1.057.95	11%	1.110.85	11.50%	1.166.39	11.50%	BAPENDA	Program Baru PMDN 90/2021
		Persentase Kontribusi Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD	87.45%	-	-	-	-	84%	1.381.01	84.50%	1.450.06	85%	1.522.56	85%	BAPENDA	Program Baru PMDN 90/2021
4.5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda APBD dan PAPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5.379.77	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5.522.07	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5.742.95	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5.972.67	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	6.211.58	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
			1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	6.58	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	-	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	-	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	-	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	-	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
			1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	-	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	6	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	7	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	7	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	7	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
4.6	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	1	100.00%	4.312.58	100.00%	5.050.54	100.00%	4.485.09	100.00%	4.664.49	100.00%	4.851.07	100.00%	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
4.7	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan kota	Persentase Raperda / Raperdaka Kab / Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran	0.95	95.00%	3.166.14	95.00%	3.266.14	95.00%	3.396.78	95.00%	3.532.65	95.00%	3.673.96	95.00%	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
4.8	Program Pembinaan Fasilitas Bansos dan Hibah	Persentase tersalurnya dana Hibah dan Bansos	0.95	95.00%	602.01	95.00%	602	95.00%	626	95.00%	651	95.00%	677	95.00%	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.9	Program Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan BMD yang sesuai ketentuan Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD yang sesuai ketentuan Persentase BMD yang dilakukan penilaian dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan Persentase Pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan Persentase Penyusunan Anggaran Sesuai Ketentuan	59.69%	67.00%	1,764.29	74.00%	1,874.20	81.00%	1,965.46	88.00%	2,061.75	95.00%	2,164.09	95.00%	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
			97.00%	98.00%	1,058.50	99.00%	1,111.42	100.00%	1,166.99	100.00%	1,193.74	100.00%	1,286.61	100.00%	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
			70.98%	76.15%	1,380.66	80.15%	1,384.97	90.42%	1,473.40	95.91%	1,570.67	100.00%	1,677.68	100.00%	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
			100.00%	100.00%	424.56	100.00%	350	100.00%	368	100.00%	386	100.00%	405	100.00%	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
			61.95%	72.00%	537.1	77.00%	569	83.00%	603	89.00%	640	96.00%	678	96.00%	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
4.10	Program Pengelolaan Keuangan	Persentase Penyusunan Anggaran Sesuai Ketentuan	-	-	-	-	-	100%	13,951	100%	15,467	100%	16,930	-	BKAD	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Pengelolaan Keuangan Kab / Kota Yang Dibina	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	BKAD	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	BKAD	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	BKAD	Program Baru PMDN 90/2019
4.11	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan	80%	85%	-	85%	-	90%	8,562	93%	9,218	96%	10,032	96%	BKAD	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		persentase pengamanan, pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	90%	-	93%	-	96%	-	96%	BKAD	Program Baru PMDN 90/2019
5.	Kepegawaian															
5.1	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara	Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN	54%	75%	-	85%	-	95%	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian Daerah	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur PNS	80%	-	-	-	-	86%	6,115	88%	6,747	90%	7,369	90%	Badan Kepegawaian Daerah	Program Baru PMDN 90/2020
5.2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS	5%	-	-	-	-	8%	840	9%	950	10%	1,060	10%	Badan Kepegawaian Daerah	Program Baru PMDN 90/2021
5.3	Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Persentase Pembinaan Aparatur Sipil Negara	95%	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-		Program Awal dari PMDN 13/2006
5.4	Program Layanan Administrasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara	Persentase Layanan Administrasi dan Informasi yang diberikan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-		Program Awal dari PMDN 13/2006
6.	Pendidikan dan Pelatihan															
6.1	Program Pendidikan dan Pelatihan	persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi teknis Persentase Dokumen Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Daerah persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi manajerial dan fungsional	-	-	-	51%	-	46.76%	2,946	40.68%	3,241	40.03%	3,565	40.03%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Baru PMDN 90/2019
			-	-	-	40%	-	38.46%	337	40%	370	40%	408	40%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Baru PMDN 90/2020
			-	-	-	48.60%	-	52.30%	77	59.32%	8,398	59.97%	9,238	59.97%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Baru PMDN 90/2021
6.2	Program Pengembangan SDM	Jumlah alumni pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	796	2701	18,353	1430	12,993	1594	12,909	1684	15,147	1709	15,421	9118		Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
		Persentase SDM pemerintahan daerah yang lulus pengembangan kompetensi teknis	19.10%	30.91%	-	51.40%	-	47.70%	13,084	40.68%	18,878	40.03	18,565	40.43%		Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
		Persentase SDM Pemerintah daerah yang lulus pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	80.90%	69.09%	-	48.60%	-	52.30%	13,084	59.32%	18,878	59.97%	18,565	59.97%	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2021
6.3	Program Sertifikasi Kompetensi ASN	Jumlah SDM Aparatur yang memperoleh sertifikasi kompetensi	88	100	262	140	279	120	350	120	380	120	400	600		Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
6.4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengembangan Kompetensi	Akreditasi Kelembagaan Institusi dan penyelenggaraan pengembangan	4 Sertifikasi	6 Dokumen	2,378	6 Dokumen	2,559	6 Dokumen	3,069	6 dok	3,356	6 dok	2,759	7 dok		Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
7.	Penelitian dan Pengembangan															
7.1	Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan (Rekomendasi)	-	8	1,135.00	6	1,074.00	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
7.2	Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Rekomendasi)	-	5	866.00	9	1,088.00	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
7.3	Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi (Rekomendasi)	-	-	-	1	250.00	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Awal dari PMDN 13/2006

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi (Rekomendasi)			817,00		970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
7.4	Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Jumlah Kerjasama Kelitbangan (Perjanjian)	-	2	419,00	2	1.301,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Publikasi Penelitian, Perekayasaan dan Inovasi Daerah (Terbitan)	-	2	103,00	9 Buku, 2 Terbitan	318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Awal dari PMDN 13/2006
7.5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	-	-	-	-	16 Rekomendasi	6,820	16 Rekomendasi	6,820	16 Rekomendasi	6,820	48 Rekomendasi	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	-	-	14 Rekomendasi 2 Laporan	4,100	14 Rekomendasi 2 Laporan	4,100	14 Rekomendasi 2 Laporan	4,100	32 Rekomendasi 6 Laporan	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi	-	-	-	-	-	2 Rekomendasi	800	2 Rekomendasi	800	2 Rekomendasi	800	2 Rekomendasi	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Kerjasama Kelitbangan (Perjanjian);	-	-	-	-	-	2 Kesepakatan Bersama	100	2 Kesepakatan Bersama	100	2 Kesepakatan Bersama	100	6 Kesepakatan Bersama	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Publikasi Penelitian, Perekayasaan dan Inovasi Daerah (Terbitan)	-	-	-	-	-	2 Terbitan	150	2 Terbitan	150	2 Terbitan	150	6 Terbitan	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	Program Baru PMDN 90/2019
8.	Pengelolaan Perbatasan																
8.1	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Konsistensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan	-	-	-	-	-	100%	1.421	100%	2.300	100%	2.530	100%	-	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Program Baru PMDN 90/2019
9.	Pengelolaan Penghubung																
9.1.	Program Peningkatan Partisipasi dan Kerjasama Antar Sektor dan Pemda	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemas		90,47%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Fasilitas Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Lainnya		12 bulan	251	15 Kali	289	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
9.2	Program Peningkatan Layanan Penghubung	Persentase Penyelenggaraan Layanan Penghubung sesuai standart		98,63%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung & Anjungan Kalimantan Barat TMIH pada hari-hari Libur/Kegiatan Piket hari-hari libur		1 Tahun	66	17 orang	71	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah fasilitasi perjalanan dinas Kepala Daerah/WK dan Pejabat Daerah di Jabodetabek		1 Tahun	179	48 Kali	223	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan		1 Tahun	294	12 Kali	315	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Pembiayaan PBB Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat se Jawa Gedung		13 PBB dan 3 Sewa Gedung	256	13 PBB dan 3 Sewa Gedung	261	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Pengelolaan Mess Daerah		1 Tahun	261	1 Mess	281	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat		-	-	16 asrama	36	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Jumlah Pawai Budaya		-	-	1 Kali	48	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Awal dari PMDN 13/2006
9.3	Program Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung sesuai standart		-	-	-	-	100,00%	875	100%	957	100%	1.090	100%	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
		Lama Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang berkualitas		-	-	-	-	12 bulan	152	12 bulan	150	12 bulan	158	100,00%	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk unggulan dan pelestarian seni Budaya		-	-	-	-	3 kali kegiatan	60	6 kali kegiatan	110	12 kali kegiatan	200	100,00%	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		-	-	-	-	1 Tahun	664	1 Tahun	697	1 Tahun	732	100,00%	-	Badan Penghubung Prov.Kalbar	Program Baru PMDN 90/2019
10.	Pengawasan																
10.1	Program Peningkatan Kinerja Rutin Pengawasan	Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan.(%)		100%	100%	12.834,26	100%	7,247	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan keuangan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan		100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan kinerja dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan (%)	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase kontribusi perbaikan terhadap sasaran pemerkasan kinerja (%)	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase peningkatan penitisan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) (Kabi/Kota) (%)	5%	5%	-	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase tingkat kesesuaian realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan (%)	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase peningkatan maturitas SPIP (%)	-	3,80%	-	7,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP (%)	-	2%	-	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
10.2	Program Pengawasan Prioritas Nasional	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan (%)	100%	100%	1.600,21	100%	748	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana BOS dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan (%)	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase tingkat kesesuaian kegiatan PPRG dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan (%)	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase tingkat partisipasi aktif Inspektorat dalam kegiatan pencegahan anti korupsi (%)	100%	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
10.3	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase peningkatan kapabilitas APIP (%)	-	9,85%	756,60	15%	379	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
10.4	Program Pengawasan Reformasi Birokrasi	Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	-	3,52%	1.132,58	4%	478	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
		Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	-	5%	-	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
10.5	Program Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan (Kejadian)	5	5	538,55	3	308	-	-	-	-	-	-	-	-	INSPEKTORAT	Program Awal dari PMDN 13/2006
10.6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	-	-	-	-	-	100%	15,529	100%	17,082	100%	18,791	100%	18,791	INSPEKTORAT	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	-	-	-	-	91%	15,529	92%	17,082	95%	18,791	95%	18,791	INSPEKTORAT	Program Baru PMDN 90/2019
10.7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rumusan Kebijakan Teknis Pengawasan	-	-	-	-	-	6	15,529	7	17,082	8	18,791	8	18,791	INSPEKTORAT	Program Baru PMDN 90/2019
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan	-	-	-	-	-	91%	15,529	92%	17,082	95%	18,791	95%	18,791	INSPEKTORAT	Program Baru PMDN 90/2019

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator sasaran pembangunan daerah yang menggambarkan indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung indikator utama daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2018)	TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Infrastruktur	57,15	61,15	65,15	64,85	68,29	71,24	71,24
2.	Indeks Reformasi	B	B	B	BB	BB	A	A
3.	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	A	A
4.	Indeks Pembangunan Manusia	66,26	67,20	68,45	69,38	70,29	71,25	71,25
5.	Pertumbuhan Ekonomi	5,06	5,09	1,56-3,78	4,51-5,25	4,71-5,46	5,02-5,68	5,02-5,68
6.	Gini Ratio	0,33	0,33	0,328-0,327	0,326-0,324	0,323-0,321	0,321-0,318	0,321-0,318
7.	Desa Mandiri	1	63	159	239	319	425	425
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,26	3,90	5,81 - 4,58	5,70 - 4,49	5,53 - 4,29	5,42 - 3,98	5,42 - 3,98
9.	Angka Kemiskinan	7,37	6,92	7,61-7,56	7,40-7,34	7,31-7,23	7,08-7,00	7,08-7,00
10.	Konflik Sosial	0	0	0	0	0	0	0
11.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,10	65,92	66,40	66,60	66,70	66,80	66,80

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama daerah, dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL 8.2.
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1.1	Indeks Infrastruktur	57.15	66.23	65.15	64.85	68.29	71.24	71.24	
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A	
1.3	Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	B	BB	BB	A	A	
1.4	Indeks Pembangunan Manusia	66.26	67.20	68.45	69.38	70.29	71.25	71.25	
1.5	Pertumbuhan Ekonomi	5.06	5.09	1,56-3,78	4,51-5,25	4,71-5,46	5,02-5,68	5,02-5,68	
1.6	Gini Rasio	0.33	0.33	0,328-0,327	0,326-0,324	0,323-0,321	0,321-0,318	0,321-0,318	
1.7	Desa Mandiri	1	63	159	239	319	425	425	
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.26	3.90	5,81 - 4,58	5,70 - 4,49	5,53 - 4,29	5,42 - 3,98	5,42 - 3,98	
1.9	Angka Kemiskinan	7.37	6.92	7,61-7,56	7,40-7,34	7,31-7,23	7,08-7,00	7,08-7,00	
1.10	Konflik Sosial	0	0	0	0	0	0	0	
1.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.09	65.92	67.84	68.06	68.19	68.32	68.32	
ASPEK PELAYANAN UMUM									
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1 Pendidikan									
1.1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.12	7.31	7.53	7.75	7.95	8.2	8.2	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.55	12.58	12.73	12.88	13.03	13.2	13.2	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.3	Angka Melek Aksara	98.24	98.3	98.34	98.39	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
1.4	Skor Mutu Pendidikan Sekolah Menengah	-	5,36	5,52	5,68	5,84	6	6	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
2 Kesehatan									
2.1	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	95	95	94	93	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.2	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	7	7	7	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	8	8	8	8	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.4	Angka Harapan Hidup (tahun)	69.92	69.95	69.97	70.76	70.87	70.99	70.99	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
2.5	BOR	60-80%	60-80%	60-80%	60-80%	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.6	LOS	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.7	TOI	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.8	BTO	40-50	40-50	40-50	40-50	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.9	NDR	<50/1000	<50/1000	<50/1000	<50/1000	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.10	GDR	<75/1000	<75/1000	<75/1000	<75/1000	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.11	BOR	81.4	60-85%	60-85%	60-85%	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.12	LOS	132	100	100	100	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.13	TOI	5.2	3	3	3	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.14	BTO	2.7	40-50	40-50	40-50	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.15	NDR	9.38	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.16	GDR	9.38	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.17	BOR	80	60-80	60-80	60-80	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.18	LOS	50	50	50	50	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.19	TOI	2	2	2	2	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.20	BTO	40-50	40-50	40-50	40-50	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.21	NDR	0	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.22	GDR	0	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	-	-	-	Program awal dari PMDN 13/2006
2.23	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	-	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Program baru PMDN 90/2019
2.24	Status Akreditasi Rumah Sakit	Utama	-	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Program baru PMDN 90/2019
2.25	Status Akreditasi Rumah Sakit	Madya	-	-	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Program baru PMDN 90/2019
2.26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	-	-	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Program baru PMDN 90/2019
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	49,71%	56,68%	59,89%	65,79%	72,18%	80,00%	80%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.2.	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46,76%	48,26%	49,83%	53,22%	55,04%	61,21%	61,21%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.3.	Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	46,76%	49,47%	56,52%	52,58%	52,70%	52,81%	52,81%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.4.	Persentase Berkurangnya pantai kritis.	56.85%	56.52%	56.14%	29.51%	28.42%	27.33%	27.33%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.5.	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	67.92%	67.92%	69,29%	70.65%	72.01%	73.37%	73.37%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.6.	Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	21.43%	35.71%	50.00%	64.29%	78.57%	92.86%	92.86%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.7.	Persentase pelayanan mutu jasa konstruksi	66%	66%	74%	78%	88%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.8.	Persentase Ketepatan Terhadap Rencana Tata Ruang	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.9.	Persentase penduduk yang berakses air minum	-	58.30%	67%	68%	69%	70%	70%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
3.10.	Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	-	-	49%	50%	51%	52%	52%	Program baru PMDN 90/2019
4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman								
4.1.	Persentase pengajuan proposal rumah korban bencana/relokasi program provinsi/Rumah Khusus/Rumah Susun/Rumah Swadaya dan PSUnya yang tertangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Program baru PMDN 90/2019
4.2.	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	-	-	-	1 Kab	1 kab	2 Kab	4 kab	Program baru PMDN 90/2019
4.3.	Jumlah Ketersediaan PSU di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	12 PKL	14 PKL	14 PKL	40 PKL	Program baru PMDN 90/2019
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Indeks Resiko Bencana	138.49	131.4	130	129	128	127	127	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
5.2.	Persentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan dan ketertiban umum (%)	100	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
5.3.	Indeks Pemahaman terhadap kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	96.95	96.95	97.35	98.35	Program baru PMDN 90/2019
6	Sosial								
6.1.	Persentase PSKS yang diberdayakan	12,77	13,20	2,50	20%	25%	30%	30%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
6.2.	Persentase Cakupan Layanan Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	100	100	100	100	Program baru PMDN 90/2019
6.3.	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0,98	1,40	9,02	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
6.4.	Persentase peningkatan PPKS (tertentu) yang mendapatkan rehabilitasi sosial	-	-	-	3,2%	3,25	3,3%	3,3%	Program baru PMDN 90/2019
6.5.	Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin	0,0033	0,018	0,038	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
6.6.	Persentase Peningkatan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilaksanakan	-	-	-	0,25	0,28	0,28	0,28	Program baru PMDN 90/2019
6.7.	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi.	100	100	100	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
6.8.	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan penanganan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Program baru PMDN 90/2019
6.9.	Persentase Kabupaten /Kota yang Terkoordinir dalam Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial	66,67	66,67	73,80	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
6.10.	Persentase Cakupan Layanan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	-	100	100	100	100	program awal dari PMDN 13/2006
6.11.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mulia Dharma)	-	-	-	100	100	100	100	Program baru PMDN 90/2019
6.12.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma)	100	100	100	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
6.13.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mustika Dharma)	-	-	-	100	100	100	100	Program baru PMDN 90/2019
6.14.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
6.15.	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial (UPT Panti Sosial Anak)	-	-	-	100	100	100	100	Program baru PMDN 90/2019
LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
7	Tenaga Kerja								
7.1.	Persentase Tenaga Kerja yang Terlatih	-	35.37%	35.82	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
7.2.	Persentase Kualitas dan ketersediaan tenaga kerja	90%	90%	91.59%	91,66%	91.75%	92.02%	92.02%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
7.3.	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	64	70	85	90	90	90	90	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
7.4.	Persentase Pelanggaran Perusahaan terhadap aturan ketenaga kerjaan	33	33	33	32.50%	32.00%	31.00%	31.00%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
8.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	68,5	68,5	70	70,5	80	80,5	80,5	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
8.2.	indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,46	64,46	65,96	66,46	66,96	67,46	67,46	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
8.3.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
9	Pangan								
9.1.	Indeks Ketahanan Pangan	-	55,17	56,79	57,69	59,04	60,91	60,91	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10	Pertanahan								
10.1.	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
11.	Lingkungan Hidup								

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.1	Indeks Kualitas Air	55.8	56.2	56.6	57	57.4	57.8	57.8	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
11.2	Indek Kualitas Air Laut (IKAL)	52.00	61.24	61.24	61.40	61.60	61.80	61.80	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
11.3	Indeks Kualitas Udara	87.9	87.914	87.928	87.942	87.956	87.97	87.97	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
11.4	Indek Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	63.371	65.588	65.311	65.035	64.759	64.483	64.483	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
11.5	Indek Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	52.00	60.27	60.77	61.27	61.77	62.77	62.77	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
11.6	Indek Kualitas lahan (IKL)	54.57	59.81	60.62	61.37	62.14	62.90	63.65	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
12.1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Kalbar	48.66%	48.66%	61.32%	68.97%	75.2%	79.29%	82.14%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
12.2	Persentase kepemilikan KTP-el			-	98.00%	98.50%	99.00%	99.00%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
12.3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)			-	23.00%	35.00%	55.00%	55.00%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
12.4	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	-	-	-	70%	85%	95%	95%	Program baru PMDN 90/2019
12.5	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	-	-	-	93%	95%	97%	97%	Program baru PMDN 90/2019
12.7	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Yang dilaporkan	-	-	-	35%	50%	75%	75%	Program baru PMDN 90/2019
12.8	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Yang dilaporkan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Program baru PMDN 90/2019
12.9	Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	-	-	-	35%	50%	75%	75%	Program baru PMDN 90/2019
12.10	Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid			-	91.00%	92.00%	93.00%	95.00%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
12.11	Persentase Capaian Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Program baru PMDN 90/2019
12.12	Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalbar			-	70%	85%	95%	95%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
13.1	Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan	66.86%	66.86%	75.08%	79.12%	81.83%	88.77%	88.77%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
13.2	Persentase Indeks Desa Membangun	52.96	56.06%	60.79%	64.73%	68.67%	73.89%	73.89%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
14.1	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk	13.35%	13.35%	30%	42%	47%	53%	53%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
15.	Perhubungan								
15.1	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat (IKU1)	-	-	-	52%	67%	71%	71%	Program baru PMDN 90/2019
15.2	Persentase Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum (IKU3)	-	-	-	90%	83%	72%	72%	Program baru PMDN 90/2019
15.3	Persentase Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP (IKU4)	-	-	-	98%	87%	79%	79%	Program baru PMDN 90/2019
16.	Komunikasi dan Informatika								
16.1	Persentase OPD dengan Zona Hijau / nilai 85 - 100	-	-	-	80%	90%	100%	100%	Program baru PMDN 90/2018
16.2	Persentase total bobot domain evaluasi SPBE	-	-	-	60%	76%	92%	92%	Program baru PMDN 90/2019
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
17.1	Persentase Koperasi Berkualitas	23.00%	23.00%	25.00%	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
17.2	Persentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang NAI k Kelas	0.00%	0.91%	1.82%	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
17.3	Persentase Volume Usaha Koperasi	-	-	-	11%	12%	13%	13%	Program baru PMDN 90/2019
17.4	Persentase Pertumbuhan UMKM	-	-	-	5.00%	7.00%	9.00%	9.00%	Program baru PMDN 90/2019
18.	Penanaman Modal								
18.1	Jumlah Nilai Investasi	18,75 T	18,75 T	19,41 T					Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
18.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B					Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
18.2	Laju Pertumbuhan Investasi (Persen)	-			3.5	3.5	3.5	3.5	Program baru PMDN 90/2019
19.	Kepemudaan								
19.1	Indeks pembangunan pemuda	48	49	50	51	52	53	53	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
20.	Olahraga								
20.1	Angka Harapan Hidup (tahun)	69.92	69.95	69.97	70.76	70.86	70.97	70.97	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
21.	Statistik								
21.1	Persentase data statistik sektoral OPD yang terintegrasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Program baru PMDN 90/2019
22.	Persandian								

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.1	Persentase OPD dengan kategori baik, cukup, perlu baik dan tidak layak.	-	-	-	Baik 0% Cukup 21% Perlu Perbaikan 38% Tidak Layak 40%	Baik 0% Cukup 26% Perlu Perbaikan 38% Tidak Layak 36%	Baik 2% Cukup 32% Perlu Perbaikan 34% Tidak Layak 32%	Baik 2% Cukup 32% Perlu Perbaikan 34% Tidak Layak 32%	Program baru PMDN 90/2019
23.	Kebudayaan								
23.1.	Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	3	5	5	6	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
23.2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	44,88	44,96	45,04	45,12	45,2	45,28	45,28	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
24.	Perpustakaan								
24.1.	Cakupan Kunjungan Perpustakaan	-	96.696	106.365 orang	117.000	12.800	141.570	141.570	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
24.2.	Koleksi Daerah yang dilestarikan	-	5.492 Judul	5.792 Judul	6.092 Judul	6392	6692	6692	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
24.3.	Nilai Budaya Literasi	-	-	-	53,00	53,50	54,00	54,00	Program baru PMDN 90/2019
24.4.	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	C (cukup)			B (baik)	B (baik)	A (sangat baik)	A (sangat baik)	Program baru PMDN 90/2019
24.5.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	-	12,76%	13,26%	13,76%	13,76%	Program baru PMDN 90/2019
25.	Kearsipan								
25.1.	Persentase Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Arsip dengan Kategori Cukup	6,67%	13,33%	20,00%	26,67%	40,00%	53,30%	53,30%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
25.2.	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Kearsipan dengan Kategori Cukup	20,00%	29,00%	43,00%	57,00%	71,00%	86,00%	86,00%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
25.3.	Nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas	0%	-	-	2 LKD dan 12 OPD	2 LKD dan 18 OPD	3 LKD dan 14 OPD	14 LKD dan 47 OPD	Program baru PMDN 90/2019
25.4.	Jumlah Penggunaan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	600 orang	-	-	650 orang	650 orang	650 orang	1950 orang	Program baru PMDN 90/2019
25.5.	Jumlah Pemanfaatan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	350 arsip	-	-	450 arsip	450 arsip	450 arsip	450 arsip	Program baru PMDN 90/2019
25.6.	Penerapan e-arsip terintegrasi	0%	-	-	3 LKD dan 4 OPD	3 LKD dan 3 OPD	4 LKD dan 4 OPD	10 LKD dan 10 OPD	Program baru PMDN 90/2019
25.7.	Persentase Penerapan e-Arsip Terintegrasi	-	-	-	14,96%	13,86%	18,53%	47,35%	Program baru PMDN 90/2019
URUSAN PILIHAN									
26.	Kelautan dan Perikanan								
26.1.	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (Persen)	3,65	3,37	1,27 - 3,09	3,73 - 4,29	3,92 - 4,52	4,09 - 4,64	4,09 - 4,64	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
26.2.	NTP Perikanan (%)	103,5	104,0	101,0	102,0	103,0	104,0	104,0	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
27.	Pariwisata								
27.1.	Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	4,17	4,17	1,19 - 3,02	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
27.2.	Pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi kreatif	90,649.00	90,938.00	91,938.00	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
27.3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	-	-	-	3,30 - 3,81	3,47 - 3,97	3,68 - 4,13	3,68 - 4,13	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
28.	Pertanian								
28.1.	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Peternakan (Persen)	5,51	5,02	1,99 - 4,83	5,77 - 6,71	6,06 - 6,98	6,19 - 7,26	6,19 - 7,26	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
28.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Pangan (Persen)	9,8	4,58	1,43 - 3,46	4,13 - 4,81	4,14 - 4,82	4,39 - 5,20	4,39 - 5,20	
28.3.	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Hortikultura (Persen)	4,96	5,47	2,55 - 6,24	6,42 - 8,68	6,76 - 8,95	7,17 - 9,43	7,17 - 9,43	
28.4.	NTP Peternakan	93,95	95,16	96,37	97,58	98,79	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
28.5.	NTP Tanaman Pangan	94,41	94,58	95,08	95,11	95,14	95,17	95,17	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
28.6.	NTP Hortikultura	101,02	100,4	100,9	101,4	101,9	102,4	102,4	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
29.	Perkebunan								
29.1.	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Perkebunan (Persen)	7,75	7,54	2,66 - 6,44	5,79 - 8,94	6,09 - 9,27	6,45 - 9,67	6,45 - 9,67	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
29.2.	NTP Perkebunan Raykat (Angka)	94,44	95,55	96,66	97,78	98,89	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
30.	Kehutanan								
30.1.	Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan (Persen)	-0,98	-0,88	-0,97 - (-1,1)	-0,92 - (-1,06)	-0,88 - (-1,02)	-0,30 - (-0,73)	-0,30 - (-0,73)	
30.2.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	63,371	65,588	65,311	65,035	64,759	64,483	64,483	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
31.	Energi Sumber Daya Mineral								
31.1.	Rasio Elektrifikasi (%)	83,00	85	87	89	91	93	93,00	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
31.2.	Daya Mampu Listrik di Kalbar (MW)	-	670	915	1093	1193	1296	1296,00	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
31.3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan ADHK (Persen)	7,45	6,09	1,07 - 3,67	3,10 - 4,69	3,26 - 4,88	3,45 - 5,07	3,45 - 5,07	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
32.	Perdagangan								
32.1.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	5,54	5,54	0,97 - 3,72	-	-	-	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
32.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-	-	-	3,99 - 5,53	4,20 - 5,76	4,51 - 5,99	4,51 - 5,99	Program baru PMDN 90/2019

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Komisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Perindustrian								
33.1	Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	7.49	7.49	2.85 - 4.80	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
33.2	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	-	-	-	7.61 - 7.67	7.74 - 7.75	7.83 - 7.86	7.83 - 7.86	Program baru PMDN 90/2019
34.	Transmigrasi								
34.1	Persentase Luas Lahan Transmigrasi Yang Clear and Clean pada UPT Bina	32.04	32.04	23.04	7.76	4.47	4.47	4.47	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
PENUNJANG URUSAN									
1.	Sekretariat Daerah								
1.1	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.2	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum)	AMPRES	0.2	0.4	0.6	0.8	100% (1 Provinsi)	100% (1 Provinsi)	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.3	Pembentukan Kabupaten	3 AMPRES	0.2	0.4	0.6	0.8	100% (1 Kabupaten)	100% (1 Provinsi)	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.4	Segmen Batas Daerah	27	3	3	5	5	5	45	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.5	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.6	Persentase Penataan perundang-undangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.7	Persentase Fasilitas, Koordinasi dan Movev Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	Program baru PMDN 90/2019
1.8	Jumlah Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang meningkat	5,28 %	5,28 %	5,39 %	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
1.9	Inflasi yang terkendali	3,60 %	3,60 %	3,52 %	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
1.10	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	-	-	-	80%	85%	90%	90%	Program baru PMDN 90/2019
1.11	Kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali	Program baru PMDN 90/2019
1.12	Persentase pelayanan pelayanan umum dan pimpinan (%)	100	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.13	Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.14	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	41	46	51	57	62	68	68	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.15	IKM Provinsi Kalimantan Barat (Baik/ Sangat Baik)	80,33	83	83,5	84	84,2	84,5	84,5	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.16	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem (%)	20	20	40	60	80	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.17	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	10,28	10,5	11	10	10	10	10	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.18	Persentase Proses Pengadaan Memenuhi Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa	-	100%	100%	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
1.19	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	-	-	60%	70%	80%	80%	Program baru PMDN 90/2019
1.20	Persentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media Cetak Elektronik, Online dan Media Luar Ruang (%)	77,5	85	89,5	95	98	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.21	Persentase Pelayanan pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standart Pelayanan (%)	80	90	94	96	98	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.25	Nilai LPPD (persen)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.26	Jumlah Peningkatan Penyebaran Informasi Melalui Media Ceta, Media Luar Ruang dan Online	-	-	-	85%	89%	100%	100%	Program baru PMDN 90/2019
1.27	Jumlah Pelayanan Tamu Pimpinan dan Pengaturan Acara	-	-	-	85%	89%	90%	90%	Program baru PMDN 90/2019
1.28	Persentase Kelembagaan Provinsi Yang Efektif dan Efisien Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Daerah	41%	46%	51%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
1.29	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan Nilai Reformasi Birokrasi 60 ke atas	-	-	-	100%	100%	100%	100%	Program baru PMDN 90/2019
1.30	Jumlah Pelaporan Kinerja Setda yang berkualitas	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
2	Sekretariat Dewan								
2.1	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD.	-	81	82	83	84	85	85	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.	Perencanaan Pembangunan								
3.1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,04	21,07	22	23	24	25	25	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
3.2	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	12,61	13	14	15	16	17	17	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
4.	Kuangan								
4.1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
4.2	Persentase Laporan BMD Sesuai Ketentuan	-	80	85%	-	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	-	-	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
4.4	Rasio PAD Terhadap APBD (Persen)	37.60%	37.60%	33.78%	34%	35%	37%	37%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
5. Kepegawaian									
5.1	Persentase Aparatur sesuai dengan Manajemen Ka	54%	59%	76%	86%	-	-	-	program awal dari PMDN 13/2006
5.2	Persentase Aparatur Sesuai Dengan Standar Kompetensi Jabatan ASN	54%	-	-	67%	72%	79%	79%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
6. Pendidikan dan Pelatihan (BPSDM)									
6.1	Persentase pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	13.22%	-	-	14.73%	15.57%	15.80%	15.80%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2020
7. Penelitian dan Pengembangan									
7.1	Persentase Rekomendasi Hasil yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah	-	80%	85%	90%	90%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
7.2	Persentase Hasil Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
7.3	Persentase Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan yang berkualitas	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
7.4	Persentase Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang berkualitas	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
8. Pengelolaan Perbatasan									
8.1	Ratio Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Wilayah Perbatasan terhadap Seluruh Desa Wilayah Perbatasan	0.9036	0.4096	0.2108	0.1506	0.0904	0.0301	0.0301	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
9. Pengelolaan Penghubung									
9.1	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta (%)	100	-	-	100	100	100	100	Program baru PMDN 90/2019
9.2	Persentase Penyelenggaraan Layanan Penghubung Sesuai Standar	96.63	100	100	100	100	100	100	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10. Pengawasan									
10.1	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti (%)	88	89	90	91%	-	-	-	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10.2	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (%)	85%	87%	89%	91%	93%	95%	95%	Program baru PMDN 90/2019
10.3	Level maturitas SPIP.	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	Level 4	Level 4	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10.4	Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional.	5	5	6	6	6	7	7	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10.5	Level Kapabilitas APIP.	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	Level 4	Level 4	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10.6	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	13.72	14.44	15	15.5	16	16.5	16.5	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10.7	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Kinerja (Nilai)	6.32	6.62	7.32	7.62	8.32	8.62	8.62	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019
10.8	Nilai Persepsi Korupsi	5.79	6.17	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	Penyesuaian dari PMDN 13/2006 ke PMDN 90/2019

BAB IX PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan kesinambungan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dokumen ini merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023.

9.1. Pedoman Transisi

Dengan telah ditetapkannya Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021. Ketentuan transisi ini juga berlaku pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

9.2. Kaidah Pelaksanaan

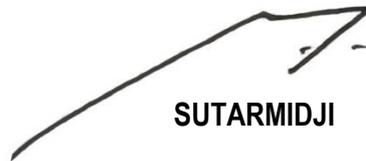
Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun Renstra PD Tahun 2018-2023. Setiap tahunnya, RPJMD ini dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dari RPJMD ini, yaitu:

1. Seluruh stakeholder pembangunan termasuk di dalamnya DPRD, instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan komponen masyarakat lainnya berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan menggerakkan semua potensi daerah secara optimal.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat wajib mengkoordinasikan pelaksanaan program-program di dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
4. Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kalimantan Barat wajib menyusun Rencana Strategis PD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama sisa masa berlakunya Perubahan RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berpedoman kepada RPJMD ini dan memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renstra PD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD setiap tahunnya.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mempedomani Perubahan RPJMD ini dalam menyusun dan/atau mengevaluasi RPJMD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya menyelaraskan sasaran dan program pembangunan Kabupaten/Kota dengan sasaran dan program pembangunan Provinsi.
6. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Perubahan RPJMD ini, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat wajib melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam proses penjabaran Perubahan RPJMD ini ke dalam Renstra PD Provinsi.

7. Bappeda Provinsi Kalimantan Barat wajib melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam Perubahan RPJMD ini setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau penelitian yang dilakukan oleh Bappeda sendiri.
8. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dan konsistensi perencanaan antara Pusat dan Daerah, pada tahun 2020 akan dilakukan penyesuaian antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan ditetapkan pada tahun tersebut.
9. Mengingat peran penting Perangkat Daerah dan sumberdaya aparatur sebagai salah satu instrumen dalam mewujudkan ketercapaian visi, misi dan sasaran pembangunan yang termuat dalam Perubahan RPJMD, maka penyusunan Perangkat Daerah dan penataan aparatur harus berpedoman kepada Perubahan RPJMD. Hal ini dimaksudkan untuk membagi atau memisahkan secara jelas tanggung jawab perangkat daerah dan menempatkan aparatur sesuai kompetensinya.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI